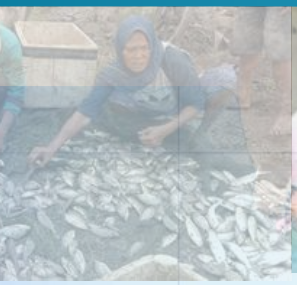
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

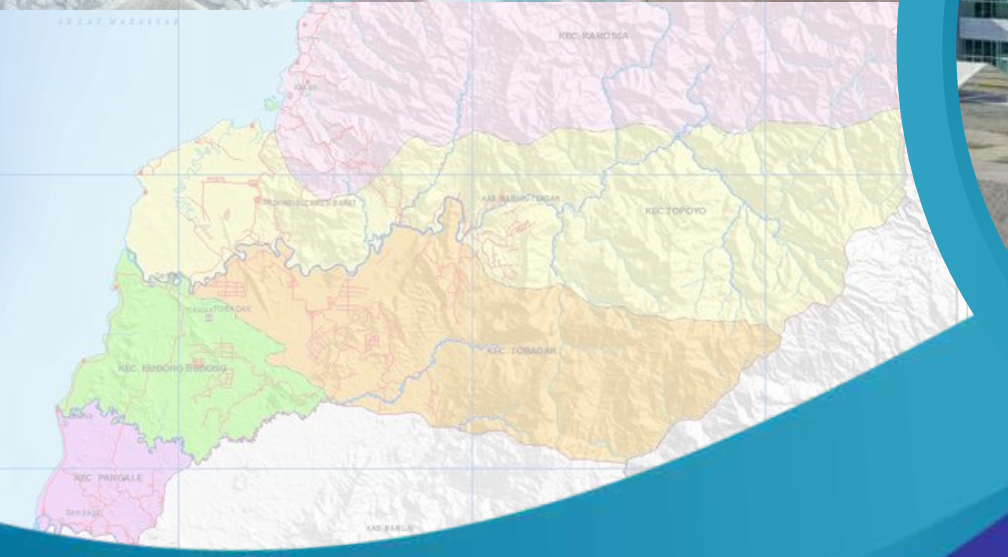
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2026











BAPPERIDA MAMUJU TENGAH

SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

a. pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun anggaran 2026; dan
b. pedoman dalam penyusunan rencana APBD tahun anggaran 2026.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rencana APBD Tahun 2026, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum kondisi daerah;
    c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
    d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
    e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
    f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
    g. penutup.

(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatif, tolok ukur kinerja, serta lokasi kegiatan. Penyusunan RKPD ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, serta forum lintas perangkat daerah. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa masukan, saran, maupun data dan informasi, sehingga penyusunan RKPD ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 ini menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan, serta mampu mendorong terwujudnya masyarakat Mamuju Tengah yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Mamuju Tengah, 2025
Bupati Mamuju Tengah

ARSAL ARAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
DAFTAR TABEL.....
DAFTAR GAMBAR.....
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1
1.3. Hubungan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 4
1.4. Maksud dan Tujuan.....5
1.4.1. Maksud.....5
1.4.2. Tujuan.....5
1.5. Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH 9
2.1 Kondisi Umum Daerah 9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 9
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 17
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....18
2.1.1.4 Demografi 21
1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....23
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....23
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial.....36
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 41
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 41
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan.....96
2.1.3.4 Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan.....108
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 117
2.4 Standar Pelayanan Minimal.....122
2.2 Capaian Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 128
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....130
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah 134

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 140
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah 140
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 140
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat 143
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabuaten Mamuju Tengah 146
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 158
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 159
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....161
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 164
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 166
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....166
4.2. Tema Pembangunan Tahun 2026 176
4.2.1. Tema RKPD Tahun 2026.....176
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 271
1.5 Rencana Kerja 271
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 772
6.1 Indikator Kinerja Makro Ekonomi Daerah.....272
6.2 Indikator Kinerja Utama Daerah 272
6.3 Indikator Kinerja Kunci 274
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 287
BAB VII PENUTUP 291
7.1. Kaidah Pelaksanaan.....291

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Per Desa/ UPT 9
Tabel 2. 2 Batas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 9
Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 12
Tabel 2. 4 Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah 14
Tabel 2. 5 Distribusi Luas Geologi di Kabupaten Mamuju Tengah 17
Tabel 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah) 26
Tabel 2. 7 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah) 27
Tabel 2. 8 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 (Persen) 28
Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut jenis Pengeluaran di Kabupaten Mamuju Tengah (miliar rupiah), Tahun 2021-2024 30
Tabel 2. 10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mamuju Tengah (miliar rupiah), Tahun 2021-2024 30
Tabel 2. 11 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mamuju Tengah (Persen) Tahun 2021-2024 31
Tabel 2. 12 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 35
Tabel 2. 2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2024 40
Tabel 2. 14 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 – 2024 42
Tabel 2. 15 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 42
Tabel 2. 16 Angka Partisipasi Murni Menurut Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 43
Tabel 2. 17 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 43
Tabel 2. 18 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten MamujuTengah, 2019 – 2024 44
Tabel 2. 19 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 44
Tabel 2. 20 Jumlah Murid, Guru, Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 45

Tabel 2. 21 Angka Stunting di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 46
Tabel 2. 22 Angka Gizi Buruk di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 46
Tabel 2. 23 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 47
Tabel 2. 24 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 47
Tabel 2. 25 Ketersediaan Sarpras di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 48
Tabel 2. 26 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 48
Tabel 2. 27 Penemuan Kasus Penyakit di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 -2024 48
Tabel 2. 28 Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, K4, Kurang Energi Kronis, Serta Mendapatkan Tablet Besi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 49
Tabel 2. 29 Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 50
Tabel 2. 30 Kondisi Panjang Jalan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 51
Tabel 2. 31 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 51
Tabel 2. 32 Kondisi Jembatan (Unit) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 52
Tabel 2. 33 Kondisi Irigasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 53
Tabel 2. 34 Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 54
Tabel 2. 35 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 54
Tabel 2. 36 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 55
Tabel 2. 37 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 56
Tabel 2. 38 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 56
Tabel 2. 39 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 57
Tabel 2. 40 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 57
Tabel 2. 41 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Relokasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 58
Tabel 2. 42 Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Di Mamuju Tengah, 2019 – 2024 59
Tabel 2. 43 Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 59
Tabel 2. 44 Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 60
Tabel 2. 3 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketenteraman Umum di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 61
Tabel 2. 46 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 61
Tabel 2. 47 Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar Panti Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 62
Tabel 2. 48 Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Perlindungan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 63
Tabel 2. 49 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 63

Tabel 2. 50 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 63
Tabel 2. 51 Tingkat Pengangguran Terbuka, Partisipasi Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, ... 64
Tabel 2. 52 Status Pekerjaan Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 64
Tabel 2. 53 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 65
Tabel 2. 54 Data Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 65
Tabel 2. 55 Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024
Tabel 2. 56 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan..... 66
di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 66
Tabel 2. 57 Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 67
Tabel 2. 58 Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024
Tabel 2. 59 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 68
Tabel 2. 60 Aduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 69
Tabel 2. 61 Timbulan Sampah yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 70
Tabel 2. 62 Pelayanan Persampahan yang Ditangani Pemerintah Daerah di Kabupate Mamuju Tengah, 2019 – 2024 70
Tabel 2. 63 Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Peraturan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 71
Tabel 2. 64 Ketersediaan Ruang Trebuka Hijau di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 72
Tabel 2. 65 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 73
Tabel 2. 66 Produksi Komoditas Pangan Nabati (Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 .....
Tabel 2. 67 Produksi Komoditas Pangan Hewani (Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –2024 74
Tabel 2. 68 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –2024 75
Tabel 2. 69 Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 75
Tabel 2. 70 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –2024 76
Tabel 2. 71 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupatendi Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 76
Tabel 2. 72 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 77
Tabel 2. 73 Persentase Penetapan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 77
Tabel 2. 74 Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes Tepat Waktu di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 78

Tabel 2. 75 Persentase BUMdes yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 79
Tabel 2. 76 Persentase Kader Posyandu Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024..... 79
Tabel 2. 77 Total Fertility Rate di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 80
Tabel 2. 78 Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 80
Tabel 2. 79 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 81
Tabel 2. 80 Cakupan Anggota Bina Keluarga yang Ber-KB di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 81
Tabel 2. 81 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahterah di Setiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 82
Tabel 2. 82 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 82
Tabel 2. 83 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 83
Tabel 2. 84 Persentase Ruas Jalan yang Didukung Jalan Memadai di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 84
Tabel 2. 85 Potensi Titik Parkir Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024 84
Tabel 2. 86 Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 85
Tabel 2. 87 Indeks Sistem Informasi Berbasis Elektronik di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 86
Tabel 2. 88 Persentase PPID Yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 86
Tabel 2. 89 Ketersediaan Jaringan Internet di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 87
Tabel 2. 90 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 87
Tabel 2. 91 Jumlah UMKM Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 88
Tabel 2. 92 Laju Investasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 88
Tabel 2. 93 Jumlah Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 89
Tabel 2. 94 Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 89
Tabel 2. 95 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 90
Tabel 2. 96 Persentase Informasi yang Terintegr di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –2024 90
Tabel 2. 97 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 91
Tabel 2. 98 Jumlah Metada Statisk yang dibuat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –2024 91
Tabel 2. 99 Jumlah Buku Statistik Sektoral yang Diterbitkan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 92
Tabel 2. 100 Pengelolaan Arsip Secara Buku di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024..... 92
Tabel 2. 101 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 93

Tabel 2. 102 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –2024 93
Tabel 2. 103 Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 94
Tabel 2. 104 Persentase Pelatih Olahraga yang Bersertifikat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 94
Tabel 2. 105 Prestasi Cabang Olahraga di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 95
Tabel 2. 106 Prestasi Atlet Berprestasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 95
Tabel 2. 107 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 96
Tabel 2. 108 Jumlah Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 97
Tabel 2. 109 Rata-Rata Lama Tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 97
Tabel 2. 410 Desa Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 97
Tabel 2. 111 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 98
Tabel 2. 112 Jumlah Produksi Komoditas Sayuran (Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 99
Tabel 2. 113 Jumlah Produksi Komoditas Buah-Buahan (Kwintal) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 100
Tabel 2. 114 Jumlah Produksi Komoditas Biofarmaka (Kg) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 100
Tabel 2. 115 Luas Lahan Sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 101
Tabel 2. 116 Produksi Ternak Ruminansia Dan Unggas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 102
Tabel 2. 117 Luas Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Produktifitas Perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 103
Tabel 2. 118 Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 104
Tabel 2. 119 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 104
Tabel 2. 120 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 105
Tabel 2. 121 Jumlah Kapal dan Perahu di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 105
Tabel 2. 122 Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 106
Tabel 2. 123 Cakupan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 106
Tabel 2. 124 Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024 107
Tabel 2. 125 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 107
Tabel 2. 126 Kondisi Industri Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 108
Tabel 2. 157 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, 2019–2024 108
Tabel 2. 128 Konsistensi Perencanaan RPJMD dan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –2024 109
Tabel 2. 129 Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –

2024 109
Tabel 2. 130 Daftar Kajian di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 110
Tabel 2. 131 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 111
Tabel 2.162 Daftar Inovasi Perangkat Daerah dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah, 2024 112
Tabel 2.133 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 114
Tabel 2. 134 Indeks Profesionalitas dan Sistem Merit ASN Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 –2024 114
Tabel 2. 135 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 115
Tabel 2. 136 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 115
Tabel 2. 137 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 116
Tabel 2. 138 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 116
Tabel 2. 139 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 117
Tabel 2. 170 Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 – 2024 118
Tabel 2. 141 Pertumbuhan Rill Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Mamuju Tengah (persen), 2020 – 2024 119
Tabel 2. 142 Lama Perizinan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 120
Tabel 2. 143 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 123
Tabel 2. 144 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 124
Tabel 2. 148 Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 125
Tabel 2. 149 Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasa Permukiman Tahun 2024 126
Tabel 2. 147 Realisasi Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 126
Tabel 2. 148 Realisasi Capaian SPM Sosial Tahun 2024 127
Tabel 2. 149 Capaian Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 128
Tabel 2. 150 Rekapitulasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 130
Tabel 2.151 Rekapitulasi Capaian Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 132
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024 142
Tabel 3. 2 Proyeksi Indikator Ekonomi Nasional Tahun 2026 143
Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 146
Tabel 3. 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahan (P2), dan Garis Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun

2020-2024 151
Tabel 3. 5 Capaian Indikator Makro Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 155
Tabel 3. 6 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 158
Tabel 3. 6 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2026 160
Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 163
Tabel 3. 8 Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 164
Tabel 4. 1 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 Tahun Pelaksanaan 2026 dengan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 167
Tabel 4. 2 Program Strategis Nasional (ProSN) 178
Tabel 4. 3 Keterkaitan Tema Pembangunan Tahun 2026 181
Tabel 4. 4 Keselarasan Tema Pembangunan RKP , RKPD Sulawesi Barat dan RPPD Mamuju Tengah Tahun 2026 181
Tabel 4. 5 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 182
Tabel 4. 6 Program Prioritas Kabupaten dalam Mendukung AstacitaProgram Prioritas Kabupaten dalam Mendukung Astacita 192
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Mamuju Tenagah Tahun 2026 272
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 272
Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Kunci Realisasi Tahun 2024 dan Tarhet Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dan 2026 274
Tabel 6. 4 Target Kinerja SPM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 287

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah 9
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Mamuju Tengah 12
Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah 13
Gambar 2. 4 Peta Batas Daerah Aliran Sungai (DAS) 15
Gambar 2. 5 Grafik Distribusi Luasan Curah Hujan di Kabupaten Mamuju Tengah 16
Gambar 2. 6 Peta Geologi Kabupaten Mamuju Tengah 16
Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah 20
Gambar 2. 8 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2019-2024 22
Gambar 2. 9 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2024 22
Gambar 2. 10 Piramida Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2019-2024 23
Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten, Tahun 2019-2024 24
Gambar 2. 12 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi se Kabuaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 25
Gambar 2. 13 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 32
Gambar 2. 14 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 33
Gambar 2. 15 Garis Kemiskinan Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 34
Gambar 2. 16 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023 36
Gambar 2. 17 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 37
Gambar 2. 18 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024
Gambar 2. 19 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 39
Gambar 2. 20 Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 2024 40
Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional serta RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 merupakan rencana yang disusun dalam masa transisi antara Rencana Pembangunana Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan visi-misi Kepala Daerah Terpilih. Tahun 2026 menjadi tahun kedua dalam perencanaan lima tahunan 2025-2029.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPD ini diantaranya adalah:

a. Merupakan penjabaran tujuann, sasaran dan program daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahun depan;
b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam meyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah;
c. Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2026;
d. Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
21. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
23. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
29. Peraturan Menteri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2025 ttg Perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Barat;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037;

1.3. Hubungan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Secara substansial, RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lolasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2026.

Dokumen RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari kebijakan Umum APBD (KUA), prioritas dan plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD).

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkannya dengan maksud sebagai berikut :

a. Menyediakan satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dalam Tahun 2026 dengan mendasarkan pada potensi, kondisi dan proyeksi ke depan.
b. Menyediakan dokumen RKPD yang dapat dipakai sebagai pedoman seluruh SKPD dan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah.
c. Sebagai dasar penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS antara Eksekutif dan Legislatif.

1.4.2. Tujuan

Pelaksanaan Pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat. Percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui penerapan sistem desentralisasi, sebagai

pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam pengambilan keputusan baik politik maupun administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 adalah:

a. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD masyarakat maupun dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah.
b. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah
c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
d. Terciptanya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Mamuju Tengah secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
e. Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.
f. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kelapa Daerah yang mengatur tentang

perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang perlu dicantumkan.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tenang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan gambaran evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan realisasi renstra OPD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, kebijakan pemerintah daerah dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP, RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan di dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Menguraikan tentang gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karateristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu dari 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, tanggal 11 januari Tahun 2013. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah **3.100,87 Km^2** (310.086,92) Ha atau sebesar **18,33 %** dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat (16.916,02 km^2).

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Ibu kota kabupaten terletak di wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Karossa dengan luas 1.175,38 Km^2 atau 37,90 persen dari luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pangale dengan luas 91,11 Km^2 atau 2,94 persen. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Per Desa/ UPT di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Nama Desa/UPT	Kecamatan	
			Luas (Ha)	%
1	Tobadak	1. Salubaja	1.556,25	2,22
		2. Bambadaru	1.883,52	2,69
		3. Batu Parigi	21.634,24	30,91
		4. Polongaan	2.790,60	3,99

No	Kecamatan	Nama Desa/UPT	Kecamatan	
			Luas (Ha)	%
		5. Mahahe	559,94	0,80
		6. Tobadak	7.036,96	10,05
		7. Saluadak	5.702,06	8,15
		8. Sejati	28.827,80	41,19
		Kecamatan Tobadak	**69.991,37**	**22,57**
2	Pangale	1. Pangale	1.230,86	13,51
		2. Sartanamaju	912,4	10,01
		3. Polo Pangale	874,69	14,58
		4. Kuo	453,86	6,34
		5. Polo Lereng	1.230,06	13,50
		6. Polo Camba	1.795,13	19,70
		7. Lamba-Lamba	1.177,25	12,92
		8. Kombiling	858,87	9,43
		9. Lemo-Lemo	577,56	6,34
		Kecamatan Pangale	**9.110,67**	**2,94**
3	Budong-Budong	1. Lumu	1.424,94	5,71
		2. Tinali	429,23	1,72
		3. Salumanurung	1.004,83	4,02
		4. Kire	2.514,34	10,07
		5. Salugatta	1.619,03	6,48
		6. Pontanakayang	3.190,80	12,78
		7. Babana	4.117,32	16,49
		8. Pasapa	1.728,67	6,92
		9. Bojo	3.289,01	13,17
		10. Barakkang	4.135,40	16,56
		11. Lembah Hada	1.513,74	6,06
		Kec. Budong-Budong	**24.967,31**	**8,05**
4	Topoyo	1. Budong-Budong	1.769,62	2,00
		2. Paraili	620,2	0,70
		3. Topoyo	833,9	0,94
		4. Kabubu	388,88	0,44
		5. Waeputeh	787,49	0,89
		6. Tappilina	732,04	0,83
		7. Tangkou	338,04	0,38
		8. Tabolang	4.141,75	4,68
		9. Salupangkang	1.092,80	1,24
		10. Salupangkang IV	1.091,16	1,23
		11. Tumbu	1.671,62	1,89
		12. Bambamanurung	476,03	0,54
		13. Pangalloang	1.414,53	1,60
		14. Sinabatta	1.794,58	2,03
		15. Salulekbo	71.327,33	80,61
		Kecamatan Topoyo	**88.479,97**	**28,53**
5	Karossa	1. Kambunong	16.942,40	14,41
		2. Tasokko	21.188,97	18,03
		3. Lara	10.222,32	8,70
		4. Karossa	32.860,37	27,96
		5. Lembah Hopo	2.149,64	1,83
		6. UPT Lara III	1.270,46	1,08
		7. Banggaulu	1.420,77	1,21
		8. UPT Mora IV	666,1	0,57

No	Kecamatan	Nama Desa/UPT	Kecamatan	
			Luas (Ha)	%
		9. Kayu Calla	964,12	0,82
		10. Kadaila	1.734,29	1,48
		11. Sukamaju	8.948,36	7,61
		12. Salubiru	13.228,86	11,26
		13. Sanjango	5.940,94	5,05
		Kecamatan Karossa	**117.537,60**	**37,90**
Total Luas Wilayah			**310.086,92**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

B. Letak dan Kondisi Geografis

1. Posisi Astronomi
   Secara astronomis, Kabupaten Mamuju Tengah berada pada titik koordinat 1°43'42,90" – 2°18'30,08" Lintang Selatan dan 119°7'41,60" – 119°52'12,97" Bujur Timur.
2. Posisi Geografis
   Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Mamuju tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Batas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Batas Wilayah			
		Utara	Selatan	Barat	Timur
1.	Topoyo	Kec. Karossa	Kec. Tobadak	Selat Makassar	Prov. Sulsel
2.	Budong-Budong	Kec. Topoyo	Kec. Pangale	Selat Makassar	Kab. Mamuju
3.	Tobadak	Kec. Topoyo	Kab. Mamuju	Kec. Budong-Budong	Prov. Sulsel
4.	Pangale	Kec. Budong-Budong	Kab. Mamuju	Selat Makassar	Kab. Mamuju
5.	Karossa	Kabupaten Pasangkayu	Kec. Topoyo	Selat Makassar	Prov. Sulsel

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

C. Topografi dan Kelerengan

Di daerah tropis secara umum dicirikan oleh keadaan iklim yang hampir beragam. Namun dengan adanya perbedaan geografis seperti perbedaan ketinggian tempat di atas permukaan laut (dpl) akan menimbulkan perbedaan cuaca dan iklim secara keseluruhan pada tempat tersebut, terutama suhu, kelembapan dan curah hujan. Unsur-unsur cuaca dan iklim tersebut banyak dikendalikan oleh lintang, ketinggian, jarak dari laut, topografi, jenis tanas, dan vegetasi. Pada dataran rendah ditandai dengan suhu lingkungan, tekanan udara dan oksigen yang tinggi. Sedangkan dataran tinggi banyak memengaruhi penurunan tekanan udara dan suhu udara serta peningkatan curah hujan.

Topografi/ketinggian suatu wilayah merupakan salah satu parameter dalam perencanaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan, hal tersebut agar sumber daya alam yang tersedia dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan. Bentuk topografi Kabupaten Mamuju Tengah bervariasi mulai dari dataran rendah, berbukit hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan datar hingga sangat terjal.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber :KLHS RPJMD Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

Ketinggian wilayah Kabupaten Mamuju Tengah bervariasi dari daratan rendah hingga daratan tinggi dengan ketinggian 0-2.800 meter diatas permukaan laut (dpl). Di wilayah bagian barat merupakan kawasan pesisir pantai dengan topografi dataran rendah dan ketinggian <500 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah topografi datar umumnya terdapat dibagian barat meliputi sebagaian wilayah di tiga Kecamatan yaitu, Karossa, Topoyo, dan Tobadak serta seluruh bagian wilayah di dua kecamatan yaitu di kecamatan Budong-Budong dan Kecamatan Pangale

Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)					Total
	Pangale	Budong-Budong	Tobadak	Topoyo	Karossa	
0-100	9.563,6	25.164,54	21.919,5	18.678,5	21.352,69	96.678,95
100-200	-	383,65	5.067,21	4.543,59	7.003,87	16.998,32
200-300	-	59, 78	2.781,76	5.092,58	6.194,28	14.128,40
300-400	-	-	1.540,99	5.239,38	7.492,84	14.273,21
400-500	-	-	570,24	4.781,86	8.709,55	14.061,64
500-600	-	-	457,96	4.284,18	8.677,61	13.419,75
600-700	-	-	478,66	4.101,45	8.457,51	13.037,62
700-800	-	-	568,36	3.745,87	7.956,45	12.270,68
800-900	-	-	428,03	3.367,17	7.379,37	11.174,57
900-1.000	-	-	374,93	3.088,25	6.137,58	9.600,76
1.000-1.100	-	-	325,01	3.187,07	4.659,99	8.172,07
1.100-1.200	-	-	203,11	3.077,18	3.741,57	7.021,86
1.200-1.300	-	-	258,24	2.691,68	2.964,52	5.914,44
1.300-1.400	-	-	315,29	2.750,71	2.299,90	5.365,90
1.400-1.500	-	-	320,40	2.889,45	1.883,70	5.093,55
1.500-1.600	-	-	339,72	3.125,19	1.772,53	5.237,44
1.600-1.700	-	-	414,02	2.680,15	1.823,08	4.917,25

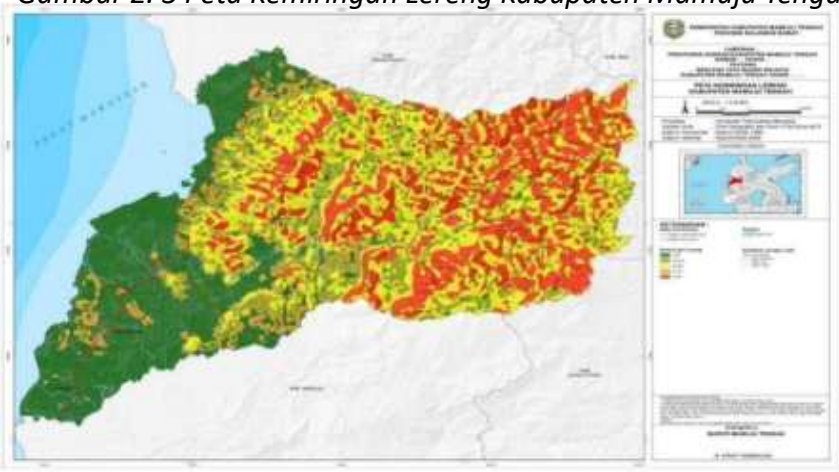
Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)					Total
	Pangale	Budong-Budong	Tobadak	Topoyo	Karossa	
1.700-1.800	-	-	476,86	2.265,77	1.801,48	4.544,11
1.800-1.900	-	-	228,80	2.090,80	1.730,25	4.049,85
1.900-2.000	-	-	180,65	2.075,07	1.572,95	3.828,67
2.000-2.100	-	-	268,62	1.541,60	1.345,75	3.155,97
2.100-2.200	-	-	164,60	817,36	886,18	1.868,13
2.200-2.300	-	-	38,26	301,98	435,50	775,73
2.300-2.400	-	-	-	170,93	191,92	362,85
2.400-2.500	-	-	-	97,30	35,82	133,12
2.500-2.600	-	-	-	50,22	-	50,22
2.600-2.700	-	-	-	21,11	-	21,11
2.700-2.800	-	-	-	5,43	-	5,43
Total	**9.563,6**	**25.607,9**	**37.721,3**	**86.761,8**	**116.506,9**	**276.161,6**

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sebagian besar di wilayah Mamuju Tengah berada pada rentang 0-100 m, yakni seluar 96.678,95 Ha dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Budong-Budong dan paling kecil di Kecamatan Pangale. Adapun rentang tertinggi 2.700-2.800 m seluas 5,43 Ha hanya terdapat di Kecamatan Topoyo.

Kabupaten Mamuju Tengah terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan klasifikasi kemiringan lereng yang menunjukan kondisi fisik lahan dibagi berdasarkan pada SK Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Secara keseluruhan persebaran kelas lereng Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

Berdasarkan peta kemiringan lereng, sebagian wilayah yang termasuk datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya semakin ke Timur secara gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang berbukit. Kemiringan lereng 0-8% yang berada di bagian Barat meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun kelerangan > 40% berada di

bagian timur meliputi sebagaian wilayah di Kecamatan Karossa, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Topoyo. Umumnya wilayah dengan kelerangan >40% adalah wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Secara jelas, kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	> 45%	
		Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
1	Pangale	9.419,72	143,92	-	-	-	9.563,64
2	Budong-Budong	21.686,62	2.798,04	700,33	422,98	-	25.607,97
3	Tobadak	15.289,10	5.840,94	6.580,47	7.140,61	2.870,13	37.721,26
4	Topoyo	15.543,77	3.771,86	9.785,28	30.844,27	26.816,68	86.761,85
5	Karossa	16.131,42	7.280,46	14.400,36	41.257,00	37.437,66	116.506,9
TOTAL		**78.070,63**	**19.835,22**	**31.466,44**	**79.664,86**	**67.124,47**	**276.161,6**

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa keadaan lereng di Kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar berada pada kemiringan 25-45% (curam) sebesar 79.664,86 Ha sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng antara 8-15% (landai) memiliki luas paling kecil yaitu sebesar 19.835,22 Ha. Kemiringan lereng berdasarkan kecamatan yaitu di Kecamatan Pangale memiliki kemiringan lereng antara 0-15% yang terbagi atas dua kelas yaitu datar dan landai dan serta didominasi oleh datar (0-8%) seluas 9.419,72 Ha, diikuti landai (8-15%) seluas 143,92 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Budong-budong didominasi oleh datar (0-8%) seluas 21.686,62 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu curam (25-45%) seluas 422,98 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Tobadak didominasi oleh datar (0-8%) seluas 15.289,10 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu sangat curam (>45%) seluas 2.870,13 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Topoyo didominasi oleh curam (25-45%) seluas 30.844,27 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu landai (8-15%) seluas 3.771,86 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Karossa didominasi oleh curam (25-45%) seluas 41.257 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu landai (8-15%) seluas 7.280,46 Ha.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Apabila kelerengan mencapai batas ekstrem (>45%) dapat menjadi faktor limitasi pengembangan dan diperlukan rekayasa teknologi untuk mengatasinya.

D. Hidrologi

Hidrologi memberikan gambaran tentang kondisi air pada suatu wilayah dimulai dari pergerakan, distribusi, kuantitas, dan kualitas air yang ada di bumi yang terus mengalami perputaran atau siklus. Siklus air merupakan suatu sirkulasi air dari laut ke atmosfer lalu ke bumi dan kembali lagi ke laut dan seterusnya. Air mempunyai wilayah daratan untuk menentukan pergerakan, dan distribusi nya yang disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dibatasi oleh kondisi topografi berupa punggung-punggung bukit atau gunung.

DAS sebagai ekosistem hidrologi dengan unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam (tanah, air, da vegetasi) dan sumber daya manusia sebagai pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sehingga informasi mengenai kondisi hidrologi sangat penting untuk pembangunan. Adapun gambaran kondisi hidrologi Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 4 Peta Batas Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kabupaten Mamuju Tengah



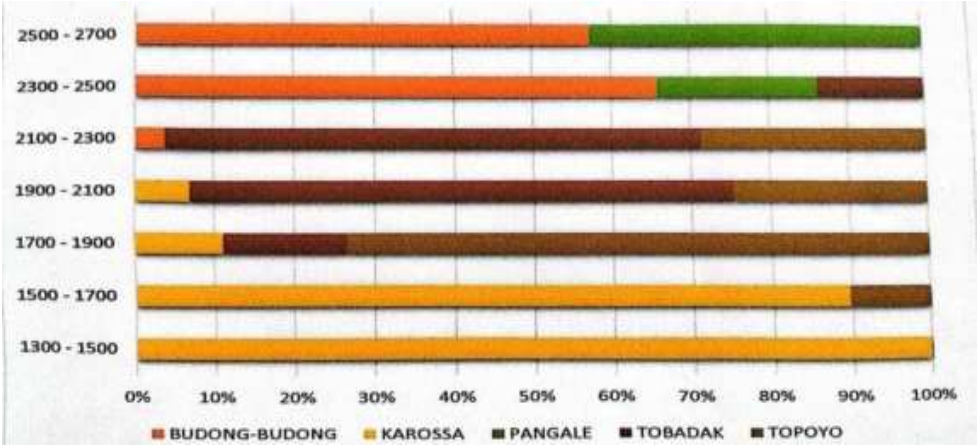
Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

E. Klimatologi

Kondisi iklim sangat penting untuk menentukan pembangunan suatu daerah. Iklim berpengaruh terhadap keadaan lingkungan dan kehidupan makhluk hidup, terutama terhadap sumber daya tanah, tanaman dan kondisi hidrologi yang memengaruhi peredaran air di darat. Kabupaten Mamuju Tengah berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi yang seringkali mengakibatkan terjadinya pencucian hara, erosi dengan translokasinya partikel-partikel tanah. Selanjutnya terjadi sedimentasi yang diendapkan di daerah aliran dan pada kondisis sangat parah air akan terkosentrasi menjadi luapan atau banjir.

Kabupaten Mamuju Tengah dikenal dengan dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juli sampai dengan Oktober arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Bulan November sampai dengan Juni arus angin yang banyak mengandung uap air berhembusan dari Asia dan Samudera Pasifik sehinga terjadi musim hujan. Berdasarkan hal tersebut, iklim Kabupaten Mamuju Tengah tergolong cukup basah sampai sangat basah yang menurut Klasifikasi iklim Oldeman digolongkan kedalam kelas iklim C2,C1,B2 & B1 (mayoritas) dan kelas Iklim A yang digolongkan sebagai cukup basah sampai sangat basah. Variasi jumlah bulan kering dari nol sampai dua hingga tiga bulan setiap tahunnya. Secara rata-rata jumlah hari hujan minimum 14 hari yang terjadi pada bulan Maret dan maksimum hari hujan 25 hari yang terjadi pada bulan Agustus dan Oktober. Adapun kondisi curah hujan Kabupaten Mamuju Tengah dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Grafik Distribusi Luasan Curah Hujan di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber :KLHS RPJMD Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Mamuju Tengah mencapai 1.300-2.700 mm/tahun. Distribusi curah hujan bulanan tersebut menunjukan bahwa daerah Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai musim kemarau sekitar 2 bulan (Agustus-September), musim hujan atau bulan basah terjadi pada November-Januari dan Maret-April. Gambar diatas menunjukan jika kecamatan Budong-Budong memiliki rata-rata curah hujan tahunan mencapai 2300-2500 mm/tahun sedangkan kecamatan Karossa memiliki rata-rata curah hujan tahunan mencapai 1300-1500 mm/tahun.

F. Geologi

Geologi merupakan gambaran kebumian yang berkaitan dengan planet bumi, baik komposisi, sifat fisik, sejarah, maupun proses pembentukannya. Kabupaten Mamuju Tengah terdaat batuan tertua berupa batuan malihan yang terdiri dari sekis, genes, filit dan batu sabak yang diduga berumur lebih tua dari Kapur di atasnya ditindih oleh Formasi Latimojong yang terdiri batuan-batuan yang termalihkan sangat lemah. Adapun kondisi geologi Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 6 Peta Geologi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber :KLHS RPJMD Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

Berdasarkan peta geologI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1993 Kabupaten Mamuju Tengahterdiri dari sebelas formasi batuan yaitu: Aluvium Batuan Gunung Api Lamasi, Gunung Talaya, Batuan Terobosan, Batuan Gamping Koral, Formasi Budong-Budong, Formasi Lariang, Formasi Latimojong, Formasi Pasangkayu, Formasi Sekala dan Kompleks Warna.

Tabel 2. 5 Distribusi Luas Geologi di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Jenis Batuan	Persentase	Luas (Ha)
1	Aluvium	14,00	43.426,62
2	Batuan Gunungapi Lamasi	13,52	41.911,35
3	Batuan Gunungapi Talaya	13,44	41.680,55
4	Batuan Terobosan	2,42	7.517,45
5	Batugamping Koral	0,72	2.245,43
6	Formasi Budong-Budong	6,72	20.847,20
7	Formasi Lariang	15,81	49.030,02
8	Formasi Latimojong	25,38	78.692,36
9	Formasi Pasangkayu	1,27	3.937,27
10	Formasi Sekala	5,20	16.122,08
11	Kompleks Wana	1,51	4.676,61
Mamuju Tengah		**100**	**310.086,94**

Sumber :KLHS RPJMD Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

Tabel diatas memperlihatkan formasi Latimojong memiliki selabaran 25,38 persen. Ini merupakan jenis batuan yang sangat mendominasi pada Kabupaten Mamuju Tengah, sedangkan Batugamping Koral merupakan jenis batuan yang sangat kecil sebenarnya hanya 0,72 persen atau 2.245,43 ha dari total luas Kabupaten Mamuju Tengah. Jika di cermati secara mendalam batuan yang mendominasi pada Kabupaten Mamuju Tengah. Formasi batuan latimojong merupakan batuan dasar yang tersingkap di sebelah tenggara daerah penyelidikan, batuan penyusunan terdiri dari batupasir kuarsa malihan, batulanau malihan, kuarsit, filit, dan setempat batu lempung gampingan.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah yang dapat dikembangkan adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar memperoleh pertambahan manfaat dari berbagai segi seperti ekonomi, kualitas, penyelesaian masalah alam seperti bencana alam dan lain sebagiannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, Kebijakan Potensi Pengembangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

1. Pusat kegiatan Lokal/PKL di Tobadak\ (ibu Kota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan kota terpadu mandiri/KTM.
2. Pengembangan Jalan Kolektor Primer, meliputi: Belang-Belang – Pasangkayu- Batas Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pengembangan Terminal Tipe C, di Ibu Kota kabupaten Mamuju Tengah.
4. Pengembangan Jalur Kereta api lintas utama meliputi; perbatasan kabupaten Pinrang (Sulsel) – Polewali – Wonomulyo – Campalagian – Majene – Mamuju – Belang-Belang – Topoyo – Pasangkayu – Donggala (Sulteng).

5. Pengembangan Pelabuhan, pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Budong-Budong.
6. Wilayah Sungai WS karama meliputi DAS Karama, DAS Budong-Budong dan DAS Karossa.
7. Kawasan Potensi Pertanian Penentuan kawasan pertanian untuk berbagai komoditas dilakukan di luar kawasan lindung (pada wilayah yang dinyatakan sebagai kawasan budidaya) yang disesuikan dengan kesesuaian lahan bagi komoditas tertentu yang ada wilayah kabupaten. Untuk Kabupaten Mamuju Tengah, kesesuaian lahan pertanian untuk komoditas Kakao, jeruk, kelapa, sawit, padi sawah dan padi ladang.
8. Kawasan Potensi Perikanan. Potensi pengembangan budidaya perikanan air tawar dan potensi perikanan tambak sangat besar di Kabupaten Mamuju Tengah. Pemeliharaan ikan air tawar dapat dilakukan dengan pemeliharaan ikan di kolam-kolam air tawar atau dilakukan dengan sistem budidaya ikan dengan mina padi. Sedangkan perikanan tambak dilakukan pada areal sekitar wilayah pantai yang landai. Pengembangan wilayah pertambakan di sepanjang jalur pantai diarahkan untuk memperhatikan kelestarian
9. Kawasan Potensi Peternakan. Potensi pengembangan kawasan peternakan sapi dikembangkan bersama pertanian pangan lahan kering (misalnya jagung, kedelai, ubi-ubian dan sayuran).
10. Kawasan Pertambangan, Potensi sumber daya pertambangan minyak dan gas terbentang di dasar laut maupun di daratan, yang saat ini sedang dilakukan eksplorasi secara intensif. blok wilayah pertambangan minyak yang sedang dieksplorasi, dan setelah ada kesimpulan layak usaha tambang maka direncanakan segera ke tahap eksploitasi yaitu Blok Budong-Budong. Pertambahngan lainnya yang potensial juga tersebar di Kabupaten mamuju tengah, yaitu tambang emas dan tambang biji besi,
11. Kawasan Industri, berdasarkan potensi sumber daya alam baik berupa komoditas pertanian maupun pertambangan, maka dapat dikembangkan industry skala menengah.
12. Kawasan Perdagangan, Kawasan perdagangan ukuran sedang diarahkan berkembang di ibukota-ibukota kabupaten. Pembangunan kawasan perdagangan diarahkan perencanaannya terpadu dengan fasilitas pendukungnya seperti perkantoran swasta, perbankan, pertokoan, hotel dan restauran, terminal bis pembantu, pergudangan dsb.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Sebagai implikasi topografi dan geografi, menyebabkan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 10 ancaman bencana dengan tingkat ancaman bencana yang bervariasi. Jenis bencana yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah terbagi menjadi dua yaitu bencana alam berupa : gempa bumi; tsunami; abrasi; angin puting beliung; gelombang pasang; banjir; tanah longsor; banjir dan tanah longsor; kekeringan; dan likuifaksi sedangkan bencana non alam berupa: kebakaran lahan dan hutan; kecelakaan transportasi; kecelakaan industry dan konflik sosial.

1. Bencana Alam
   a) Banjir

      Banjir adalah peristiwa atau terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Selain itu juga ada banjir bandang yaitu banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar. Banjir tersebut disebabkan karena terbendungnya aliran sungai pada alur sungai oleh material longsoran pada alur sungai di kawasan hulu. Kawasan rawan bencana Banjir di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di : Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; dan Kecamatan Karossa.

b) *Gelombang Pasang*

Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia yang berada dibawah lintang 10 derajat tidak terpengaruh oleh gaya koriolis bumi karena itu bukan daerah lintasan siklon tropis. Tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Kawasan rawan bencana Gelombang Pasang di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di sepanjang pantai yaitu di: Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; dan Kecamatan Karossa.

c) *Tsunami*

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang laut (*tsu)* berarti pelabuhan dan (name*)* berarti gelombang, jadi tsunami secara harfiah berarti sebagai gelombang laut yang menerjang pelabuhan atau kawasan pantai. Gelombang ini timbul setelah gempa besar karena adanya interaksi antar lempeng di dasar laut, longsor di bawah laut, jatuhnya meteor di laut serta gunung api di dasar laut. Kawasan rawan bencana Tsunami di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di sepanjang pantai yaitu di: Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; dan Kecamatan Karossa.

d) *Abrasi*

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kawasan rawan abrasi di kabupaten Mamuju Tengah yaitu di: Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; dan Kecamatan Karossa.

e) *Longsor*

Tanah longsor terjadi akibat gerakan massa tanah atau batuan, maupun pencampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana ini umumnya terjadi di kawasan lereng curam dan daerah kritis. Tanah longsor umumnya dipicu oleh hujan lebat dan gempa. Kawasan rawan bencana Longsor di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; Kecamatan Tobadak.

f) *Angin Puting Beliung*

Angin Puting Beliung adalah anginkencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 Km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat. Kawasan rawan bencana Angin Puting Beliung di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; dan Kecamatan Tobadak.

g) *Gempa*

Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif dan aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; dan Kecamatan Tobadak

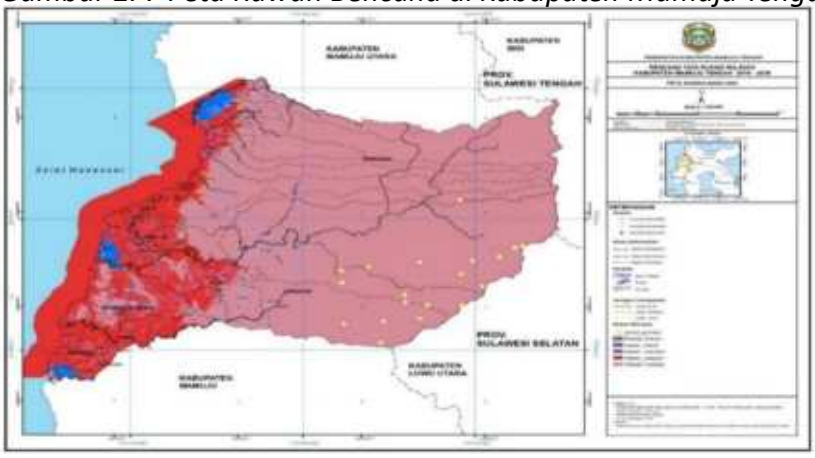
h) Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang memerlukan kecukupan air. Bencana kekeringan memang dipengaruhi oleh berbagai penyebab seperti musim kemarau panjang, kondisi tanah dan topografi. Namun bukan berarti manusia tidak memiliki andil terhadap perubahan itu. Faktor vegetasi dan daerah tangkapan air, tata kelola air dan kearifan dalam memanfaatkan air pun menjadi faktor penentu yang mempengaruhi ketersediaan air. Kawasan rawan bencana Kekeringan di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; dan Kecamatan Tobadak.

i) Likuifaksi

Likuifaksi merupakan salah satu bahaya ikutan gempa bumi. Kejadian liikuefaksi bergantung pada intensitas kekuatan gempa bumi. Berdasarkan hasil penelitian kejadian-kejadian likuefaksi di dunia, likuefaksi dapat terjadi pada beberapa nilai percepatan tanah puncak. Kawasan rawan likuefaksi menurut Badan Geologi terdapat dibeberapa kecamatan yang ada di Kabuapten Mamuju Tengah yang masuk dalam zona kerentanan likuefaksi sedang artinya zona kerentanan yang dapat mengalami likuefaksi secara tidak merata dan struktur tanah umumnya rusak. Tipe kerusakan struktur tanah yang terjadi berupa pergeseran lateral, penurunan tanah dan semburan pasir.

Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Perda RTRW kab. Mamuju Tengah 2017 – 2037

2. Bencana Non Alam

Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain kebakaran, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial juga termasuk bencana non alam.

a) Kebakaran Lahan dan Hutan

Kebakaran lahan dan hutan adalah suatu kejadian dimana lahan dan hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Kebakaran lahan dan hutan sering kali menyebabkan

bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rawan bencana kebakaran lahan dan hutan dikarenakan dengan banyaknya lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; dan Kecamatan Tobadak.

b) *Kecelakaan Transportasi*

Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara. Kawasan rawan bencana Transportasi khususnya transportasi darat yang disebabkan oleh prasarana jalan yang belum memadai di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di :Desa Tinali dan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong; dan Desa Tasokko, Desa Lara dan Desa Karossa Kecamatan Karossa.

c) *Kecelakaan Industri*

Kecelakaan Industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi yang tidak aman (unsafe conditions). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang digunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya. Kawasan rawan bencana Kecelakaan Industri di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di: Desa Pontanakayyang Kecamatan Budong-Budong; dan Desa Tabolang Kecamatan Topoyo.

d) *Konflik Sosial*

Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama dan ras (SARA). Selain masyarakat asli yang bermukim, Kabupaten Mamuju Tengah yang sebagian wilayahnya menjadi kawasan permukiman transmigrasi juga didiami oleh masyarakat yang berasal dari luar daerah serta berasal dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Hal tersebut bukan tidak mungkin akan menyebabkan rawannya kejadian konflik sosial apabila tidak ditangani oleh pemerintah melalui program-program yang bersifat mempeerat persatuan dan persaudaraan antar sesama masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

2.1.1.4 Demografi

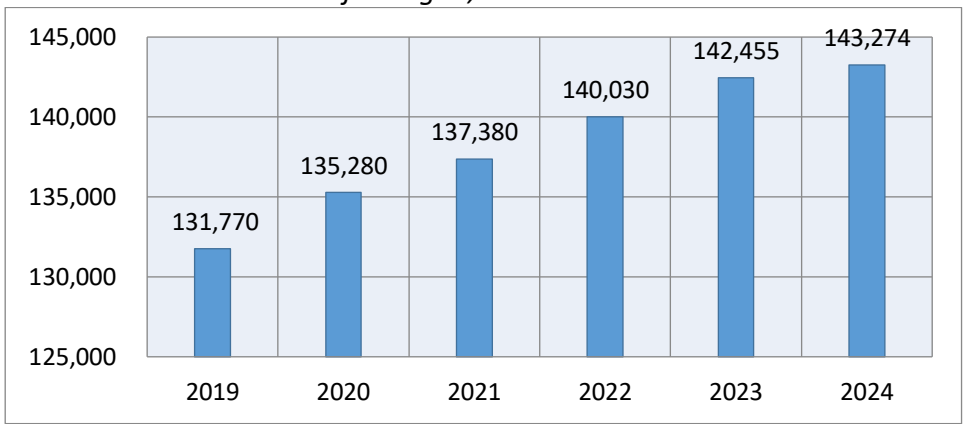
Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar dan penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Dinamika penduduk yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya menjadikan kota/ wilayah berkembang. Dinamika tersebut mencakup peristiwa-peristiwa demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah, komposisi, distribusi dan kepadatan penduduk di suatu kota/ wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada munculnya isu-isu kependudukan, seperti urbanisasi, bonus demografi, population ageing dan lainnya. Oleh karenanya, aspek kependudukan harus menjadi dasar atau landasan bagi perencana untuk merumuskan perencanaan pembangunan di wilayahnya.

1. Jumlah Penduduk

   Data penduduk kabupaten mamuju tengah pada tahun 2024 beradasarkan survey statistik sebesar 143.274 jiwa penduduk dengan laju pertumbuhan sebesar NA persen. Jumlah tersebut terdiri atas 73.609 jiwa laki-laki dan 69.665 jiwa perempuan. Jumlah

penduduk akan terus meningkat seiring dengan mobilisasi penduduk dan bertambahnya angka kelahiran. Data perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

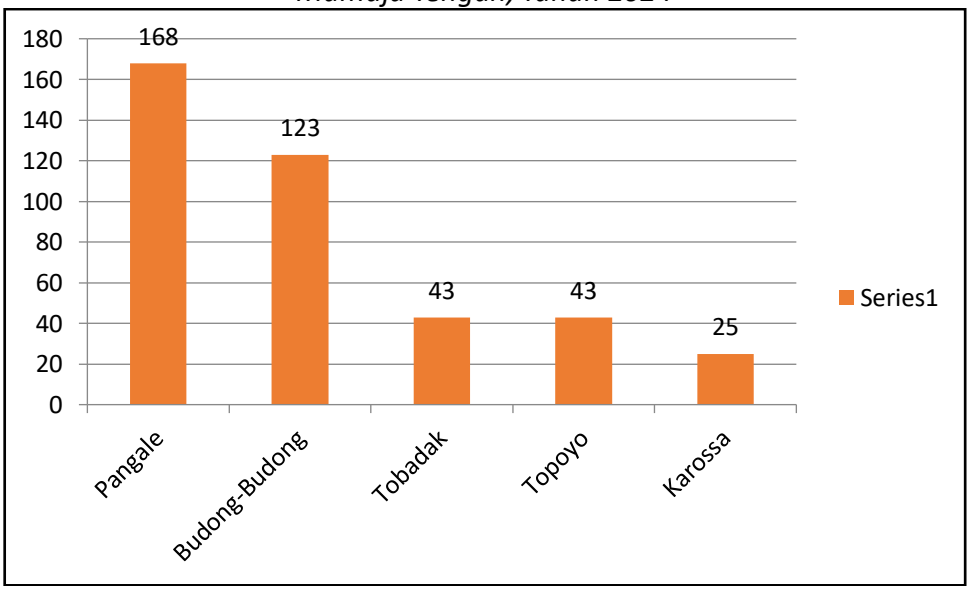
Gambar 2. 8 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data diolah)

Distribusi penduduk tertinggi di Kabupaten Mamuju Tengah berada di Kecamatan Topoyo dengan jumlah penduduk yang tercatatkan sebesar 37,9 ribu jiwa atau 26,45 persen dari total penduduk Mamuju Tengah. Sementara itu distribusi penduduk terkecil berada di Kecamatan Pangale dengan jumlah penduduk sebesar 15,33 ribu jiwa atau 10,70 persen dari total penduduk Mamuju Tengah.

Gambar 2. 9 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2024

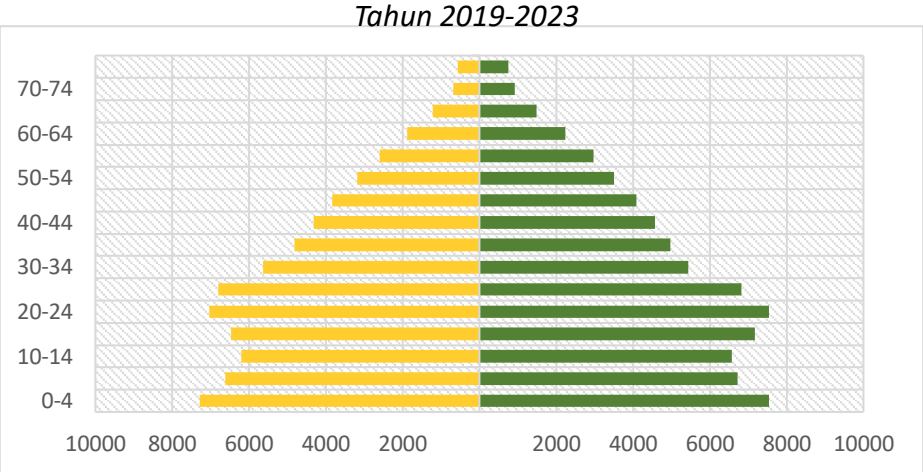


Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data diolah)

Jika dilihat dari data tingkat Kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah diatas Kecamatan Pangale memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit tetapi dengan tingkat kepadatan yang paling besar. Hal ini disebabkan luas wilayah yang kecil dibandingkan dengan banyaknya pemukiman penduduk. Kecamatan Karossa memiliki kepadatan

penduduk yang paling rendah, menunjukkan wilayah yang luas dengan penduduk yang lebih tersebar. Kecamatan Topoyo dan Tobadak memiliki jumlah penduduk cukup besar tetapi dengan kepadatan rendah, menunjukkan area yang lebih luas dan masih berkembang. Kecamatan Budong-Budong berada di tengah-tengah dalam hal kepadatan, menunjukkan distribusi oenduduk yang relative merata.

Gambar 2. 10 Piramida Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2024 (Data diolah)

Potret piramida penduduk Kabupaten Mamuju Tengah termaksud tipe Ekspansive (Penduduk Muda). Hal ini tercermin dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara di bagian atas merupakan penduduk usia tua meruncing. Hal ini menunjukan bahwa penduduk Kabupaten Mamuju Tengah didominasi oleh usia produktif yang berusia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk sebesar 108,673 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebesar 106. Hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, atau secara lebih rinci dapat diartikan bahwa ada sebanyak 106 laki-laki diantara 100 orang perempuan.

1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Adanya Heteroginitas budaya, adat istiadat, sumber daya, luas wilayah, serta potensi alam yang ada mengakibatkan beragamnya pencapaian hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu pengawasan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan harus dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan serta manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut. Untuk mengukur indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat salah satunya dari capaian indikator makro ekonomi dan sosial.

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

   Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Tujuan utama adanya perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu untuk mengukur kesehatan dan kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa ekonomi sedang berkembang dan bergerak maju, sementara pertumbuhan negatif bisa menandakan resesi atau stagnasi ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi di peroleh atas dasar harga konstan dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1 dikalikan dengan 100 persen.

Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data diolah)

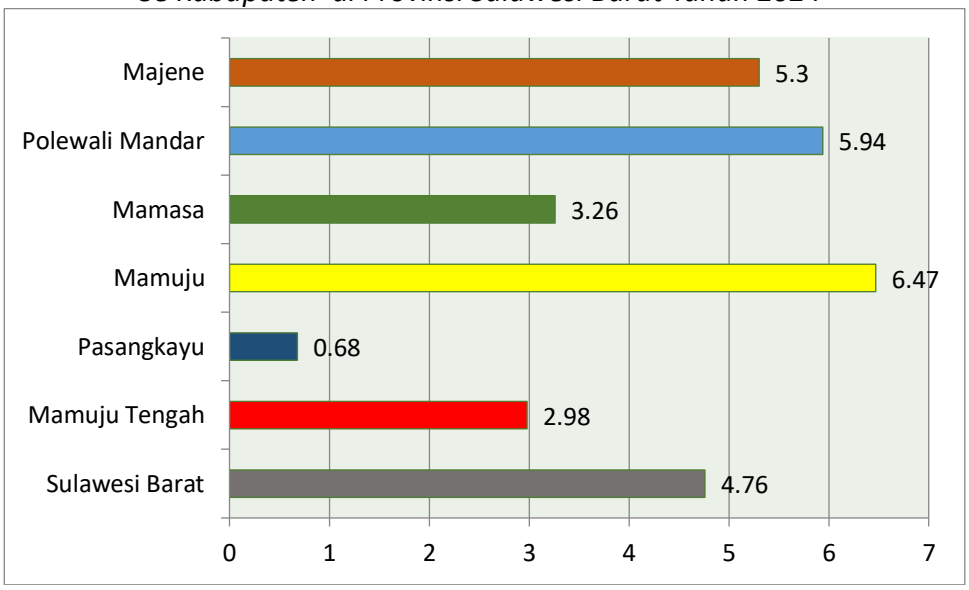
Dalam enam tahun terkahir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah mengalami nilai yang fluktuatif. Perubahan terbesar berada di tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi dari 5,62 persen mengalami kontraksi yang cukup parah menyentuh angka -1,02 persen karena pengaruh mebawahnya virus Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan di berbagai sisi lapangan usaha menurun. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor lapangan usaha mulai membaik dengan capaian 3,35 persen akan tetapi pada tahun 2022 dengan dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor CPO sangat mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah yang kontribusi terbesar disumbang oleh sektor perkebunan sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi turun di angka 2,20 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah berhasil naik walaupun tumbuh melambat menjadi 2,98 persen atau meningkat sekitar 0,18 persen dari tahun sebelumnya.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 12,95 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, ada yang mengalami pertumbuhan positif namun ada juga yang negatif. Lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup ekstrem yaitu konstruksi sebesar 6,90 persen.

Dari tujuh belas lapangan usaha yang ada, mayoritas lapangan usaha mempunyai pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen. Tercatat sejumlah 8 lapangan usaha memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Dari beberapa lapangan usaha tersebut, yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi dibanding tahun lalu terdapat sebanyak 9 lapangan usaha. Sedangkan sisanya tercatat mengalami perlambatan ekonomi yang bervariasi. Sedangkan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terendah berada pada sektor industri pengolahan sebesar 1,65 persen. Hal ini salah satunya disebabkan karena menurunnya produksi CPO dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan pertumbuhan ini masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten lainnya yang begitu progresif. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah masih berada diurutan kedua terbawah diantara kabupaten yang ada Sulawesi Barat.

Gambar 2. 12 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Se Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2024 sebesar 4,76 persen dimana tertinggi dicapai oleh Kabupaten Mamuju sebesar 6,47 persen diikuti oleh Kabupaten Majene sebesar 5,3 persen, Kabupaten Polewali Mandar sebesar 5,94 persen dan Kabupaten Mamasa sebesar 3,26 persen. Sementara itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu berada diurutan terbawah masing-masing 2,98 persen dan 0,68 persen. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah agar fokus meningkatkan sektor-sektor lapangan usaha yang potensial untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB

digunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sementara itu dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Perhitungan PDRB ini bertujuan sebagai bahan evaluasi kegiatan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan non Pemerintah.

a. Berdasarkan Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup 17 lapangan usaha. PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

1) PDRB atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yang ditentukan sebagai tahun dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tengah yang dihitung menggunakan harga konstan mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 PDRB ADHK Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan lapangan usaha sebesar 2.469,05 miliar meningkat sebesar 2,80 persen dari tahun sebelumnya. Jika melihat tabel dibawah secara umum semua sektor mengalami peningkatan walapun tidak terlalu signifikan. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.594,35	1.643,17	1.667,67	1.710,13
B	Pertambangan dan Penggalian	27,90	27,82	29,00	31,50
C	Industri Pengolahan	223,39	219,77	242,13	246,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,55	0,58	0,64	0,73
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,51	1,64	1,72	1,77
F	Konstruksi	31,64	30,64	31,83	34,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	91,38	92,0	96,45	100,30
H	Transportasi dan Pergudangan	13,71	14,38	15,89	17,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,39	4,88	5,37	5,74
J	Informasi dan Komunikasi	28,39	29,17	31,64	34,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,95	19,20	19,63	20,30
L	Real Estate	74,16	78,63	80,71	84,84

M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,34	0,36	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	79,05	80,35	82,56	86,08
P	Jasa Pendidikan	76,74	78,09	79,86	82,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	6,85	6,80	7,06	7,54
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,52	4,77	4,92	5,07
Total PDRB		**2.279,81**	**2.332,23**	**2.397,44**	**2.469,05**

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

2) PDRB atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. Jika melihat data statistik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mamuju Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2024 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan lapangan usaha meningkat sebesar 12,067 persen atau dari nilai 4.064,39 miliar rupiah menjadi 4.554,87 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku secara umum semua sektor di lapangan usaha mengalami peningkatan dimana nilai PDRB tertinggi diperoleh oleh sektor lapangan usaha pertanian,kehutanan dan periakanan sebesar 3.378,62 miliar rupiah sedangkan yang terkecil adalah sektor jasa perusahaan sebesar 470 juta rupiah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.590,26	2.784,39	2.963,93	3.378,62
B	Pertambangan dan Penggalian	38,27	40,43	45,47	49,06
C	Industri Pengolahan	319,51	345,59	374,97	396,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,41	0,45	0,51	0,57
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,77	1,93	2.03	2,15
F	Konstruksi	45,50	47,02	50,06	54,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	143,44	152,79	165,03	175,47
H	Transportasi dan Pergudangan	17,78	19,94	23,33	25,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,17	7,20	8,14	8,93
J	Informasi dan Komunikasi	32,91	33,84	37,23	40,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	32,76	32,02	33,85	35,84
L	Real Estate	99,30	109,73	116,76	126,42
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	0,40	0,43	0,47

O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	110,22	112,67	115,25	121,72
P	Jasa Pendidikan	104,22	108,19	110,75	119,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	9,26	9,29	10,03	10,90
R,S,T, U	Jasa Lainnya	5,74	6,20	6,62	6,90
Total PDRB		**3.557,87**	**3.812.08**	**4.064,39**	**4.554,87**

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh 17 Lapangan Usaha dimana dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 sub sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih memberikan sumbangsih terbesar sebesar 74,18 persen dari total keseleruhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah. Distribusi tertinggi selanjutnya diberikan oleh sub sektor industri pengolahan sebesar 8,71 persen dan perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda sebesar 3,85 persen sedangkan tiga lapangan usaha yang memberikan distribusi paling kecil yaitu: Pengadan listrik dan gas sebesar 0,01 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang sebesar 0,05 persen serta Jasa Perusahaan sebesar 0,01 persen. Distribusi persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Mamuju Tengah dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah:

Tabel 2. 8 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	72,80	73,04	72,92	74,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,06	1,12	1,08
C	Industri Pengolahan	8,98	9,07	9,23	8,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	1,28	1,23	1,23	1,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,01	4,06	3,85
H	Transportasi dan Pergudangan	0,50	0,52	0,57	0,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,17	0,19	0,20	0,20
J	Informasi dan Komunikasi	0.92	0,89	0,92	0,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	0,84	0,83	0,79

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
L	Real Estate	2,79	2,88	2,87	2,78
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	3,10	2,96	2,84	2,67
P	Jasa Pendidikan	2,93	2,84	2,72	2,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	0,26	0,24	0,25	0,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,16	0,16	0,16	0,15
Total PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

b. Berdasarkan Pengeluaran

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyusun PDRB adalah melalui pendekatan pengeluaran. Jika dari sisi lapangan usaha yang mengambarkan penjumlah seluruh komponen yang mencipatkan nilai tambah bruto oleh sektor-sektor atas berbagai aktivitas produksinya, maka dari sisi pengeluaran menggambarkan tentang pengunaan dari nilai tambah tersebut. Menurut Pendekatan Pengeluaran, ada 6 (enam) komponen yang dicakup PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemrintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor.

1) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Perhitungan PDRB ADHK 2010 sama sekali tidak terpengaruh oleh faktor perubahan harga. Dengan kata lain PDRB ADHK dari sisi pengeluaran hanya memperhitungkan besaran peningkatan secara kuantitas atau volume yang dialami oleh seluruh komponen PDRB pengeluaran. Jika dilihat dari data statistik pada tabel dibawah PDRB ADHK Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun terkahir meningkat dari 2.279.811,96 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 2.469.048,25 juta rupiah pada tahun 2024. Artinya sejak tahun 2021 terjadi peningkatan nilai PDRB sekitar 8,30 persen hingga akhir tahun 2024.

Jika dilihat dari nilai capaiannya maka jumlah tertinggi PDRB Atas Dasar Harga Konstan masih diperoleh dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1.496.376,37 juta rupiah sedangkan nilai terendah diperoleh dari Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 34.277,23 juta rupiah.

Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mamuju Tengah (miliar rupiah), Tahun 2021-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)	1.345.652,56	1.383.856,13	1.414.268,78	1.496.376,37
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	25.590	27.328,80	30.016,59	34.277,23
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	292.254,13	289.231,13	296.813,31	303.347,72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	574.640,57	567.541,73	590.577,93	624.531,84
5	Perubahan Inventori	79.032,11	90.464,39	136.743,67	104.134,59
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-37.357,41	-25.352,95	-70.741,20	-93.619,50
Total PDRB		**2.279.811,96**	**2.333.069,23**	**2.397.679,09**	**2.469.048,25**

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Perhitungan PDRB ADHB di berpengaruh oleh faktor perubahan harga di suatu wilayah pada tahun berjalan. Jika dilihat dari data statistik pada tabel dibawah PDRB ADHB Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun terkahir meningkat dari 3.557.865,68 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 4.554.868,66 juta rupiah pada tahun 2024. Artinya sejak tahun 2021 terjadi peningkatan nilai PDRB sekitar 28,02 persen hingga akhir tahun 2024.

Jika dilihat dari nilai capaiannya maka jumlah tertinggi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku masih diperoleh dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2.565.222,15 juta rupiah sedangkah nilai terendah diperoleh dari Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 60.529,87 juta rupiah.

Tabel 2. 10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mamuju Tengah (miliar rupiah), Tahun 2021-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)	2.080.907,09	2.247.650,92	2.359.510,31	2.565.222,15
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	37.525,46	41.994,79	49.470,41	60.529,87
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	473.950,96	477.350,53	504.830,47	548.727,14
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	886.393,04	916.152,07	1.006.579,99	1.128.597,52
5	Perubahan Inventori	135.127,81	137.249,20	186.380,62	156.632,98
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-56.038,68	-8.314,96	-42.385,07	95.159
Total PDRB		**3.557.865,68**	**3.812.082,56**	**4.064.386,73**	**4.554.868,66**

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2024

Jika ditinjau dari kontribusi komponen pengeluaran, perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah sangat ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Hal ini dapat dilihat pada data dibawah dimana kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga melampaui setengah dari total PDRB dimana mencapai 56,32 persen. Kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap sebesar 24,78 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,05 persen, Perubahan Inventori sebesar 3,44 persen, dan terakhir Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,33 persen.

Tabel 2. 11 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mamuju Tengah (Persen) Tahun 2021-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)	58,49	58,96	58,05	56,32
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,05	1,10	1,22	1,33
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,32	12,52	12,42	12,05
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,91	24,03	24,77	24,78
5	Perubahan Inventori	3,80	3,60	4,59	3,44
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,58	-0,22	-1,04	2,09
Total PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**

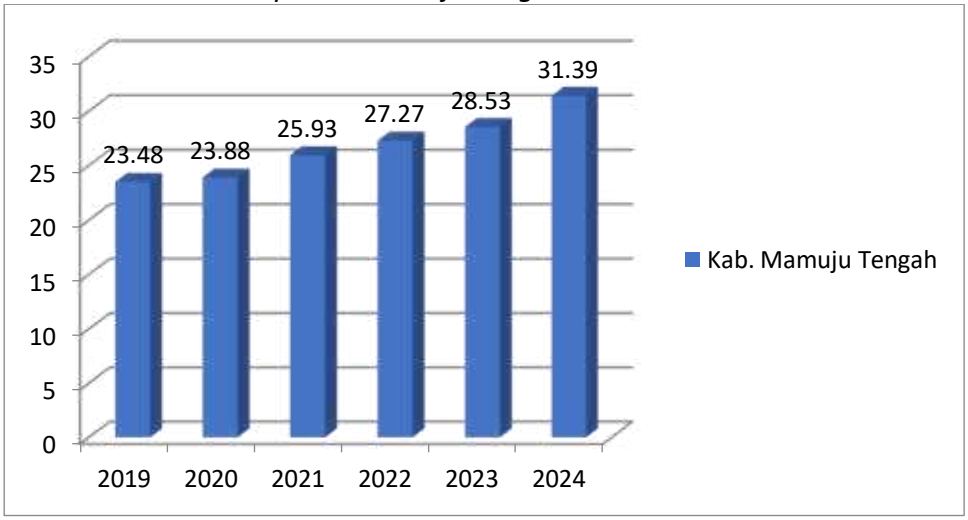
Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Kontribusi pengeluaran LNPRT dalam struktur PDRB pengeluaran masih dikategorikan sangat kecil disebabkan belum banyaknya aktivitas dari jenis lembaga terkait, serta skala kegiatan yang tergolong masih sangat kecil menjadi faktor utama. Walaupun nilainya terus meningkat hingga mencapai 60,52 miliyar di tahun 2024, nilai konsumsi LNPRT stagnan pada kisaran angka 1 persen selama empat tahun terakhir. Dari sisi pertumbuhan pengeluaran konsumsi aksi LNPRT mencapai puncaknya yaitu 14,19 persen meningkat 4,35 persen pada tahun sebelumnya.

B. PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita di kabupaten didapatkan dari hasil pembagian pendapatan regional bruto kabupaten dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah wilayah Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wialyah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Gambar 2. 13 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data diolah)

Dari data diatas mengambarkan bahwa capaian pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,06 persen setiap tahunnya. Data tahun 2024 capaian Pendapatan per kapita Kabupaten Mamuju Tengah untuk setiap orangnya sebesar 31,39 juta/tahun.

Jika dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Barat, Mamuju Tengah masih menempati posisi kedua terendah untuk nilai pendapatan per kapita, setelah Mamasa. Masih rendahnya pendapatan per kapita Mamuju Tengah turut dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih mengandalkan pertanian dan perkebunan, serta sebagian masyarakat masih bekerja pada sektor informal yang berupah rendah.

C. Angka Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah serius hampir disetiap negara termaksud di Indonesia dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Ageda For Sustainable Development, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan utama dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Sejalan dengan prioritas RPJMN 2020-2024, RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021- 2026 indikator pengurangan kemiskinan menjadi isu startegis utama dan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ditetapkan kedalam sasaran ke lima RPJMD yaitu “Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan indikator penurunan angka kemiskinan sekitari 5,50 persen di akhir tahun 2026.

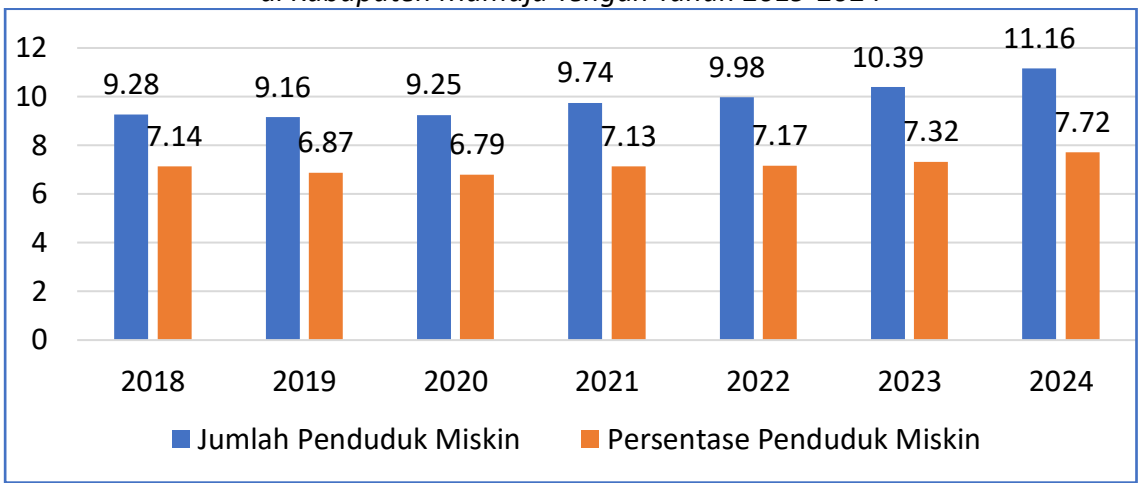
Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhaan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bahwah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Di Indonesia Garis Kemiskinan dihitung dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK masuk ke dalam kategori penduduk miskin.

GKM adalah nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan yang dapat disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita dalam sehari. Komoditi yang mewakili kebutuhan dasar makanan ada 52 jenis komoditi, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan sebagainya. Sedangkan GKNM sendiri adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi jenis ini diwakili oleh 47 komoditi di pedesaan dan 51 jenis di perkotaan.

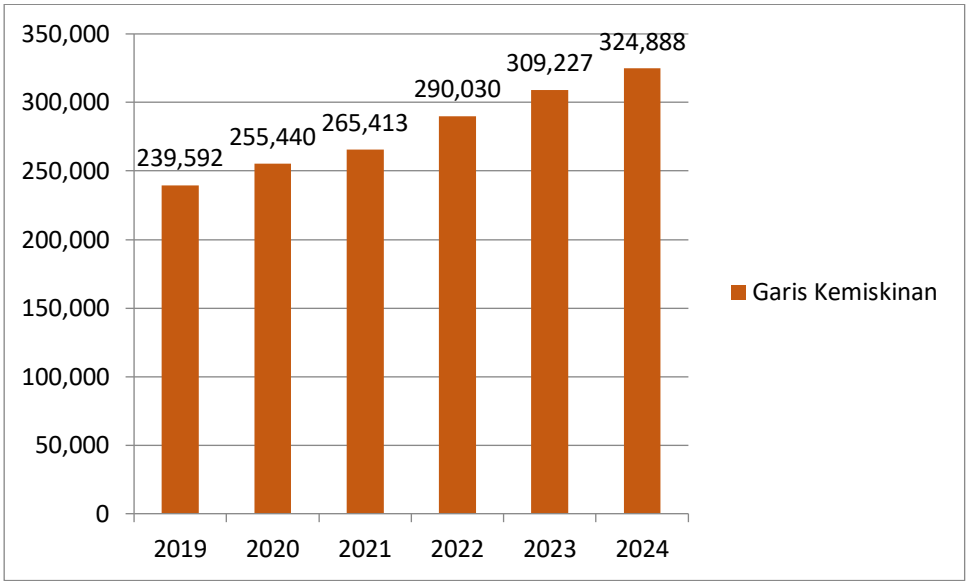
Garis Kemiskinan Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp. 324.888,- pada tahun 2024. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah tercatat sekitar 11,16 ribu jiwa atau sekitar 7,72 persen dari total penduduk. Jika melihat dari data tahun sebelumnya tingkat kemiskinan di Mamuju Tengah meningkat sejak tahun 2020 yaitu sebesar 6,79 persen dan terus meningkat sampai pada akhir tahun 2024. Garis Kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada table berikut:

Gambar 2. 14 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 15 Garis Kemiskinan Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data diolah)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Indeks-P1) merupakan ukuran rata- rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata- rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Secara statistik Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah dalam enam tahun terakhir mengalami fluaktuatif. Tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,37 poin meningkat 0,37 poin dari tahun (2018) kemudian menurun menjadi 0,88 poin di tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 1.15 poin pada akhir tahun 2024 menurun menjadi 0,92 poin. Diperlukan upaya yang stratgeis dari pemerintah daerah karena peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis ketimpangan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Gap Indeks-P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2019 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 0,34 poin meningkat 0,10 poin dari tahun (2018) kemudian menurun menjadi 0,18 poin di tahun 2020 namun kembali meningkat menjadi 0,27 poin di tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,09 poin dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 Indeks Keparahan Kemiskinan berhasil menurun menjadi 0,24 poin dan 0,19 poin di tahun 2024 Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	1,37	0,34
2020	0,88	0,18
2021	1,15	0,27
2022	1,15	0,24
2023	0,97	0,18
2024	0,92	0,19

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Sejak tahun 2020 Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan hampir diseluruh wilayah di Indonesia termaksud di Kabupaten Mamuju Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kemiskinan salah satunya melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Bantuan sosial yang diberikan merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan pemerintah yang mencakup tiga jenis program yaitu Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Porgram Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pemerintah Daerah melalui dinas terkait bisa melakukan verifikasi dan validasi data untuk memperbaiki kualitas data kemiskinan yang ada. Tersedianya data kemiskinan yang akurat diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya mampu mewujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.

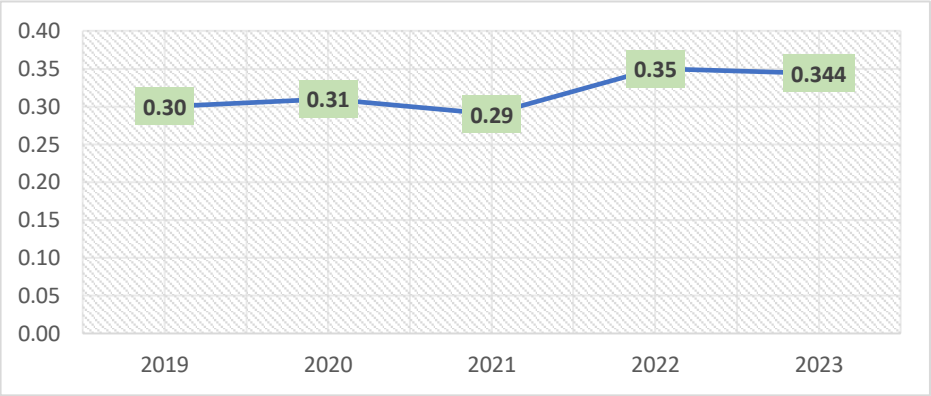
D. Indeks Gini

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Jadi Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Jika dilihat dari gambar dibawah menunjukan bahwa indeks gini ratio di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Data Gini ratio di Kabupaten Mamuju Tengah berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 capaian Gini ratio menunjukan progres yang baik karena berhasil turun dari tiga tahun sebelumnya menjadi 0,29 poin. Akan tetapi kembali meningkat menjadi 0,35 poin di tahun 2022 sekaligus merupakan angka tertinggi selama kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 angka gini ratio mengalami penurunan walaupun tidak signifikan menjadi 0,344 poin atau sebesar 0,01 persen dari tahun sebelumnya. Meningkatnya ketimpangan pengeluaran

penduduk salah satunya disebabkan karena meningkatnya pengeluaran golongan atas sedangkan pengeluaran golongan menengah dan kebawah cenderung tetap. Data capaian Gini Ratio Kabupaten Mamuju Tengah secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah inI:

Gambar 2. 16 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2024 (Data Diolah)

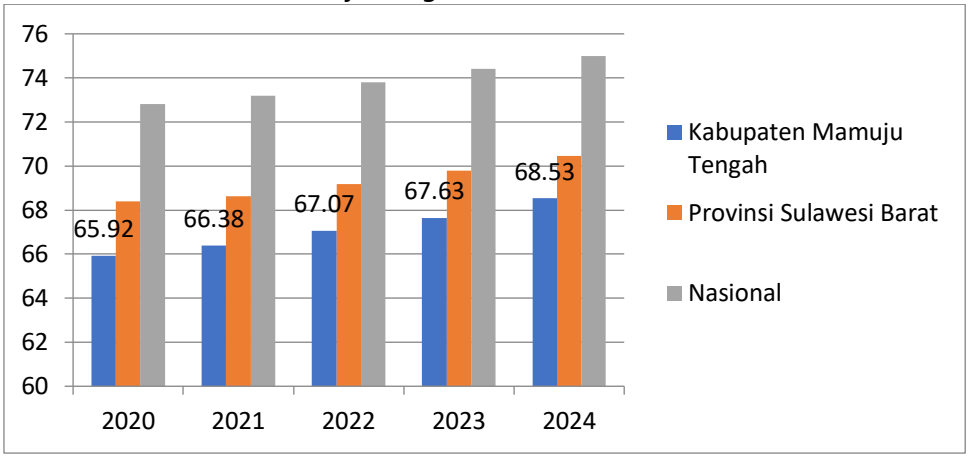
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi yang mempunyai skala dari nol sampai dengan satu. United Nation for Development Program (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan manusia atau IPM (Human Development Index). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup.

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Gambar 2. 17 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data Diolah)

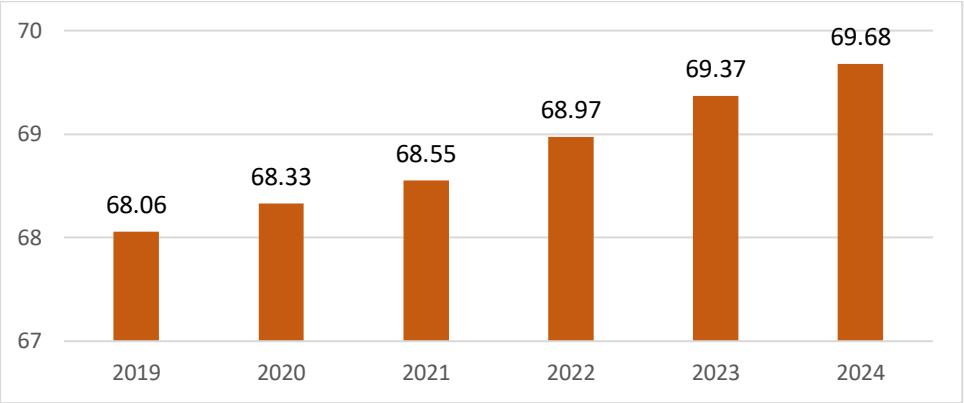
Hasil pembangunan manusia dapat dilihat melalui indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2024, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 68,53. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,9 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari klasifikasi IPM menurut UNDP, nilai IPM Mamuju Tengah pada tahun 2024 termasuk kategori sedang. Jika dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2024, IPM Kabupaten Mamuju Tengah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya sebesar 7,05 poin atau 11,47 persen yaitu dari 61,48 pada tahun 2014 menjadi 68,53 pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik, seperti program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang telah lebih dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Capaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1. **Umur Harapan Hidup (UHH)**

   Umur Harapan Hidup saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

   Capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yaitu 69,68 tahun. Nilai ini meningkat sebesar 0,31 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2023. AHH mencerminkan rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 69,68 tahun. Angka Harapan Hidup di Mamuju Tengah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan 2,68 tahun. Dari yang awalnya 67,00 pada tahun 2014 menjadi 69,68 pada tahun 2024. Hal ini menunjukan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Mamuju Tengah. Grafik perkembangan Angka Harapan Hidup Mamuju Tengah dapat dilihat pada dibawah ini:

Gambar 2. 18 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data Diolah)

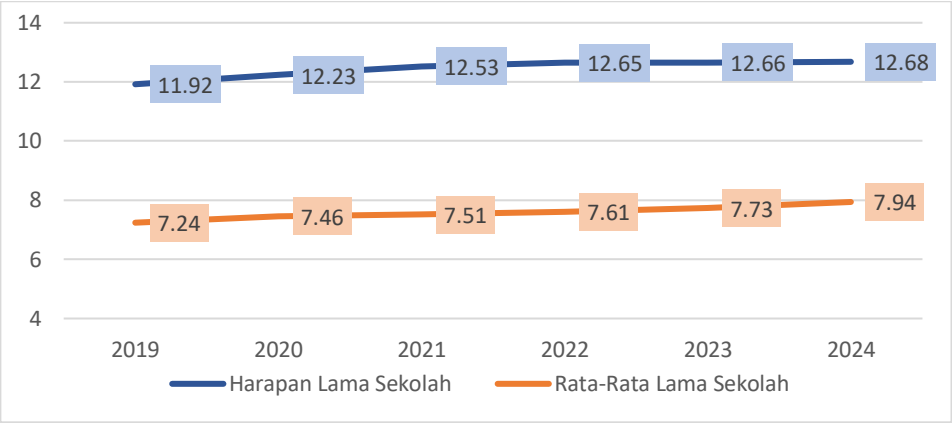
2. Pengetahuan

Pengetahuan diukur melalui dua indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata- rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Harapan Lama Sekolah Mamuju Tengah pada tahun 2024 telah mencapai 12,68 tahun yang berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,68 tahun atau setara dengan Diploma I. Selama periode 2019 hingga 2024 HLS di Mamuju Tengah meningkat sebesar 0,74 tahun. Selama periode 2019-2023, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,57 persen atau naik secara rata-rata sebesar 0,19 tahun setiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang telah semakin membaik.

Sementara itu, untuk Rata-rata Lama Sekolah Mamuju Tengah pada tahun 2024 telah mencapai 7,94 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk Mamuju Tengah yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 7,73 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Selama periode 2019-2024 , RLS di Mamuju Tengah telah meningkat sebesar 0,49 tahun. Secara umum Rata-rata Lama Sekolah tumbuh sebesar 1,35 persen atau naik secara rata-rata sebesar 0,10 tahun selama lima tahun. Grafik perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata- rata lama sekolah di Mamuju tengah dapat dilihat sebagaimana berikut:

Gambar 2. 19 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



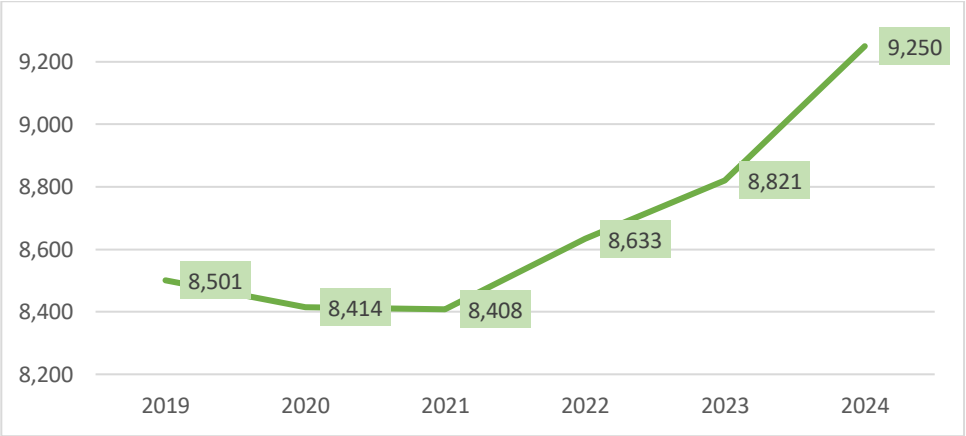
Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data Diolah)

3. Pengeluaran Perkapita

Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Dalam paradigma pembangunan, pendapatan adalah alat untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup yang layak.

Pada tahun 2024 Pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah sebesar Rp 9.250 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah meningkat sekitar 429 ribu rupiah. Walaupun demikian pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Mamuju Tengah sudah meningkat sebesar 1.040 juta rupiah dari tahun 2014-2019 sebelum pandemic Covid-19 dan mengalami penurunan setelah pandemic Covid-19 di tahun 2020 dan 2021. Pengeluaran per kapita rata-rata tumbuh sebesar 1,38 persen dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk secara rata-rata meningkat sebagai dampak dari semakin membaiknya ekonomi. Perkembangan Pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2. 20 Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data Diolah)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

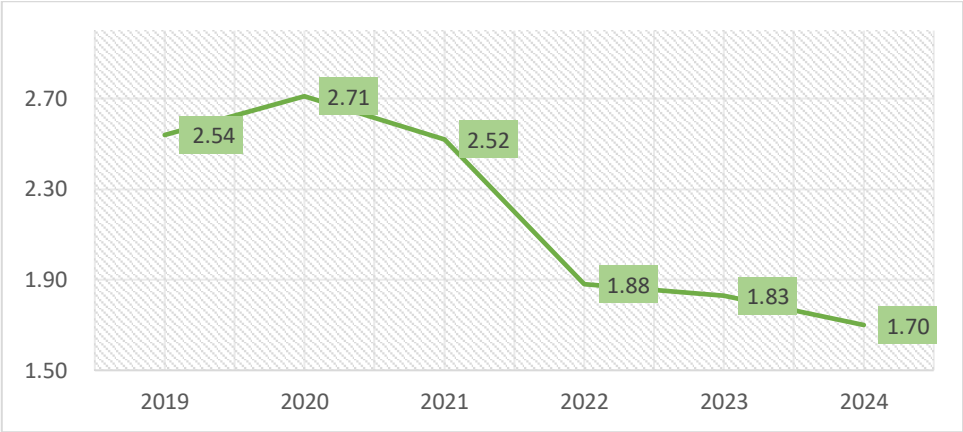
Tenaga Kerja adalah sebuah modal bagi pembangunan suatu bangsa. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 sebanyak 71.729 dari total Angkatan kerja tersebut 98,30 persen bekerja dan sebaliknya sebanyak 1.219 atau sekitar 1,69 persen adalah pengangguran terbuka. Data ketenagakerjaan Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 13 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kegiatan			Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
1. SD	31.604	351	31.955	98,90
2. SMP	9.694	0	9.694	100
3. SMA	21.028	276	21.304	98,70
4. Perguruan Tinggi	8.184	592	8.776	93,25
Jumlah/Total	**70.510**	**1.219**	**71.729**	**98,30**

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025 (Data Diolah)

Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah mampu menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 1,70 persen atau sebesar 0,13 poin dari tahun sebelumnya. Menurut status pekerjaan ada tiga kegiatan utama yang mendominasi pekerjaan di Mamuju Tengah yaitu kategori Berusaha sendiri sebanyak 14.209 orang, Berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 18.688 orang dan kategori Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 13.711 orang.

Jika melihat dari kualifikasi pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rendah karena 87,76 persen masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah di mana sebanyak 44,55 persen adalah lulusan SD, 13,51 persen adalah lulusan SMP, dan 29,70 persen adalah lulusan SMA sedangkan perguruan tinggi hanya sebanyak 12,23 persen.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 4 (empat) kategori urusan yang diselenggarakan di Pemerintah Daerah yaitu, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pemerintahan. Berikut ini gambaran pelayanan umum di Kabupaten Mamuju Tengah.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Untuk dapat mengetahui keberhasilan pendidikan di suatu wilayah dapat dilihat dari ketercapaian beberapa indikator pendidikan seperti Angka melek huruf, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM) dan lain sebagainya, adanya ketersediaan tenaga pendidik yang bersertifikat dan distribusi secara merata, serta ketersediaan jaminan infrastruktur pendidikan yang layak dan memadai.

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2. 14 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 -2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf	**93,13**	**93,42**	**94,93**	**96,39**	**97,71**

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Perkembangan capaian angka melek huruf di Kabupaten Mamuju Tengah memperlihatkan progres yang baik dengan adanya peningkatan capaian setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) laju pertumbuhan angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Mamuju Tengah meningkat sebesar 1,37 persen dari tahun 2023 sebesar 96,39 persen sampai dengan akhir tahun 2024 yang telah mencapai angka 97,71 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa sekitar 97 persen dari 100 penduduk dewasa di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Pemerintah daerah perlu mendukung pengembangan literasi di daerah yang dapat ditempuh melalui gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, dan gerakan literasi keluarga melalui pendidikan formal dan non formal. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan angka melek huruf untuk mewujudkan program pemberantasan buta aksara di Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100%. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK dapat lebih dari 100% hal ini disebabkan terdapat siswa di luar usia kelompok usia sekolah, wilayah kota atau perbatasan.

Tabel 2. 15 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	110,38	109,83	108,69	109,52	107,52	107,28
SMP/MTs/Sederajat	83,65	85,12	84,22	91,26	78,13	84,06

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2024

Dalam lima tahun terakhir angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI/sederajat menujukan rata-rata capaian di atas 100 persen sedangkan rata-rata capaian APK untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 80 persen. Pada akhir tahun

2024 APK untuk jenjang SD/MI/sederajat di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 107,528 persen sedangkan untuk tingkat jenjang SMP/MTs/sederajat sebesar 84,06 persen.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi APM maka menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tertentu.

Tabel 2. 16 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	97,04	97,74	98,53	93,73	96,48	96,76
SMP/MTs/Sederajat	69,98	70,93	67,22	72,33	73,33	73,47

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 capaian angka partisipasi murni untuk tingkat SD/MI/sederajat bertambah 0,28 persen atau meningkat menjadi 96,76 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu angka partisipasi murni untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat juga mengalami peningkatan dari 73,33 persen menjadi 73,47 persen atau bertambah 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Angka Putus Sekolah (Apts)

Angka Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Rumus AptS adalah jumlah siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%.

Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 17 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	52	59	47	59	171	41
SMP/MTs/Sederajat	38	23	22	6	144	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Salah satu masalah krusial bagi pembangunan manusia adalah meningkatnya angka putus sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam lima tahun terakhir angka putus

sekolah meningkat secara signifikan terutama pada tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel diatas untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat jumlah anak putus sekolah sebanyak 171 orang meningkat 189,53 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederjat jumlah anak putus sekolah yang dicatatkan sebanyak 144 orang. Angka ini meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya berjumlah 6 orang.

Pada tahun 2024 angka putus sekolah mengalami penurunan secara signifikan. Dapat dilihat pada table diatas untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat menurun menjadi 41 orang.

5. Angka Kelulusan (AK)

Angka Lulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus pada jenjang tertentu dengan jumlah peserta ujian pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik. Idealnya Angka Kelulusan adalah sama dengan 100%, yang berarti semua siswa peserta ujian lulus seluruhnya. Angka Kelulusan digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2. 18 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	98	100	100	99,5	100	100
SMP/MTs/Sederajat	97,64	99,76	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, 2024

6. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi AM angkanya makin baik. Idealnya AM adalah sama dengan 100% yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100% hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lain. AM digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi

Tabel 2. 19 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	100	100	100	97,5	98,7	98,89
SMP/MTs/Sederajat	84	85	94	96,5	97,4	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, 2025

7. Jumlah Murid, Guru dan Sekolah

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik yang merata diseluruh wilayah.

Tabel 2. 20 Jumlah Murid, Guru, Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Siswa						
TK	-	-	2.673	2.477	2.507	2.627
RA	-	-	335	520	541	-
SD	14.325	14.242	13.960	13.737	13.931	14.643
MI	-	-	1.295	1.510	1.503	-
SMP	5.265	5.049	4.803	4.363	4.389	4.159
MTs			1.531	1.847	1.719	-
Jumlah Guru						
TK	-	-	236	244	238	245
RA	-	-	24	36	47	-
SD	955	1.112	1.142	1.106	1.166	2.960
MI	-	-	108	106	121	-
SMP	494	588	619	590	569	390
MTs	-	-	209	174	200	-
Jumlah Sekolah						
TK	-	-	69	71	72	72
RA	-	-	7	9	10	-
SD	116	116	116	116	116	116
MI	-	-	11	11	11	-
SMP	36	36	37	37	37	37
MTs	-	-	20	20	23	-

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

B. Kesehatan

1. Angka Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Seorang anak dikatakan menderita stunting apabila panjang badan saat lahir dibawah empat puluh delapan sentimeter untuk bayi laki-laki dan kurang dari empat puluh tujuh sentimeter untuk bayi perempuan.

Tabel 2. 21 Angka Stunting di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berdasarkan Data SSGI	32,1	-	26,3	28,1	28,6	
Berdasarkan Data E-PPGBM	7,04	8,13	14,46	14,58	14,92	16,73

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Menurut Data Study Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Mamuju Tengah pada Maret 2023 meningkat menjadi 28,6 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,91 persen dari tahun 2021. Sementara itu jika melihat data dari E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) juga mencatatkan penderita stunting di Mamuju Tengah pada Januari 2024 meningkat menjadi 16,73 persen. Angka ini meningkat 12,13 persen atau meningkat 1,81 poin dari tahun sebelumnya. Jika membandingkan capaian stunting Kabupaten se-Sulbar angka stunting di Kabupaten Mamuju Tengah cukup rendah karena berada di urutan terbawah Namun upaya penurunan angka stunting di Mamuju Tengah harus terus dilakukan dan diharapkan dapat terus menurun setiap tahunnya.

2. Angka Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangn gizi menahun. Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG). Setiap tahunnya dilakukan Kegiatan Pemantauan Status Gizi dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita.

Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, thypus, dan lain-ain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program-program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Tabel 2. 22 Angka Gizi Buruk di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Gizi Buruk	80	88	55	67	51	73

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

3. Angka Kematian Neonatal, Bayi Dan Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-12 bulan (termaksud neonatal) disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Penyebab terbesar kematian bayi karena BBLR, asfiksia dan penyebab lain (ispa, diare, dll).

Pada tahun 2024 angka kematian neonatal yang dilaporkan sebanyak 24 orang, Bayi sebanyak 4 orang, dan balita sebanyak 2 orang. Angka kematian neonatal mengalami kenaikan 14,28 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka kematian neonatal diantaranya berat badan lahir rendah, asfiksia, usia kehamilan kurang bulan dan lainnya.

Tabel 2. 23 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neonatal	22	31	40	45	21	24
Bayi	7	5	6	4	13	4
Balita	0	5	1	5	7	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

4. Angka Kematian Ibu per 1000 KH

Angka kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termaksud kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam massa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah sejak lima tahun terakhir angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 9 orang sedangkan pada tahun 2024 jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang. Rincian kematian ibu diantaranya disebabkan karena pendarahan, hipertensi, asma dan faktor lainnya. Angka kematian ibu di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 24 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu	4	9	3	7	5	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta tersedianya tenaga kesehatan yang tersebar merata di seluruh wilayah. Data dari Dinas Kesehatan menunjukan bahwa pada akhir tahun 2024 Fasilitas Kesehatan mencakup rumah sakit umum daerah sebanyak 1 unit, klinik sebanyak 4 unit, puskesmas sebanyak 11 unit, posyandu sebanyak 195 unit, dan pustu sebanyak 46 unit.

Tabel 2. 25 Ketersediaan Sarpras di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 204

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
Puskesmas	11	11	11	11	11	11
Klinik	1	1	4	4	4	4
Posyandu	181	177	190	192	192	195
Pustu	42	45	25	45	45	46

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

6. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Salah satu yang masih menjadi masalah utama di Mamuju Tengah adalah keterbatasan kuantitas SDM tenaga kesehatan. Pada tahun 2024 tenaga kesehatan yang tersedia mencakup Dokter Umum 30 orang, Dokter Spesialis 11 orang, Perawat 385 orang, Bidan 461 orang, Farmasi 50 orang dan Ahli Gizi 44 orang. Ketersediaan tenaga medis ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 26 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter Spesialis	0	0	0	6	6	11
Dokter Umum	24	25	24	27	25	30
Dokter Gigi	16	16	16	16	14	17
Perawat	208	129	316	317	348	385
Bidan	199	184	453	504	430	461
Farmasi	27	22	48	60	43	50
Ahli Gizi	23	19	28	37	41	44
Total	497	395	885	967	907	998

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

7. Penemuan Kasus Penyakit

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah secara umum ada empat jenis penyakit yang dengan kasus tertinggi diantaranya Tuberkulosis, Demam Berdarah Dengeu, Hipertensi, dan Diabetes Melitus. Dimana pada tahun 2024 Angka tertinggi dicatatatkan pada jenis penyakit Hipertensi dengan jumlah kasus sebanyak 6.889, kemudian ikuti dengan Diabetes Melitus sebanyak 1.716, Turbekulosis sebanyak 383 kasus, dan Demam Berdarah Dengeu sebanyak 77 kasus. 3 Penyakit lainnya seperti kusta sebanyak 9 kasus, Malaria sebanyak 8 kasus dan HIV/AIDS sebanyak 11 kasus.

Tabel 2. 27 Penemuan Kasus Penyakit di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tuberkulosis	164	276	224	216	296	383
HIV/AIDS	0	4	7	8	9	11
Kusta	14	10	7	15	7	9

Malaria	-	-	4	3	3	8
Demam Berdarah Dengeu	33	23	64	61	199	77
Hipertensi	18.489	20.472	7430	7893	7231	6889
Diabetes Melitus	2.198	1.947	1158	840	1056	1716

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

8. Jumlah Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapatkan Tablet Zat Besi

Dalam program kesehatan ibu dan anak, kunjungan antenatal ini diberi kode angka K (K1,K2,K3,K4) yang merupakan singkatan dari kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan 1-12 minggu, kunjungan kedua dilakukan 12-28 minggu, kunjungan ketiga dilakukan 28-36 minggu, dan kunjungan keempat adalah kontak ibu hamil yang keempat atau lebih dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Distribusi kontak K4 adalah minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga.

Data menunjukkan bahwa cakupan indikator ini dari tahun ke tahun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan faktor ekonomi yang lemah. pengetahuan yang terbatas akan pentingnya mendapatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang lengkap hingga usia kehamilan 32 minggu serta keterbatasan akses untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang ada.

Tabel 2. 28 Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, K4, Kurang Energi Kronis, Serta Mendapatkan Tablet Besi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ibu Hamil	3.087	3.166	3.234	3.274	3.324	3.525
Melakukan Kunjungan K1	2.972	3.125	3.092	2.993	2.744	2.386
Melakukan Kunjungan K4	2.362	2.558	2.132	2.250	2.475	2.213
Kurang Energi Kronis	426	505	541	554	536	406
Mendapatkan Zat Besi	2.972	3.125	3.092	2.993	2.744	2.292

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 Jumlah Ibu hamil meningkat 6,04 persen atau sebesar 3.525 ibu hamil. Jumlah yang melakukan kunjungan K1 sebanyak 2.386 dengan persentase 67,69 persen dari jumlah ibu hamil. Sementara itu jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 sisa 2.213 dengan persentase 62,78 persen. Angka ini berkurang 4,91 persen jika dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K1.

***9.* Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Universal Child Immunizatitioni adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0,11 bulan), ibu hamil, WUS, dan anak sekolah tingkat dasar. Imuniasasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 Dosis BCG, 3 Dosis DPT, 4 Dosis Polia, 4

Dosis Hepatitis B, 1 Dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 Dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 Dosis DT, 1 Dosis Campak dan 2 Dosis IT.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan bahwa cakupan desa yang telah melaksanakan UCI berfluktuatif setiap tahunnya. Di tahun 2018 persentase Desa UCI telah mencapai 100 persen atau menunjukan bahwa 100 persen dari jumlah bayi yang ada di 56 desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Namun demikian di akhir tahun 2021 capaian Desa UCI menurun menjadi 80,36 persen. Hal ini disebabkan karena pengaruh pandemic Covid-19 yang membuat masyarakat enggan untuk membawa anaknya ke pusat kesehatan. Akan tetapi pada tahun 2022 persentase desa UCI sudah kembali meningkat menjadi 89,29 persen. Namun Pada tahun 2024 capaian desa UCI kembali mengalami penurunan menjadi 81,6 persen.

Tabel 2. 29 Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa UCI	46	49	45	50	50	46
Jumlah Desa	56	56	56	56	56	54
Persentase	82,14	87,50	80,36	89,28	89,28	81,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2024

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi Kemantapan Jalan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, status jalan dibagi ke dalam lima jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

Jalan Kabupaten didefenisikan sebagai jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antardesa. Jalan Kabupaten juga bisa berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten, lalu penghubung antar-pusat kegiatan lokal. Kode jalan ini ditandai dengan K4. Pengelolaan dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun biasanya jalan kabupaten memiliki ukuran lebar yang lebih kecil dari jalan provinsi.

Untuk menghitung persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap, maka dapat dilakukan dengan menjumlahkan Panjang jalan dalam kondisi baik ditambah Panjang jalan dalam kondisi sedang dibagi total Panjang jalan kabupaten dikali seratus persen.

Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 30 Kondisi Panjang Jalan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baik (Km)	78,90	98,18	61,12	76,843	87,99	84,554
Sedang (Km)	77,78	112,62	53,55	169,833	78,75	23,995
Rusak Ringan (Km)	191,23	222,54	349,72	199,438	248,89	4,323
Rusak Berat (Km)	117,98	32,54	1,40	19,765	26,56	329.308
Jumlah (Km)	465,879	465,879	465,879	465,879	442,18	442,18
Kondisi Mantap Jalan (%)	33,63	45,25	56,28	52,95	37,66	24,55

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten Mamuju Tengah dari masih sama dengan panjang jalan pada tahun 2023 yakni 442,18 km. Jika melihat dari kondisi panjang jalan dalam keadaan mantap mengalami penurunan menjadi 24,55 persen. Hal ini diakibatkan pada meningkatnya kondisi jalan rusak berat sebesar 329,308 Km.

Pada umumnya kerusakan jalan disebabkan karena penggunaan jalan yang melebihi muatan, tingginya intensitas hujan, serta belum baiknya sistem drainase di bahu jalan yang menimbulkan genangan air sehingga menyebabkan kerusakan jalan.

2. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan

Survey kondisi permukaan jalan baru dilakukan mulai pada tahun 2021. Secara umum jika melihat data sejak tiga tahun terakhir kondisi permukaan jalan di Kabupaten Mamuju Tengah menujukan adanya perbaikan pada infrastruktur jalan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 dari total panjang jalan 442,18 km dengan kondisi aspal sebesar 79,077 Km, Beton sebesar 53,57 Km, Kerikil sebesar 294,751 Km, dan Kerikil sebesar 14,782 Km

Tabel 2. 31 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal (Km)	-	-	61,205	62,735	66,183	79,077
Beton (Km)	-	-	53,55	55,102	68,117	53,57
Kerikil (Km)	-	-	349,724	342,119	298,120	294,751
Tanah (Km)	-	-	1,4	6,013	9,760	14,782

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

3. Kondisi Jembatan

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyebrangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyebrangan pejalanan kaki, kendaraan atau kereta api diatas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (traffic flows). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas

jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik dalam hal ini adalah jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten dengan struktur atas dan sturuktur bawahnya dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Untuk memperoleh persentase jembatan kabupaten kondisi baik dapat digunakan rumus yaitu jumlah jembatan dalam kondisi baik dibaik jumlah total jembatan yang ada di kabupaten dikalikan 100 persen.

Tabel 2. 32 Kondisi Jembatan (Unit) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	80	80	2	2	3	3
Sedang	2	2	91	91	84	81
Rusak Ringan	21	21	52	52	76	73
Rusak Berat	66	66	2	2	1	7
Jumlah	169	169	147	147	164	164

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Untuk tahun 2019-2020 Dinas PUPR masih menggunakan metode DD2 dari tahun 2018 yakni pengukuran masih di bawah 6 meter sedangkan untuk tahun 2021-2022 pengukuran sudah disesuaikan dengan bentang minimum jembatan yakni 6 meter. Survey Kondisi jembatan mulai dianjurkan bersamaan dengan Survey Kondisi Jalan, yang juga bertepatan dengan update SK Jalan Kabupaten sehingga pada tahun 2024 menghasilkan 164 jembatan yang ada di Kab. Mamuju Tengah. Jika melihat data survey dari Dinas PUPR kondisi jembatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 3 unit dalam kondisi baik, 154 dalam kondisi rusak sampai rusak ringan, dan 7 unit dalam kondisi rusak berat.

4. Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasnya dalam satu wilayah kabupaten. Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-

sadap, dan banguna sadap, dan bangunan pelengkapannya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Tabel 2. 33 Kondisi Irigasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Irigasi Primer (m)	22.708	22.708	22.708	22.708	22.708	22.708
a. Kondisi Baik	18.817,14	19.147,54	19.807.8	19.807,8	19.807,8	19.807,8
b. Kondisi Sedang	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3
c. Kondisi Rusak Ringan	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3
d. Kondisi Rusak Berat	7.592,99	7.262,86	6.602,6	6.602,6	6.602,6	6.602,6
2. Irigasi Sekunder (m)	22.708	22.708	22.708	22.708	22.708	22.708
a. Kondisi Baik	1.021,86	10.899,84	11.354	11.345	11.345	11.345
b. Kondisi Sedang	2.270,8	2.270,8	2.270,8	2.270,8	2.270,8	2.270,8
c. Kondisi Rusak Ringan	2.724,96	2.724,96	2.724,96	2.724,96	2.724,96	2.724,96
d. Kondisi Rusak Berat	7.947,8	6.812,4	6.358,24	6.358,24	6.358,24	6.358,24
3. Irigasi Tersier (m)	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518
a. Kondisi Baik	1.183,46	1.208,64	1.259	1.259	1.259	1.259
b. Kondisi Sedang	377,7	377,7	377,7	377,7	377,7	377,7
c. Kondisi Rusak Ringan	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9
d. Kondisi Rusak Berat	830,94	805,76	755,4	755,4	755,4	755,4
Jumlah Bangunan Irigasi Luas Daerah	36	36	36	36	36	36
Irigasi Sesuai PERMEN (ha) Luas Daerah	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032
Irigasi Sesuai Sawah/Fungsional	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Untuk tahun 2024 belum ada data terbaru terkait panjang dan kondisi irigasi masih dikarenakan tidak ada kegiatan E-PAKSI untuk diakomodir dalam kegiatan DAK (seperti halnya Survey Kondisi Jalan/SKJ, terlebih dahulu harus dilakukan survey E-PAKSI baru diperoleh data survey terkait keseluruhan irigasi)

5. Rumah Tangga Bersanitasi

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah

tangga lain tertentu dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga di kali 100 persen.

Tabel 2. 34 Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RT Bersanitasi	16.690	22.283	23.729	24.603	24.726	22.265
Jumlah Rumah Tangga	28.623	28.623	28.623	28.834	28.834	28.834
Persentase	58,31	77,85	82,90	85,33	86,39	77,22

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Capaian Rumah Tangga bersanitasi layak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 rumah tangga yang bersanitasi layak meningkat sebesar 48,15 persen. Namun di tahun 2024 rumah tangga yang bersanitasi mengalami penurunan sebesar -10,61 atau menjadi 77,22 persen. Diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya dapat meningkat kembali. Sebagaimana diketahui bahwa sanitasi termaksud kedalam urusan pelayanan minimal sehingga wajib untuk dipenuhi. Pengelolaan sanitasi sangat berdampak pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jika kondisi sanitasi masyarakat buruk maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan sehingga akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan produktivitas masyarakat sekitar.

6. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termaksud air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air yang tidak terlindungi. Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas di bagi total penduduk.

Tabel 2. 35 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RT Pengguna Air Bersih	18.651	20.343	24.285	25.713	27.176	24.129
Jumlah Rumah Tangga	28.623	28.623	28.623	28.834	28.834	28.834
Persentase	65	71	85	89	94	84

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari menunjukan progres yang baik setiap tahunnya. Dimana dalam lima tahun terakhir persentase pengguna air bersih terus meningkat. Jika membandingkan data antara tahun 2019 dimana capaian Rumah Tangga yang menggunakan AIir bersih masih 65 persen kemudian pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 94 persen. Namun pada tahun 2024 rumah tangga pengguna air bersih mengalami penurunan dari 27.176 menjadi 24.129 atau turun menjadi 84 persen.

D. Perumahan dan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat, pihak swasta dan stakeholder terkait lainnya. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Ada lima kriteria rumah layak huni yaitu Ketahanan dan Keselamatan Bangunan; Kecukupan Luas Ruang Penghuni; Akses Sanitasi Layak, Air Minum Layak dan Adanya Luas Pencahayan dan Pengawasan.

Tabel 2. 36 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Layak Huni (Unit)	22.538	16.333	31.449	31.861	32.087	30.810
Penduduk (Jiwa)	134.028	135.280	137.380	140.028	142.455	143.274
Rasio	16,82	12,07	22,89	22,75	22,52	21,50

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas, capaian infrastruktur rumah layak huni sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,72 persen. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -3,98 Persen menjadi 30.810 rumah layak huni. Dengan kata lain sekitar 21,50 persen penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki rumah layak huni. Penurunan ini terjadi karena adanya pemutakhiran data jumlah rumah layak huni sementara di sisi lain terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan cakupan minimun luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria rumah layak huni meliputi: memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, pengawasan dan sanitasi, serta memenuhi kecukupan luas bangunan minimum 9 $m^{2.}$

Tabel 2. 37 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Layak Huni (Unit)	22538	16.333	31.449	31.861	32.087	30.810
Jumlah Rumah	27.217	39.413	39.413	39.353	39.353	38.657
Persentase	81,31	41,44	79,79	80,96	81,54	79,70

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

Cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukan progres yang baik setiap tahunnya dengan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 81,54 persen meningkat 0,58 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -2,25 persen atau menjadi 79,70. Hal ini diakibatkan oleh adanya pemutakhiran data. Cakupan rumah layak huni menjadi tantangan bagi pemerintah daerah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga setiap tahunnya. Selain itu ketersediaan lahan, dan penataan ruang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pengawasan terhadap pembangunan yang harus sejalan dengan pelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Definisi kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat: Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Di kabupaten Mamuju Tengah di identifikasi Kawasan kumuh yang ada dan untuk lebih mengintensipkan dan memfokuskan penanganan telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh. Sampai pada tahun 2020 persentase lingkungan permukiman kumuh konstan di capaian 1,09 persen sejak enam tahun terakhir.

Tabel 2. 38 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Permukiman Kumuh (Ha)	142,66	142,66	142,66	142,66	142,66	142,66
Luas Wilayah (Ha)	13.056,01	13.056,01	13.056,01	13.056,01	13.056,01	13.056,01
Persentase	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

4. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah Tangga Kumuh Perkotaan adalah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi

atap, lantai, dan dinding yang layak atau tinggal pada kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Capaian rumah tangga kumuh perkotaan terhadap jumlah rumah menunjukan progres yang baik dengan adanya penurunan setiap tahunnya. Di akhir tahun 2023 persentase jumlah rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 16,17 persen atau turun 0,18 persen dari tahun sebelumnya. Begitupun pada Tahun 2024 persentase rumah tangga kumuh perkotaan mengalami penurunan menjadi 16 persen.

Tabel 2. 39 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT Kumuh Perkotaan (Ha)	455	420	360	356	353	351
Jumlah Rumah (Unit)	2.160	2.170	2.175	2.178	2.183	2.185
Persentase	21,06	19,35	16,55	16,35	16,17	16

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

5. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

Pelaksanaan SPM di Bidang Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan produk hukum turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, SPM menjadi kewajiban Bidang Perumahan adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Korban Bencana. Program Kerja yang telah dilaksanakan secara nyata oleh Bidang Perumahan adalah Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, *Housing Stock*, Penyediaan Rumah Layak Huni.

Tabel 2. 40 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Warga yang Memperoleh Rumah Layak Huni	2	13	15	20	24	2
Jumlah Korban Bencana	30	37	38	39	39	6
Persentase	7	35	39	51	62	33

Sumber: Dinas Perkimtan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Capaian penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni bagi korban bencana terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai pada tahun 2023 capaian pemberian bantuan bagi korban bencana mencapai 62 persen. Dan pada tahun 2024 persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 33 persen. Dimana dapat diartikan bahwa dari 6 korban bencana sebanyak 2 korban bencana yang sudah mendapatkan bantuan rumah layak huni.

6. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Relokasi Program Pemerintah

Pelaksanaan SPM di Bidang Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan produk hukum turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, SPM menjadi kewajiban Bidang Perumahan adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Korban Relokasi Program Pemerintah.

Fasilitas dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mencakup anatara lain pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis (termaksud pendampingan penggantian kerugian, penyusunan rencana tapak dan/atau DED Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus, Pembangunan Rumah Susun Umum, Pembangunan Rumah Khusus dan pengadaan tanah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 2. 41 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Relokasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Warga yang Memperoleh Rumah Layak Huni	2	2	21	23	29	6
Jumlah Korban Relokasi	16	16	25	27	33	6
Persentase	12,50	75	84	85,19	87,88	100

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

Jumlah korban relokasi program pemerintah bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2023 jumlah korban relokasi yang tercatatkan sebesar 33 unit rumah. Angka ini bertambah 17 unit dari sejak tahun 2019. Penggantian kerugian di lakukan secara bertahap dan pada tahun 2023 dari total korban relokasi sebesar 87,88 persen. Dan pada tahun 2024 dari total korban relokasi sebesar 100 persen telah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa penyediaan ataupun rehabilitasi rumah layak huni.

E. Ketertiban dan Ketentraman Umum

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan

polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 42 Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Di Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggaran yang Dilaporkan	5	0	1	3	1	2
Jumlah Pelanggaran yang Ditangani	5	0	1	3	1	2
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa cakupan penegakan perda di Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahunnya telah mencapai angka 100 persen, yang artinya semua pelanggaran yang dilaporkan sudah ditangani sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Ketersediaan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat derah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Tabel 2. 43 Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anggota Satpol-PP	167	279	182	182	182	182

Jumlah Penduduk	134.030	135.280	137.280	140.030	142.455	143.274
Rasio	124	206	132	129	128	127

Sumber: Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju Tengah, 2025

Semakin tinggi jumlah anggota Satpol-PP maka Rasio Petugas Satpol PP juga semakin rendah. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan Satpol-PP semakin terpenuhi. Pada tabel diatas menunjukan rasio Satpol-PP yang cenderung menurun sejak empat tahun terakhir. Pada tahun 2024 rasio petugas Satpol-PP sebesar 127 yang artinya setiap 1 petugas Satpol-PP berbanding dengan 127 penduduk. Menurunnya rasio Satpol-PP disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk sedangkan jumlah anggota Satpol-PP berada pada kondisi stagnan tidak mengalami penambahan personil sejak tiga tahun terakhir.

3. Penanganan Bencana Kebakaran

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri, bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada Kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Tabel 2. 44 Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani dalam 15 Menit	24	28	10	19	16	11
Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK	24	28	14	22	28	11
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran	100	100	71,43	86,36	57	100

Sumber: Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dalam lima tahun terakhir cakupan penanganan bencana kebakaran menunjukan capaian yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 capaian penanganan korban kebakaran sebesar 100 persen yang artinya dari 11 kasus kebakaran dapat

tertangani semua dalam 15 menit. Cakupan ini dipengaruhi oleh ketersediaan sapras, keterjangkauan lokasi kejadian, dan sumber daya penanganan kebakaran daerah.

4. Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Umum

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: a) Tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan; b) Antar batas wilayah; dan c) Tempat keramaian/hiburan. Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Tabel 2. 45 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketenteraman Umum di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banyaknya Patroli (1 Tahun)	10	10	10	10	10	10
Jumlah Kecamatan	5	5	5	5	5	5

Sumber: Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju Tengah, 2025

5. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah suatu perangkat analisis yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak bencana suatu daerah. Indeks ini membagi risiko bencana menjadi tiga ukuran yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Berdasarkan pengukuran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan adanya penurunan, pada tahun 2021 sebesar 161,71 dan tahun 2024 sebesar 154,11. Secara umum berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah masuk kedalam kategori tinggi (rawan bencana). Kalsifikasi Bencana yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah meliputi banjir, cuaca ekstrim, gemoa bumi, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor.

Tabel 2. 46 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	-	-	161,71	161,71	159,33	154,11

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

F. Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan PMKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya

rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PMKS di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial.

Tabel 2. 47 Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar Panti Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Disabilitasi Terlantar	140	36	23	180	163	52
Anak Terlantar	14	31	45	101	163	47
Lanjut Usia Terlantar	115	15	45	144	39	44
Tuna Sosial Diluar Panti	17	2	12	0	1	2
Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial yang Tertangani	208	84	125	425	366	145

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data yang didapatkan dari Dinas Sosial Mamuju Tengah menunjukan bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah PMKS di luar panti sosial yang direhabilitasi menjadi 145 orang dengan rincian: Disabilitasi terlantar sebanyak 52 orang, Anak Terlantar sebanyak 47 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 44 orang, dan Tuna Sosial diluar Panti sebanyak 2 orang.

2. Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial

Korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial.

Data dari Dinas Sosial menunjukan bahwa angka tertinggi jumlah korban bencana terdapat di tahun 2018 sebanyak 1.752 korban bencana dan di akhir tahun 2024 jumlah korban bencana yang tercatat sebanyak 1.291 korban bencana. Selama lima tahun terakhir persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial telah mencapai 100 persen. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial harus berbanding lurus dengan jumlah korban yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Tabel 2. 48 Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Perlindungan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Korban Bencana Mendapatkan Layanan	527	129	948	894	495	1291
Jumlah Korban Bencana	527	129	948	894	495	1291
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, 2025

3. Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Pekerja Sosial, PSM, Tagana, Penyuluh Sosial, TKSK yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 2. 49 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja Sosial	1	1	1	1	1	1
PSM	35	35	35	35	35	35
Tagana	34	34	34	34	35	35
Penyuluh	0	0	0	0	1	1
TKSK	5	5	5	5	5	5
Cakupan Pemberdayaan Sosial	75	75	75	75	77	77

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, 2025

4. PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga atau keluarga/keluarga binaan sosial yang terdiri dari keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Pada tahun 2024 jumlah PMKS yang menerima bantuan sebesar 100 persen artinya dari keseluruhan PMKS yang terdaftar telah menerima bantuan.

Tabel 2. 50 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan KK	2.994	3.072	4.579	5.871	3.743	5.202

Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	2.994	3.072	4.579	5.871	3.743	5.202
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, 2025

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka, Partisipasi Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah sebuah modal bagi pembangunan suatu bangsa. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2024 terdapat 71.729 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Sebanyak 70.510 orang atau 98,30% diantaranya bekerja dan sisanya 1.219 orang atau sekitar 1,69 persen adalah pengangguran terbuka. Angka ini berhasil turun walaupun tidak terlalu signifikan sebesar 8 poin dari tahun sebelumnya. Data jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja selama lima tahun di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 51 Tingkat Pengangguran Terbuka, Partisipasi Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TPT	2,67	2,71	2,52	1,88	1,83	1,70
TPAK	69,59	70,04	70,84	63,15	66,01	69,06
AK	64.255	67.414	68.082	63.749	67.231	71.729

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Status Pekerjaan Angkatan Kerja

Status pekerjaan dibedakan menjadi enam jenis yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada tahun 2024 dari keenam status pekerjaan tersebut jumlah status pekerjaan terbanyak ada pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 18.688 orang sedangkan status pekerjaan terkecil ada pada status berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 747 orang. Data status pekerjaan angkatan kerja di Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52 Status Pekerjaan Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Sendiri	10.880	11.324	12.462	15.422	13.814	14.209

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	17.499	14.811	15.835	14.139	14.999	18.688
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	1.222	2.284	1.165	67	908	747
Buruh/Karyawan /Pegawai	12.885	17.737	18.645	14.062	14.900	13.711
Pekerja Bebas	4.004	3.483	5.875	8.196	8.790	11.336
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	12.075	13.700	14.100	10.840	12.593	11.819
Jumlah	62.541	63.339	68.082	62.548	66.004	70.510

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Mamuju Tengah, 2025

3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan di Tempatkan

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja tahun 2019-2024 menunjukan besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022 persentase pekerja yang ditempatkan sudah mulai menunjukan angka yang baik dengan capaian 39 persen. Namun pada tahun 2023 angka ini kembali menurun sebesar 1 persen. Dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,73 .Diakibatkan karena meningkatnya jumlah pencari kerja tapi yang berhasil mendapatkan pekerjaan hanya sebesar 36,27 persen dari total pendaftar kerja.

Tabel 2. 53 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pencari Kerja yang Ditempatkan	12	34	9	280	468	247
Pencari Kerja yang Terdaftar	109	85	251	712	1.250	681
Persentase	11%	40%	3,58%	39%	37%	36,27%

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Mamuju Tengah, 2025

4. Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sementara itu jenis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi empat macam yakni Pekerja Penerima Upah (PU), Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tabel 2. 54 Data Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Pekerja/Buruh Jamsostek	N/A	N/A	779	780	1.806	13.860
Total Pekerja/Buruh	N/A	N/A	11,035	11,335	11,335	62.548
Persentase	N/A	N/A	17%	19%	21%	

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data yang tercatatkan selama tiga tahun terakhir jumlah kepemilikan BPJS ketenagakerjaan meningkat dengan rata-rata peningkatan 1,6 persen. Pada tahun 2023 capaian sebesar 21 persen meningkat 3 persen dari tahun sebelumnya dan diharapkan akan terus meningkat mencapai 100 persen.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi Angkatan kerja perempuan. Defenisi dari partisipasi Angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada Angkatan kerja pada satu periode tertentu. Persentase partispasi angkatan kerja perempuan dihitung dari jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah perempuan pada angkatan kerja di kali 100 persen.

Tabel 2. 55 Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kerja Perempuan	20.557	21.932	21.660	17.521	17.728	23.866
Angkatan Kerja	64.255	67.414	68.082	63.749	62.370	71.729
Persentase	31,99	32,53	31,81	27,84	27,26	33,27

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dari data diatas menunjukan bahwa persentase partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Dan pada akhir tahun 2024 data angkatan kerja perempuan yang tercatatkan mengalami peningkatan sebanyak 23.866 orang dengan persentase sebesar 33,27 persen dari total angkatan kerja. Angka ini meningkat 6,01 persen dari tahun sebelumnya.

2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada Lembaga pemerintahan baik di yang bekerja di legislatif maupun yang bekerja di eksekutif. Data menunjukan bahwa pada tahun 2024 jumlah perempuan yang berpartisipasi di lembaga legislatif sebanyak 4 (empat) orang sedangkan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga eksekutif sebanyak 1.643 orang, angka ini mengalami peningkatan sebesar 13,39 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 56 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Bekerja di Legislatif	6	6	6	6	6	4
Bekerja di Eksekutif	971	960	956	1.132	1.449	1.643

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

3. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Tabel 2. 57 Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus KDRT	3	5	9	7	9	4
Kasus Kekerasan Anak	14	17	19	21	16	22

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data yang tercatatkan menunjukan pada tahun 2019-2024 terjadi fluktuatif pada kasus jumlah KDRT dan angka kekerasan anak. Kasus tertinggi pada kasus kekerasan anak terjadi pada tahun 2024 sebanyak 22 kasus sedangkan pada kasus KDRT tertinggi pada tahun 2021 dan 2023 tercatatkan sebanyak 9 kasus.

4. Persentase Kecamatan/Desa Layak Anak

Kecamatan dan desa/kelurahan layak anak dapat diartikan sebagai pembangunan di tingkatan kecamatan dan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak. Persentase Kecamatan dan desa/kelurahan layak anak dihitung dari jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang terbentuk Layak Anak dibanding jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan x 100%.

Tabel 2. 58 Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Desa Layak Anak	2	2	2	2	12	12
Jumlah Desa	54	54	54	54	54	54
Persentase	3,7	3,7	3,7	3,7	22,2	22,22

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa persentase Desa Layak Anak di Kabupaten Mamuju Tengah selama enam tahun terakhir telah mencapai 22,2 persen. Dimana artinya jumlah desa layak anak dari total 54 desa sudah berhasil dicapai oleh 12 desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah diantaranya: Desa Salugotta, Karossa, Suka Maju, Tabolang, Tobadak, Kire, Bambadaru, Palongaan, Tinali, Tangkao, Salupangkang, Waeputeh.

C. Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan modifikasi dari studi Indeks Lingkungan yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan sebagai indikator perhitungannya. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah yang akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian program-program pemerintah di bidang perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualifikasi dan rentang nilai IKLH menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: Unggul (x > 90), Sangat Baik (82 < s.d < 90); Baik (74 < s.d. <82); Cukup (66 < s.d. < 74); Kurang (58 < x < 66); Sangat Kurang (50 < x< 58); Wasapada (x < 50).

Tabel 2. 59 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	66,67	N/A	67,50	63,30	54,44	50,00
Indeks Kualitas Udara	99,48	N/A	89,13	91,73	92,08	92,29
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,08	N/A	81,05	81,05	78,56	78,27
IKLH	71,38	N/A	79,23	78,71	74,97	73,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah , 2025

Secara umum capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 sebesar 73,32 dengan kategori baik. Akan tetapi jika dilihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir komponen IKLH mengalami penurunan pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Data terakhir menunjukan Indeks Kualitas Air berada pada kategori sangat kurang dengan nilai sebesar 50,00 poin

menurun 4,44 persen sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 78,27 poin menurun 0,29 persen dari tahun sebelumnya.

Permasalahan ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah terutama pada indeks kualitas air, sebagaimana air merupakan sumber utama kehidupan. Jika kualitas sumber air tidak baik maka dapat mengganggu aktivitas kehidupan terutama pada menurunya angka kesehatan masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi dengan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan harus selaras. Adanya Peningkatan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan pembangunan lingkungan bukan malah sebaliknya. Pengawasan terhadap pengendalian lingkungan juga harus dilakukan, terutama pada pembukaan dan peralihan lahan untuk kawasan perkebunan dan permukiman, serta pengolahan hasil limbah perusahaan sawit yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga mencemari air.

2. Aduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkanya mahkluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan hidup turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Perusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, serta rusaknya ekosistem.

Tabel 2. 60 Aduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus yang dilaporkan	5	1	0	3	0	0
Kasus yang ditindaklanjuti	5	1	0	3	0	0
Persentase	100	100	0	100	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah , 2025

Secara umum tidak terdapat aduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan terkait pencemaran air sungai akibat pengolahan limbah perusahaan sawit serta pencemaran suara dari aktivitas bongkar muatan tandan sawit yang menganggu masyarakat setempat.

3. Timbulan Sampah yang Tertangani

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefenisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman,

perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta Kawasan umum lainnya.

Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Pengelolaan sampah harusnya dipisahkan menjadi 2 bagian yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk organik atau kompos, sedangkan sampah non organik dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah menarik seperti pengganti plastik. Sisa pemilahan dari sumber sampah dapat diangkut dan dikelola di TPA.

Tabel 2. 61 Timbulan Sampah yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sampah Terkelola TPA (Ton)	3.432	1.896	803	4.121,00	5.110,00	5.110,00
Total Timbulan Sampah (Ton)	18.962	18.962	22.864	20.057	20.444	20.444
Persentase	18,10	10	3,51	20,55	25	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah , 2025

Bertambahnya penduduk dan aktivitas perekonomian setiap tahunnya memberikan pengaruh yang besar dalam pertambahan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2024 total timbulan sampah sebesar 20.444 ton dengan jumlah sampah yang berhasil dikelola sebesar 25 persen. Angka ini masih sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana capaian pengelolaan sampah sebesar 25 persen.

4. Pelayanan Persampahan yang Ditangani Pemerintah Daerah

Persentase cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase daerah atau desa yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah dan Swasta terhhadap jumlah keseluruhan desa dan keluruhan. Tujuan disusunya persentase penanganan sampah adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi tingkat layanan persampahan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik tentang pencapaian target program pemerintah di bidang pengelolaan persampahan.

Rumus untuk menghitung capaian area layanan sampah adalah jumlah desa yang terlayani oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah Jumlah Desa sekabupaten di kali 100 persen.

Tabel 2. 62 Pelayanan Persampahan yang Ditangani Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Desa yang Terlayani PEMDA	2	2	2	2	2	2
Desa	54	54	54	54	54	54
Persentase	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah , 2025

Dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah menunjukan selama bahwa kurun waktu lima tahun terakhir persentase cakupan layanan persampahan hanya sekitar 3,70 persen yang artinya dari 54 desa hanya 2 desa yang baru mampu di layani oleh Pemerintah Kabupaten yaitu di Desa Tobadak dan Desa Topoyo. Keterbatasan Pelayanan ini diakibatkan karena masih kurangnya anggaran sehingga memengaruhi pada fasilitasi pelayanan persampahan. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah bisa melalukan inovasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta dan bank melalui dana CSR yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah karena diharapkan pelayanan persampahan ini bisa meningkat setiap tahunnya dan mencakup semua desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga terwujud Kabupaten Mamuju Tengah yang bersih, sehat dan bebas dari sampah.

5. Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Peraturan Lingkungan Hidup

Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan desiminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyuluhan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan akan memberikan pengaruh terhadap terjaganya kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.

Dari tabel dibawah ini menunjukan bahwa pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan peraturan lingkungan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2. 63 Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Peraturan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Usaha yang Diawasi Ketaatanya Terkait Izin Lingkungan	30	30	36	39	52	52
Jumlah Ketaatan Izin Lingkungan yang Diterbitkan	24	30	36	39	52	52
Persentase	80	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah , 2025

6. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan perkotaan pada saat ini masih menjadi masalah yang cukup sulit diatasi terutama dalam bidang pemanfaatan ruang terbuka hijau yang dimana meningkatnya akan permintaan lahan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan perkotaan dapat menyebabkan kualitas ruang terbuka hijau kota semakin menurun dan jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman. Pada realitas saat ini pemanfaatan ruang terbuka hijau belum tepat sasaran di suatu kota yang mengakibatkan penurunan kualitas kota antara lain tidak terawatnya pelestarian atau ruang pejalan kaki, perubahan fungsi tanaman hijau menjadi tempat penjualan pedagang kaki lima, yang mengganggu kenyamanan dan estetika penataan kota.

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi minimal 30 persen terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen untuk penggunaan ruang terbuka privat.

Tabel 2. 64 Ketersediaan Ruang Trebuka Hijau di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	-	-	0,00011	0,00011	0,0034	0,0037

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah , 2025

D. Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Secara umum, ada 9 kelompok pangan dalam PPH yaitu; padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak. Buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan buah dan lain-lain. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018, ditetapkan bahwa jumlah kalori harian yang ideal dikonsumsi orang Indonesia sebesar 2.100 kkal.

Tabel 2. 65 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skor PPH (%)	N/A	88,5	76,3	85,2	82,5	86,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah , 2025

Kabupaten Mamuju Tengah dengan karateristik wilayah dataran rendah, sedang hingga dataran tinggi memiliki potensi dalam pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Data capaian skor PPH dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan angka yang berfluktuatif setiap tahunnya. Skor PPH tertinggi ada pada tahun 2020 dengan nilai 88,5 persen sedangkan di tahun 2024 skor PPH sebesar 86,2 persen.

Skor PPH ketersediaan pangan untuk Kabupaten Mamuju Tengah belum dikatakan ideal, dikarenakan belum mencapai skor ideal, yaitu 100 persen. Jika nilai skor PPH semakin mendekati angka ideal, maka dapat dikatakan ketersediaan pangan yang ada dalam suatu wilayah semakin beragam. Berbagai macam masalah ketersediaan pangan yang dihadapi diantaranya perubahan alih fungsi lahan pertanian kepada kegiatan non pertanian, semakin langkahnya ketersediaan sumber daya air untuk pertanian, curah hujan yang tidak menentu, perubahan iklim yang ekstrem, serta kemampuan petani berlahan sempit dalam menerapkan teknologi tepat guna menyebabkan tingkat produktifitas usaha tani relative rendah.

2. Produksi Komoditas Pangan Nabati

Bahan pangan merupakan sumber makanan yang menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan bahan pangan sebagai sumber nutrisi yang akan membantu pertumbuhan dan memberikan energi untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari.

Bahan pangan nabati merupakan salah satu jenis bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Bahan pangan ini meliputi berbagai macam jenis makanan yang berasal dari tanaman, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Bahan pangan nabati memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi manusia.

Pengelompokan komoditas pangan nabati terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bahan pangan yang berasal dari tanaman hortikultura dan bahan pangan yang berasal dari tanaman pangan. Tanaman hortikultura terdiri atas: sayur-sayuran dan buah-buahan. Sementara itu bahan pagan terdiri dari beras, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar

Tabel 2. 66 Produksi Komoditas Pangan Nabati (Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beras	55.824,37	17.793,24	13.628,90	12.704,51	10.018,39	13.469,00
Jagung	215.896,67	55.926,60	25.057,30	15.933,60	14.655,83	14.399,80
Kedelai	5.129,91	141,60	4,50	0,94	17,60	
Kacang Tanah	24,05	16,81	20,19	22,39	21,20	7,49
Ubi Kayu	1.622,05	1.428,50	1.411,00	1.274,10	574,10	837,50
Ubi Jalar	360,48	383,16	396,90	359	147,72	164,16
Sayur-Sayuran	3.061.30	2.402.30	1.971.10	1.152,90	1.318,20	829,90
Buah-Buahan	703.597	571.229	757.511	131.361,70	122.744,90	82.010,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah , 2025

3. Produksi Komoditas Pangan Hewani

Bahan makanan hewani adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan hewani dikenal sebagai sumber protein dan lemak. Kandungan protein dalam bahan pangan hewani terbilang tinggi dan dapat berperan untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Protein dalam bahan pangan hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap dan seimbang jika dibandingkan dengan protein dalam bahan pangan nabati. Kandungan protein dalam bahan pangan hewani dapat lebih mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Protein hewani ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki dan membangun jaringan pada tubuh manusia. Selain mengandung protein, bahan pangan hewani juga mengandung berbagai nutrisi lain, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak omega-3.

Tabel 2. 67 Produksi Komoditas Pangan Hewani (Ton)
di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daging Sapi dan Kerbau	-	-	-	18,65	44,70	2,04
Daging Ayam	-	-	-	2.631,59	4.059,70	30,84
Telur	-	-	-	-	174,80	1,48

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah , 2025

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian produksi komoditas pangan hewani dikelompokkan menjadi dua yaitu produksi daging dan telur. Pada tahun 2024 produksi daging sapi dan kerbau menurun drastis menjadi 2,04 ton, daging ayam menurun dari tahun sebelumnya menjadi 30,84 ton dan telur juga mengalami penurunan menjadi 1,48 ton.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus: jumlah kepemilikan kartu keluarga

dibagi jumlah kepala keluarga di kalikan seratus. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga di Mamuju Tengah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 68 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan KK	34.858	41.951	41.642	41.663		
Jumlah KK	34.858	41.951	41.642	41.663		
Persentase	100	100	100	100		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah , 2025

Sejak lima tahun terakhir ketersediaan kepemilikan kartu keluarga yang diterbitkan di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian ini juga menunjukan bahwa masyarakat Mamuju Tengah semakin menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan salah satunya Kartu Keluarga yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Rumus perhitungan persentase kepemilikan e- KTP dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP dengan jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah.

Tabel 2. 69 Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan KTP	60.813	92.815	87.914	90.568	89.205	96.046
Jumlah Penduduk	96.346	93.459	94.631	95.888	98.054	98.314
Persentase	63	99,31	92,90	94,45	90,98	97,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah , 2025

Pada tahun 2024 persentase capaian kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Mamuju Tengah yang tercatatkan sebesar 97,69 persen meningkat sebesar 7,37 persen dari tahun sebelumnya.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status peristiwa kelahiran seorang yang merupakan peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan kutipan penerbitan akta kelahiran paling lambar 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan delam perda mengenai administrasi kependudukan.

Tabel 2. 70 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan Akta Kelahiran	40.589	47.449	67.137	71.801	76.627	81.470
Jumlah Kelahiran	143.272	138.130	138.372	138.970	141.260	144.810
Persentase	28	34,35	48,52	51,67	54,25	97,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah , 2025

Persentase kepemilikan akta kelahiran dalam lima tahun terkahir terus meningkat setiap tahunnya. Pada awal tahun 2019 capaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 28 persen dan diakhir tahun 2024 meningkat menjadi 97,69 persen.

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistimatik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2024 menunjukan sudah adanya ketersediaan database kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah. Data Ketersediaan database kependudukan skala provinsi di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 71 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Database Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah , 2025

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Indeks Desa Membangun

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang

dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa. Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu: 1) Desa Mandiri 2) Desa Maju 3) Desa Berkembang 4) Desa Tertinggal 5) Desa Sangat Tertinggal.

Tabel 2. 72 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Mandiri	1	1	1	3	5	6
Desa Maju	1	1	3	3	9	9
Desa Berkembang	25	27	32	36	32	35
Desa Tertinggal	25	25	18	12	7	4
Desa Sangat Tertinggal	2	0	0	0	1	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2025

Perkembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun terakhir menunjukan progres yang baik. Dimana terdapat 6 Desa Mandiri, 9 Desa Maju, 35 Desa Berkembang, 4 Desa Tertinggal dan 0 Desa Sangat Tertinggal.

2. Penetapan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKPDesa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu. RKPDesa yang disusun tepat waktu adalah apabila ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 30 September.

Tabel 2. 73 Persentase Penetapan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Jumlah Desa Menetapkan RKPDes Tepat Waktu	0	0	0	0	17	46
Jumlah Desa	54	54	54	54	54	54
Persentase	0	0	0	0	31	85,19

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 perkembangan desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu menunjukan progres yang baik dimana sudah mencapai 85,19 persen atau dengan kata lain sebanyak 46 desa sudah menetapkan RKPDes tepat waktu dari total 54 desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Penerapan SISKEUDES Tepat waktu

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Tabel 2. 74 Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes Tepat Waktu di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Menetapkan SISKEUDES	54	54	54	54	54	54
Jumlah Desa	54	54	54	54	54	54
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2025

Penerapan SISKEUDES merupakan hal yang wajib bagi pemerintah desa dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi kualitas penatausahaan keuangan desa. Dilihat dari lima tahun terkahir capaian Desa yang menerapkan SISKEUDES sudah mencapai 100 persen.

4. BUMdes Aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Capaian persentase BUMdes yang aktif tercatat mengalami penurunan dalam kurun empat tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai tahun 2022. Hal ini dilihat dari bertambahnya jumlah BUMdes namun tidak diikuti dengan pertambahan jumlah BUMdes yang aktif. Pada tahun 2023 persentase BUMDes meningkat menjadi 56 persen. Dan pada tahun 2024 persentase BUMDes kembali meningkat menjadi 77,78 persen atau dengan kata lain dari 54 BUMDes yang ada, sebesar 42 BUMDes yang aktif. Pemerintah Desa diharapkan dapat mendorong pengelolaan BUMDesa yang ada di desanya karena BUMDesa bukan hanya sekadar badan hukum, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pengembangan dan penguatan pembangunan ekonomi di desa. Keberadaannya memberikan harapan bagi masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Tabel 2. 75 Persentase BUMdes yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah BUMDes Aktif	42	32	30	26	30	42
Jumlah BUMDes	48	49	52	52	54	54
Persentase	85	65	58	50	56	77,78

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2025

5. Kader Posyandu

Kader posyandu merupakan orang yang secara sukarela mempunyai peran penting dalam keberlangsungan posyandu. Mereka merupakan warga masyarakat yang telah dilatih dan memiliki pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak serta keterampilan dalam melakukan pemeriksaan, penanganan dan pengobatan sederhana.

Tugas utama kader posyandu adalah melakukan pengenalan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program posyandu, mengajak masyarakat untuk menghadiri kegiatan posyandu, serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Dalam melakukan tugasnya, kader posyandu bekerja sama dengan petugas kesehatan puskesmas dan bidan desa. Diharapkan dengan adanya peran aktif kader posyandu, program posyandu dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Tabel 2. 76 Persentase Kader Posyandu Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kader Posyandu Aktif	-	-	-	-	598	973
Kader Posyandu Tidak Aktif	-	-	-	-	375	0
Total Kader	-	-	-	-	973	973

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 jumlah posyandu yang tercatatkan di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 195 unit yang tersebar pada lima kecamatan di 54 desa. Jumlah kader sebanyak 973 orang dimana kader yang aktif sebanyak 973 orang.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Total *Fertility Rate*

Total Fertility Rate Total Fertility Rate merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya (antara umur 15-49). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program keluarga berencana.

Pada tahun 2024 TFR menurun dari 2,68 di tahun 2023 menjadi 2,59. TFR sebesar 2,59 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2 sampai 5 anak selama masa usia suburnya. Angka ini jika dibandingkan dengan standar indikator dinamis keseimbangan penduduk yaitu 2,1 (yang merupakan angka target) sampai 2,8 (atau angka nasional), maka TFR Kabupaten Mamuju Tengah telah berada di rentang cukup/sedang. Data total Fertility Rate dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 77 Total Fertility Rate di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fertility Rate	2,57	2,67	2,69	2,70	2,68	2,59

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Berdasarkan data dibawah menunjukan bahwa persentase PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani telah menurun setiap tahunnya. Angka tertinggi terdapat di tahun 2022 sebesar 21,4 persen Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 8,2 persen. Sementara itu di tahun 2024 persentase PUS yang tidak terlayani sudah menunjukan progres yang baik dengan adanya penurunan yang cukup signifikan menjadi 9,49 persen.

Tabel 2. 78 Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PUS ingin ber-KB tidak terlayani	2.548	1.764	1.640	3.769	2.343	2.182
Jumlah PUS	21.566	19.302	19.715	17.617	21.805	22.997
Persentase	11,8	9,1	8,2	21,4	10,75	9,49

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah , 2025

3. Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Alat Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi IUD (intras uterine device), implant (susuk KB) dan kontap (kontrasepsi mantap). Rumus perhitungan penggunaan kontrasepsi jangka

panjang adalah jumlah akaseptor KB yang menggunakan MKJP dibagi jumlah akaseptor KB.

Data statistik keluarga berencana menunjukan bahwa pengunaan kontrasepsi jangka panjang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walapun sempat menurun di tahun 2022 sebesar 16,7 persen akan tetapi di akhir tahun 2024 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang mencapai 37,3 persen meningkat 43,40 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 79 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	23	19	24	16,7	26,01	37,3

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah , 2025

4. Cakupan Anggota Bina Keluarga yang Ber-KB

Tri Bina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan dalam keluarga.

Tri Bina memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orangtua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja maupun lansis. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik, pemberian gizi seimbang balita, tumbuh kembang balita, kemampuan motorik dll. Sementara itu untuk remaja mengenai cara efektif berinteraksi dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja, dan lain-lain.s Selain itu Tri Bina juga mengedepankan kesejahteraan lansia agar tetap memiliki produktifitas yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka Tri Bina dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah BKB (Bina Keluarga Balita), (Bina Keluarga Sejahtera), dan BKL (Bina Kelaurga Lansia).

Tabel 2. 80 Cakupan Anggota Bina Keluarga yang Ber-KB di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anggota Kelompok BKB	839	841	846	1.450	1.156	2.319
Jumlah Anggota Kelompok BKR	364	369	374	725	765	2.379
Jumlah Anggota Kelompok BKL	468	472	477	420	152	240

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah , 2025

Berdasarkan data statistik diatas menunjukan adanya peningkatan pada cakupan bina keluarga setiap tahunnya. Sampai pada tahun 2024 jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita sebesar 2.319 anggota, Bina Keluarga Remaja sebesar 2.379 anggota, dan Bina Keluarga Lansia sebesar 240 anggota.

5. **Pusat Pelayanan Keluarga Sejahterah (PPKS) di Setiap Kecamatan**

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah kegiatan terpadu yang berbasis institusi yang dibangun dan dikembangkan oleh keluarga Indonesia dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS in juga digunakan sebagai wadah pusat pelayanan informasi dan konseling untuk penyiapan berkeluarga bagi remaja, konseling jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KB-KR), pertumbuhan dan perkembangan anak, konseling peningkatan ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi, kesejahteraan keluarga serta informasi kependudukan dan KB.

Tabel 2. 81 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahterah di Setiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS	0	1	1	1	5	5
Jumlah Kecamatan	5	5	5	5	5	5
Persentase	0	20	20	20	100	100

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah , 2025

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa dari tahun 2019-2022 jumlah PPKS yang dibentuk baru 20% yang artinya baru satu kecamatan yakni kecamatan tobadak yang dibentuk PPKS. Namun di akhir tahun 2024 jumlah PPKS yang dibentuk telah mencapai 100 persen, yang artinya PPKS sudah dibentuk disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

6. **Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja**

Berdasarkan data Susenas 2024, diperkirakan sekitar 64,22 juta jiwa penduduk di Indonesia adalah pemuda atau seperlima dari jumlah penduduk indonesia. Disamping jumlah banyaknya tercatat angka kelahiran di usia remaja yang masih tinggi. Permasalahan lain yang cukup memprihatinkan pada remaja adalah pernikahan dini, perilaku seks pranikah dan penyalahgunaan Napza. Sekitar 2,39 % pemuda di Indonesia melakukan perkawinan dibawah umur 16 tahun. Dan masih ada sebesar 43,55 persen pemuda perempuan pernah melahirkan pertama di saat umur kurang dari 21 tahun.

Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, BKKBN menyediakan PIK R/M atau Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa. Program ini merupakan program Genre yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahanan tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Tabel 2. 82 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PIK R/M	21	22	22	21	31	32
Jumlah Kecamatan	5	5	5	5	5	5

Persentase	4,2	4,4	4,4	4,2	6,2	6,4

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah , 2025

Berdasarkan data dari Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana cakupan remaja PIK R/M meningkat dari tahun 2019 sebesar 4,2 menjadi 4,4 di tahun 2020 dan tetap stagnan di tahun 2021 kemudia kembali menurun menjadi 4,2 persen di akhir tahun 2022 dan meningkat menjadi 6,2 pada tahun 2023. Diakhir tahun 2024 jumlah PIK R/M kembali meningkat menjadi 6,4 persen atau meningkat sebesar 3,22 persen dari tahun sebelumnya. Total PIK R/M yang dibentuk sebanyak 32 unit yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Pusat informasi dan konseling remaja yang tersebar di seluruh kecamatan ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, bercerita, berkreatifitas dan saling berbagi informasi.

H. Perhubungan

1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah/banyaknya kejadian kecelakaan. Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas. Cara mengukur persentase penurunan angka kecelakaan didapatkan dari jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikali 100.

Tabel 2. 83 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	105	50	38	94	112	116
Persentase Penurunan	53,74	52,38	24	147,36	19,1	19,4

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah , 2025

Data angka kecelakaan lalu lintas dalam enam tahun terakhir menunjukan angka tertinggi kecelakaan terdapat di tahun 2024 di mana jumlah kecelakaan lalu lintas yang tercatatkan sebanyak 116 kasus. Angka ini meningkat sebesar 19,4 persen jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya di mana jumlah kecelakaan yang tercatatkan sebanyak 112 kasus. Berbagai faktor utama yang menyebabkan angka kecelakaan meningkat diantaranya: kelalaian manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan yang tidak memadai, serta faktor lingkungan dan cuaca. Kondisi cuaca buruk, seperti hujan deras, kabut tebal, atau jalan yang licin akibat hujan dapat mengurangi visibilitas pengemudi dan mengganggu kinerja kendaraan.

2. Persentase Ruas Jalan yang Didukung Jalan Memadai

Ruas jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/ persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas atau

pun tidak. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas maka jalan wajib di lengkapi dengan perlengkapan jalan yang memadai. Adapun jenis perlengkapan jalan dimaksud dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, cermin tikungan, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 2. 84 Persentase Ruas Jalan yang Didukung Jalan Memadai di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ruas yang Dilengkapi Perlengkapan Memadai	3	3	3	4	5	5
Jumlah Ruas Jalan	74	74	74	74	93	93
Persentase	4,1	4,1	4,1	5,4	5,4	5,4

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah , 2025

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa persentase ruas jalan yan didukung perlengkapan sampai pada tahun 2024 mencapai 5,4 persen yang artinya dari total 93 jumlah ruas jalan baru 5 jumlah ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan memadai.

3. Potensi Titik Parkir Tertangani

Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perparkiran diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu pengelolaan parkir yang baik menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang baik, di samping sebagai salah satu sumber PAD.

Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah. Tempat parkir di tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir sedangkan tempat khusus parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

Tabel 2. 85 Potensi Titik Parkir Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Titik Parkir Tertangani	10	10	13	20	23	23
Jumlah Potensi Titik Parkir	14	14	14	31	60	60
Persentase	71,4	71,4	93	64	38	38

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah menunjukan data potensi parkir diakhir tahun 2021 sudah mencapai 93 persen, yang artinya dari 14 potensi parkir sebanyak 13 titik pakir yang telah dimanfaatkan. Akan tetapi melihat data capaian dua tahun terkahir menunjukan adanya penurunan yang cukup signifikan pada pengelolaan parkir yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2024 persentase potensi titik parkir yang tertangani sebesar 38 persen. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya potensi titik parkir sebanyak 60 titik akan tetapi yang baru tertangani baru 23 titik parkir.

4. Layanan Angkutan Darat

Pada tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah persentase layanan angkutan darat menurun menjadi 10,2 persen dimana jumlah angkutan darat yang tercatatkan sebanyak 2.145 dengan jumlah penumpang sebanyak 20.852 orang.

Tabel 2. 86 Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angkutan darat	2.978	1.534	3.115	4.099	18.123	2.145
Jumah penumpang angkutan darat	20.432	10.975	15.262	20.598	21.402	20.852
Persentase	15	14	20	20	84	10,2

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah, 2025

I. Komunikasi dan Informatika

1. Indeks Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai: 1) Domain Kebijakan Internal SPBE; 2) Domain Tata Kelola SPBE; 3)

Domain Layanan SPBE. Nilai indeks memuaskan (4,2 sampai dengan 5), sangat baik (3,5 sampai dengan < 4,2), baik (2,6 sampai dengan < 3,5), cukup (1,8 sampai dengan < 2,6) dan kurang (< 1,8).

Tabel 2. 87 Indeks Sistem Informasi Berbasis Elektronik di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	0	0	0	1,83	2,19	2,28
Domain Kebijakan SPBE	0	0	0	290	290	2,90
Domain Tata Kelola	0	0	0	1,2	1,1	1,20
Domain Layanan SPBE	0	0	0	2,17	2,93	3,06
Domain Manajemen SPBE	0	0	0	1,00	1,27	1,27

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2018, evaluasi SPBE pertama kali dilakukan sejalan dengan upaya sistematis pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95/2018. Namun Kabupaten Mamuju Tengah baru memulai melakukan evaluasi SPBE tahun 2022 dimana capaiannya sebesar 1,83 dari skala 5 dan dikategorikan cukup. Pada tahun 2023 capaian Indeks SPBE meningkat dengan nilai 2,19, pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 2,28 dan masih dikategorikan cukup.

2. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengeola Informasi dan Dokumentasi. Fungsi dari PPID adalah sebagai pengelola dan penyimpanan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi dengan melibatkan semua perangkat daerah. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PPID tidak difungsikan karena keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing dana untuk penanganan pandemic Covid-19. Namun di tahun 2022 PPID kembali diaktifkan dengan dikeluarkannya SK Bupati Mamuju Tengah tentang susunan keanggotaan PPID Mamuju Tengah.

Tabel 2. 88 Persentase PPID Yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PPID yang Aktif	0	0	0	100	100	60

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

3. Ketersediaan Jaringan Internet

Di Kabupaten Mamuju Tengah capaian persentase ketersediaan jaringan internet desa terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Pada tahun 2024 capaian ketersediaan internet sudah mencapai angka 100 persen yang artinya 54 desa dari total 54 desa telah terfasilitasi jaringan internet.

Tabel 2. 89 Ketersediaan Jaringan Internet di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Pengguna Internet	12	19	23	23	23	54
Jumlah Desa	54	54	54	54	54	54
Persentase	22	35	44	44	44	100

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi yang Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sehat adalah koperasi yang segala bentuk kegiatan dan aktivitasnya sehat secara organisasi, usaha, dan mental. Sedangkan yang dimaksud Koperasi Aktif adalah koperasi yang anggota berperan aktif untuk menyejahterakan ekonomi dan sosialnya serta pengurus melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban terhadap anggota secara berkala dan tahunan.

Tabel 2. 90 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pangale	1	1	1	1	1	1
Budong-Budong	6	6	9	13	13	13
Tobadak	4	6	9	9	9	9
Topoyo	27	31	33	33	34	34
Karossa	6	6	19	21	22	22
Total	**44**	**50**	**71**	**77**	**79**	**79**

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 jumlah koperasi yang aktif masih sama dengan jumlah tahun lalu yakni 79 koperasi. Jika melihat data diatas persebaran koperasi paling banyak terdapat di Kecamatan Topoyo sebesar 34 unit dan yang terkecil berada di Kecamatan Pangale sebesar 1 unit koperasi.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Aktif

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu kriteria aset maksimal Rp. 50.000.000,- dan kriteria omzet maksimal Rp. 300.000.000,-. Usaha mikro yang berkembang adalah usaha mikro perorangan dan/atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif sehingga bisa meningkatkan nilai

omzet usahanya. Rumus perhitungan persentase UMKM yang aktif adalah jumlah usaha mikro aktif dibagi jumlah UMKM.

Dari tabel di bawah ini dapat menunjukan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan pada jumlah UMKM yang aktif diiringi dengan adanya peningkatan pada jumlah UMKM. Sampai pada tahun 2024 persentase capaian UMKM aktif berhasil mencapai angka 100 persen dari total 4.731 jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Diharapkan tahun berikutnya persentase UMKM aktif bisa mencapai 100 persen karena UMKM merupakan salah satu roda penggerak dalam peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut.

Tabel 2. 91 Jumlah UMKM Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UMKM Aktif	685	820	1.100	1.200	4123	4731
Jumlah UMKM	800	1.000	1.203	1.248	4123	4731
Persentase	85	82	90	96	100	100

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.Mamuju Tengah, 2025

K. Penanaman Modal

1. Laju Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi Daerah adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri aupun asing di suatu wilayah daerah spesifik. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Tabel 2. 92 Laju Investasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Investasi	1.026.822. 159. 311	700.453. 385. 572	1.785.392 . 396. 556	631.605. 879.206	588.443. 667.356	623.336.8 91.467
Persentase Laju Investasi	6,64	-31,78	154,89	-64,62	6,83	5,93

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kab.Mamuju Tengah, 2025

Laju investasi adalah pertumbuhan investasi atau penanaman modal di suatu daerah dilihat dari realisasi nilai investasi yang dicapai. Rumus untuk memperoleh angka laju investasi adalah Nilai investasi dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100%. Pada tahun 2022 nilai investasi di Kabupate Mamuju Tengah mengalami penurunan dari total Rp.1.785.392.396.556 di tahun 2021 menjadi Rp.631.605.879.206 di tahun 2022 sehingga persentase laju pertumbuhan

investasi daerah pada tahun 2022 sebesar minus 64.62 persen. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan investasi kembali menurun sebesar 6,83 persen dimana total investasi sebesar Rp. 588.433.667.356. Pada tahun 2024 nilai investasi mengalami kenaikan menjadi Rp. 623.336.891.467 atau 5,93 persen.

L. Perpustakaan

1. Ketersediaan Perpustakaan Daerah

Pengunjung perpustakaan merupakan masyarakat yang datang ke perpustakaan. Peminjam perpustakaan adalah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk meminjam buku.

Jumlah perpusatakaan yang ada di Mamuju Tengah tercatatkan sampai pada tahun 2024 sebanyak 206 perpustakaan, yang terdiri dari 1 perpustakaan milik daerah dan sisanya adalah perpusatakaan yang terdapat di sekolah, desa, dan sebagainya.

Tabel 2. 93 Jumlah Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perpustakaan Daerah	206	206	206	206	206	206

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Kunjungan Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan adalah masyarakat yang datang/berkunjung ke perpustakaan. Jenis layanan yang tersedia di perpustakaan yaitu sirkulasi (peminjaman/pengembalian buku), baca di tempat, perpustakaan keliling, gelar buku baca santai, story telling, internet, pembuatan kartu anggota, kunjungan berkelompok,serta layanan kearsipan.

Tabel 2. 94 Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah	144	261	580	795	510	824

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data jumlah kunjungan perpusatakaan selama enam tahun terakhir cenderung menurun di tahun 2019 sampai tahun 2020. Penurunan drastis pada tahun 2019 dan tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang membatasi mobilisasi masyarakat. Jumlah kunjungan pada tahun 2020 hanya sekitar 261 pengunjung. Namun pada akhir tahun 2022 Dinas perpustakaan melaporkan jumlah pengunjung telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 795 pengunjung. Namun di tahun 2023 jumlah kunjungan menurun dengan jumlah kunjungan yang tercatatkan sebesar 510 kunjungan. Dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan jumlah kunjungan menjadi 824 pengunjung.

3. Koleksi Buku Perpustakaan

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang dewasa ini berkembang dengan pesat, perpustakaan memiliki posisi strategis dalam menyediakan informasi sebagai media pembelajaran dan sumber pengetahuan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagsa. Perpustakaan dituntut harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam bentuk koleksi yang terdiri dari koleksi umum, koleksi rujukan, koleksi serial, koleksi khusus, koleksi multi media, dan koleksi elektronik.

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang memiliki nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

Tabel 2. 95 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koleksi Buku	2.585	1.535	1.535	6.134	7.734	8.426

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 7.734 unit pada tahun 2023 menjadi 8.426 unit atau 8,94 persen. Buku ini dihitung dari jumlah buku yang tersedia di seluruh perpustakaan baik yang ada di daerah, sekolah dan desa.

M.Persandian

1. Informasi yang Terintegrasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentiksasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih yaitu sandiman. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah sistem elektronik yang ada dikali seratus persen. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

Tabel 2. 96 Persentase Informasi yang Terintegrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SI Terintegrasi	0	0	0	0	0	0
Jumlah SI	0	0	0	0	0	0
Persentase	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

N. Statistik

2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral sendiri adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Tabel 2. 97 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai EPSS	-	-	-	1,00	N/A	2,52

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Mamuju Tengah baru dimulai pada tahun 2023 untuk penilaian statitisk sektoral tahun 2022. Dimana capaiannya nilai EPSS sebesar 1 poin dan masuk dalam kategori kurang. Angka ini masih sangat rendah jika melihat range 1-5 penilaian EPSS. Nilai EPSS ini diharapkan dapat meningkat sebagaimana ditarget 2 poin pada tahun 2025.

3. Metadata Statistik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan statistik harus disertai dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk metadata. Dalam pengelolaanya, BPS membagi metadata menjadi metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Guna memudahkan pemahaman dan pengisian formulir-formulir tersebut, BPS menyusun pedoman metadata statistik yang membuat mekanisme penghimpunan metadata dan tata cara pengisian Formulir Metadata Statistik.

Tabel 2. 98 Jumlah Metada Statisk yang dibuat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Jumlah Metada Statistik	0	0	0	0	0	33

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

BPS Kabupaten Mamuju Tengah baru resmi dibentuk pada akhir tahun 2023 dan mulai aktif pada bulan januari 2024. Selama ini BPS Mamuju Tengah masih berada dibawah naungan BPS Kabupaten Mamuju sehingga koordinasi terkait pengelolaan statistik belum berjalan dengan baik. Baru pada awal 2023 BPS melakukan sosialisasi terkait dengan pengisian metadata statistik dan pengumpulannya baru terealisasi pada tahun 2024 dimana jumlah metadata statistk yang terkumpulkan dan telah divalidasi oleh BPS sebanyak 33 metadata.

4. Buku Statistik Sektoral yang Diterbitkan

Buku Data Statistik Sektoral merupakan kumpulan dari data-data sektoral Perangkat Daerah dengan periode cutoff datanya per 31 Desember. Buku ini sudah disusun berdasarkan Perangkat Daerah untuk mempermudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data statistik sektoral.

Tabel 2. 99 Jumlah Buku Statistik Sektoral yang Diterbitkan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Buku Statistik	1	1	1	1	1	0

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

O. Kearsipan

1. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Berdasarkan data pada tahun 2024 jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sudah mencapai 100 persen. Hal ini sebagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Serta Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

Aplikasi srikandi merupakan sebuah inovasi yang sangat memudahkan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas kearsipan di suatu instansi. Beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya, pengurangan dalam penggunaan kertas dan adanya efesiensi waktu yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan tanda tangan manual. Apalagi jika pimpinan sedang berada di luar kantor hal ini sangat menghambat penyelesaian administrasi persuratan. Hal yang terpenting adalah aplikasi srikandi ini tersedia online sehingga terintegrasi dan terekam sampai pada pusat data nasional.

Tabel 2. 100 Pengelolaan Arsip Secara Buku di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Jumlah PD yang mengelola arsip baku	0	0	0	0	100	100
Jumlah PD	33	33	33	33	33	33
Persentase	0	0	0	0	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, 2025

P. Kebudayaan

1. Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tabel 2. 101 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	2	2	2	2	3	1
Jumlah Cagar Budaya	61	61	61	61	61	23
Persentase	3,28	3,28	3,28	3,28	4,92	4,35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatatkan ada 23 jumlah cagar budaya yang terdaftar di Kabupaten Mamuju Tengah. Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami penurunan menjadi 4,35 persen atau sebanyak 1 unit Cagar Budaya telah dilestarikan dari total Cagar Budaya yang ada.

2. Kelompok Kesenian yang Aktif

Kelompok Seni Budaya merupakan suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia tetang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan. Kelompok Seni Budaya yang aktif adalah Kelompok Seni Budaya yang ikut secara konsisten melestarikan, mengembangkan seni budaya baik mentradisi maupun melalui berbagai macam event dengan jenis/ kebutuhannya yang terdiri dari organisasi kesenian/sanggar kesenian/kelompok pengahyat kepercayaan.

Tabel 2. 102 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Seni yang aktif	5	6	7	9	15	14
Jumlah Kelompok Seni	14	14	14	14	26	23
Persentase	35,71	42,85	50	64,29	57,69	60,86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Persentase kelompok seni yang aktif menunjukan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sampai tahun 2022 tercatatkan ada 14 kelompok seni dengan persentase kelompok seni yang aktif sebesar 64,29 persen. Pada tahun 2023 jumlah kelompok seni bertambah menjadi 26 kelompok dengan persentase kelompok seni yang aktif sebesar 57,69 persen.

Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah kelompok seni yang aktif dan jumlah kelompok seni mengalami. Namun persentase kelompok kesenian yang aktif mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 60,86 persen.

Q. Kepemudaan dan Olahraga

1. Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Definisi organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Batasan organisasi kepemudaan yang aktif adalah: 1) Ada kepengurusan; 2) Ada program kerja; 3) Ada kegiatan; 4) Ada pertanggungjawaban. Persentase organisasi pemuda yang aktif didapat dari jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda dikali 100%.

Jika melihat capaian data pada tabel dibawah sejak enam tahun terakhir rata-rata capaian organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 5,14 persen. Pada tahun 2024 persentase capaian kepemudaan yang aktif sebesar 4,73 persen dimana dari 1.900 jumlah organisasi pemuda yang tercatatkan hanya 90 unit organisasi yang aktif.

Tabel 2. 103 Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	77	77	77	77	80	90
Jumlah Organisasi Pemuda	1.000	1.440	1.786	1.791	1.800	1.900
Persentase	7,70	5,34	4,31	4,29	4,5	4,73

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Persentase Pelatih Olahraga yang Bersertifikat

Definisi pelatih olah raga adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan, mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Pelatih bersertifikat adalah pelatih olahraga yang mempunyai sertifikat keahlian dibidang olahraga yang dikeluarkan baik oleh pengurus Kabupaten, pengurus provinsi maupun pengurus besar (ditambah syarat syarat untuk bersertifikat). Rumus penghitungan persentase pelatih olahraga bersertifikat adalah jumlah pelatih olahraga bersertifikat dibagi jumlah pelatih olahraga dikali 100%.

Tabel 2. 104 Persentase Pelatih Olahraga yang Bersertifikat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelatih Bersertifikat	2	2	2	2	35	40
Jumlah Pelatih Olahraga	16	16	16	16	50	60
Persentase	12,5	12,5	12,5	12,5	70	66,67

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Capaian Pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah pelatih olahraga. Pada tahun 2024 pelatih olahraga meningkat sebanyak 40 orang dimana persentase pelatih olahraga yang bersertifikat sebesar 66,67 persen.

3. Prestasi Cabang Olahraga

Definisi prestasi olah raga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Prestasi olah raga adalah cabang olah raga berprestasi yang minimal mendapat juara 3 di tingkat provinsi. Persentase prestasi olah raga didapat dari jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga dikali 100%.

Dari data capaian prestasi cabang olahraga dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 persentase capaian prestasi olahraga meingkat dibanding tahun lalu menjadi 95,24 persen yang artinya sebanyak 20 cabang olahraga dimenangkan dari dari total 21 cabang olahraga yang diikuti.

Tabel 2. 105 Prestasi Cabang Olahraga di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Cabor Berprestasi	16	16	16	16	16	20
Jumlah Cabor	19	19	19	21	21	21
Persentase	84,21	84,21	84,21	76.19	76,19	95,24

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

4. Atlet Berprestasi

Definisi prestasi olah raga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Atlet berprestasi adalah atlet yang mempunyai prestasi di tingkat provinsi minimal juara 3 pada setiap nomor kejuaraan minimal di tingkat provinsi. Definisi persentase atlet berprestasi adalah Jumlah atlet yang meraih kejuaraan minimal ditingkat Provinsi. Batasan kejuaraan minimal tingkat provinsi minimal juara III Tingkat Provinsi. Persentase atlet berprestasi didapat dari rumus jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 di tingkat provinsi dibagi jumlah nomor pertandingan dikali 100 persen.

Tabel 2. 106 Prestasi Atlet Berprestasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Jumlah Atlet Berprestasi	15	0	8	8	15	20
Jumlah Nomor yang Dipertandingkan	20	0	10	12	15	15
Persentase	75	0	80	66,7	100	133,33

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data capaian atlet berprestasi cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Persentase capaian atlet berprestasi tertinggi didapatkan pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 75 persen, yang di mana dari 20 cabang olahraga yang diikutkan terdapat 15 atlet yang berhasil memenangkan pertandingan. Sedangkan tahun 2020 karena merebaknya pandemic Covid-19 sehingga tidak ada kejuaraan olahraga yang dipertandingkan. Diakhir tahun 2024 dari total 15 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 20 atlet berhasil memenangkan pertandingan sehingga pencapaian persentase atlet yang berprestasi sebesar 133,33 persen.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1. Kunjungan Wisatawan

Dalam kurun waktu 6 tahun jumlah kunjungan wisatawan pada semua objek wisata di Kabupaten Mamuju Tengah cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, dengan adanya pandemic Covid-19 dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat sehingga berdampak signifikan pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 turun menjadi 17,608 atau menurun sebesar 60,88 persen. Namun angka ini terus meningkat pada tahun berikutnya. Pada tahun 2024 jumlah kedatangan wisatawan domestik yang tercatatka sebesar 57.581 wisatawan atau meningkat sekitar 15,50 persen dari tahun sebelumnya. Data jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 107 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan	45.017	17.608	44.906	47.125	49.853	57.581

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Objek Wisata Unggulan

Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebuah daerah yang kaya akan keindahan alam dan budaya yang khas. Terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten ini memadukan keanekaragaman alam dengan warisan budaya yang kaya, menciptakan destinasi yang menarik bagi wisatawan serta lingkungan yang inspiratif bagi warganya sendiri. Kabupaten Mamuju Tengah dilalui oleh beberapa daerah aliran sungai yang indah dan hutan hujan tropis yang melimpah. Keindahan alam ini memberikan kesempatan bagi para petualang untuk menjelajahi trekking dan kegiatan alam lainnya.

Tabel 2. 108 Jumlah Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Objek Wisata Unggulan	4	4	4	5	5	5

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Sampai tahun 2024 tercatatkan ada lima destinasi wisata unggulan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu, Pantai Batu Rede, Pantai & Mangrove Waitumbur, Rea Camp Tabolang, Pulau Kambunong, dan Air Terjun Kalando.

3. Rata-rata Lama Tinggal

Rata-Rata lama tinggal adalah rata-rata lamanya tamu menginap di hotel atau perbandingan antara banyaknya tamu di bagi malam tempat tidur dengan banyaknya malam kamar huni. Untuk memperoleh angka lama tinggal wisatawan dapat dihitung dengan jumlah lama menginap tamu di hotel yang ada di bagi jumlah hotel yang ada.

Tabel 2. 109 Rata-Rata Lama Tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hotel/Penginapan	18	18	18	19	26	26
Rata-Rata Lama Tinggal	1	1	1	1	1	1

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Sebagai salah satu unsur penunjang pariwisata, Hotel/Usaha penyediaan akomodasi merupakan hal yang wajib untuk disediakan. Pada tahun 2024, jumlah Hotel/Penginapan di Mamuju Tengah yang terdaftar pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah ada sebanyak 26 unit. Sementara itu untuk rata-rata lama tinggal yaitu satu hari.

4. Desa Wisata

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi yang ada di desa. Seperti pernah diamanatkan oleh Permen Budpar No.PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui desa wisata. Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat enam desa wisata yaitu Desa Tobadak, Desa Topoyo, Desa Karossa, Desa Salupakang, Desa Tasokko, Desa Kambunong

Tabel 2. 110 Desa Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Wisata	6	6	6	6	6	6

Jumlah Desa	54	54	54	54	54	54
Persentase	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

B. Pertanian

Produksi pertanian adalah kunci dari keberlanjutan sistem pangan dalam masyarakat. Tanpa produksi pertanian yang cukup, kebutuhan pangan dan bahan baku industri akan sulit terpenuhi. Dalam dunia pertanian, produksi pertanian memiliki peran yang sangat penting. Produksi pertanian merupakan kegiatan yang melibatkan proses pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan produk pertanian. Produk pertanian ini mencakup berbagai macam komoditas, seperti tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, ternak, dan hasil olahan lainnya.

1. Produksi Komoditas Tanaman Pangan

Tanaman pangan adalah tanaman dengan kandungan karbohidrat tinggi, sehingga bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Komoditas tanaman pangan terbagi menjadi empat jenis yaitu: serealia, kacang-kacangan, umbi umbian, dan jenis tanaman lainnya seperti sagu dan sukun.

Tabel 2. 111 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Pertanian
di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi						
Luas Panen	13.163,00	5.907,00	5.010,00	4.909,00	3.818,0	3.249,00
Produksi	69.242,35	30.849,32	23.753,20	23.726,50	18.710,0	15.823,80
Produktifitas	52,60	52,23	47,41	48,30	49,0	48,70
Jagung						
Luas Panen	41.168,10	11.061,00	5.066,00	3.162,00	3.054,9	3.026,00
Produksi	215.896,67	55.926,60	25.057,30	15.933,60	14.655,8	14.399,80
Produktifitas	52,44	50,56	49,46	50,39	48,0	47,59
Ubi Kayu						
Luas Panen	68,00	56,00	55,00	49,20	22,2	34,00
Produksi	1.622,05	1.428,50	1.411,00	1.274,10	574,1	837,50
Produktifitas	238,54	255,09	256,55	258,96	258,6	246,32
Ubi Jalar						
Luas Panen	31,00	27,00	26,00	27,80	14,6	19,00
Produksi	360,48	383,16	396,90	359,00	147,7	164,16
Produktifitas	116,28	141,91	152,65	129,14	101,2	86,40
Kacang Tanah						
Luas Panen	24,00	15,00	18,00	21,95	19,5	9,80
Produksi	24,05	16,81	20,19	22,39	21,2	7,49
Produktifitas	10,02	11,21	11,22	10,20	10,9	7,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Komoditas tanaman pangan pokok terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Dalam enam tahun terakhir rata-rata produksi di sejumlah komoditas tanaman pangan mengalami penurunan setiap tahunnya terutama padi dan jagung

sebagai bahan pangan utama. Jika melihat data pada tabel diatas, produksi tertinggi padi dihasilkan pada tahun 2019 yang mampu menghasilkan produksi sebesar 69.242,35 ton dengan produktifitas 52,60 persen, namun sampai pada akhir tahun 2024 produksi padi menurun menjadi 15.823,80 ton atau sekitar 79,97 persen. Sementara itu untuk produksi jagung juga mengalami penurunan. Data tahun 2019 menunjukan jumlah produksi jagung sebesar 215.896,67 ton dengan produktifitas sebesar 52,44 persen dan pada akhir tahun 20234 jumlah produksi jagung yang dihasilkan sebesar 14.399,80 ton atau menurun sebesar 93,12 persen. Produksi kacang tanah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 produksi kacang tanah sebesar 24,05 ton menurun menjadi 7,49 pada tahun 2024.

2. Produksi Komoditas Sayuran

Sayuran merupakan komoditas yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini memiliki keragaman yang luas dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan mineral yang bernilai ekonomi tinggi, untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal maka diperlukan pemanfaatan teknologi budidaya dan pemberian unsur hara esensial selain radiasi surya, air dan CO2. Unsur hara esensial adalah nutrisi yang berperan penting sebagai sumber unsur hara tanaman.

Tabel 2. 112 Jumlah Produksi Komoditas Sayuran (Ton)
di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Daun	27,1	27,3	57,8	22,2	26,2	13,4
Petsai/Sawi	41,1	62,2	89,1	55,8	59,4	42,3
Kacang Panjang	226,6	215,7	270	130	158,4	101,5
Cabe Besar	178,8	131,5	207,1	-	-	123,3
Cabe Rawit	173	204,4	254,7	140,6	171,3	113,2
Tomat	198,9	146,8	221,8	101,1	96,1	22,3
Terung	180,7	184,5	257,4	123,1	147	125,5
Ketimun	190,6	206,6	290,6	143,8	159,1	103,7
Kangkung	105,9	134,9	177,3	116,8	127,2	101,7
Bayam	92,9	107,7	135,7	69,7	77,3	83
Total Produksi	1.415,6	1.421,6	1.961,5	903,1	1.022	829,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Komoditas sayuran dibagi menjadi 10 jenis seperti pada tabel diatas. Jika melihat data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menujukan bahwa dalam lima tahun terakhir hasil produksi terbesar sayuran dihasilkan di tahun 2021 dengan total produksi sebesar 1.961,5 ton. Sementara itu di tahun 2022 terjadi penurunan yang drastis pada semua jenis sayuran, dimana total penurunan produksi dari tahun sebelumnya sebanyak 1.058,4 ton. Pada tahun 2023 jumlah produksi sayuran kembali meningkat walaupun tidak signikan dengan total peningkatan produksi sebesar 118,9 ton. Sementara pada tahun 2024 produksi kembali mengalami penurunan produksi sebesar 192,1 ton. Jika melihat dari jenis sayuran, produksi terbesar dihasilkan oleh

terung dengan jumlah produksi sebesar 125,5 ton sedangkan produksi terkecil dihasilkan oleh bawang daun dengan jumlah produksi sebesar 13,4 ton.

3. Produksi Komoditas Buah-Buahan

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 13 jenis buah-buahan semusim yaitu Alpukat, Langsat, Durian, Jeruk Siam/keprok, Jeruk Besar, Manggis, Mangga, Nangka, Nenas, Pisang, Pepaya, Rambutan, dan Sawo.

Dalam lima tahun terakhir produksi komoditas buah-buahan rata-rata mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2024 dimana terjadi penurunan total produksi sebesar 401.669 Kwintal dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi dari beberapa jenis buah-buahan diantaranya: alpukat, langsat, durian, jeruk siam, manggis, mangga, nangka, nenas, pisang, papaya, rambutan, dan sawo. Sementara itu jenis buah-buahan yang meningkat diantaranya jeruk besar dengan produksi sebesar 268 Kwintal.

Tabel 2. 113 Jumlah Produksi Komoditas Buah-Buahan (Kwintal) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Alpukat	813	447	975	909	1.150	563
Langsat	21.789	21.390	18.692		17.427	1.585
Durian	41.355	45.245	84.683	126.183	183.933	113.974
Jeruk Siam	152.722	82.381	96.342	158.804	115.535	57.295
Jeruk Besar	1.346	609	547		248	268
Manggis	174	162	274	74	216	125
Mangga	16.940	2.016	11.955	1.274	9.769	4.337
Nangka	41.316	21.823	18.790	20.910	13.382	9.859
Nenas*	1.048	771	1.261	1.432	904	720
Pisang*	106.784	361.897	317.293	964.369	838.276	609.528
Pepaya	1.413	1.009	1.345	1.971	1.825	1.067
Rambutan	25.977	31.526	28.114	34.635	36.996	18.723
Sawo	2.000	562	406	457	164	112
Total Produksi	413.677	569.838	580.677	1.311.018	1.219.825	818.156

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

4. Produksi Komoditas Biofarmaka

Tanaman Biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat sebagai obat-obatan dan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Bagian yang biasa dimanfaatkan adalah bagian tanaman seprti daun, batang, bunga,buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Melihat dari data statistik dapat diliihat bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 4 jenis produksi tanaman biofarmaka yaitu jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas yang berpotensi untuk dikembangkan.

Tabel 2. 114 Jumlah Produksi Komoditas Biofarmaka (Kg) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahe	15.385	7.255	9.195	12.400	21.108	36.230
Kunyit	3.317	4.736	9.184	12.875	22.524	34.369
Lengkuas	1.564	1.846	8.616	10.712	18.941	34.454
Kencur	1.338	2.017	7.304	7.916	15.857	29.039
Total Produksi	21.604	15.854	34.299	43.903	78.430	134.092

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Secara umum produksi biofarmaka dalam kurun waktu enam tahun terakhir mengalami peningkatan di setiap jenis komoditi. Produksi tertinggi dihasilkan pada tahun 2024 dengan total produksi sebesar 134.092 Kg. Angka ini bertambah sebanyak 55.662 Kg atau meningkat sebesar 70,97 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata hasil produksi terbesar dihasilkan oleh jahe dengan jumlah produksi sebesar 36.230 Kg, kemudian lengkuas dengan jumlah produksi sebesar 34.454 Kg, kunyit dengan jumlah produksi sebesar 34.369 Kg, dan produksi terkecil yaitu Kencur dengan jumlah produksi sebesar 29.039 Kg.

5. Luas Lahan Sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum yang meliputi: jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, drainase, sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandara udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, pembangkit dan jaringan listrik, serta kepentingan umum lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2. 115 Luas Lahan Sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024
Pangale	-	-	2.293,58	2.293,58	2.038,8	2.038,8
Budong-Budong	-	-	1.010,97	1.010,97	1.019,1	1.019,1
Tobadak	-	-	847,45	847,45	712,5	712,5
Karossa	-	-	209,63	209,63	164,0	164,0
Topoyo	-	-	692,98	692,98	486,5	486,5
Total LP2B	-	-	5.054,61	5.054,61	4.420,9	4.420,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Peraturaran terkait LP2B pertama kali di sahkan melalui Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dimana berdasarkan Perbup total luasan lahan LP2B sebesar 5.054,61 ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Pangale dengan luas kurang lebih 2.293, 58 ha. Sementara itu pada tahun 2024 berdasarkan pendataan dari Pertanahan Luas LP2B yang ada di Mamuju Tengah sebesar 4.420,9 ha. Jika membandingkan data dari Perbup Nomor 32 Tahun 2021 terdapat selisih luasan lahan

yang berkurang sebesar 633,71 ha. Berkurangnya Luas LP2B ini disebabkan karena adanya konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk yang terus meningkat sehingga berdampak pada dibutuhkannya lahan untuk menampung kebutuhan masyarakat seperti tempat tinggal atau tempat usaha. Selain itu permasalahan pada kesulitan dalam menyediakan pengairan sawah. Masih ada beberapa ditemukan di mana petani masih mengandalkan tadah air hujan untuk mengaliri sawahnya.

6. Produksi Komunitas Peternakan

Salah satu sumber pangan lainnya adalah berasal dari sumber pangan hewani. Ternak Ruminansia merupakan ternak yang memiliki sistem pencernaan yang kompleks yang terdiri dari empat perut yaitu r*umen, reticulum, omasum, dan abomasum*. Sedangkan unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan daging, telur dan bulunya. Umumnya merupakan bagian dari ordo *Galliformes* (Seperti ayam dan kalkun) dan *Anseriformes* (Seperti bebek).

Tabel 2. 116 Produksi Ternak Ruminansia Dan Unggas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ternak Ruminansia						
Produksi Sapi (Ekor)	13.233	15.373	15.557	15.773	15.991	8.714,00
Produksi Kambing (Ekor)	8.728	9.158	9.245	9.372	9.502	2.375,00
Ternak Unggas						
Produksi Ayam (Ekor)	47.530	38.443	1.198.638	1.316.606	1.333.578	109.721,00
Produksi Itik (Ekor)	33.813	37.531	40.802	41.367	39.203	4.187,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah , 2025

Berdasarkan data statistik menunjukan bahwa produksi ternak ruminansia yan terdiri dari sapi dan kambing terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 total produksi sapi dan kambing mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2023 total produksi sapi sebesar 15.991 ekor mengalami penurunan sebesar 7.277 ekor atau 45,51 persen pada tahun 2024. Sedangkan produksi kambing pada tahun 2023 sebesar 9.502 ekor mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 7.127 atau 75 persen.

Sementara itu untuk ternak unggas yaitu ayam dan itik mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2024 produksi ayam menurun sebesar 91,77 persen dimana produksi ayam sebesar 109.721 ekor sedangkan produksi itik mengalami penurunan sebesar 89,32 persen dengan jumlah produksi sekitar 4.187 ekor.

7. Produksi Komoditas Perkebunan

Tanaman sub sektor perkebunan terdiri atas perkebunan semusim dan perkebunan tahunan. Tanaman perkebunan tahunan (utamanya kelapa sawit) memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah. Dari data pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 produktifitas kelapa sawit masih sama dengan tahun 2023 yakni sebesar 2.474 kg/Ha.

Tabel 2. 117 Luas Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Produktifitas Perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa Sawit						
Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	29.549,00	18.588,30	29.001,76	29.126,76	29.126,76	29.126,75914
Produksi (Ton)	96.578,00	96.978,00	96.978,00	97.235,00	72.052,88	72.052,88
Produktifitas (Kg/Ha)	3.268	5.217	3.344	3.338	2.474	2.473,769211
Kakao						
Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	9.325	9.530	12.087	11.611	10.330	10.090
Produksi (Ton)	6.529	6.703	8.883	8.549	8.392	8.383
Produktifitas (Kg/Ha)	708	701	704	700	703	830,82
Kelapa Dalam						
Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	994,8	884,0	884,0	879,0	879,0	1.153,77
Produksi (Ton)	891	895,5	897,5	924,0	922,5	1.026,9
Produktifitas (Kg/Ha)	896	1.013,0	1.015	1.051	1.049	890,0387426
Kopi Robusta						
Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	23	23	20,5	20,5	20,5	20,5
Produksi (Ton)	14	14	13	14	14	14
Produktifitas (Kg/Ha)	622	622	610	683	683	682,92

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

C. Perikanan

1. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang di catat tidak hanya produksi yang dijual saja tetapi termaksud juga produksi yang di konsumsi oleh rumah tangga maupun yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikah hasil tangkapan/budidaya.

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang di budidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.

Tabel 2. 118 Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.990,50	26.033,53	9.914,97	3.128,68	3.187,98	3.652,94
Nilai Produksi Perikanan Budidaya	181.696. 571.500	149.272. 198. 500	141.515. 487 .000	130.108. 564.000	126.362. 585.000	160.690.4 20.500

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Selama enam tahun terakhir jumlah produksi perikanan budidaya berfluktuatif setiap tahunnya. jumlah produksi perikanan budidaya tertinggi didapatkan pada tahun 2020 sebesar 26.033,53 ton. Pada tahun 2021 sampai pada tahun 2023 jumlah produksi perikanan budidaya terus cenderung mengalami penurunan hingga pada akhir tahun hanya mampu menghasilkan produksi sebesar 3.187.980 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.126.362.585.000 juta rupiah. Dan pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan sebesar 14,58 persen atau menjadi 3.652,94 ton.

2. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap adalah semua hasil penangkapan ikan/bintang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan.

Tabel 2. 119 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.575,07	1.388,82	1.310,92	1.362,01	1.386,36	1.435,72
Nilai Produksi Perikanan Tangkap	35.524. 754.000	22.789. 042.000	26.561. 470.500	34.268. 192.000	29.054. 317.000	29.097.36 6.000

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 34 jenis perikanan tangkap dengan jumlah produksi perikanan tangkap yang tercatatkan sampai pada triwulan 4 sebesar 1.435,72 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 29.097.366.000.

3. Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan merupakan salah satu indikator dari Dinas Perikanan yang digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang di konsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan ini akan dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan dalam pengelolaan ikan.

Dari data Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah jumlah konsumsi ikan masyarakat Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pada

tahun 2022 tercatat jumlah konsumsi ikan sebesar 64,3 kg/kapita/tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,98 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu data konsumsi ikan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,38 persen dimana angka konsumsi ikan sebesar 55,05 kg/kapita/tahun. Dan pada tahun 2024 konsumsi ikan kembali mengalami peningkatan sebesar 13,49 persen atau menjadi 62,48 kg/kapita/tahun.

Tabel 2. 120 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Konsumsi Ikan	45.88	31.04	63.67	64.3	55.05	62.48

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

4. Jumlah Kapal dan Perahu

Produksi perikanan didukung oleh adanya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan serta tersedianya SDM yang kapabel untuk memfungsikan sarana dan prasarana tersebut. Data dari Dinas Perikanan menunjukan bahwa ketersediaan sapras perikanan mengalami peningkatan dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah pada kelompok nelayan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 total sapras yang ada sebanyak 1.086 unit, atau menurun 12,49 persen dari tahun 2023. Sapras tersebut meliputi tanpa perahu sebanyak 170 unit, perahu tanpa mesin sebanyak 150 unit, mesin tempel sebanyak 750 unit, kapal motor sebanyak 16 unit.

Tabel 2. 121 Jumlah Kapal dan Perahu di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tanpa Perahu	164	164	144	215	278	170
Perahu Tanpa Mesin	144	144	164	150	145	150
Mesin Tempel	725	785	725	802	802	750
Kapal Motor	13	12	14	22	16	16
Total	1.046	1.105	1.047	1.189	1.241	1.086

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

5. Rumah Tangga Nelayan

Rumah Tangga Nelayan adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha perikanan baik tangkap ataupun budidaya dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual. Pada tahun 2024 Dinas Perikanan melaporkan bahwa jumlah Rumah Tangga Nelayan di Mamuju Tengah tercatatkan sebanyak 1.083 KK. Angka ini mengalami penurunan sebesar 15,32 persen dari tahun sebelumnya.

Pentingnya pembinaan bagi rumah tangga nelayan sangatlah relevan, terutama mengingat kondisi sebagian besar nelayan yang masih hidup dalam kategori miskin. Berikut beberapa aspek penting dalam pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan rumah tangga nelayan seperti: pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sumber daya laut, penguatan kelompok usaha nelayan, diversifikasi ekonomi, dan kesejahteraan perempuan nelayan. Peran perempuan nelayan juga harus diperhatikan. Mereka seringkali berkontribusi secara signifikan dalam aktivitas nelayan.

Pemberdayaan mereka akan membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat sektor perikanan

Tabel 2. 122 Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT Nelayan	1.048	1.161	1.161	1.278	1.279	1.083

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

D. Perdagangan

1. Cakupan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Alat Ukur, Taka, Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas penakaran. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran atau penimbangan. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menujukkan hasil pengukuran. Yang dimaksud dengan tera adalah hal menandai dengan tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Rumus penghitungan didapatkan dari Jumlah alat UTTP yang ditandai berkala dengan tera sah atau tera batal yang berlaku dibagi jumlah alat UTTP dikali 100%.

Tabel 2. 123 Cakupan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Alat UTTP yang Ditandai	24.749	31.744	33.374	33.383	34.954	34.224
Jumlah Alat UTTP	24.850	31.852	33.512	33.586	33.586	32.456
Persentase	99,59	99,66	99,58	99,40	96,08	94,83

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik

Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat. Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang

menyangkut pengelolaan manajemen secara profesional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerja sama (Objek Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik. Kategori pasar baik adalah tidak hanya fisik bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih, pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta manajemen pasar.

Tabel 2. 124 Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pasar Dalam Kondisi Baik	17	17	19	19	19	19
Jumlah Pasar	41	41	41	41	41	41
Persentase	41	41	46	46	46	46

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Rata-rata capaian persentase pasar dalam kondisi baik pada tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah sebesar 41 persen dengan jumlah pasar sebanyak 41 unit yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2021 kondisi pasar dalam keadaan baik bertambah menjadi 19 unit hingga persentase ketercapaian pasar dalam kondisi baik meningkat menjadi 46 persen, dan tetap konstan sampai pada akhir tahun 2023. Pada tahun 2024 persentase pasar dalam kondisi baik tetap konstan di 46 persen.

3. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari pungutan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parkir, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA). Rumus perhitungannya didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100%.

Tabel 2. 125 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (jt)	300	200	350	227	283	250
Realisasi (jt)	183,02	162,96	156,62	154,85	146,50	134,2
Persentase	61	81	44	67	52	57

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Capaian realisasi retribusi pasar dalam enam tahun terakhir tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp. 162.960.000 juta rupiah. Namun di empat tahun

berikutnya realisasi penerimaan retribusi pasar cenderung menurun. Hingga pada akhir tahun 2024 jumlah penerimaan retribusi pasar adalah Rp. 134.200.000 juta rupiah.

E. Perindustrian

1. Kondisi Industri Mikro Kecil dan Menengah

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industry/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Industri kecil adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 5-19 orang. Sedangkan Industri Mikro adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang.

Pada tahun 2023 jumlah industri Mikro Kecil di Kabupaten Mamuju Tengah yang tercatatkan sebanyak 332 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 240 orang. Sementara itu dalam dua tahun terakhir untuk nilai produksi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 3.383.

Tabel 2. 126 Kondisi Industri Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah (unit)	606	314	332	266	367	332
Tenaga Kerja	1.504	737	781	644	358	240
Nilai Produksi (milyar)	5.750	7.191	7.421	4.227	-3.196	3.383

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.Mamuju Tengah, 2025

2.1.3.4 Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

A. Perencanaan

1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, maka telah disusun dokumen perencaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencaan pembangunan lima tahunan yaitu PJMD periode kedua Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026. Selain itu fungsi lain dari perencanaan adalah penyelarasan baik antara RPJMD dengan RKPD, RPJMD dengan Renstra PD, Renstra PD dengan Renja PD. Setiap tahunnya Kabupaten Mamuju Tengah juga menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan pada satu tahun yang akan datang.

Tabel 2. 127 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber:Bappeda Litbang Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Konsistensi Perencanaan RPJMD dan RKPD

Keselarasan Keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD, serta persentase prioritas usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tabel 2. 128 Konsistensi Perencanaan RPJMD dan RKPD
Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Program RKPD	120	125	167	175	187	
Jumlah Program RPJMD	132	132	171	171	171	
Persentase	90,91	94,70	97,66	102,34	109,36	

Sumber:Bappeda Litbang Kab.Mamuju Tengah, 2025

B. Penelitian dan Pengembangan

1. Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Penelitian dan pengembangan (Litbang) memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah. Salah satu dari peran strategis litbang adalah berupaya mewujudkan visi dan misi pembangunan, yang berbasis pada penelitian dan analisa data ilmiah. Keberadaan litbang sangat penting dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Kegiatan kelitbangan memerlukan suatu pedoman peraturan dan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat lebih terarah, memenuhi standar ilmiah dan berdaya guna.

Tabel 2. 129 Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelitbangan yang Dihasilkan	4	5	4	5	2	3
Jumlah Kelitbangan yang Dimanfaatkan	4	5	4	5	2	4
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber:Bappeda Litbang Kab.Mamuju Tengah, 205

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, penelitian dan pengembangan sebagai wadah pemikiran yang harus mampu mendorong peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah serta menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah. Hasil-hasil litbang diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan daerah yang ada, serta mampu memberikan masukan bagi perumusan strategi kebijakan daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Sampai pada akhir tahun 2024 total penelitian yang dilakukan dan diterbitkan sebanyak 23 penelitian yang dimana tahun 2019 sebanyak 4 kajian, tahun 2020 sebanyak 5 kajian, tahun 2021 sebanyak 4 kajian, tahun 2022 sebanyak 5 kajian, tahun 2023 sebanyak 2 kajian, tahun 2024 sebanyak 3 kajian. Daftar Penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. 130 Daftar Kajian di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Kajian	Mitra Kerjasama	Tahun
Kajian Daerah Rawan Pangan	Dr. Rahmadani dan Tim / UNHAS	2019
Rencana induk Kelitbangan	Prof. DR. Darmawan Salman MS/ LP2M UNHAS	2019
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (RIPARDA)	LP2M UNHAS	2019
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAPPEDA	2019
Kajian Roadmap Pengembangan Potensi Unggulan daerah Terpadu	LP2M UNHAS	2020
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAPPEDA	2020
Roadmap Pengembangan Kapasitas SDM ASN	BKPP kerjasama LP2M UNHAS	2020
Kajian Penempatan ASN dalam Penempatan Jabatan Struktural/ Fungsional	BKPP kerjasama LP2M UNHAS	2020
Kajian Dokumen Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah	Badan Keuangan bekerjasama LP2M UNHAS	2020
Kajian Dampak Covid 19 Terhadap Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS	2021
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Prof Dr Thahir Haning, MS	2021
Kajian Bidang Perekonomian	LP2M UNHAS	2021

Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi	LP2M UNHAS	2021
Kajian Akademis Pembentukan Balai Benih Ikan Tobinta Kabupaten Mamuju Tengah	Institute Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Makassar	2022
Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Pasar Ikan Bersih dan Sentra Kuliner Kabupaten Mamuju Tengah	Bappeda Bekerjasama dengan LP2M UNHAS	2022
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Bappeda Bekerjasama dengan LP2M UNHAS	2022
Penyusunan Roadmap SIDa	Bappeda Bekerjasama dengan LAN RI-KMP Makassar	2022
Penyusunan Rencana Induk kelitbangan	Bappeda Bekerjasama dengan LP2M UNHAS	2022
Penyusunan Rencana Induk sistem Proteksi Kebakaran	BLP2M UNHAS	2023
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Bappeda Bekerjasama dengan LP2M UNHAS	2023
Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM	Bapperida Bekerjasama dengan LP2M UNHAS	2024
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Bapperida Bekerjasama dengan LP2M UNHAS	2024
Kajian Pelayanan Publik	Bapperida Bekerjasama dengan LP2M UNHAS	2024

Sumber:Bappeda Litbang Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Kebijakan Inovasi yang Diterapkan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa inovasi merupakan kegiatan penelitian, dan pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktik nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.

Menyikapi hal tersebut Kabupaten Mamuju Tengah dituntut untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki melalui sebuah penciptaan inovasi. Melalui kegiatan inovasi diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah ataupun masyarakat sebagai pembawa perubahan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Membangun kreativitas daerah untuk daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang lebih baik.

Tabel 2. 131 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inovasi yang Diusulkan	0	2	19	63	71	51
Inovasi yang Diterapkan	0	2	19	63	71	51
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber:Bappeda Litbang Kab.Mamuju Tengah, 2025

Tabel 2. 132 Daftar Inovasi Perangkat Daerah dan Desa
Kabupaten Mamuju Tengah, 2024

Keterangan	Nama Inovasi
INOVASI PERANGKAT DAERAH	
BAPPERIDA	1. Pantau SisTem & Informasi Data Perencanaan Daerah (PASTI DPD) 2. Air Limbah Aman, Nyaman dan Layak dengan Grease Trap (ALIM AMALKAN SI GT)
BKPSDM	DILAN BKPSDM
BADAN KEUANGAN	ALUR PENGAJUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
INSPEKTORAT	Lintas Scan
DISDUKCAPIL	PENARI (penerbitan Akta Perkawinan di Rumah Ibadah)
DINAS KETAPANG DAN PERTANIAN	Inovasi BAPAKNA (Bantuan Pangan Korban Bencana Alam) Dinas Ketahanan Pangan&Pertanian Mamuju Tengah
DINAS PU	BATIK PITON
DINAS PERIKANAN	TERIAKI RT DAN PAK DESA
DISPARPORA	PAMER (Pendaftaran Merk)
DINKES	Inovasi Gerakan Pasar Jam Delapan
DINAS PERKIMTAN	LADANG BERGAYA
DINAS SOSIAL	E-TAMU
DISKOMINFO	NGOPI BARENG PAK KADIS (Ngobrol Pagi Bersama Pak Kadis)
BPBD	SINKAMA
DINAS PTSP	KSP PERIJINAN BERKELANJUTAN (Sehari dalam Pelayanan perijinan berkelanjutan)
DINAS TRANSMIGRASI	pelayanan SIA-K1
KESBANGPOL	Birokrasi Bersinar NH
SEKWAN	TELADAN MATENG
DINAS DP3AP2KB	GASA
DINAS SATPOL PP & DAMKAR	Inovasi Drs.Mamuju Tengah
RSUD	DUET(Daur Ulang Limbah Plastik Detergen)
KEC. TOPOYO	TANCEP
KEC. BUDONG-BUDONG	Inovasi Sipake Tahun 2024 Kecamatan Budong-Budong
KEC. TOBADAK	PENAKU (Penanganan Kawasan Kumuh
KEC. KAROSSA	SIPAKAREBA (Sistem Informasi Pelaporan dan Percepatan Penanggulangan Bencana Alam)
BAG. UMUM	Open Data BMD - Inovasi 2024
BAG. ORGANISASI	KONPENSASI TATA LAKSANA
BAG. ADM PEMBANGUNAN	DAMO (Data Base Monitoring)
BAG. PEMERINTAHAN	WAKANDA (Wajib Kerja Daerah)
BAG. PROTOKOL	Human Capital Kreatif Komunikatif Dan Berwawasan
BAG. EKONOMI	S M A R T E C O N ((Solusi Terintegrasi untuk Pengendalian dan Distribusi Ekonomi Daerah)
BAG. KESRA	SIPAH

Keterangan	Nama Inovasi
BAG. HUKUM	SI doi(Sistem Dokumentasi)
BAG. PBJ	Aplikasi AMOBA
PKM POLO CAMBA	Inovasi Puskesmas Gercep Mobile (Gerakan Edukasi Masyarakat dengan Penyuluhan Mobile)
PKM BATUPARIGI	Inovasi Gencu Merah UPTD Puskesmas Batuparigi
PKM SALUGATTA	Inovasi Sibabu Mantul (Simbah bugar ceria masa tua)
PKM LARA	Inovasi " Gersipku Penting Gerakan Sanitasi dan asap rokok untuk mencegah stunting "
PKM DURIKUMBA	INOVASI KOPI IMUNO
PKM TOBADAK	SI CERDIK
PKM SALOADAK	MANDI CANTIK
INOVASI PERANGKAT DESA	
DESA TABOLANG	1. GENDIS PARADES (Gerakan Disiplin Perangkat Desa) 2. REA CAMP
DESA TANGKAU	SMARTGIZI
DESA WAEPUTEH	PERDIN 0%
DESA SALUPANGKANG	Kampung Digital Salupangkang Layanan Smart Service
DESA BAMBAMANURUNG	Inovasi Manarang - Pemdes Bergerak | Selamatkan Anak Putus Sekolah Untuk Kembali Bersekolah
DESA BABANA	SINAL LAMPU (Sarana TerIntegrasi Lapangan Dan Masyarakat Pelaku Usaha)
DESA KIRE	KOPIS (Komunitas Penggiat Infaq dan Shodaqah)
DESA SALUGATTA	PEMIKATT
DESA LAMBA-LAMBA	Pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.
DESA TOBADAK	Taman Literasi Ruang Impian

Sumber:Bappeda Litbang Kab.Mamuju Tengah, 2025

C. Keuangan

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah

Ketersediaan Keuangan/anggaran daerah merupakan salah satu dukungan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan segala aktivitas pembangunan di daerah. Pada tahun 2024 PAD Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan menjadi Rp. 51.811.067.390 milyar yang terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp. 12.064.921.118, Retribusi Daerah sebesar Rp. 14.022.486.339, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 729.061.014, dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 24.994.598.919.

Selain komponen PAD, intervensi penganggaran dari pusat berupa DAK juga masih sangat dibutuhkan dalam berlangsungnya pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa persentase dana perimbangan masih sangat besar yang artinya kemampuan dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Tabel 2. 133 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	32.555.588.000	27.185.089.000	29.019.264.000	30.327.198.167	43.058.385.635	51.811.067.390
Dana Perimbangan	560.497.995.000	492.352.240.000	502.815.712.000	502.003.790.028	535.895.712.061	532.310.045.129
LLPD	122.414.598	101.980.858	0	5.224.335.245	7.016.842.758	7.692.528.903
Belanja TL	252.334.046	278.706.634	260.829.777	242.567.652.230	112.910.953.285	354.986.674.791
Belanja L	506.954.814.	355.787.977.	327.230 363	485.664.995.577	519.338.162.267	342.213.047.536

Sumber: BPKAD Kab.Mamuju Tengah, 2025

D.Kepegawaian

1. Indeks Profesionalitas dan Indeks Sistem Merit ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Berdasarkan data dari BPKSDM Kabupaten Mamuju Tengah capaian Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan pada tahun 2021 capain IP ASN sebesar 49,75 persen dan meningkat menjadi 51,92 persen di tahun 2022. Akan tetapi IP ASN menurun 9,72 persen pada tahun 2023 menjadi 42,61. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 72,82 persen atau 73,64 dibandingkan tahun lalu.

Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai. Merit sistem bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; pemberian kompensasi yang adil dan layak; mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; dan melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Pada tahun 2022 nilai Sistem Merit ASN Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 0,32 dan meningkat 0,02 point pada tahun 2023 menjadi 0,34. Dan kembali meningkat sebesar 0,16 poin pada tahun 2024 menjadi 0,5.

Tabel 2. 134 Indeks Profesionalitas dan Sistem Merit ASN Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	0	0	49,75	51,88	42,61	73,64
Indeks Merit ASN	0	0	0	0,32	0,34	0,5

Sumber: BPKSDM Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Adanya penerimaan P3K pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 menyebabkan adanya peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2023 sebesar 20,72 persen atau meningkat sebesar 2.452 orang dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 7,78 atau menjadi 2.643 orang. Jika dilihat menurut jenis kelamin, sekitar 37,83 persen PNS Kabupaten Mamuju Tengah adalah perempuan sedangkan sisanya 62,16 persen adalah laki-laki. Rincian jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 135 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan	971	960	956	1.132	1.449	1.000
Laki-Laki	914	882	865	899	1.003	1.643
Total	1.885	1.842	1.821	2.031	2.452	2.643

Sumber: BPKSDM Kab.Mamuju Tengah, 2025

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2024 jumlah PNS Kabupaten Mamuju Tengah menurut jenjang pendidikan sebagai berikut: SMA sebanyak 90 orang, D1 sebanyak 1 orang, D2 sebanyak 12 orang, D3 sebanyak 457 orang, D4/S1 sebanyak 1.925 orang, S2 sebanyak 154 orang, dan S3 sebanyak 4 orang. Rincian jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 136 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
S3	0	0	0	3	3	4
S2	97	99	129	134	153	154
D4/S1	1369	1349	1317	1549	1.636	1925
D3	278	259	219	207	555	457
D2	0	0	24	20	14	12
D1	0	0	0	1	0	1
SMA	172	150	132	117	91	90
Total	1.916	1.857	1.821	2.031	2.452	2643

Sumber: BPKSDM Kab.Mamuju Tengah, 2025

E. *Pendidikan dan Pelatihan*

1. Pendidikan dan Pelatihan ASN

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Diklat mengandung dua fungsi yaitu peningkatan pengetahuan sekaligus menambah keterampilan pegawai. Sasaran Diklat PNS adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan. Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 persentase ASN yang

mengikuti diklat formal sebesar 21,74 persen dan persentase ASN yang mengikuti diklat struktural sebesar 0,004 persen.

Tabel 2. 137 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN mengikuti Diklat Formal	12.68	8.08	8.29	0.79	0.25	21,74
Persentase ASN mengikuti Diklat Struktural	6.76%	0.65%	2.40%	5.75%	0	0,004

Sumber: BPKSDM Kab.Mamuju Tengah, 2025

F. Pengawasan

1. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Penilaian SPIP terdiri dari lima aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi maturitas SPIP menunjukan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Tabel 2. 138 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Penerapan SPIP Pada PD	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase TLHP yang di selesaikan sesuai rekomendasi	92,31	78,38	74,26	75,16	N/A	66,53
Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	0,01	0,04	0	0,28	0,005	0

Sumber: Inspektorat Kab.Mamuju Tengah, 2025

Jika melihat pencapaian maturitas SPIP Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 telah mencapai angka pada level 3 yang artinya kualitas penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Mamuju Tengah sudah dikategorikan baik. Terkait dengan persentase tindak

lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sesuai rekomendasi menurun dari tahun 2022 menjadi 66,53 persen dan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah–daerah, tentunya usaha–usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide– ide baru, perbaikan–perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha–usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu aspek yang sangat menunjang daya saing adalah inovasi teknologi. Aspek ini masih sangat kurang dikembangkan di Kabupaten Mamuju Tengah terutama untuk menunjang sektor usaha kecil baik industri kecil maupun UMKM.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen data serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

Besaran konsumsi rumah tangga per kapita ADHB Mamuju Tengah juga terus meningkat setiap tahunnya dalam enam tahun terakhir, Namun demikian berdasarkan angka ADHK, Konsumsi Rumah Tangga per kapita mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pengurangan pola konsumsi karena penghematan yang disebabkan selain oleh berkurangnya sumber daya yang dapat diakses masyarakat karena berkurangnya pendapatan, juga oleh karena pasokan barang konsumsi yang terbatas. Kebijakan pelonggaran mobilitas serta mulai menggeliatnya kembali aktivitas ekonomi, membuat konsumsi rumah tangga per kapita tumbuh kembali pada tahun 2022 dengan angka 0,91 persen hingga mencapai 4,18 persen pada tahun 2024.

Tabel 2. 139 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Konsumsi Rumah Tangga						
ADHB (Miliar Rp)	1.881,44	1.963,90	2.080,91	2.247,65	2.359,51	2.565,22
ADHK (Miliar Rp)	1.307,13	1.320,83	1.345,65	1.383,86	1.414,27	1.496,38
Proporsi Terhadap PDRB (%)	59,80	61,12	58,49	58,96	58,05	56,32

Rata-Rata Konsumsi Per Kapita/Tahun						
ADHB (Juta Rp)	14,28	14,52	15,15	16,05	16,56	17,90
ADHK (Juta Rp)	9,92	9,76	9,80	9,88	9,93	10,44
Pertumbuhan						
Total Konsumsi Rumah Tangga	3,87	1,05	1,88	2,84	5,10	8,13
Per Kapita	1,75	-1,04	-0,08	0,91	1,22	4,18

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Besaran pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga didominasi untuk konsumsi sub komponen makanan, minuman dan rokok. Besaran nilai pengeluaran untuk rincian ini mencapai hingga lebih dari separuh atau di atas 50 persen dari total PKRT, sementara sisanya untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari 6 (enam) sub komponen lain. Hal ini menunjukkan bahwa pola perekonomian masyarakat Mamuju Tengah masih tergolong ke dalam pola hidup primer dimana sebagian besar pendapatannya masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makan-minum.

Untuk PKRT non makanan, sub komponen dengan porsi terbesar adalah pengeluaran untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga yaitu berkisar antara 16-17 persen. Porsi PKRT urutan terbesar selanjutnya digunakan untuk keperluan kesehatan dan pendidikan yang nilainya ada berkisar 5-6 persen.

Di sisi lain, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok sandang (pakaian dan alas kaki) tercatat hanya sekitar 3 persen setiap tahun. Sementara itu, pengeluaran untuk keperluan transportasi, komunikasi, rekreasi, budaya kontribusinya tercatat berada di kisaran 5-6 persen. Dari tujuh sub komponen pengeluaran, hanya komponen makanan, minuman dan rokok yang mengalami peningkatan pertumbuhan di tahun 2024.

Tabel 2. 140 Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Mamuju Tengah, 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Makanan, Minuman dan Rokok	52,60	54,15	55,11	54,69	54,90	55,12
Pakaian dan Alas Kaki	3,19	3,09	3,07	2,95	2,87	2,87
Perumahan, Perkakas, Pelengkapan RT	17,56	17,68	17,37	17,34	17,00	16,82
Kesehatan & Pendidikan	6,31	6,24	6,19	5,75	5,67	5,59
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, Budaya	15.94	14,38	13,85	15,00	15,22	5,26
Hotel & Restoran	1,32	1,31	1,33	1,29	1,32	1,32
Lainnya	3.08	3,15	3,07	2,98	3,02	3,03

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dari sudut pandang pertumbuhan rill, dalam rentang tahun 2020-2024, keseluruhan rincian dalam kelompok pengeluaran rumah tangga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perubahan keberagaman jumlah, baik secara kuantitas, kualitas maupun volume barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Mamuju Tengah setiap tahunnya.

Tabel 2. 141 Pertumbuhan Rill Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Mamuju Tengah (persen), 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan, Minuman dan Rokok	1,75	1,43	2,26	3,14	6,49
Pakaian dan Alas Kaki	-1,65	2,73	1,10	-0,01	4,75
Perumahan, Perkakas, Pelengkapan RT	4,90	2,71	2,95	0,01	4,93
Kesehatan & Pendidikan	2,34	4,20	-2,12	2,66	4,32
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, Budaya	-4,22	1,18	6,99	1,87	5,55
Hotel & Restoran	-1,07	5,73	0,64	3,96	3,94
Lainnya	1,54	2,10	-0,23	1,77	5,23

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dari tujuh sub komponen yang menyusun pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), seluruh sub komponen mengalami pertumbuhan positif di tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sub komponen makanan, minuman, dan rokok, yakni sebesar 6,49 persen. pertumbuhan sub komponen makanan, minuman, dan rokok yang cukup tinggi ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Mamuju Tengah. Selain itu, adanya pembukaan beberapa *booth* makanan dan minuman serta *coffe shop* di Mamuju Tengah tahun 2024.

Pertumbuhan kelompok kebutuhan pokok lainnya yakni sandang (pakaian dan alas kaki) secara rata-rata tumbuh sebesar 1,38 persen dalam lima tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 dan 2023 mengalami kontraksi berturut-turut sebesar 1,65 persen dan 0,01 persen.

Sementara itu, laju pertumbuhan konsumsi sub komponen perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga relative mengalami percepatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, sub komponen ini mengalami pertumbuhan hingga 4,93 persen. selanjutnya pertumbuhan konsumsi untuk kebutuhan sub komponen kesehatan dan pendidikan pada tahun 2020-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2024, sub komponen ini tumbuh mencapai 4,32 persen setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 2,12 persen pada tahun 2022 sebagai akibat dari penurunan penggunaan obat yang diakibatkan virus COVID-19.

Untuk kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya secara rata-rata tumbuh sebesar 2,27 persen pada tahun 2020-2024, meskipun pada tahun 2020

mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam. Dan untuk pertumbuhan konsumsi kebutuhan sub komponen hotel dan restoran pada tahun 2020-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2024, sub komponen ini tumbuh mencapai 3,94 persen. konsumsi untuk barang dan jasa lainnya juga secara rata-rata tumbuh sebesar 2,08 persen selama lima tahun terakhir.

B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Konektifitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup bagus, karena sudah terhubung dengan fasilitas jalan nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan poros desa. Panjang jalan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 mencapai 442,18 Km masih sama dari tahun sebelumnya. Dari total panjang jalan kabupaten tersebut sebanyak 19,12 persen jalan dalam kondisi baik, 5,42 persen jalan dalam kondisi sedang, 0,97 persen jalan dalam kondisi rusak ringan dan sisanya 74,47 persen kondisi rusak berat.

Dengan adanya dana desa diharapkan konektifitas di dalam desa maupun antar desa dapat terhubung dengan baik sehingga tidak ada lagi dusun yang terisolir. Tinggal kualitas infrastruktur jalan dan moda transportasi yang memadai untuk mendukung konektifitas tersebut sehingga akan mendukung kelancaran mobilitas barang maupun orang, mendorong aksesibilitas kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan serta dapat mengurangi inflasi karena distribusi barang yang lancar dan relatif mudah.

C. Iklim Berinvestasi

Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah. Target peningkatan PAD seringkali memicu munculnya berbagai kebijakan yang kontraproduktif terhadap iklim usaha dan investasi. Padahal iklim investasi yag kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik dari skala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan sehingga mendongkrak kemampuan pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang dan mendatangkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Salah satu faktor pendukung minat investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Mamuju Tengah adalah peraturan dan waktu yang dibutuhkan dalam perizinan usaha. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan untuk beberapa jenis perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 1 hari kerja, namun ada beberapa jenis perizinan yang memerlukan waktu rata-rata 3 hari karena terdapat kajian teknis di lapangan sehinggga waktunya sedikit lebih lama. Sementara itu untuk biaya pengurusannya tidak dipungut biaya apapun. Dalam perspektif ke depan, pelayanan perizinan akan terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 142 Lama Perizinan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maksimum, Rupiah)

Nomor Induk Berusaha (NIB)	1 Hari	6	Gratis
Rekomendasi BBM	1 Hari	5	Gratis
Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	1 Hari	-	Gratis
Izin Mendirikan Bangunan	3 Hari	11	Gratis
Izin Apotik	3 Hari	12	Gratis
Izin Klinik	3 Hari	-	Gratis
Izin Toko Obat	3 Hari	-	Gratis
Izin Praktik Apoteker	3 Hari	12	Gratis
Izin Praktik Perawat Gigi	3 Hari	12	Gratis
Izin Praktik Dokter	3 Hari	12	Gratis
Izin Praktik Badan	3 Hari	12	Gratis
Izin Praktik Perawat	3 Hari	12	Gratis

Sumber: Dinas PTSP Kab.Mamuju Tengah, 2025

Kabupaten Mamuju Tengah adalah daerah yang memberi rasa aman, kedamaian dan kesejahteraan dengan sumber daya yang ada, dan akan terus bergerak mewujudkan Mamuju tengah yang handal dalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai basis perindustrian sekaligus sentral ekonomi perdagangan nasional dan internasional. Letak Kabupaten Mamuju Tengah juga sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan trans Sulawesi, yang mana berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah untuk jalur darat, sedangkan untuk jalur laut berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga kedepannya Kabupaten Mamuju Tengah dapat menjadi jalur segita emas perdagangan ditambah lagi rencana perpindahan Ibu Kota Negara Baru ke Pulau Kalimantan akan memberikan peluang investasi yang besar untuk di manfaatkan dengan baik.

Ada beberapa peluang investasi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di Kabupaten Mamuju Tengah diantaranya:

1. Padi (Rice Plant) dengan luas lahan sebesar 5.079 ha dan produksi sebesar 23.930,04 ton memberikan peluang investasi untuk industri pengolahan padi menjadi beras;
2. Kelapa Sawit (Plam Tree) dengan luas lahan sebesar 36.159,14 ha dan produksi sebesar 432.905 ton memberikan peluang investasi untuk industri pengolahan sawit menjadi bahan yang siap pakai karena saat ini masih sebatas produksi bahan mentah;
3. Jagung (Corn) dengan luas lahan 5.3333 ha dan produksi sebesar 25.057,30 ton memberikan peluang investasi pada Industri pengolahan jagung menjadi bahan makanan atau pengolahan menjadi pakan ternak;
4. Kakao (Cacao) dengan luas lahan sebesar 14.851 ha dengan jumlah produksi 8.883 ton memberikan peluang investasi pada Industri pengolahan kakao menjadi bahan jadi seperti butter, bubuk coklat dan cake;
5. Pisang (Babana) dengan luas lahan 336.330 ha dengan jumlah produksi 317.293 ton memberikan peluang investasi pada Industri pengolahan pisang menjadi berbagai jenis makanan ringan;
6. Rumput Laut (Seaweed) dengan luas produksi sebesar 18.193,77 ton memberikan peluang pada Industri pengolahan rumput laut;
7. Ikan Tuna dan Udang Varame. Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten pengekspor ikan tuna terbesar di Sulawesi barat hal ini memberikan peluang investasi

pada Industri pengolahan ikan Tuna, pembangunan pabrik ikan, dan budidaya udang varame.

8. Pengembangan Destinasi Wisata. Saat ini Kabupaten Mamuju Tengah baru memiliki 6 wisata unggulan yaitu, pantai & mangrove waitumbur, pantai batu rede, kolam pemancingan di desa lemba hopo, pulau kambunong, air terjun kalando, kolam pemancingan & kuliner kaymoto.

D. Aspek Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya sebagai gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah. Pada tahun 2023 pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Mamuju Tengah tercatat sebesar 67,63. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,74 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada empat indikator pembentuk IPM yaitu, Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita per tahun.

Angka Harapan Hidup merupakan indikator pada IPM untuk menggambarkan rata-rata usia hidup penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2024 Angka Harapan Hidup di Mamuju Tengah meningkat mencapai 69,68 tahun. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di Sulawesi Barat setelah Kabupaten Mamasa dengan Angka Harapan Hidup mencapai 71,58 tahun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program kegiatan di bidang kesehatan tidak dapat berlangsung tunggal, memerlukan dukungan dari berbagai bidang agar terdapat akselerasi peningkatan derajat kesehatan.

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 sebesar 12,68 tahun yang mengartikan bahwa anak usia sekolah di Mamuju Tengah memiliki harapan lama sekolah sampai pada diploma 1. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah mencapai 7,94 tahun atau setara dengan dengan lulus kelas dua Sekolah Menegah Pertama.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan. Pada tahun 2024 Pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah sebesar Rp 9.250 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah meningkat sekitar 429 ribu rupiah.

2.4 Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada Pasal 14 ayat (2) Indeks Pencapaian SPM meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis dan capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja. Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang

Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.

1. Urusan Pendidikan

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini
b. Pendidikan Dasar
c. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2. 143 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	100%	91,61%	91,61%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	100%	47,95%	47,95%
3.	Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	80,70%	80,70%

Sumber: Dokumen LPPD Kab.Mamuju Tengah, 2025

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada bidang kesehatan di Kabubapaten jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d. Pelayanan Kesehatan Balita
e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguang Jiwa Berat
k. Pelayanan KesehatanOrang dengan Tuberkulosis
l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

Tabel 2. 144 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	58,39%	58,39%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	67,23%	67,23%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	70,77%	70,77%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	69,49%	69,49%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	97,03%	97,03%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	88,97%	88,97%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	93,83%	93,83%
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	85,33%	85,33%
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabates Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes miletus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	85,92%	85,92%
10.	Pelayanan Kesehatan OGDJ Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%

11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%

Sumber: Dokumen LPPD Kab.Mamuju Tengah, 2025

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Ruang mengatur SPM urusan pekerjaan umum meliputi:

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. Penyediaan pengelolaan limbah domestik

Tabel 2. 145 Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	92,61%	92,61%
2.	Penyedian pengelolaan limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelohan air limba domestik	100%	84,44%	84,44%

Sumber: Dokumen LPPD Kab.Mamuju Tengah, 2025

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM dibidang perumahan memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar dibidang perumahan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut lebih lanjut ditentukan 2 jenis pelayanan dasar bidang perumahan yaitu:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota .

Tabel 2. 146 Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda kabupaten/kota	100%	100%	100%

Sumber: Dokumen LPPD Kab.Mamuju Tengah, 2025

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 2. 147 Realisasi Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada	100%	90%	90%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
3.	Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	95%	95%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

5.	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	96,67%	96,67%

Sumber: Dokumen LPPD Kab.Mamuju Tengah, 2025

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial terdapat 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantai sosial
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti sosial
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2. 148 Realisasi Capaian SPM Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	95,38%	95,38%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	98,33%	98,33%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	96,92%	96,92%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	93,33%	93,33%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tangkap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%

Sumber: Dokumen LPPD Kab.Mamuju Tengah, 2025

2.2 Capaian Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

Tabel 2. 149 Capaian Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

VISI: MAMUJU TENGAH MAJU DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI LALLA'TASSISARA							
Keterangan		**Indikator**	**Satuan**	**Target (2024)**	**Realisasi (2024)**	**Capaian (%)**	**Status Capaian**
Misi-1: Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Tujuan-1: Meningkatkan Kapasitas Infratruktur Dasar Secara Merata Antar Wilayah	Rasio Gini (Ketimpangan antar kelompok pendapatan)	(Nilai)	0,375	0,344	91,73	Sangat Tinggi
	Sasaran-1: Pemantapan Infrastruktur Transportasi Perdesaan (S1)	Indeks Daya Saing Infrastruktur	(Nilai)	76,3			
Misi-2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Tujuan-2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar dalam Mendukung Kualitas Hidup yang Layak	Indeks Kepuasaan Masyarakat	(Nilai)	C	C	100	Sangat Tinggi
	Sasaran-2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia (S2)	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	67,14	67,63	100	Sangat Tinggi
		Pravelensi Stunting	(%)	7,85	21,8	36,01	Sangat Rendah
	Sasaran-3: Terpenuhinya SPM (S3)	Rata-Rata Capaian SPM Pelayanan Dasar	(%)	100	83,47	83,47	Tinggi
Misi-3: Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Tujuan-3: Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah	PDRB/Kapita ADHB	(Rp. Juta)	26,51	28,54	100	Sangat Tinggi
	Sasaran-4: Meningkatnya Produktivitas dan Daya Serap Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah (S4)	Pertumbuhan Ekonomi	(%)	4,33	2,80	64,66	Rendah
		Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	2,50	1,83	100	Sangat Tinggi
	Sasaran-5: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S5)	Angka Kemiskinan	(%)	6,13	7,23	85,97	Tinggi
	Sasaran-6: Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri (S6)	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	(%)	71,00	72,93	100	Sangat Tinggi
Misi-4: Memantapkan Tatakelola	Tujuan-4: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(Nilai)	CC	N/A	N/A	N/A

VISI: MAMUJU TENGAH MAJU DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI LALLA'TASSISARA							
Pemerintahan yang baik	Sasaran-7: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (S7)	Nilai LPPD	(Nilai)	3,01	N/A	N/A	N/A
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	(Nilai)	C	N/A	N/A	N/A
		SAKIP	(Nilai)	CC	N/A	N/A	N/A
		Opini BPK	(Nilai)	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
		Indeks SPBE	(Nilai)	2	2,19	100	Sangat Tinggi
	Sasaran-8: Berkembangnya Inovasi Daerah (S8)	Indeks Inovasi Daerah	(Nilai)	Inovatif	Inovatif	100	Sangat Tinggi
Misi-5: Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Tujuan-5: Meningkatkan Ikatan Kebersamaan dan Kepatuhan Norma Hukum	Indeks Kriminalitas	(%)	4,8	N/A	N/A	N/A
	Sasaran-9: Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (S9)	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	(%)	65	N/A	N/A	N/A
Misi-6: Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tujuan-6: Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Predikat Daya Dukung Lingkungan (Kategori)	(Nilai)	terlampaui	N/A	N/A	N/A
	Sasaran-10: Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragam Hayati Daerah (S10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	(Nilai)	75,29	74,97	99,57	Sangat Tinggi
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	(%)	4	N/A	N/A	N/A

Sumber: Tim Penyusunan RKPD (Data Diolah), 2024

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Tabel 2. 150 Rekapitulasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
		Target	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	104%	104%	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	90%	40,33%	48,88%	Sangat Rendah
3	RSUD Satelit	100%	97,5%	97,5%	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	91,89%	91,89%	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial	100%	80,83%	80,83%	Tinggi
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100%	69,83%	69,83%	Sangat Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	99,12%	99,12%	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100%	87,68%	87,68%	Sangat Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	67,85%	58,26%	85,9%	Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,6%	99,99%	119%	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,33%	99%	126%	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	99,5%	97,5%	97,98%	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	77%	97,6%	126,75%	Sangat Tinggi
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan	91,74%	24,68%	26,90%	Sangat Rendah
18	Dinas Penanaman Modal	100%	71,50%	71,50%	Sedang
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	100%	99,62%	99,62%	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	94,66%	94,66%	Sangat Tinggi
21	Dinas Perikanan	100%	99,23%	99,23%	Sangat Tinggi
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	78,6%	78,6%	Sedang
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100%	99,17%	99,17%	Sangat Tinggi
24	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100%	94,87%	94,87%	Sangat Tinggi

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
		Target	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	81,18%	82,2%	101,25%	Sangat Tinggi
26	Sekretariat DPRD	100%	8,89%	8,89%	Sangat Rendah
27	Sekretariat Daerah	100%	65,67%	65,67%	Sangat Rendah
28	Inspektorat	100%	100,25%	100,25%	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Topoyo	100%	51,16%	51,16%	Rendah
30	Kecamatan Tobadak				
31	Kecamatan Pangale	100%	108%	108%	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Karossa	100%	81,67%	81,67%	Tinggi
33	Kecamatan Budong-Budong	100%	106%	106%	Sangat Tinggi

Sumber: Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel 2. 151 Rekapitulasi Capaian Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
		Target Renja OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.554.199.863,5	6.309.661.540,75	96,26%	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	17.734.756.895	6.468.859.116	36,47%	Sangat Rendah
3	RSUD Satelit	14.713.354.030,5	8.032.563.623,5	54,59%	Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.821.806.810	7.347.371.484	62.15%	Rendah
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	947.227.540	919.830.448	97,10%	Sangat Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.646.579.821,66	2.040.911.998,33	77,11%	Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.565.778.037,5	1.539.530.187	98,32%	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial	183.694.367,16	181.873.259,5	99,008%	Sangat Tinggi
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	583.946.250	368.700.158,57	63,13%	Rendah
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.647.005.399	1.629.236.415	98,92%	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.129.271.025	1.026.419.717	90,89%	Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	721.546.400,71	653.002.168,57	90,50%	Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	620.616.370	597.332.9975	96,24%	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.096.277.740,63	1.024.563.480,63	93,45%	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	1.230.509.500	1.136.486.000	92,35%	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	552.781.896	343.082.367	62,06%	Rendah
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan	323.234.070	238.097.662,07	73,66%	Sedang
18	Dinas Penanaman Modal	759.628.838	749.669.918	98,68%	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.065.731.062	1.015.730.754	95,30%	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	741.880.789,33	732.339.380,66	98,71%	Sangat Tinggi
21	Dinas Perikanan	2.150.999.823	1.866.425.111	86,77%	Tinggi
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.739.827.678,8	242.714.615,2	13,95%	Sangat Rendah
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.405.750.260,25	914.810.163	65.07%	Rendah
24	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	26.827.090.750	13.094.592.250	48,81%	Sangat Rendah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	919.333.091,5	914.869.859,5	99,51%	Sangat Tinggi

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
		Target Renja OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
26	Sekretariat DPRD	10.094.044.915,5	3.029.476.364	30,01%	Sangat Rendah
27	Sekretariat Daerah	11.410.418.988	5.716.939.009	50,10%	Sangat Rendah
28	Inspektorat	1.770.541.941	1.746.355.202	98,63%	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Topoyo	264.321.982,5	283.562.618,83	107,27%	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Tobadak				
31	Kecamatan Pangale	144.460.182,80	112.712.078	78,02%	Tinggi
32	Kecamatan Karossa	605.889.410,66	534.685.508	88,24%	Tinggi
33	Kecamatan Budong-Budong	100.546.748	97.366.940	96,83%	Sangat Tinggi

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Penanganan permasalahan 4+1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Dini, Kemiskinan Ekstrem) dan Inflasi;
2. Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
3. Melambatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan;
5. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia;
6. Terbatasnya kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah;
7. Degradasi lingkungan dan sumber daya alam;
8. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut.

A. Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan urusan pendidikan:

a. Belum tercapaianya target SPM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Belum tercapaianya target SPM Pendidikan Dasar (SD);
c. Belum tercapaianya target SPM Pendidikan Kesetaraan;
d. Belum optimalnya pemajuan kesenian dan kebudayaan daerah.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pada urusan Kesehatan meliputi:

a. Masih rendanya cakupan pelayanan SPM Bidang Kesehatan;
b. Masih tingginya angka stunting;
c. Masih adanya angka kematian ibu;
d. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita;
e. Akses sanitasi yang masih rendah;
f. Belum maksimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat disebabkan karena kurangnya tenaga SDM dan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

a. Masih tingginya persentase kondisi jalan kategori sedang sampai rusak berat;
b. Belum maksimalnya penyelesaian lahan yang masuk dalam wilayah pembangunan/pelebaran jalan;
c. Keterlambatan izin kerja dari BPJN;
d. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
e. Pembangunan drainase di lapangan yang kurang baik;
f. Belum optimalnya pengelolaan air bersih dan sanitasi layak;
g. Belum optimalnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

h. Persoalan lahan/lokasi pekerjaan yang melintas di lahan perkebunan masyarakat.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

a. Masih adanya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang memerlukan pendataan.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

a. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat;
b. Masih rendanya penegakan hukum;
c. Belum optimalnya penerapan manajemen penanggulangan kebakaran;
d. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana dan pengelolaan daerah rawan bencana.

6. Urusan Sosial

Permasalahan pada urusan Sosial meliputi:

a. Belum optimalnya kerjasama dan/atau koordinasi dengan PSKP dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar selama proses pemulangan;
c. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar selama pemulangan;
d. Belum optimalnya pemeberian layanan data dan pengaduan;
e. Belum optimalnya pemberian layanan kedaruratan;
f. Belum akuratnya DTKS yang tersedia;
g. Belum optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan terhadap kesipasagaan bencana;
h. Belum optimalnya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

B. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pada urusan Tenaga Kerja meliputi:

a. Masih adanya pengangguran dan rendahnya penempatan tenaga kerja karena peluang kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja;
b. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang masih rendah;
c. Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan kewirausahan dan pelatihan berbasis kompetensi;
d. Belum optimalnya penyelesaian kasus-kasus ketengakerjaan.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak meliputi:

a. Belum tercapaiannnya Kabupaten Layak Anak (KLA);
b. Banyak kasus tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga;
c. Belum adanya OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender.

3. Lingkungan Hidup

Permasalahan pada urusan administrasi lingkupan hidup meliputi:

a. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
b. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
c. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, tertutama kualitas air;
d. Tidak adanya permohonan penyimpanan semnetara LB3;
e. Tidak adanya penambahan area cakupan pelayanan sampah.

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:

a. Belum optimalnya pelayanan keliling dikarenakan tidak adanya kendaraan operasional lapangan;
b. Masih terpusatnya pelayanan dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

a. Masih rendahnya kualitas kelembangaan masyarakat desa;
b. Belum optimalnya pengelolaan BUMdes.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

a. Masih rendahnya angka kepesertaan KB aktif;
b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di Faskes.
c. Belum optimalnya pementukan PIK-R dan Tribina.
d. Belum optimalnnya pendampingan oleh TPK terhadap sasaran.
e. Belum optimalnya data lapangan (RI PUS).
f. Masih kurangnya pembinaan 8 fungsi keluarga oleh akder pokja kampung KB.
g. Masih kurangnya dukungan lntas sektor.
h. Belum optimalnya pemanfaatan GDPK Disetip OPD Kabupaten Mamuju Tengah.

7. Perhubungan

Permasalahan pada urusan perhubungan meliputi:

a. Masih terbatasnya ketersediaan fasilitas keselamatan angkutan darat;
b. Belum optimalnya pengoperasian trayek angkutan umum;
c. Masih terbatasnya SDM pengelola;
d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas;
e. Belum optimlanya pelaksanaan keseimbangan pelayanan jasa angkutan dengan kendaraan penumpang umum.

8. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Permasalahan pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

a. Masih rendahnya kompetensi Aparatur Negeri Sipil yang melakukan tugas dan fungsi di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian sehingga masih perlu ditingkat;
b. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
c. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;

d. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
e. Masih minimnya sarana dan prasarana;
f. Minimnya konektifitas jangkauan pelayanan infromasi dan komunikasi;
g. Rawannya penyalahgunaan website dan informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

9. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

a. Banyaknya koperasi yang tidak aktif dan belum memenuhi standar kesehatan;
b. Kurangnya kemandirian dan kemampuan permodal usaha koperasi dan usaha mikro karena ketergantungan pada bantuan pemerintah;
c. Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha mikro untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi dalam melakukan produksi dan pemasaran.

10. Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan Penanaman Modal meliputi:

d. Kurangnya realisasi penanaman modal berskala nasional
e. Belum optimalnya pengawasan pada investor
f. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya

11. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada urusan kepemudaan dan Olahraga meliputi:

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga;
b. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah dilihat dari persentase pemuda wirausaha, pemuda kreatif dan organisasi kepemudaan;
c. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional.

12.Perpustakaan dan Kearsipan

Permasalahan pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan meliputi:

a. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang sesuai standar;
b. Kurangnya SDM tenaga pustakawan, kearsipan dan arsiparis;
c. Masih kurangnya koleksi buku sesuai kebutuhan;
d. Kurangnya peminat dan kesadaran masyarakat berliterasi;
e. Belum dibentuknya bunda literasi dari Ibu PKK kabupaten dan desa;
f. Minimnya akses internet untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan secara elektronik.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

Permasalahan pada urusan Perikanan meliputi:

a. Belum adanya Tempat Pengelolaan Ikan (TPI)
b. Belum adanya kemampuan nelayan menggunakan teknologi penangkapan ikan;
c. Sulitnya mengakses permodalan bagi nelayan/kelompok nelayan;
d. Maraknya ilegal fishing/penangkapan ikan secara illegal;
e. Rendahnya produksi Ikan air tawar;
f. Rendahnya produksi Rumput Laut;
g. Kesegaran ikan tidak terjaga;
h. Rendahnya angka konsumsi ikan;

i. Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan.

2. Pariwisata

Permasalahan pada urusan Pariwisata meliputi:

a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran destinasi wisata
b. Kurangnya daya Tarik dan keunikan destinasi wisata
c. Kurangnya sarana dan prasaran penunjang wisata

3. Urusan Pertanian

Permasalahan pada urusan Pertanian meliputi:

a. Masih kurangnya pengetahuan petani dalam menerapkan pemanfaatan teknologi modern di bidang pertanian

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan Perdagangan meliputi:

a. Belum optimalnya kerja sama atau koordinasi lintas sektor dengan OPD dan lembaga terkait perhitungan data ekspor dan impor;
b. Belum optimalnya kerja sama dan atau koordinasi lintas sektor dengan OPD dan lembaga terkait pengawasan penyaluran pupuk subsidi;
c. Belum optimalnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
d. Kurangnya pertumbuhan industri kecil yang produktif dan berkesinambungan;
e. Belum tersedianya kawasan indutri yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
f. Pelayanan Tera/Tera Ulang serta pengawasannya belum maksimal;
g. Belum tersedianya media digital yang dapat diakses langsung oleh pelaku industri kecil.

5. Urusan Transmigrasi

Permasalahan pada urusan Transmigrasi meliputi:

a. Belum optimalnya ketersedian sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;
b. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.

D. Penunjang Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan dan Pembangunan

Permasalahan pada urusan Perencanaan dan Pembangunan meliputi:

a. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Perencana;
b. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan;
c. Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan dengan mitra terkait.

2. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada urusan Penelitian dan Pengembangan meliputi:

a. Masih rendahnya penggunaan hasil kajian pada penyusunan dokumen perencanaan;
b. Masih rendahnya hasil penilitian yang dihasilkan.

3. Urusan Keuangan

Permasalahan pada urusan Keuangan meliputi:

a. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya pengelolaan keuangan;
b. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan berlaku;
c. Penerapan sanksi pajak belum dilaksanakan secara tegas dan kurangnya sarana dan prasarana pengawasan pajak;

d. Belum akuratnya data piutang PBB-P2.

4. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

a. Belum optimalnya penempatan pegawai karena masih terdapat penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki;
b. Kompetensi ASN masih rendah;
c. Kualifikasi ASN yang masih rendah;
d. Tingkat kedisiplin ASN yang masih rendah.

5. Urusan Pengawasan

Permasalahan pada urusan Pengawasan meliputi:

a. Belum terpenuhinya Laporan Reviu SAKIP sesuai aturan dikarenakan kurangnya SDM Auditor;
b. Masih Belum adanya OPD yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
c. Belum mencapai Target dalam Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP) BPK Yang diSelesaikan Sesuai Rekomendasi;
d. Masih terdapat Temuan Penyimpangan Terhadap APBD.

6. Sekretariat Daerah

Permasalahan pada urusan Sekretariat Daerah meliputi:

a. Nilai LPPD masih rendah;
b. Indeks Reformasi Birokrasi masih rendah;
c. Nilai SAKIP masih rendah;
d. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa masih rendah.

7. Sekretariat DPRD

Permasalahan pada urusan Sekretraiat DPRD meliputi:

a. Belum optimalnya pelayanan sekretariat DPRD dalam mendorong peningkatan kinerja DPRD dibidang penganggaran, pengawasan dan legislasi;
b. Belum optimalnya peran DPRD dalam pentaan produk hukum.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pada urusan Bangsa dan Politik meliputi:

a. Kesenjangan sosial, politik, ekonomi dan budaya;
b. Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat;
c. Masih kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

9. Kecamatan

Permasalahan pada urusan Kecamatan meliputi:

a. Masih rendahnya indeks kepuasaan masyarakat atas pemerintah dan pelayanan kecamatan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 disusun untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah, proyeksi makro ekonomi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mendukung pembangunan daerah. Penyusunan kerangka ekonomi daerah ini mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 serta mendukung tema pembangunan daerah tahun 2026, yaitu **"Perluasan Swasembada Pangan dan Penguatan Infrastruktur Dasar Wilayah."**

Dalam kerangka ekonomi daerah ini, akan diuraikan kondisi makro ekonomi daerah tahun sebelumnya sebagai baseline, proyeksi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta indikator ekonomi lainnya. Selain itu, kerangka ekonomi daerah juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang menekankan pada kedaulatan pangan, penguatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan demikian, kerangka ekonomi daerah ini menjadi acuan strategis dalam merumuskan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, serta penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2026 secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Kondisi dan kebijakan perekonomian nasional berpengaruh pada kondisi dan kebijkan perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah. Maka hal ini patutnya menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah.

3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.279,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,50 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,44 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 tumbuh sebesar 4,95 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,95 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,69 persen. Sampai dengan triwulan III-2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,29 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,10 persen. Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencatat pertumbuhan (y-on-y) yang stabil. Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar dengan peranan sebesar 56,84 persen dari PDB nasional dan mencatat pertumbuhan sebesar 4,92 persen (y-on-y).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen, turun sebesar 0,41 persen poin dibanding pada Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,15 persen poin dibanding Agustus 2023. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang, naik sebanyak 4,79 juta orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,31 juta orang. Pada Agustus 2024 sebanyak 60,81 juta orang (42,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,16 persen poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,32 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun sebesar 0,46 persen poin dibanding Agustus 2023. Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2024 sebesar 7,59 juta orang, naik sebesar 0,21 juta orang dibanding pada Agustus 2023.

Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen. Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024). Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,00 (74,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,00 (25,56 persen). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata- rata adalah sebesar Rp2.786.415,00/rumah tangga miskin/bulan.

Berdasarkan data BPS, Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2024 sebesar 74,15

tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2024 meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2024 meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun angka capaian/Realisasi Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	-2,07	5,02	5,31	5,05	4,55
2	TPT	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
3	Kemiskinan	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03
4	IPM	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS, 2024

3.1.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah-panjang. Penguatan sektor manufaktur dapat memberikan peluang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran sektor manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri high tech dengan focus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna meningkatkan nilai tambah. Dalam jangka menengah, sektor-sektor yang lain juga ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun diperkirakan mengalami moderasi. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2024 tetap tumbuh sebesar 4,95 persen (Triwulan III 2024), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Pada tahun 2026 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi berkisar pada 5,5 – 6,0 persen. Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen pada tahun 2026.

Dinamika faktor domestik dan internasional diperkirakan akan terus menjadi faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. Peningkatan ekonomi global dan reformasi struktural di dalam negeri dipandang sebagai dua factor penting yang akan memengaruhi

pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah. Peningkatan ekonomi global akan mendukung ekspor Indonesia, sementara perbaikan struktur ekonomi domestik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta menciptakan produk ekspor baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan cadev dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung sumber pembiayaan domestik dan mengurangi risiko defisit, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menjadi faktor yang menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini diperkirakan akan mendorong nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan penguatan dalam jangka menengah. Nilai Tukar Rupiah terus diupayakan terjaga dalam rentang Rp.14.900 – Rp.15.400 pada tahun 2026. Sementara itu, yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam jangka menengah, meskipun tantangan yang dihadapi cenderung menurun. Pergerakan yield SBN akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sektor keuangan, baik secara global maupun domestik. Stabilitas ekonomi dan pasar keuangan global diharapkan dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan. Di sisi lain, upaya Pemerintah yang terus-menerus untuk memperbaiki ekonomi domestik diharapkan dapat menjaga yield SBN tetap stabil pada tingkat yang rendah. Yield SBN 10 Tahun terus diupayakan terjaga dalam rentang 6,3 – 7,3 persen pada tahun 2026.

Adapun Target Indikator Makro Nasional Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Proyeksi Indikator Ekonomi Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,3
2	GNI per Capita	Rp	5.870
3	Kemiskinan Ekstrem	%	0
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44-4,96
6	Rasio Gini	Indeks	0,377-0,380
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,67

Sumber: Rancangan RKPD 2026

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat

Kondisi dan kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat turut berpengaruh pada kondisi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah. Maka hal ini menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah.

3.1.2.1. Kondisi Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat

Secara umum struktur perekonomian Sulawesi Barat di triwulan IV-2024 tidak jauh berbeda dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Tiga kategori teratas yakni kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; kategori industri pengolahan; dan kategori perdagangan masih

mendominasi struktur perekonomian Sulawesi Barat. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi primadona perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan IV-2024 dengan besaran kontribusi 45,73 persen, mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (43,88 persen). Kontribusi terbesar kedua pada triwulan IV-2024 ditempati oleh kategori industri pengolahan dengan besaran kontribusi 10,67 persen. Kontribusi terbesar ketiga terhadap perekonomian Sulawesi Barat triwulan IV-2024 yakni kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan besaran kontribusi 9,50 persen. Posisi tiga besar terhadap perekonomian tersebut masih sama dengan triwulan IV-2023.

Jika diamati, kontribusi sektor pertanian masih mendominasi di Sulawesi Barat pada triwulan IV-2024 seperti pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong transformasi ekonomi masih perlu untuk lebih digiatkan di Sulawesi Barat.

Berdasarkan lapangan usaha, 16 dari 17 kategori lapangan usaha di Sulawesi Barat tercatat tumbuh positif secara year on year pada triwulan IV-2024. Pertumbuhan positif tertinggi tercatat ditempati oleh kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mampu tumbuh 19,57 persen (y-on-y). Hal tersebut berkaitan dengan kembali normalnya produksi pengadaan air yang sempat terdampak El-Nino di tahun 2023 sehingga mendorong peningkatan nilai tambah pada sektor ini. Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi kedua ditempati oleh kategori jasa perusahaan yang mampu tumbuh sebesar 11,97 persen.

Pertumbuhan yang tinggi pada kategori ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah jamaah umroh yang mendorong peningkatan output jasa agen perjalanan. Selanjutnya, pada urutan ketiga ditempati oleh kategori jasa pendidikan yang mampu tumbuh 11,05 persen secara year on year. Tingginya pertumbuhan tersebut di antaranya disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja daerah pada belanja fungsi Pendidikan yang salah satunya didorong oleh peningkatan gaji PNS sebesar 8 persen di awal tahun 2024. Meski secara umum perekonomian Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan positif pada triwulan IV-2024 secara year on year, namun masih ada kategori yang mengalami kontraksi, yaitu kategori industri pengolahan. Kontribusi kategori ini terhadap keseluruhan nilai PDRB Sulawesi Barat triwulan IV-2024 adalah sebesar 10,67 persen dengan tingkat pertumbuhan yang terkontraksi sebesar 0,10 persen sehingga sedikit menahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat secara keseluruhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 2,68 persen, naik sebesar 0,41 persen poin dibanding pada Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 778.383 orang, naik 18.103 orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,35 persen poin dibanding Agustus 2023. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 757.507 orang, naik sebanyak 14.500 orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 351.028 orang. Pada Agustus 2024 sebanyak 60,81 juta orang (42,05 persen) bekerja pada

kegiatan formal, naik sebesar 1,16 persen poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,32 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun sebesar 0,46 persen poin dibanding Agustus 2023. Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2024 sebesar 7,59 juta orang, naik sebesar 0,21 juta orang dibanding pada Agustus 2023.

3.1.2.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat

Ekonomi Sulawesi Barat triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-on-y). Peningkatan penciptaan nilai tambah menyebabkan perekonomian tumbuh pada sebagian besar kategori lapangan usaha dengan besaran yang bervariasi. Tiga kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,83 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 13,97 persen, dan kategori Jasa Perusahaan yang mampu tumbuh sebesar 12,45 persen. Di sisi lain, terdapat empat kategori yang mengalami kontraksi dibandingkan triwulan I-2024, yaitu kategori konstruksi; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah daur ulang; serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Struktur PDRB Sulawesi Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2025 menunjukkan perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 47,32 persen dengan andil terbesar pada subkategori Perkebunan Tahunan. Diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,68 persen; lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 9,62 persen; lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,24 persen; dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,18 persen.

Perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan I-2025 mengalami kontraksi sebesar 4,45 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan nilai tambah yang tercipta pada triwulan I-2025 mengalami penurunan dibanding triwulan IV-2024. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kinerja perekonomian pada triwulan I-2025 tampak lebih rendah dibanding triwulan IV-2024 yang tumbuh sebesar 3,14 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja triwulan I-2025 belum bisa lebih baik dibanding triwulan IV-2024. Begitupun jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian triwulan I-2024 yang terkontraksi 2,80 persen, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja di triwulan I-2025 belum dapat mengimbangi kinerja perekonomian pada triwulan yang sama tahun lalu. Penurunan kinerja perekonomian pada triwulan I-2025 disebabkan oleh penurunan nilai tambah yang terjadi pada kategori lapangan usaha yang memiliki andil yang cukup besar. Kategori lapangan usaha yang memiliki besaran kontraksi terdalam adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 39,35 persen. Kategori lapangan usaha dengan kontraksi terdalam kedua adalah kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 11,92 persen. Selanjutnya, kategori dengan kontraksi terdalam ketiga adalah kategori Perdagangan sebesar 10.07 persen.

Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,3
2	GNI per Capita	Rp	5.870
3	Kemiskinan Ekstrem	%	0
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44-4,96
6	Rasio Gini	Indeks	0,377-0,380
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,67

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabuaten Mamuju Tengah

3.1.3.1 Kondisi Perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah

Pertumbuhan Ekonomi

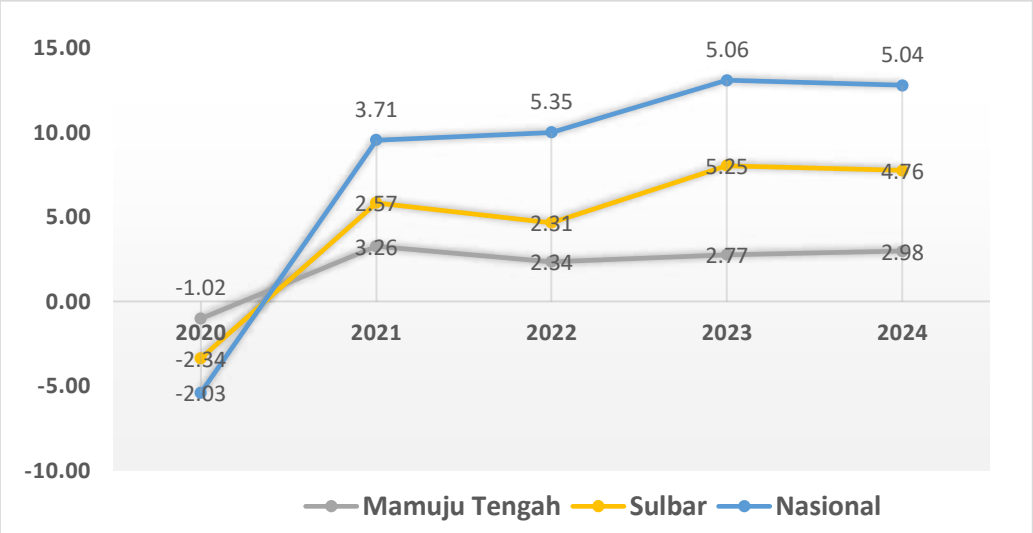
Kabupaten Mamuju Tengah memperlihatkan trajektori pertumbuhan ekonomi yang moderat dengan pola *recovery-stabilization* selama periode 2020-2024. Diawali dengan kontraksi -1,02% pada 2020 akibat guncangan eksternal pandemi COVID-19, kabupaten ini mengalami rebound signifikan sebesar 3,26% pada 2021 melalui implementasi kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang disinergikan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Perlambatan moderat menjadi 2,34% pada 2022 mengindikasikan fenomena *base effect* pasca-pemulihan drastis tahun sebelumnya, diikuti momentum akselerasi gradual ke 2,77% (2023) dan 2,98% (2024) yang mencerminkan konsolidasi struktural ekonomi regional.

Dalam konteks perbandingan interkabupaten, kinerja ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dengan kabupaten tetangganya. Kabupaten Mamuju mencatatkan pertumbuhan lebih dinamis dengan lonjakan hingga 4,47% pada 2023 dan 6,47% pada 2024, mengindikasikan keunggulan struktural ekonomi sebagai pusat pemerintahan provinsi. Kabupaten Pasangkayu memperlihatkan volatilitas tertinggi dengan kontraksi -0,02% pada 2022 diikuti lonjakan drastis menjadi 6,78% pada 2023 yang mencerminkan ketergantungan pada sektor rentan fluktuasi. Sementara Majene dan Polewali Mandar menunjukkan tren akselerasi konsisten dengan puncak pertumbuhan 5,30% dan 5,94% pada 2024, didukung oleh diversifikasi ekonomi yang lebih matang dan konektivitas yang lebih baik dengan pusat ekonomi regional.

Determinan kausal kesenjangan pertumbuhan meliputi ketergantungan tinggi Kabupaten Mamuju Tengah pada sektor primer yang rentan terhadap volatilitas harga komoditas, belum optimalnya infrastruktur ekonomi dan konektivitas logistik, serta transformasi struktural ekonomi yang berjalan lambat dari aktivitas subsisten menuju industrialisasi dan jasa bernilai tambah tinggi. Dibandingkan dengan Kabupaten Mamuju yang memperoleh keuntungan dari aglomerasi ekonomi sebagai pusat administratif dan Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki basis manufaktur lebih kuat, Kabupaten Mamuju Tengah masih perlu memperkuat

kapabilitas produktifnya. Meski demikian, kecenderungan pertumbuhan positif dan eskalasi inkremental sepanjang 2021-2024 menandakan adanya fundamental ekonomi yang resilient dengan potensi ekspansi yang dapat diakselerasi melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi investasi pada sektor-sektor strategis unggulan daerah.

Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah (persen) Tahun 2020-2024

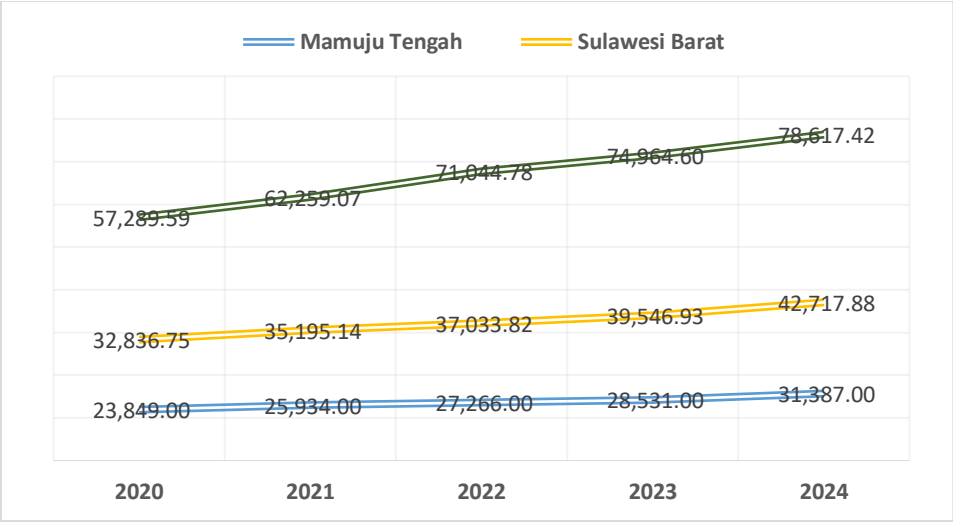


PDRB Per Kapita

Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren positif dalam pendapatan perkapita selama periode 2020-2024. Pendapatan perkapita kabupaten ini mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp23.849.000 pada tahun 2020 menjadi Rp31.387.000 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 31,6% selama lima tahun tersebut. Pertumbuhan tahunan pendapatan perkapita Mamuju Tengah rata-rata mencapai 7,1%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi secara umum.

Namun, pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan menunjukkan gambaran yang berbeda. Pada tahun 2020, PDRB perkapita konstan Mamuju Tengah mengalami kontraksi sebesar 3,20%, kemungkinan besar sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,41%, meskipun kemudian melambat menjadi 0,42% pada tahun 2022. Pada tahun 2023-2024, terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 0,86% dan 1,09% secara berturut-turut, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang semakin menguat meskipun masih relatif lambat.

Gambar 3. 2 PDRB Per Kapita Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional (ribu rupiah), Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, pendapatan perkapita Mamuju Tengah masih tertinggal jauh dari rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan nasional. Pada tahun 2024, pendapatan perkapita Mamuju Tengah hanya mencapai 73,5% dari rata-rata provinsi (Rp42.717.880) dan hanya 40,4% dari rata-rata nasional (Rp77.617.420). Kesenjangan ini cenderung semakin melebar selama periode lima tahun terakhir, mengindikasikan bahwa Mamuju Tengah belum mampu mengejar ketertinggalan ekonominya.

Pada tahun 2020, kesenjangan pendapatan perkapita antara Mamuju Tengah dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp8.987.750, namun pada tahun 2024 kesenjangan ini meningkat menjadi Rp11.330.880. Demikian pula dengan kesenjangan terhadap rata-rata nasional yang meningkat dari Rp33.440.590 pada tahun 2020 menjadi Rp46.230.420 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan yang semakin lebar.

Berdasarkan data PDRB perkapita atas dasar harga konstan, Kabupaten Mamuju Tengah berada pada posisi terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2024, PDRB perkapita konstan Mamuju Tengah sebesar Rp17.014.000, jauh di bawah Kabupaten Pasangkayu (Rp39.127.000), Kabupaten Mamuju (Rp32.224.000), Kabupaten Polewali Mandar (Rp21.550.000), dan Kabupaten Majene (Rp22.211.000). Posisi ini relatif tidak mengalami perubahan signifikan selama periode 2020-2024, menunjukkan bahwa Mamuju Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing ekonominya di tingkat provinsi.

Rendahnya pendapatan perkapita Mamuju Tengah kemungkinan besar terkait dengan struktur ekonomi kabupaten yang masih bertumpu pada sektor primer dengan nilai tambah relatif rendah. Dominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang terbatas menjadi salah satu faktor penyebab pendapatan perkapita yang rendah. Diversifikasi ekonomi yang terbatas

dan minimnya industrialisasi juga berkontribusi terhadap rendahnya pertumbuhan PDRB perkapita.

Tren pendapatan perkapita Mamuju Tengah mengimplikasikan perlunya strategi pembangunan yang lebih terarah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

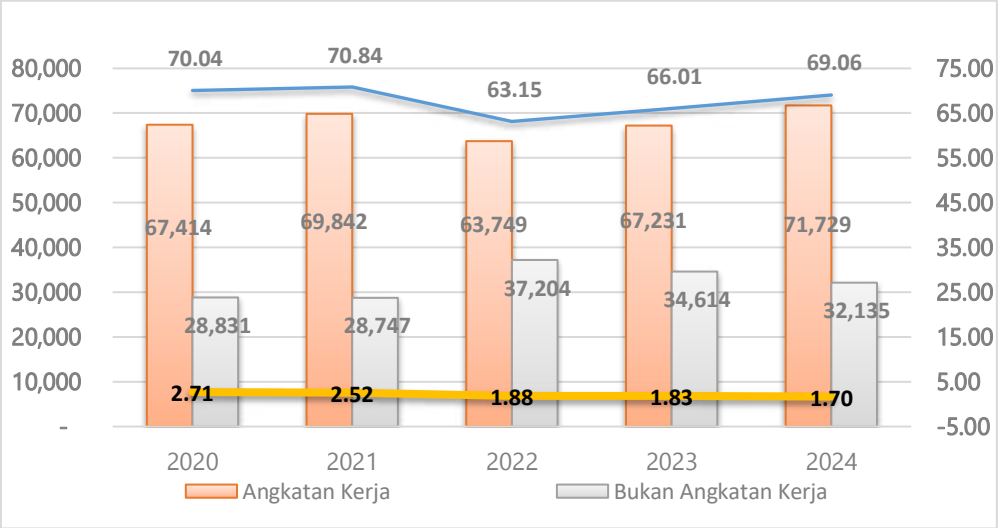
Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki karakteristik unik sebagai daerah dengan basis ekonomi pertanian dan perkebunan, dengan topografi yang beragam dan infrastruktur yang masih dalam tahap pengembangan. Kondisi ini memberikan konteks spesifik terhadap struktur ketenagakerjaan yang terbentuk, pola pengangguran yang terjadi, serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, dinamika ketenagakerjaan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan lainnya, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan transformasi struktur ekonomi. Pemahaman mendalam terhadap kondisi ketenagakerjaan menjadi prasyarat dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran, efektif, dan mampu menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan selama periode 2020-2024, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus menurun dari 2,71% pada 2020 menjadi 1,70% pada 2024. Pencapaian ini menempatkan Mamuju Tengah pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi Sulawesi Barat. Analisis data ketenagakerjaan menunjukkan pertumbuhan angkatan kerja dengan CAGR sebesar 1,60%, melampaui laju pertumbuhan penduduk kabupaten (1,32%), mencerminkan optimalisasi bonus demografi yang efektif.

Gambar 3. 3 Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Dinamika tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Mamuju Tengah memperlihatkan pola fluktuatif dengan *tren U-shaped* selama lima tahun terakhir. TPAK mencapai 70,04% pada 2020, meningkat menjadi 70,84% pada 2021, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 63,15% pada 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 66,01% (2023) dan 69,06% (2024). Pola ini mengindikasikan adanya *shock* struktural dalam pasar tenaga kerja pada tahun 2022, kemungkinan sebagai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor padat karya, restrukturisasi ekonomi lokal sebagai konsekuensi perubahan kebijakan nasional, serta pergeseran preferensi angkatan kerja.

Di balik rendahnya TPT, tantangan substantif masih dihadapi dalam aspek kualitas ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju Tengah. Komposisi pengangguran didominasi oleh pengangguran usia muda (15-24 tahun) yang mencapai 63,2% dari total pengangguran, dan fenomena pengangguran terdidik yang semakin meningkat dengan proporsi pengangguran berpendidikan menengah ke atas mencapai 47,8% pada 2024. Kedua hal ini mengindikasikan kesenjangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu terlihat adanya kesenjangan yang konsisten antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja. Pada tahun 2024, tercatat angkatan kerja laki-laki mencapai 39.078 orang sementara perempuan hanya 22.713 orang, mengonfirmasi ketimpangan gender dalam partisipasi ekonomi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menunjukkan pola serupa dengan kesenjangan signifikan antara laki-laki (72,78%) dan perempuan (39,51%) pada tahun 2024.

Kesenjangan partisipasi gender dalam angkatan kerja Mamuju Tengah merupakan tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian khusus. Data time-series 2017-2024 menunjukkan persistensi kesenjangan ini, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio partisipasi perempuan terhadap laki-laki dalam angkatan kerja berkisar antara 0,54-0,59 selama periode tersebut, mengindikasikan hambatan sistemik yang membatasi akses perempuan ke pasar tenaga kerja formal.

Beberapa faktor mendasar yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini meliputi: (1) beban ganda perempuan dalam ekonomi perawatan tidak berbayar dan ekonomi produktif, yang tercermin dari tingginya jumlah perempuan dalam kategori bukan angkatan kerja (33.851 perempuan dibandingkan 13.844 laki-laki pada 2024); (2) segregasi vertikal dan horizontal dalam pasar tenaga kerja yang membatasi akses perempuan terhadap sektor-sektor formal dengan produktivitas tinggi; (3) kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan; serta (4) norma sosial patriarki yang masih kuat di wilayah pedesaan Mamuju Tengah.

Tingkat Kemiskinan

Dalam aspek sosial, tingkat kemiskinan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 6,79% pada tahun 2020 menjadi 7,72% pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 11,16 ribu jiwa. Meskipun persentase ini tergolong moderat dan berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Barat (11,21%), peningkatan

konsisten ini mengindikasikan tantangan struktural dalam upaya pengentasan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami fluktuasi dengan pola yang menarik dimana naik tajam dari 0,88 pada 2020 menjadi 1,15 pada 2021-2022, lalu turun menjadi 0,965 pada 2023, dan kemudian kembali naik ke 0,92 pada 2024. Pola ini menggambarkan dinamika kompleks dari kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan tren serupa dengan kenaikan tajam dari 0,18 (2020) menjadi 0,27 (2021), lalu menurun ke 0,24 (2022) dan 0,184 (2023), sebelum sedikit naik ke 0,19 (2024). Meskipun terjadi perbaikan sejak 2021, nilai P2 pada 2024 masih di atas level 2020, mengindikasikan ketimpangan distribusi pengeluaran di antara kelompok miskin yang belum kembali ke kondisi pra-pandemi.

Tabel 3. 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahan (P2), dan Garis Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin %		Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
		Jumlah (Ribu)	Presentase		
2020	255.440	9,25	6,79	0,88	0,18
2021	265.413	9,74	7,13	1,15	0,27
2022	290.030	9,98	7,17	1,15	0,24
2023	309.227	10,39	7,32	0,965	0,184
2024	324.888	11,16	7,72	0,92	0,19

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, berbagai versi

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 yakni 1,75 persen setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2021 sampai 2023. Jumlah masyarakat miskin ekstrem pada tahun 2024 masih lebih besar dibanding tahun 2021.

Masalah ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi tantangan serius dalam penanggulangan kemiskinan di Mamuju Tengah. Data dari BPS menunjukkan bahwa terdapat permasalahan inclusion dan exclusion error dalam penyaluran bantuan. Pada tahun 2022, sebanyak 82,89% rumah tangga miskin di Mamuju Tengah tidak menerima bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), sementara hanya 17,11% rumah tangga miskin yang menerima bantuan tersebut. Hal ini mengindikasikan tingginya exclusion error, di mana banyak keluarga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak terjangkau program.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang menyerap tenaga kerja di Mamuju Tengah. Namun, produktivitas sektor ini relatif rendah dibandingkan sektor lain, sehingga pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian cenderung lebih rendah.

Selain itu infrastruktur dasar seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi layak masih menjadi permasalahan. Data menunjukkan bahwa masih terdapat persentase rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air bersih dan jamban yang layak, sehingga berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Pada sektor pendidikan, capaian dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan menunjukkan kemajuan, meskipun kesenjangan masih terlihat. Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar mencapai 93,46%, namun menurun signifikan pada jenjang pendidikan menengah. Tingginya persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD/SLTP (51,68%) mengindikasikan korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan kemiskinan, sekaligus menunjukkan area prioritas untuk intervensi kebijakan.

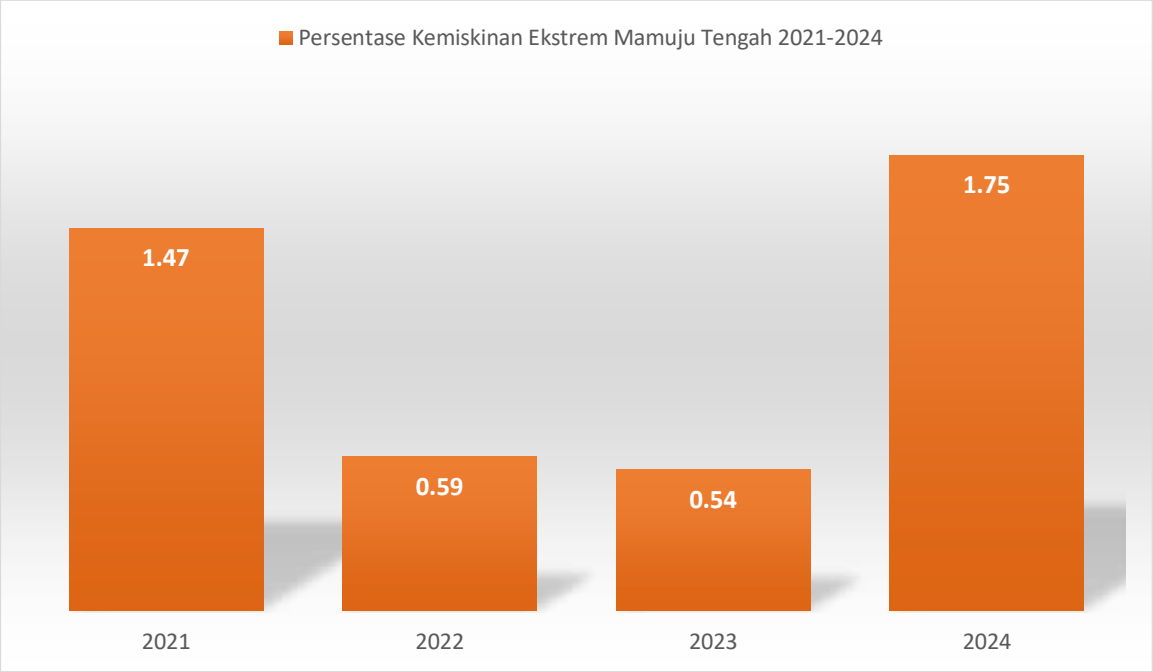
Kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa indikator, seperti penurunan angka kematian ibu dan peningkatan cakupan imunisasi dasar. Namun, disparitas akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Infrastruktur kesehatan berupa pusat kesehatan masyarakat dan tenaga medis menunjukkan rasio yang masih di bawah standar nasional, dengan distribusi yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten.

Tata kelola pemerintahan mengalami perbaikan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, tercermin dari peningkatan opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah. Namun, efektivitas program-program pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan, masih menghadapi tantangan signifikan. Data menunjukkan adanya masalah serius dalam ketepatan sasaran program bantuan sosial, dengan hanya 17,11% rumah tangga miskin yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2022, mengindikasikan kelemahan dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan.

Dalam konteks penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, terdapat peningkatan luas kawasan terbangun yang mencapai 6,8% dari total luas wilayah. Pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan masih memerlukan penguatan, terutama terkait dengan konversi lahan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi lingkungan, khususnya pada daerah-daerah dengan topografi yang rentan terhadap bencana alam.

Secara keseluruhan, kondisi umum Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang moderat dalam berbagai aspek pembangunan, namun masih diiringi dengan tantangan struktural yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, transformasi ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas institusional pemerintah daerah.

Gambar 3. 4 Persentase Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024

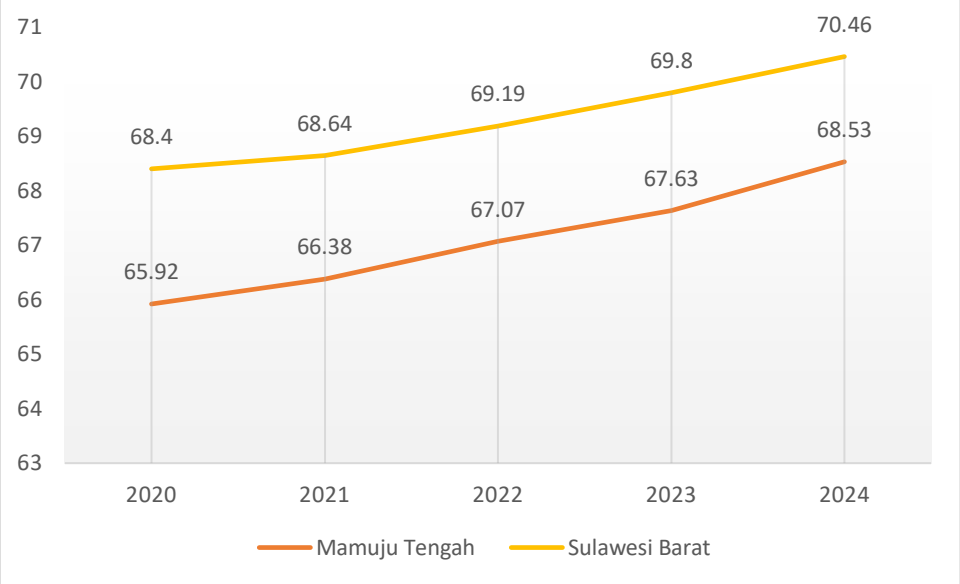


Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan kualitas pembangunan suatu wilayah dari perspektif manusia sebagai subjek pembangunan. Berbeda dengan indikator ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang hanya berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, IPM mengintegrasikan tiga dimensi fundamental pembangunan manusia yaitu kesehatan (diukur melalui Umur Harapan Hidup), pendidikan (diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan). Integrasi ketiga dimensi ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, menjadikannya indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tercatat IPM Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 65,92, meningkat menjadi 66,38 pada 2021, 67,07 pada 2022, 67,63 pada 2023, dan mencapai 68,53 pada 2024. Capaian terakhir pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,33% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan pencapaian signifikan mengingat kompleksitas peningkatan IPM yang melibatkan berbagai dimensi pembangunan. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, posisi IPM Mamuju Tengah masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 70,46 pada tahun 2024, serta di bawah kabupaten lain seperti Majene (73,25), Mamuju (71,86), dan Pasangkayu (71,04). Namun demikian, laju pertumbuhan IPM Mamuju Tengah menunjukkan tren positif yang mengindikasikan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Gambar 3. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Analisis sektoral menunjukkan bahwa peningkatan IPM Mamuju Tengah pada tahun 2024 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponennya. Dalam dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 69,76 tahun pada 2023 menjadi 70,05 tahun pada 2024, atau tumbuh sebesar 0,42%. Meskipun pertumbuhannya relatif kecil, peningkatan UHH ini mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan dan lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, kecukupan gizi, dan kualitas lingkungan. UHH 70,05 tahun menandakan bahwa rata-rata penduduk Mamuju Tengah yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga usia tersebut, menggambarkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dimensi pendidikan Mamuju Tengah juga menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,66 tahun pada 2023 menjadi 13,68 tahun pada 2024, menandakan bahwa anak-anak usia sekolah di Mamuju Tengah kini memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi (setara semester awal perguruan tinggi). Peningkatan HLS ini mencerminkan keberhasilan upaya perluasan akses pendidikan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di kabupaten tersebut. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan dari 7,73 tahun pada 2023 menjadi 7,94 tahun pada 2024, atau setara dengan jenjang SMP kelas 2. Meskipun masih tergolong rendah dibandingkan dengan standar pendidikan 12 tahun, tren peningkatan RLS menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam tingkat pendidikan masyarakat Mamuju Tengah. Kesenjangan antara HLS dan RLS mengindikasikan adanya potensi peningkatan kualitas pendidikan di masa depan, seiring dengan semakin banyaknya generasi muda yang menempuh pendidikan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya.

Komponen standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan juga mencatat kenaikan signifikan dari 8.821 ribu rupiah pada 2023 menjadi 9.250 ribu rupiah pada 2024, atau tumbuh sebesar 4,86%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat Mamuju Tengah, yang mencerminkan kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa indikator pengeluaran per kapita ini juga perlu dilihat dalam konteks kecukupan dan kualitas pengeluaran, khususnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan vs non-pangan, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya.

Jika dilihat dari perkembangan historisnya, IPM Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil meskipun dengan laju yang bervariasi. Peningkatan IPM yang relatif moderat pada periode 2020-2021 (dari 65,92 menjadi 66,38 atau naik 0,7%) kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial. Namun pada periode berikutnya, laju peningkatan IPM mulai mengalami akselerasi, khususnya pada periode 2023-2024 yang mencatat pertumbuhan 1,33%. Akselerasi ini menunjukkan keberhasilan program pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Makro Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	-1,02	3,26	2,34	2,77	2,98
2	PDRB Per Kapita	23.849	25.934	27.266	28.531	31.387
3	TPT	2,71	2,52	1,88	1,83	1,70
4	Kemiskinan	6,79	7,13	7,17	7,32	7,72
5	IPM	65,92	66,38	67,07	67,63	68,53

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

3.1.3.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah

Struktur ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah yang didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (71,93% dari PDRB pada 2023) memiliki dampak signifikan terhadap kualitas ketenagakerjaan. Dominasi sektor primer ini menyebabkan beberapa konsekuensi dalam pasar tenaga kerja: (1) prevalensi pekerjaan musiman dengan produktivitas dan pendapatan rendah; (2) keterbatasan penyerapan tenaga kerja terdidik; dan (3) tingginya underemployment atau setengah pengangguran.

Komposisi PDRB sektoral yang didominasi pertanian (lebih dari 70%) dengan kontribusi signifikan namun rendah terhadap pendapatan per kapita mengindikasikan produktivitas tenaga kerja yang rendah di sektor ini. Kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap PDRB hanya sekitar 0,84-0,92%, sementara sektor konstruksi berkontribusi sekitar 1,23-1,28%, menunjukkan keterbatasan diversifikasi ekonomi lokal.

Kontribusi sektor industri pengolahan yang relatif kecil namun menunjukkan tren peningkatan (dari 8,98% pada 2021 menjadi 9,22% pada 2023) mengindikasikan adanya potensi diversifikasi ekonomi meskipun dengan laju yang masih lambat. Pengembangan sektor industri pengolahan, khususnya yang berbasis produk pertanian lokal, dapat menjadi katalisator dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

Transformasi struktural ekonomi Mamuju Tengah masih pada tahap awal, ditandai dengan masih dominannya sektor pertanian dengan produktivitas rendah dan belum berkembangnya sektor sekunder yang mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi dan terbatasnya investasi di sektor manufaktur, terlihat dari rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan (kurang dari 10%) terhadap PDRB.

Pendapatan per kapita ADHB Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan moderat dari Rp25.934 ribu pada 2021 menjadi Rp28.531 ribu pada 2023, dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,92%. Meskipun demikian, nilai ini masih berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Barat. PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga menunjukkan pertumbuhan terbatas dari Rp16.618 ribu (2021) menjadi Rp16.831 ribu (2023), dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata hanya 0,64%.

Keterbatasan pertumbuhan pendapatan per kapita ini mencerminkan tantangan produktivitas tenaga kerja yang dihadapi Mamuju Tengah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas meliputi: (1) keterbatasan adopsi teknologi dan praktik pertanian modern di sektor dominan; (2) rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja; (3) keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi; dan (4) terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan analisis komprehensif ini, Kabupaten Mamuju Tengah perlu mengadopsi pendekatan dual-track dalam mengelola pasar tenaga kerja, dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja produktif sekaligus penguatan kualitas angkatan kerja. Transformasi sektor pertanian dari subsisten menuju komersial dan berorientasi nilai tambah menjadi prasyarat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dengan penekanan pada pengembangan agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Akselerasi pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi juga diperlukan untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian dengan produktivitas lebih tinggi. Dengan modal dasar berupa TPT rendah dan struktur demografi yang mendukung, penanganan tantangan struktural dalam kualitas ketenagakerjaan dan produktivitas secara terintegrasi akan mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi Kabupaten Mamuju Tengah.

Posisi IPM Mamuju Tengah yang masih berada di bawah rata-rata provinsi mencerminkan tantangan pembangunan yang dihadapi wilayah ini sebagai kabupaten yang relatif baru hasil pemekaran. Kesenjangan pembangunan antar-wilayah dalam provinsi yang sama merupakan

fenomena umum, terutama untuk daerah-daerah pemekaran yang masih dalam proses konsolidasi dan pengembangan infrastruktur dasar. Namun demikian, tren pertumbuhan IPM yang positif dan konsisten memberikan optimisme bahwa kesenjangan tersebut dapat dipersempit seiring dengan waktu, dengan catatan bahwa pemerintah daerah terus memprioritaskan investasi pada sektor-sektor yang berkontribusi langsung pada peningkatan IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dari segi demografis, karakteristik Mamuju Tengah sebagai daerah dengan komposisi penduduk yang beragam, meliputi penduduk asli dan pendatang, memberikan tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan manusia. Di satu sisi, keberagaman ini dapat menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dengan potensi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Di sisi lain, perpaduan berbagai latar belakang budaya dan keahlian dapat menjadi modal sosial yang berharga untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah. Agar potensi ini dapat dioptimalkan, diperlukan pendekatan pembangunan inklusif yang memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Struktur ekonomi Mamuju Tengah yang masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian dan perkebunan, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika IPM. Ketergantungan pada sektor primer dengan nilai tambah yang relatif rendah membatasi potensi peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berimplikasi pada dimensi standar hidup layak dalam IPM. Diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor dengan nilai tambah lebih tinggi seperti pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan jasa menjadi penting untuk mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui adopsi teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani yang merupakan mayoritas penduduk Mamuju Tengah.

Dari perspektif pembangunan wilayah, karakteristik geografis Mamuju Tengah yang beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan, menghadirkan tantangan dalam pemerataan akses terhadap layanan dasar. Ketimpangan spasial dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi berpotensi menciptakan disparitas IPM antar-wilayah dalam kabupaten yang sama. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah menjadi penting untuk memastikan pembangunan manusia yang lebih merata. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar ibukota kabupaten dan penguatan konektivitas antar-wilayah dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketimpangan spasial dan meningkatkan IPM secara agregat.

Jika dikaji dari aspek kelembagaan, peningkatan konsisten IPM Mamuju Tengah mencerminkan adanya kapasitas kelembagaan yang memadai dalam mengelola pembangunan. Koordinasi antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan, perencanaan berbasis bukti, serta monitoring dan evaluasi yang efektif merupakan prasyarat untuk

keberhasilan program-program yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan perlu terus diperkuat untuk mengakselerasi peningkatan IPM di masa depan.

Tabel 3. 6 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73
2	PDRB Per Kapita	Rp (juta)	33,25
3	Inflasi	Persen	2,5±1
4	Tingkat Kemiskinan	%	7,07
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,63
6	Rasio Gini	Indeks	0,300
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,77
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (tahunan)	Ton CO_2 e	*31.680,40*
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (komulatif)		*273.490,27*

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah dengan bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efesien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan berdasarkan 4 (empat) Pilar utama yaitu mengembangkan system pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efesien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaran layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam Pengelolaan Belanja Daerah telah diatur diundang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Belanja Daerah yang disusun menggunakan 3 (tiga) pendekatan :

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
2. Dilaksanakan dengan Menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap
3. Penganggaran Terpadu:
4. Berisi perkiraan kebutuhan anggran untuk program,kegiatan,dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
5. Penganggaran berbasis kinerja.

6. Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan anatara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan / sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan,serta efesiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Arah Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif,efesien,transparan,tertib,akuntabel dan tepat saran, dengan berdasar analisis perkembangan ekonomi daerah. Diharapkan ditahun 2026 kondisi keuangan daerah sudah stabil dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2026 secara umum diarahkan untuk :

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2026 diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (substained), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
2. Kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Mamuju Tengah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program/kegiatan prioritas, terutama diarahkan untuk pencapaian target sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2026;
3. Kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2026 diarahkan untuk meningkatkan daya dukung keuangan daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan optimaslisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong kemandirian keuangan melalui upaya pemenuhan kebutuhan biaya operasional bagi OPD pengampuh pendapatan serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, Peningkatan kualias Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan menajemen pendapatan dengan memegang teguh prinsip integritas dan profesionalitas, pengembangan konsep pelayanan berbasi teknologi informasi, serta memberikan banyak pilihan layanan pembayaran ke masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13, adalah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggatan yang bersangkutan. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada

umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;

2. Dana Transfer, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Proyeksi pendapatan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
4	**PENDAPATAN**	**615.559.616.256,00**	**670.474.668.815,66**	**669.751.492.868,69**	**662.819.052.296,00**	**639.759.030.274,60**
4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**31.504.006. 348,00**	**43.089.865.860,66**	**51.819.614.198,69**	**59.705.093.186,00**	**68.760.387.168,97**
4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah	11.993.858 .368,00	10.986.888.633,00	12.064.921.118,00	23.965.016.835,00	26.470.138.035,19
4 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.196.958 .500,00	28.164.198.735,00	14.022.486.339,00	31.362.077.753,00	37.089.402.400,42
4 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	990.000.000,00	482.055.891,00	729.061.014,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00
4 1 4	Lain-lain PAD Yang Sah	2.323.189. 480,00	3.456.722.601,66	25.003.145.727,69	2.397.998.598,00	3.220.846.733,36
4 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**559.325.940.573,00**	**620.367.960.197,00**	**610.185.349.767,00**	**608.720.168.605,48**	**561.980.585.634,55**
4 2 1	Pendapatan Transfer PemerintahPusat	537.759.475.490,00	593.634.511.061,00	635.232.475.129,00	591.456.208.000,00	543.750.547.260,13
4 2 3	Pendapatan Transfer PemerintahDaerah Lainnya	21.566.465. 083,00	26.733.449.136,00	26.414.089.638,00	17.263.960.605,48	18.230.038.374,42
4 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**24.729.669. 335,00**	**7.016.842.758,00**	**7.746.528.903,00**	**8.339.182.911,00**	**9.018.057.471,08**
4 3 1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00			
4 3 3	Lain – Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	24.729.669 .335,00	7.016.842.758,00	7.746.528.903,00	8.339.182.911,00	9.018.057.471,08

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan trend pendapatan pada sektor pendapatan asli daerah yang meliputi komponen pajak daerah, pajak daerah yang cenderung mengalami peningkatan di tiga (3) tahun terakhir (2022 – 2024) melihat dari sektor Peningkatannya tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah dalam skala makro dan pertambahan wajib pajak, penambahan subjek pajak baru, serta peningkatan nilai pajak terutang dibeberapa jenis pajak pada skala mikro.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026 yang merupakan perkiraan sebagai penerimaan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai urusannya

diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diproyeksikan mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan.

Peningkatan pendapatan ini dihitung menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Wajib Pajak yang taat dan yang tidak taat pajak, sehingga memungkinkan fokus penagihan dan dapat maksimal, dengan membentuk tim Satgas PAD sebagai kolaborasi antar Stakeholder dalam pendampingan dan edukasi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak sekaligus Identifikasi perizinan wajib pajak. Jenis pajak yang dimaksud diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Reklame, dan yang lebih khusus lagi dalam hal ini adalah jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Perbaikan/pemutakhiran data pajak pada jenis Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dimana PBB-P2 ini merupakan penerimaan yang paling menunjang penerimaan PAD Kabupaten Mamuju Tengah Sampai saat ini. Pemutakhiran yang dimaksud adalah usulan penghapusan data ganda dan tidak diketahui yang selama ini membebani jumlah piutang yang membengkak. Selain itu, pelunasan PBB-P2 bagi ASN menjadi salah satu syarat dalam penerimaan Tambahan penghasilan pegawai.
3. Potensi Peningkatan Pajak Penerangan Jalan dengan Instensifikasi koordinasi dengan PLN terkait data umum pelanggang listrik perumahan dalam hal ini khusus PLN Cabang setempat wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Memaksimalkan potensi penerimaan dari opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
5. Meningkatkan kinerja Agen PAD dalam rangka optimalisasi penerimaan dan kontrol PAD ditingkat kecamatan.
6. Evaluasi dan reformulasi regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui : (i) perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, (ii) penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah;
8. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan baru;
9. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah ditahun 2026 masih tetap mengacuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan juga tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029. Struktur belanja daerah Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat.
c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja hibah tahun 2025 antara lain digunakan untuk pembiayaan PAUD/TK, SD, , pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2025 dirinci atas jenis:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyrakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Berikut proyeksi belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026:

Tabel 3. 8 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	Realisasi TAHUN 2024	Target TAHUN 2025	Proyeksi Tahun 2025
BELANJA	**595.806.088.137,00**	**632.249.115.552,00**	**697.199.722.327,00**	**678.764.444.702,48**	**645.759.030.274,60**
BELANJA OPERASI	**401.524.797.450,00**	**407.880.179.375,00**	**468.766.363.811,00**	**477.349.153.978,72**	**444.678.016.842,50**
Belanja Pegawai	158.953.128.063,00	186.514.182.863,00	224.098.755.376,00	273.530.543.004,93	280.368.806.580,05
Belanja Barang dan Jasa	218.041.091.580,00	200.826.460.987,00	203.078.457.820,00	189.212.886.445,79	156.022.467.535,61
Belanja Bunga	1.972.540.314,00	0	0	0	0,00
Belanja Hibah	21.891.737.493,00	20.415.535.525,00	41.570.650.615,00	14.585.724.528,00	8.186.742.726,83
Belanja Bantuan Sosial	666.300.000,00	124.000.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan					
BELANJA MODAL	**108.670.775.934,00**	**131.997.518.417,00**	**139.134.589.716,00**	**110.306.147.223,76**	**111.276.776.606,10**
BELANJA TAK TERDUGA	**2.382.146.753,00**	**326.062.160,00**	**475.105.500,00**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000,00**
Belanja Tak Terduga	2.382.146.753,00	326.062.160,00	475.105.500,00	2.000.000.000	2.000.000.000,00
TRANSFER	**83.228.368.000,00**	**87.378.503.300,00**	**88.823.663.300,00**	**89.109.143.500,00**	**87.804.236.826,01**
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	83.228.368.000,00	87.378.503.300,00	88.823.663.300,00	89.109.143.500,00	87.804.236.826,01
JUMLAH BELANJA	**595.806.088.137,00**	**691.421.652.801,00**	**697.199.722.327,00**	**678.764.444.702,48**	**645.759.030.274,60**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

Kebijakan perencanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus bersifat spesifik, terukur, realistis serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Belanja Daerah dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai target RPJMD untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 serta selaras dengan prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
6. Memberikan tambahan penghasilan bagi PNS guna lebih mendorong peningkatan kinerja.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi akibat tingginya kebutuhan belanja maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk menambah belanja yang masih prioritas.

Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi dengan memperhatikan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Berikut tabel proyeksi target pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**14.369.614.343,00**	**6.156.200.188,00**	**41.381.753.452,10**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.369.614.343,00	6.156.200.188,00	41.381.753.452,10	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**24.072.096.104,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**
Pembentukkan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	22.166.665.780,00	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO	**(9.702.481.760,00)**	**3.156.200.188,00**	**41.381.753.452,10**	**4.156.200.188,44**	**6.000.000.000,00**

Sumber: Badan Keuangan Kabu[aten Mamuju Tengah, 2025

Adapun strategi pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 yaitu :

1. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
3. Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dan efisien.
4. Pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 disusun dan mengacu pada Rancangan Awal Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rancangan awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dari visi misi ini diturunkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan (2025-2029) dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap pertama rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan memperhatikan isu-isu strategis aktual. Kesesuai Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 Tahun Pelaksanaan 2026 dengan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(T1) Mewujudkan manusia dan masyarakat yang sehat dan panjang umur, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dari kemiskinan dan kerentanan	IPM	Indeks	69,77	(T1) Mewujudkan manusia dan masyarakat yang sehat dan panjang umur, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dari kemiskinan dan kerentanan	IPM	Indeks	69,77	
	(S1.1) Meningkatnya kualitas modal manusia	Indeks Pendidikan	Indeks	62,97	(S1.1) Meningkatnya kualitas modal manusia	Indeks Pendidikan	Indeks	62,97	
		Indeks Kesehatan	Indeks	0,75		Indeks Kesehatan	Indeks	0,75	
		Prevalensi Stunting	Persen	25,5		Prevalensi Stunting	Persen	25,5	
	(S1.2) Berkurangnya Penduduk Miskin dan Ketimpangan Pendapatan	Angka Kemiskinan	Persen	7,07	(S1.2) Berkurangnya Penduduk Miskin dan Ketimpangan Pendapatan	Angka Kemiskinan	Persen	7,07	
		Gini Ratio	Indeks	0,300		Gini Ratio	Indeks	0,300	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
	(T2) Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita ADHB	Juta Rupiah	33,25	(T2) Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	33,25	
		PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	17,59		PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	17,59	
	(S2.1) Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja perekonomian daerah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,73	(S2.1) Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja perekonomian daerah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,73	
		TPT	Persen	1,63		TPT	Persen	1,63	
	(S2.2) Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah	Kontribusi Industri Pengelolaan dalam PDRB	Persen	9,35	(S2.2) Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah	Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	9,35	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
	(S2.3) Berkembangnya Digitalisasi dan Inovasi Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	43	(S2.3) Berkembangnya Digitalisasi dan Inovasi Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	43	
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,7		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,7	
	(T3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Inovasi Birokrasi	Indeks	60,5	(T3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,5	
	(S3.1) Meningkatnya kualitas produk hukum dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,25	(S3.1) Meningkatnya kualitas produk hukum dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Indeks reformasi Hukum	Indeks	97,25	
		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)(LAN)	Indeks	50,5		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (LAN)	Indeks	50,5	
	(S3.2) Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	S3.2) Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WTP	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
	(S3.3)Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pemerintahan Digital Pemdi)	Indeks	1,5	(S3.3)Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi)	Indeks	1,5	
	(S3.4) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,01	(S3.4) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,01	
		Skor survey kepuasan masyarakat	Nilai	76,00		Skor survey kepuasan masyarakat	Nilai	76,00	
	(T4) mewujudkan kondisi daerah yang aman untuk semua dan Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	Indeks Kriminalitas	Indeks	0,16	(T4) mewujudkan kondisi daerah yang aman untuk semua dan Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	Indeks Kriminalitas	Indeks	0,16	
	(S4.1) terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum, sosial politik dan	Penurunan Tingkat Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persen	40	(S4.1) terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum, sosial politik dan	penurunan tingkat gangguan keamanan dan ketertiban	Persen	40	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
	demokrasi substansial	Persentase Penegakan Perda	Persen	10	demokrasi substansial	persentase penegakan perda	Persen	10	
	(S4.2) terwujudnya stabilitas kebutuhan pokok masyarakat secara merata	Tingkat Inflasi	Persen	2,5±1	(S4.2) terwujudnya stabilitas kebutuhan pokok masyarakat secara merata	Tingkat Inflasi	Persen	2,5±1	
	(S4.3) Meningkatnya Literasi Keuangan Pelaku Ekonomi	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Indeks	2.55	(S4.3) meningkatnya literasi keuangan pelaku ekonomi	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD	Indeks	2.55	
	(T5) Mewujudkan ketahanan sosial-budaya dalam bingkai Lalla Tassisara	indeks Kerukunan umat beragama	Indeks	77,90	(T5) Mewujudkan ketahanan sosial-budaya dalam bingkai Lalla Tassisara	indeks Kerukunan umat beragama	Indeks	77,90	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
	(S5.1) Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,48	(S5.1) Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,48	
	(S5.2) terpeliharanya adat istiadat lokal dan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	67	(S5.2) terpeliharanya adat istiadat lokal dan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	67	
	(T6) Meningkatkan ketahanan ekologi dalam meghadapi berbagai kerentanan akibat bencana dan perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2 e) Tahunan	ton CO2 e	31.680,40	(T6) Meningkatkan ketahanan ekologi dalam meghadapi berbagai kerentanan akibat bencana dan perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2 e)	ton CO2 e	31.680,40	
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2 e) Komulatif	ton CO2 e	273.490,27		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2 e) Komulatif	ton CO2 e	273.490,27	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
	(S6.1) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,64	(S6.1) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,64	
	(S6.2) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	IKLHD	Indeks	87,15	(S6.2) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	IKLHD	Indeks	87,15	
	(T7) mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah	Indeks Desa	Indeks		(T7) mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah	Indeks Desa	Indeks		
	(S7.1) Terwujudnya kawasan agropolitan	Persentase desa yang memiliki lapangan usaha berbasis industri dan jasa layanan pertanian	Persen	30	(S7.1) Terwujudnya kawasan agropolitan	Persentase desa yang memiliki lapangan usaha berbasis industri dan jasa layanan pertanian	Persen	30	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	74,75		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	74,75	
	(S7.2)terwujudnya pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru dan berkelanjutan	Nilai SDG's desa	Nilai	45,00	(S7.2)terwujudnya pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru dan berkelanjutan	Nilai SDG's desa	Nilai	45,00	
	(T8) meningkatkan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan sarana-prasarana pelayanan dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	71,05	(T8) meningkatkan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan sarana-prasarana pelayanan dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	71,05	
	(S8.1) terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar	Indeksdaya saing Infrastruktur Daerah	Indeks	80,05	(S8.1) terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana	Indeksdaya saing Infrastruktur Daerah	Indeks	80,05	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
	serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan				prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan				
	(T9) mewujudkan kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,23	(T9) mewujudkan kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,23	
	(S9.1) meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	Nilai SAKIP	Nilai	61,5 (B)	(S9.1) meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	Nilai SAKIP	Nilai	61,5 (B)	
	(S9.2) meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Kabupaten	Rupiah	650.000.000.000	(S9.2) meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Kabupaten	Rupiah	650.000.000.000	

4.2. Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah disusun dengan memperhatikan Tema dan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

4.2.1. Tema RKPD Tahun 2026

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mamuju Tengah ini disusun, terdapat Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 yakni **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional yang memastikan keberlanjutan pembangunan sebagaimana diamanatkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokraso dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastrukturdan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Memnangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Penekanan prioritas pembangunan pada RKP 2026 terdiri dari 5 direktif presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh prioritas nasional.

Kedaulatan Pangan dan Energi	Pangan: - optimalisasi BULOG - Pelaksanaan lumbung pangan (food estate)	
	Energi: - peningkatan bauran ethanol dan biodiesel - energi terbarukan	
	Air: - pengembangan SPAM terintergrasi hulu ke hilir	
	Pengelolaan Sampah*	
Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Pendidikan dan Kesehatan: - ekosistem makan bergizi gratis - percepatan renovasi sekolah - sekolah unggulan - cek kesehatan - percepatan rumah sakit daerah **- Digitalisasi Pendidikan***	Deregulasi dan Kepastian Hukum: - Reformasi Birokrasi - Kemudahan berbisnis - Ketertarikan Investasi
	Pertahanan Semesta: - Komponen cadangan - pemenuhan alutsista - ketertarikan investasi	Percepatan pertumbuhan ekonomi: - percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia - Optimalisasi potensi Danantara
	Adopsi Teknologi dan Inovasi: - Transformasi digital - Riset dan Inovasi	Percepatan Pengentasan Kemiskinan: - Data tunggal kemiskinan - digitalisasi bantuan - 3 juta rumah - koperasi desa/ kelurahan
	Fiskal Adaptif dan Stabilitas Ekonomi Makro	

Melalui tema RKP nasional ini ditetapkan Program Strategis Nsional (ProSN). Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 4. 2 Program Strategis Nasional (ProSN)

No	ProSN	Proyek Kegiatan
1.	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk mendukung swasembada pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (sawah/lumbung pangan (*Food estate*)
3.	Kesehatan untuk semua	1.Stunting
		2. Pemeriksaan kesehatan gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional
		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap
4.	Perluasan akses pendidikan	1. Pembangunan dan revitalisasi PAUD
		2. Pembangunan dan Revitalusasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggulan Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran

No	ProSN	Proyek Kegiatan
		4. Makanan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (investasi, lapangan pekerjaan)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan sampah

Selain merujuk pada Tema RKP, RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 juga memperhatikan Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yaitu **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat".** Tema pembangunan ini disusun dengan 5 (lima) prioritas pembangunan:

(1) Penguatan sektor ekonomi produktif yang berdaya saing. Sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, dan UMKM, berdaya saing meliputi produktivitas, diversifikasi, hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja;
(2) Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perluasan jangkauan bantuan sosial yang berbasis data akurat (DTSEN) serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan dan masyarakat miskin;
(3) Peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. Pemerataan akses pendidikan berkualitas dan vokasi, penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas;
(4) Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkelanjutan. Pembangunan jalan, jembatan, dan infratsruktur lainnya serta penerapan infrastruktur hijau dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
(5) Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang transparan, kakuntabel dan berbasis teknologi, pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Meningkatkan koordinasi dan penegakan hukum guna menciptakan rasa aman, tertib dan kondusifitas wilayah.

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Mamuju Tengah serta memperhatikan tema indikatif RKP 2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, maka disepakati tema pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 adalah: **"Perluasasn Swasembada Pangan dan Penguatan Infrastruktur dasar Wilayah".**

Tema pembanguan Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Mamuju Tengah sesuai Rancangan RPJMD Kabupaten Mauju Tengah Tahun 2025-2029 yaitu **Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Yang dijabarkan ke dalam 8 Misi pembangunan (Asta KUAT), yakni (1) Memperkuat transformasi sosial; (2) Memperkuat Transformasi Ekonomi; (3) Memperkuat

transformasi tata kelola; (4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro; (5) Memelihara ketahanan sosial dan ekonogi; (6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata; (7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas; (8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah.

Keterkaitan Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 dengan RKP Nasional Tahun 2026 dapat dimaknai:

- **Perluasan Swasembada Pangan** mendukung **kedaulatan pangan** dengan meningkatkan produksi pertanian lokal, kemandirian petani, dan pengurangan ketergantungan pada impor bahan pangan.
- **Penguatan Infrastruktur Dasar** seperti jalan usaha tani, irigasi, dan akses pasar akan memperkuat rantai pasok pertanian dan mempercepat distribusi pangan serta energi secara efisien.
- Dengan pembangunan sektor pertanian yang berbasis lokal dan didukung infrastruktur, Mamuju Tengah berkontribusi pada **ekonomi produktif**, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil sebagai bentuk **ekonomi inklusif**.

Keterkaitan Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Sulaweis Barat] Tahun 2026 dapat dimaknai:

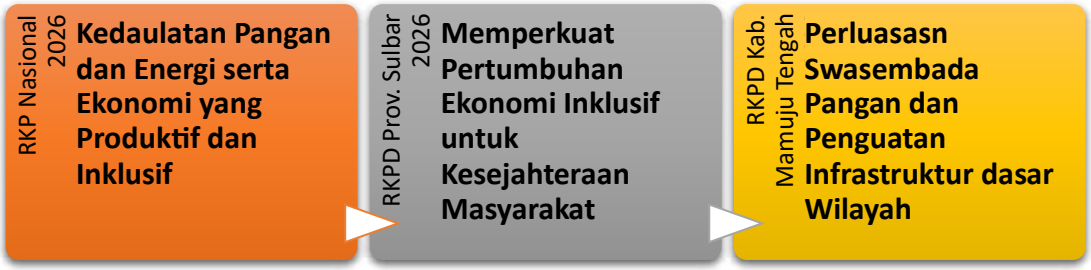
- **Fokus pada swasembada pangan** secara langsung membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, dan mendorong tumbuhnya agroindustri berbasis lokal.
- **Infrastruktur dasar wilayah** (seperti jalan desa, listrik, dan sanitasi) memungkinkan keterhubungan antarwilayah, pemerataan akses layanan dasar, dan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
- Hal ini mendukung **pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan (inklusif)**, serta memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah secara menyeluruh

Keterkaitan tema pembangunan ini menjadi penjabaran stategis lokal dan prioritas nasional dan provinsi dengan pendekatan sektor unggulan yang fokus pada pertanian sebagai kekuatan utama ekonomi daerah, konektivitas wilayah fokus pada meningkatkan infratruktur untuk mempercepat perputaran ekonomi dan inklusivitas yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dan merasakan hasil pembangunan.

Tabel 4. 3 Keterkaitan Tema Pembangunan Tahun 2026

Dokumen Perencanaan	Tema Pembangunan	Keterkaitan/Substansi Sejalan
RKP Nasional 2026	Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	- Swasembada pangan mendukung kedaulatan pangan nasional - Infrastruktur dasar mempercepat distribusi dan produktivitas ekonomi lokal - Mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan UMKM secara inklusif
RKPD Provinsi Sulbar 2026	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat	- Swasembada pangan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani - Infrastruktur dasar mendukung keterhubungan antarwilayah dan pelayanan dasar masyarakat
RKPD Mamuju Tengah 2026	Perluasan Swasembada Pangan dan Penguatan Infrastruktur Dasar Wilayah	- Fokus pada pertanian sebagai sektor unggulan daerah - Mendorong konektivitas dan aksesibilitas untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan

Gambar 4. 4 Keselarasan Tema Pembangunan RKP , RKPD Sulawesi Barat dan RPPD Mamuju Tengah Tahun 2026



4.2.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 berdasarkan permasalahan dan isu strategis maka tahapan pembangunan untuk tahun 2026 atau tahun kedua dalam RPJMD 2025-2029 diprioritaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses Pendidikan
2. Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin
3. Optimalisasi Sentra Produksi Pertanian
4. Penguatan Dasar Industri Daerah
5. Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital
6. menguatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran
7. penguatan pondasi kelembagaan, kebijakan dan infrasturktur dasar SPBE
8. Pembangunan infrastruktur dasar prioritas dan peningkatan kapsasitas sumber daya manusia
9. Optimalisasi sosialisasi kerangka kebijakan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sosial politik dan demokarasi substansial
10. Penyusunan sistem pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan pokok dan hasil perikanan
11. Persiapan dan penguatan dasar penyusunan regulasi daerah untuk mendukung literasi keuangan
12. memfasilitasi pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak di berbagai bidang
13. memfasilitasi kegiatan keagamaan serta forum komunikasi umat beragama forum komunikasi, budaya dan suku
14. Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi
15. Konsolidasi dan Perencanaan Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan
17. Optimalisasi sosialisasi kerangka kebijakan Rencana Detai Tata Ruang
18. Perencanaan, Pemetaan dan Konsolidasi Awal infrastruktur Dasar
19. Harmonisasi Perencanaan Dan Penganggaran
20. Menetapkan Fondasi Dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah

Tabel 4. 5 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
(S1.1)	Meningkatnya kualitas modal manusia	meningkatkan akses pendidikan PAUD, SD, SMP melalui pemberian beasiswa, perlengkapan sekolah, mengembalikan anak putus sekolah kembali bersekolah, rehabilitasi sarpras pendidikan dengan lokus prioritas di kecamatan/kawasan pesisir (paling banyak anak putus sekolah)	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; pengendalian penduduk; pembinaan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
(S1.2)	Berkurangnya Penduduk Miskin dan Ketimpangan Pendapatan	pemutakhiran dan pengintegrasian data kemiskinan, pemberian bantuan sosial bagi petani, nelayan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, serta pembangunan dan rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Program perencanaan tenaga kerja; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
(S2.1)	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja perekonomian daerah secara berkelanjutan	Optimalisasi sentra produksi pertanian di Topoyo, Budong-Budong, dan Tobadak sebagai basis agropolitan dengan penerapan teknologi pertanian presisi, pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi, dan pemberdayaan petani melalui transfer teknologi untuk peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan daerah.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm); Program Pengembangan Umkm; Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi; Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
(S2.2)	Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah	penguatan dasar industri daerah yang fokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung industri dan pemetaan pitensi industri unggulan daerah dengan kegiatan utama kajian potensi dan klaster industri (perkebunan, perikanan, UMKM olahan) dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan Persampahan; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Program Pengawasan Keamanan Pangan; Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
(S2.3)	Berkembangnya Digitalisasi dan Inovasi Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah	Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital di seluruh kecamatan dengan fokus pada Tobadak sebagai percontohan kota digital, pengembangan akses internet di daerah tertinggal, pelatihan digital bagi UMKM dan petani, serta penyusunan peta jalan transformasi digital daerah sebagai fondasi ekonomi digital yang inklusif.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik; Program Riset Dan Inovasi Daerah; Program Pembinaan Perpustakaan; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
			Dan Usaha Mikro (Umkm)
(S3.1)	Meningkatnya kualitas produk hukum dan akuntabilitas pemerintahan daerah	menguatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja serta pelatihan teknis untuk seluruh OPD, serta menyusun rencana aksi MCP terpadu.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd; Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan Dan Asistensi; Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan Dan Asistensi
(S3.2)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Penyelarasan regulasi dan kebijakan melalui Identifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan yang masih tumpang tindih atau belum optimal, penetapan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan untuk setiap perangkat daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd; Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan Dan Asistensi; Program Pengelolaan Keuangan Daerah
(S3.3)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	penguatan pondasi kelembagaan, kebijakan dan infrasturktur dasar SPBE melalui strategi harmonisasi arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE nasional, tata kelola data melalui penyusunan kebijakan pengelolaan data dan pembentukan tim koordinasi SPBE lintas OPD, infrastruktur digital dengan pemutakhiran jaringan dan perangkat keras di seluruh OPD dan UPT dan integrasi domain aplikasi, serta pelatihan dasar ASN terkait literasi digital dan manajemen SPBE	Pengelolaan Aplikasi Informatika; Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Penataan Organisasi; Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Pendapatan Daerah; Kepegawaian Daerah; Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
(S3.4)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur dasar prioritas dan peningkatan kapsasitas	Pelayanan Penanaman Modal;

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
		sumber daya manusia melalui pengalokasian APBD tahap awal untuk pembangunan fisik dan pelatihan sumber daya manusia pelayanan, kemitraan dengan pusat untuk dana DAK Fisik dan Non fisik dengan mengintegrasikan program pembangunan MPP tingkat dasar di kabupaten, rehabilitasi kantor pelayanan kecamatan, pengaktifan PSC 119 minimal pada tingkat kabupaten, pelatihan ASN berbasis merit dan pembuatan peta kompetensi serta renovasi toilet publik di fasilitas pelayanan prioritas.	Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil
(S4.1)	terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum, sosial politik dan demokrasi substansial	Optimalisasi sosialisasi kerangka kebijakan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sosial politik dan demokarasi substansial melalui penegakan perda, peningkatan pengendalian kententaman dan ketertiban, serta penciptaan kondisi sosial politik yang kondusif dan responsif serta memperhatikan keadialan semua pihak	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran; Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
(S4.2)	terwujudnya stabilitas kebutuhan pokok masyarakat secara merata	Penyusunan sistem pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan pokok dan hasil perikanan melalui pembentukan tim pengendali inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
		daerah (TPID) yang efektif, pengembangan pusat distribusi pangan dan perikanan terpadu di Tobadak, pemantauan stok dan harga secara berkala, pengembangan cadangan pangan daerah untuk antisipasi kelangkaan dan gejolak harga, pembentukan koperasi pemasaran untuk komoditas pangan dan perikanan, serta pembangunan sistem pemantauan harga di daerah pemasok utama dari luar Kab. Mamuju Tengah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perekonomian Dan Pembangunan; Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
(S4.3)	Meningkatnya literasi keuangan pelaku ekonomi	Persiapan dan penguatan dasar penyusunan regulasi daerah untuk mendukung literasi keuangan, identifikasi dan pemetaan pelaku ekonomi lokal (UMKM, Petani, Koperasi, Nelayan), pelatihan dasar literasi keuangan untuk pengelolaan usaha, perencanaan keuangan rumah tangga dan akses layanan keuangan, penyusunan roadmap literasi keuangan daerah.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
(S5.1)	Terwujudnya kesetaraan gender	memfasilitasi pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak di berbagai bidang`melalui penguatan sinergitas, partisipasi dan kelembagaan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan, peningkatan kualitas layanan pemenuhan hak anak serta kualitas keluarga. serta fasilitas pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (Pha); Program Perlindungan Khusus Anak; Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb);

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
(S5.2)	Terpeliharanya adat kebudayaan lokal dan kehidupan sosial yang saling menghargai dan menghormati	memfasilitasi kegiatan keagamaan serta forum komunikasi umat beragama forum komunikasi, budaya dan suku melalui penyusunan kerangka regualasi serta pemberian bantuan rumah ibadah dan insentif imam masjid, guru mengaji dan pemuka agama lainnya, sayembara motif batik khas Mamuju Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pengembangan Kesenian Tradisional; Program Pembinaan Sejarah; Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengelolaan Permuseuman
(S6.1)	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi, Fokus pada Pemetaan risiko, regulasi, dan koordinasi antar lembaga, Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD),Penguatan kelembagaan BPBD dan sinergi antar OPD, Revisi dan penetapan regulasi/perda kebencanaan (RTRW berbasis risiko, Rencana Kontinjensi), Inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial, Pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa, dan relawan, Pembangunan sistem peringatan dini lokal (Early Warning System - EWS). kapasitas diperkuat (termasuk untuk mitigasi gempa)	Program Penanggulangan Bencana; Program Penanganan Bencana; Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
(S6.2)	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Konsolidasi dan Perencanaan Dasar melalui Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPSL), Pemutakhiran data sumber timbulan sampah, limbah domestik, dan sanitasi, Penetapan kebijakan dan peraturan daerah (Perda) pengelolaan sampah dan sanitasi, Identifikasi lokasi TPA/TPST dan IPAL yang tidak layak, Sosialisasi awal 3R (Reduce, Reuse, Recycle) kepada masyarakat dan Penguatan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
		kelembagaan pengelola lingkungan hidup tingkat daerah dan desa	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
(S7.1)	Terwujudnya kawasan agropolitan	Perencanaan Strategis dan Kelembagaan, (Penyusunan Masterplan Agropolitan: Merumuskan rencana induk yang komprehensif, mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan program pengembangan agropolitan. Pembentukan Kelembagaan: Membentuk tim koordinasi lintas sektor atau badan pengelola agropolitan yang melibatkan berbagai dinas terkait, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Penyusunan Kebijakan Pendukung: Merumuskan kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung pengembangan agropolitan (misalnya, insentif investasi, kemudahan perizinan)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Program Penyuluhan Pertanian

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
(S7.2)	terwujudnya pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru dan berkelanjutan	Optimalisasi sosialisasi kerangka kebijakan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Administrasi Pemerintahan Desa; Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
(S8.1)	terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan	Perencanaan, Pemetaan & Konsolidasi Awal Fokus pada Penyusunan dokumen teknis, pemetaan prioritas, dan penetapan skala urgensi peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj); Program Pengelolaan Pelayaran; Program Penataan Bangunan Gedung; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman; Program Pengembangan Permukiman; Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
(S9.1)	meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	harmonisasi perencanaan dan penganggaran melalui peningkatan kapasitas SDM perencana dengan lokus pada semua perangkat daerah	Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Koordinasi Dan Sinkronisasi

No	Sasaran	Prioritas (Tahapan Pembangunan Tahun 2026)	Program Prioritas
			Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Pendapatan Daerah; Pemerintahan Dan Otonomi Daerah; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
(S9.2)	meningkatnya daya saing investasi daerah	menetapkan fondasi dan penguatan sinergi melalui penyusunan peta jalan daya saing daerah, peta potensi unggulan daerah yang bekerja sama dengan universitas/politeknik, serta baseline daya saing berbasis indikator yang bekerja sama dengan lembaga terkait	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Arah Kebijakan Bidang Urusan Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Mendukung Asta Cita

Tabel 4. 6 Program Prioritas Kabupaten dalam Mendukung Astacita

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1.00
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	166	450.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
3	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	60	60.00
4	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
5	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	500	500.00
6	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Unit	1	0.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						dan/atau dalam rangka p			
7	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	1.00
8	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	13	13.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
9	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.00
10	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
11	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	50	10.00
12	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.00 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
13	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM		
14	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0.5	0
15	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0.5	0

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
16	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	3.5	1.00
17	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	3.5	1.00
18	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	600	
19	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	600	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
20	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		
21	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		
22	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
23	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00
24	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	90	25.00
25	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	66	5.00
26	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			pemberantasan kemiskinan.									
27	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi		
28	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00
29	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
30	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1.00
31	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1.00
32	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	4.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
33	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	4.00
34	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	
35	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			masyarakat yang adil dan makmur.									
36	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		
37	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		
38	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	58	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.									
39	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	58	
40	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	71	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
41	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	71	
42	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	646	10.00
43	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	646	10.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
44	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.00 06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6692	6692.0 0
45	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.00 06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6692	6692.0 0

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
46	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	20	20.00
47	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	20	20.00
48	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	5	5.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
				perlindungan pekerja								
49	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.00 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	5	5.00
50	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.00 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	8007	8007.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
51	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	8007	8007.00
52	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga		33.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
53	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	20	30.00
54	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1	1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
55	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	22	22.00
56	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5	5.00
57	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	4	12.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
58	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.00 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00
59	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
60	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen		
61	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
62	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	2	5.00
63	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	2	5.00
64	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	4	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
65	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	4	
66	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	630	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
67	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	630	
68	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	24	
69	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	24	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.									
70	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	2	
71	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
72	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	630	630.00
73	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	630	630.00
74	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
75	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.00 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan		1.00
76	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.00 02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada	Laporan		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d			
77	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan		1.00
78	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
				Masyarakat Desa								
79	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	1	
80	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	42	54.00
81	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	42	54.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Masyarakat Desa								
82	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1.00
83	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit		54.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
84	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	6	5.00
85	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Kelompok		25.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
86	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	24	32.00
87	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	24	32.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			melalui peran aktif koperasi.									
88	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		
89	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
90	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		4.00
91	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		4.00
92	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
				di Jalan Kabupaten/Kota								
93	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit		
94	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	2	1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
95	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	2	1.00
96	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2	1.00
97	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2	1.00
98	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	6	1.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
99	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	6	1.00
100	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	2	46.00
101	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	2	46.00
102	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	7	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
103	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	7	
104	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	
105	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	
106	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	41	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
107	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.00036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	41	
108	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.00038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1.00
109	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.00038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1.00
110	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.00003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	10	94.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
111	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	54	94.00
112	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	8	5.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
113	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	120	120.00
114	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	8	8.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
115	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	60	40.00
116	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.00 11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang		50.00
117	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.00 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang		10.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
118	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.00 06	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang		50.00
119	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.00 09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang		10.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
120	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga		
121	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	100	65.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			dan penyeludupan.									
122	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.00019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	100	100.00
123	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.00007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	33	33.00
124	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.00007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	33	33.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.									
125	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen	2	0
126	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen	2	0

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
127	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	5	
128	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	5	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
129	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	30	30.00
130	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	30	30.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
131	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.00 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	23	2.00
132	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.00 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	23	2.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
133	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	23	
134	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	23	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
135	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	7	7.00
136	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	7	7.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
137	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	3.000	300.00
138	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	3.000	300.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
139	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	10	10.00
140	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	10	10.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
141	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	10	10.00
142	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	10	10.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
143	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	10	10.00
144	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	35.00
145	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	80	80.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
146	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.00002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	2	2.00
147	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.00004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	3	3.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
148	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.00 04	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha		
149	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.00 06	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha		
150	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.00 07	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
151	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha		
152	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
153	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen		
154	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang		50.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
155	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi		
156	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
157	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		2.00
158	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit		2.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
159	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.00002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen		
160	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.00009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
161	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga		
162	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
163	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk		
164	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1.00
165	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1.25	80.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
166	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	
167	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	30	25.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
168	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	2	2.00
169	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen		
170	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha		
171	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
172	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1.00
173	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		
174	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
175	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.00 04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	1	
176	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.00 10	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	100	
177	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.00 20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	1	
178	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.00 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	70	100.00

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
179	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	30	
180	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	30	
181	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	30	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			yang adil dan makmur.									
182	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	90	
183	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	90	
184	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Orang	90	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026
			toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						Ormas dan Ormas Asing di Daerah			

Adapun dukungan pemerintah daerah terhadap Proyek Strategis Nasional (ProSN) antara lain:

Tabel 4. 1 Dukungan Pemerintah Daerah terhadap ProSN Tahun 2026

No	ProSN	Proyek Kegiatan	Dukungan Prioritas Kabupaten	OPD Pengampu
1.	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1. Rapat Koordinasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Dinas Sosial, BPS Kabupaten Mamuju Tengah, BPJS Kesehatan, Camat, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepala desa setempat
			2. Optimalisasi Peran UMKM dan Jaring Pengaman Sosial	Dinas KUKM, OPD terkait sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat
			3. Pembentukan Satgas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Putus Sekolah, Perkawinan usia anak dan Inflasi	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPKBPPPA, Dinas Pendidikan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1. Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat miskin ekstrem	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			2. Pemberdayaan UMKM dan usaha produktif keluarga	Dinas Perindustrian Perdagangan KUKM, Disnakertrans
			3. Pemenuhan akses pendidikan, kesehatan, air bersih	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PUPR
			4. Perluasan bansos, PKH, BPNT berbasis DTSen	Dinas Sosial, Bapperidam Dinas Sosial Provinsi
			5. Pendampingan Kelompok Rentan dan KUBE	Dinas Sosial, DP3A

No	ProSN	Proyek Kegiatan	Dukungan Prioritas Kabupaten	OPD Pengampu
			6. Penguatan dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem	Dinas sosial, Bapperida, BPS
		3. Sekolah Rakyat	1. Penyediaan Lahan & Pembangunan Fasilitas	Dinas Pendidikan, PUPR, Disperkimtan, Bapperida
			2. Peningkatan Kapasitas Guru & Teknologi	Dinas Dikbud Kabupaten; LPMP Sulbar; Dinas Kominfo
			3. Sarana Penunjang Belajar (asrama, makanan, buku)	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial; koordinasi dengan kemensos/kemendikbud
			4. Monitoring & Evaluasi Program Sekolah Rakyat	Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial
		4. Pembangunan 3 juta Rumah	1. Pendataan RTLH melalui SDI	Dinas Perkim, Bapperida, BPS, Dinsos
			2. Pengajuan 5.000 unit via E-SIBARU	Dinas Perkim, Tim Anggaran, pusat (PUPR/Bappenas)
			3. Sinergi dengan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Kementerian Sosial	Dinas Perkim, Dinsos, KemenSos, KemenPUPR
			4. Program Inovasi Lokal “Membara”	Dinas Perkim, pemerintah desa, tokoh CSR & masyarakat
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk mendukung swasembada pangan)	1. Penyelesaian Bendungan Budong-Budong (air irigasi)	BWS Sulawesi III, DKPP Kabupaten, Dinas PUPR
			2. Permanenisasi jaringan irigasi	DKPP Kabupaten, BWS Sulawesi III, Dinas PUPR Kabupaten, Pemerintah Desa, PPL
			3. Perluasan Areal Tanam via Pompanisasi & Padi Gogo	DKPP Kabupaten, BPP, PPL, BSIP Sulbar, TNI/Polri
			4. Penanganan Alih Fungsi Lahan ke Sawit	DKPP Kabupaten, Dinas Sosial, PPL, Pemerintah Desa
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	1. Pelatihan standar budidaya jagung & manajemen hama	BSIP Sulawesi Barat, Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kabupaten, PPL, BPP
			2. Sosialisasi pertanian terintegrasi (integrated farming)	KJF Penyuluh, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Provinsi
			3. Survei lahan CPCL untuk padi gogo	BRMP Sulbar, Dinas Pertanian Kabupaten, BPP, PPL
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta	1. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah periode triwulan kepada KPM	Dinas Ketahanan Pangan Prov., Dinas Pangan & Pertanian Kab., BULOG, Bapperida

No	ProSN	Proyek Kegiatan	Dukungan Prioritas Kabupaten	OPD Pengampu
		Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	2. Penguatan cadangan pangan lokal sebagai buffe	Dinas Ketahanan Pangan Kab., BULOG Prov., Bappeda Kab.
			3. Penguatan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Beras (Perbup Kabupaten Mamuju Tengah No. 5 Tahun 2022 (yang telah diperbaharui dengan Perbup No. 36 Tahun 2023))	Bupati (Pemda), Dinas Ketahanan Pangan Kab., Bapperida Kab.
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (sawah/lumbung pangan (*Food estate*)		
3.	Kesehatan untuk semua	1.Stunting	1. Pembinaan kader posyandu & kolaborasi lintas sektor	Dinkes Kab, Dinas P2KB, Dharma Wanita, kader Posyandu
			2. Program "ASN Bapak/Orang Tua Asuh Stunting"	Bupati, Wakil, Sekda, OPD, Dinkes, camat, kepala desa, Puskesmas
			3. Pengembangan Desa B2SA (B2SA = Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Dinas Ketahanan Pangan Prov., TP PKK, Puskesmas, kader Posyandu
			4. Sinergi dengan Program Aksi Penanganan Stunting Terpadu	Dinkes Prov., Bapperida Sulbar, BKKBN Sulbar, Pemda Kab
		2. Pemeriksaan kesehatan gratis	1. Pelayanan Kesehatan Keliling (Puskesmas Keliling dan Ambulance)	Dinkes Kab., operator Puskesmas Keliling, tenaga medis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	1. Peningkatan kepesertaan aktif JKN (UHC)	Bupati/PD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dukcapil, BPJS, CSR lokal
			2. Pemanfaatan Dana Non-Kapitasi JKN	Dinas Kesehatan, Puskesmas (BLUD)
			3. Monev Pelayanan JKN (BOK, DAU, Rekam Medik, SPM)	Dinas Kesehatan (Subbag Program), Puskesmas
		4. Penuntasan TBC	1. Skrining aktif & investigasi kontak	Dinkes Kab., Puskesmas, tenaga kesehatan & kader masyarakat
			2. Pelatihan & penguatan tata laksana TBC	Dinkes Prov. (P2P), Dinkes Kab.
			3. Pembentukan TP2TB Kabupaten	Bupati, Dinkes Kab., BKKBN, komunitas, media, desa
			4. Monitoring dan Evaluasi Program TBC	Dinkes Kab., Dinkes Prov.
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap	1. Penyusunan usulan & persiapan "RS Vertikal"	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar, Pemda Kab. Mamuju Tengah
4.	Perluasan akses pendidikan	1. Pembangunan dan revitalisasi PAUD	1. Pembangunan PAUD/TK baru di daerah yang masih minim PAUD	Disdikbud Kab., Pemerintah Desa

No	ProSN	Proyek Kegiatan	Dukungan Prioritas Kabupaten	OPD Pengampu
			2. Pendampingan administratif untuk izin PAUD baru	Bidang PAUD & Dikemas Disdikbud, Disdikbud Kab.
			3. Penerapan kurikulum PAUD inovatif & pendekatan gizi lokal	Disdikbud Kab., Kader BKB, TP PKK, mitra desa
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1. Rehabilitasi ruang kelas, guru, perpustakaan, aula	Dinas Dikbud Kab., SD, LPMP, Pemda/APBD & DAK
			2. Pendirian & perluasan SD dan SMP	Dinas Dikbud Kab., Dinas PUPR, Pemerintah Desa, LPMP
			3. Revitalisasi SD dan SMP rujukan sebagai pusat peningkatan mutu	Dinas Dikbud Kab., LPMP Sulbar, Komite Sekolah & guru rujukan
			4. Kurikulum inovatif berbasis lokal & pendekatan interaktif	Dinas Dikbud Kab., Kelompok Guru, TP PKK, komunitas lokal, sekolah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggulan Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran		
		4. Makanan Bergizi Gratis	1. Pembuatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	Dinas Pendidikan Kab., BGN, Dinas Kesehatan
			2. Ekspansi MBG ke seluruh jenjang PAUD hingga SMP	Dinas Pendidikan Kab., BGN & Provinsi, Pemerintah Desa, UMKM & Petani lokal
			3. Integrasi Pendidikan Karakter dalam MBG	Dinas Pendidikan Kab./Prov., Guru Sekolah
			4. Monitoring & Evaluasi Dampak MBG	Dinas Pendidikan Kab., Bapperida Kab., BGN Provinsi
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian inflasi	1. Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan High-Level Engagement	Bupati, BPS, BI, Bappeda, OPD teknis (Perdagangan, Pertanian, perikanan, Bagian Ekonomi)
			2. Operasi Pasar Murah & Sidak Pasar	Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, TPID, BPS, BI
			3. Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen Lokal	Dinas Pertanian, PMD, BPP/PPL, Pemdes
			4. Pemanfaatan BTT & Bansos Untuk Inflasi	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, TPID, BPKPAD
			5. Sistem Informasi Inflasi Real-Time	Bappeda (BRIDA), Diskominfo, BPS, BI
			1. Fasilitasi pembentukan & legalisasi koperasi desa	Dinas Koperasi UKM

No	ProSN	Proyek Kegiatan	Dukungan Prioritas Kabupaten	OPD Pengampu
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2. Pelatihan manajemen koperasi & kewirausahaan desa	Dinas Koperasi UKM, DPMD
			3. Penyediaan modal awal koperasi (Dana hibah bergulir atau bantuan stimulan modal koperasi)	Dinas Koperasi UKM, Bapperida, BPKPAD, Pemerintah Desa, BUMDes)
			4. Integrasi koperasi dengan BUMDes & e-commerce lokal	DPMD, Diskominfo
			5. Kampanye "Satu Desa, Satu Koperasi Merah Putih"	Dinas Koperasi UKM, DPMD
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1. Penyusunan prioritas pembangunan dan penguatan perencanaan berbasis data untuk kegiatan ekonomi produktif.	Bapperida
			2. Optimalisasi pengelolaan belanja daerah, efisiensi anggaran, dan penguatan peran TAPD	BPKPAD
			3. Pengawasan internal untuk memastikan belanja ekonomi tepat sasaran dan sesuai peraturan.	Inspektorat
			4. Menyediakan usulan kegiatan berbasis kebutuhan sektor riil yang dapat diintegrasikan ke dalam APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			5. Menyusun kegiatan ekonomi produktif yang selaras dengan potensi lokal, dan mengusulkan anggaran berbasis potensi hasil tani dan nelayan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan / Perikanan
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (investasi, lapangan pekerjaan)	1. roadmap hilirisasi, pelatihan, fasilitasi alat dan pemasaran produk	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			2. promosi investasi dan layanan perizinan berbasis kawasan industri	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			3. pengembangan usaha tani/nelayan terintegrasi dengan unit pengolahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan / Dinas Perikanan
			4. pelatihan kerja sesuai kebutuhan sektor industri dan menyelaraskan dengan serapan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			5. Mengintegrasikan rencana industrialisasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

No	ProSN	Proyek Kegiatan	Dukungan Prioritas Kabupaten	OPD Pengampu
			6. Koordinasi lintas sektor serta penguatan sinergi BUMDes dan koperasi produksi	Bagian Ekonomi Setda
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan sampah	1. Pengoperasian TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 ini berpedoman pada tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026. Dimana, ketiga dokumen perencanaan terakhir statusnya masih dalam tahap proses penyusunan dokumen sebagai perwujudan akan hasil dari Pemilu Serentak Tahun 2024.

Guna mengejawantahkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah di tahun rencana, maka akan dijabarkan melalui program pembangunan strategis yang terukur dan tepat sasaran. Sehingga, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pencapaian target dari masing-masing indikator sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Disisi yang lain, guna memberikan kepastian dalam kerangka sinkronisasi penyusunan perencanaan antara nasional, provinsi dan kabupaten, dibutuhkan adanya keselarasan pada penyusunan prioritas pembangunan sehingga fokus pembangunan akan terwujud serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat secara luas.

Gambaran singkat guna mengekspresikan sinergitas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah beserta dukungan anggarannya melalui keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi dengan prioritas pembangunan kabupaten di Tahun 2026 akan diuraikan dalam bab ini. Serta, penjabaran dari program prioritas pembangun kabupaten guna merealisasikan pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah melalui rencana kerja daerah di Tahun 2026. Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah dapat dilihat pada lampiran I RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KAB. MAMUJU TENGAH

TAHUN 2026

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						185.615.159.498,51							185.426.365.293,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						184.085.159.498,51							183.886.365.293,00	
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						184.085.159.498,51							183.886.365.293,00	
1	1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	131.494.805.769,00						-	131.494.805.769,00	
	1	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			100 %	416.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	416.000.000,00	
	1	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		22.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		13.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		13.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	175.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	129.686.806.769,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	129.686.806.769,00	
	1	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2828 Orang/bulan	129.604.306.769,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		129.604.306.769,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-			100 %	150.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	150.000.000,00	

	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-			100 %	350.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	350.000.000,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	90.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	85.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	347.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	347.000.000,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		13.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	26.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 %	310.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	310.000.000,00	
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	96.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		96.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	134.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		134.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-				100 %	171.999.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	171.999.000,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	63.399.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		63.399.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	33.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		33.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-				100 %	63.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	63.000.000,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
								Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	16.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata APM SD/Mi, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan	-				100 %	50.830.353.729,51						-	50.631.559.524,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD)	-				100 %	21.146.860.000,00			-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	20.886.860.000,00	
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
								Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
								Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
								Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah															
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															

							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah															
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah															
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah															
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	90.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa															
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				60 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar															
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				50 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar															
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				116 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				116 Satuan Pendidikan	13.554.860.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		13.554.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															

							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				116 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														
							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				15 Unit	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				116 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				116 Orang	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				20 Komunitas	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK														
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				135 Buku	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan															
							-				-	100.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik															
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				60 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	672.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		672.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus															
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				3 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar															
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik															
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun (APM SMP)	-			100 %	17.607.579.524,00			-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	17.607.579.524,00	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah															
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium															
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula															

							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				2 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah															
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir															
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah															
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				16 Unit	5.471.786.168,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5.471.786.168,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	348.674.250,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		348.674.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah															
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium															
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula															
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah															
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	260.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah															
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah															
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				450 Peserta Didik	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				120 Peserta Didik	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				278 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				37 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				37 Satuan Pendidikan	5.265.240.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5.265.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				37 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				15 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama														
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

								Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	005 0	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
								Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				74 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	005 1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	005 2	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
								Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	005 4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
								Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	34.379.106,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		34.379.106,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	005 5	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
								Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	005 6	Penataan Ruang/Sudut Baca														
								Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				5 Ruang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	005 8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
								Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1475 Satuan Pendidikan	147.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		147.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	005 9	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
								Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	006 0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
								Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	006 1	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
								Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				154 Buku	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	006 2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
								Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	006 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah														
								Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus															
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik															
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	125.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK															
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun	-			100 %	8.171.214.205,51			-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	8.232.420.000,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	413.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		413.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD															
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD															
							Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				3 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD															
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD															
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				130 Peserta Didik	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD															
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				287 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD															
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD															
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				130 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD															
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				130 Satuan Pendidikan	2.719.420.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.719.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD															
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				130 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan															
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan															
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan															
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK															
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				3 Paket	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca															
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah															
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik															
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				`130 Peserta didik	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik															
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				300 Buku	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah															
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan															
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0043	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus															
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus															
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD															
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD															
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				130 Satuan Pendidikan	85.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															

							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	238.794.205,51	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahan yang berpartisipasi dalam pendidkan kesetaraan	-			100 %	3.904.700.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	3.904.700.000,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				18 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				18 Satuan Pendidikan	99.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		99.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				40 Konten Digital	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				38 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi				80 Orang	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK														
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca														
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														

							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				112 Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				300 Buku	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				60 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium														
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				2 unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0054	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	109.900.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		109.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0058	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat														
							Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat														
							Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun				1 Ruang	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang ditetapkan	-			83 %	990.000.000,00						-	990.000.000,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Muatan Lokal yang ditetapkan	-			83 %	600.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	600.000.000,00	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				5 Buku	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				40 Orang	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar														

								Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah				5 Buku	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar															
								Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar															
								Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-			-	390.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-	-	390.000.000,00	
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
								Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
								Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				2 Buku	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
								Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai				2 Buku	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
								Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
								Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				60 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan	-			100 %	600.000.000,00							-	600.000.000,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta didik	-			100 %	600.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	600.000.000,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
								Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat	-			95 %	170.000.000,00							-	170.000.000,00	
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	ersentase satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat memiliki izin	-			95 %	50.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	50.000.000,00	
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	ersentase satuan Pendidikan Paud dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat memiliki izin	-			93 %	120.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	120.000.000,00	
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.530.000.000,00								1.540.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.530.000.000,00								1.540.000.000,00	
6	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang Dikelola	-			57 %	730.000.000,00							-	730.000.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan	-			89 %	180.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	180.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				30 Orang	180.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	-			64 %	180.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	180.000.000,00	
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	180.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	ersentase Lembaga Adat yang Dibina	-			18 %	370.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	370.000.000,00	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	-			40 %	570.000.000,00						-	570.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dibina	-			40 %	570.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	570.000.000,00	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				70 Sertifikat	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Sejarah Lokal yang Dibina	-			50 %	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sejarah Lokal yang Dibina	-			50 %	130.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	130.000.000,00	
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				3 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														

								Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya yang Dikelola	-			68 %	100.000.000,00							-	110.000.000,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentasi Cagar Budaya yang Ditetapkan	-			85 %	100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	110.000.000,00	
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KESEHATAN						102.350.699.579,00								102.355.699.579,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						102.350.699.579,00								102.355.699.579,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						102.350.699.579,00								102.355.699.579,00	
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	40.610.699.579,00							-	40.610.699.579,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	415.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-		415.000.000,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
								Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
								Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
								Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	34.570.960.354,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	34.570.960.354,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				624 Orang/bulan	34.390.960.354,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		34.390.960.354,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	130.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				8 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-				100 %	131.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	131.000.000,00	
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													

								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	76.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		76.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	-				100 %	70.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	70.000.000,00	
	1	02	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah													

								Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah													
								Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-			100 %	355.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	355.000.000,00	
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				286 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	541.739.225,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	541.739.225,00	
	1	02	01	2.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.739.225,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		16.739.225,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 %	3.100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	3.100.000.000,00	
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1.600.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	750.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	264.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	264.000.000,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	170.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	18.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	66.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	663.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	663.000.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	118.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		118.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD yang berjalan baik	-			100 %	500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah	-	500.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				11 Unit Kerja	500.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat/BMHP	-			100 %	59.230.000.000,00						-	59.230.000.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	-			1 PKM : 30.000 Puskesmas : Penduduk	36.520.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	36.520.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas													
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	17.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				5 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas													
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	320.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	720.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		720.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Unit	10.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi															
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				30 Unit	430.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		430.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.500.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga															
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1000 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)															
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				2 Layanan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)	-			90 %	22.420.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	22.420.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															

								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2811 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2811 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2681 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12973 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22726 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													

								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				91511 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8484 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36139 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1650 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				218 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2.483 Orang	600.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3.340 Orang	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				15 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													

								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				218 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	002 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
								Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	002 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	002 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				15 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	002 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	15.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	002 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

								Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				100 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	002 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
								Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	003 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
								Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	003 3	Operasional Pelayanan Puskesmas													
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	003 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	003 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													

								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	350.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				52 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
								Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				286 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													

								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				27 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	004 2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
								Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				150 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	004 3	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
								Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	004 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	004 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
								Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	004 6	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	004 7	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
							Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	100.000.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	190.000.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				11 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
12	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan	-			100 %	1.600.000.000,00						-	1.600.000.000,00	

	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktek Tenaga Kesehatan	-			100 %	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan dan Tempat Praktek/ Klinik Kesehatan	-	150.000.000,00	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan dan Tempat Praktek/ Klinik Kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan dan Tempat Praktek/ Klinik Kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan	-	1.250.000.000,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				567 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Petugas Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Teknis	-			80 %	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan	-	200.000.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				113 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kesehatan		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengolahan Makanan Yang Sesuai Standar dan Memiliki Izin Sesuai	-			100 %	430.000.000,00						-	435.000.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Memiliki Izin	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	-	100.000.000,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				49 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang Memiliki Izin	-			100 %	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	-	100.000.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				35 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tempat Pengelolaan Makanan	-	100.000.000,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														

								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tempat Pengelolaan Makanan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	
	1	02	04	2.05	000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT Yang Memiliki Izin	-			100 %	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat	-	55.000.000,00	
	1	02	04	2.06	000 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				45 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Desa Sehat	-			5 Desa	480.000.000,00						-	480.000.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Stop BABS	-			5 Desa	250.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	250.000.000,00	
	1	02	05	2.01	000 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	000 2	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman														
							Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman				100 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-			100 %	130.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	130.000.000,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				100 Keluarga	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Melaksanakan UKBM	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	100.000.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						39.139.976.987,26							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39.139.976.987,26							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						39.139.976.987,26							0,00	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 PERSEN	33.514.667.383,26						-	0,00	

	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 PERSEN	12.219.543.838,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	0,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				215 Orang/bulan	12.219.543.838,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 UNIT KERJA	21.295.123.545,26			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	21.295.123.545,26	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	5.625.309.604,00						-	0,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	533.684.604,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit														
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	533.684.604,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM RSUD yang Tercapai	-			100 Persen	5.091.625.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	-	0,00	
	1	02	02	2.02	003 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	5.091.625.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						26.553.436.125,90							24.649.744.322,82	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.553.436.125,90							24.649.744.322,82	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						26.553.436.125,90							24.649.744.322,82	
17	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	4.710.632.390,97						-	5.890.000.000,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada perangkat daerah tepat waktu	-			100 %	14.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	170.000.000,00	
	1	03	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	-			100 %	4.020.682.390,97			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	4.150.000.000,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	4.010.682.390,97	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		4.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu	-			100 %	22.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	120.000.000,00	
	1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Pegawai yang terlayani	-			100 %	62.150.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	570.000.000,00	
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.150.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	-			100 %	330.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	475.000.000,00	

	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	-			100 %	5.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	30.000.000,00	
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	-			100 %	165.600.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	215.000.000,00	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	-			100 %	90.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	160.000.000,00	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	-			46 %	1.500.000.000,00						-	1.775.000.000,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi pada wilayah sungai kabupaten	-			46 %	400.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	400.000.000,00	
	1	03	02	2.01	0122	Rehabilitasi Kanal Banjir														

								Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi				1 KM	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													
								Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jaringan primer & sekunder dalam kondisi baik	-			100 %	1.100.000.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	1.375.000.000,00	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan													
								Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.1 KM	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
								Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,3 KM	600.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sentra Produksi Pertanian	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
								Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,05 KM	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sentra Produksi Pertanian	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi													

							Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 UNIT	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sentra Produksi Pertanian	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Mamuju Tengah	-			100 %	8.600.000.000,00						-	9.000.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penerima manfaat sarana air bersih/air minum	-			100 %	8.600.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	9.000.000.000,00	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0,1 Liter/Detik	550.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	4.500.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		4.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				300 SR	3.450.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		3.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	-			100 %	1.350.000.000,00							-	1.550.000.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah	-			100 %	1.350.000.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	1.550.000.000,00	
	1	03	05	2.01	004 4	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				90 Rumah Tangga	1.300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	004 5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabupaten	-			55 %	2.300.000.000,00							-	1.350.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik pada daerah Kabupaten/Kota	-			55 %	2.300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	1.350.000.000,00	
	1	03	06	2.01	001 2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2200 M	2.200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	002 3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di wilayah kabupaten/kota	-			100 %	700.000.000,00							-	100.000.000,00	

	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	700.000.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	100.000.000,00	
	1	03	07	2.01	0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				200 Rumah Tangga	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	07	2.01	0010	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Unit	650.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan	-			100 %	330.000.000,00						-	330.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota	-			100 %	330.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	330.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				70 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di wilayah kabupaten/kota	-			100 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	

	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di wilayah kabupaten/kota	-			100 %	100.000.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	100.000.000,00	
	1	03	09	2.01	001 0	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	001 1	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	-			60 %	5.612.803.734,93						-	3.359.744.322,82	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	-			60 %	5.612.803.734,93			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	3.359.744.322,82	
	1	03	10	2.01	002 9	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	004 3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				442,18 KM	550.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	005 1	Pemeliharaan Rutin Jalan													
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	005 9	Rekonstruksi Jalan													
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0,7 KM	862.803.734,93	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		1.009.744.322,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	006 9	Pembangunan Jembatan													
							Panjang jembatan yang dibangun				20 Meter	3.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

26	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil pada pengembangan jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota	-			100 %	300.000.000,00						-	255.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di tingkat kabupaten/kota	-			100 %	195.000.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	160.000.000,00	
	1	03	11	2.01	001 0	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	001 1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	001 6	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				30 Orang	135.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	105.000.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-	-	95.000.000,00	
	1	03	11	2.02	001 2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				2 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	001 3	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	001 4	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	001 5	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	-			100 %	1.050.000.000,00						-	940.000.000,00	

	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalinya aktifitas pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	-			100 %	300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	300.000.000,00	
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kabupaten yang telah dikoordinasi dan disinkronisasikan	-			100 %	600.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	500.000.000,00	
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	-	-	140.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				85 Layanan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN						4.802.640.064,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.067.640.064,00							0,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						4.067.640.064,00							0,00	
28	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 Persentase	2.468.040.064,00						-	0,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	92.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	27.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	1.433.541.858,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	1.338.541.858,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				62 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				72 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	23.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				7 Dokumen	25.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				6 Dokumen	89.850.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	04	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
								Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				62 Unit	18.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	8.250.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

	1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				55 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				55 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	23.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			7 Laporan	224.948.206,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				150 Paket	22.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1000 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20 Dokumen	37.448.206,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Unit	255.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	105.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 Laporan	300.500.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				62 Laporan	6.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	32.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				45 Laporan	252.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			23 Unit	47.200.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	22.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
29	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah	-			100 Persentase	389.600.000,00						-	0,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumenpendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau relokasi program pemerintah undefined	-			5 Dokumen undefined undefined	92.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	-	0,00	
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														

								Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
								Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
								Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				50 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
								Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				3 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
								Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
								Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				3 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
								Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			50 Orang	34.800.000,00			-	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	-	0,00	
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
								Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 Orang	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
								Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				30 Orang	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

								Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5 Orang	4.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				60 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	-			5 Unit Rumah	184.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	-	0,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																
								Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				3 Unit Rumah	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																
								Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota																
								Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				57 Unit Rumah	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
								Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				4 Rumah Tangga	4.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota																
								Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				5 Rumah Tangga	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																
								Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				5 Unit Rumah	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bemcana atau relokasi program pemerintah	-			5 Dokumen	12.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	-	0,00	

	1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				6 Rumah Tangga	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MBR KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				50 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus														
							Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen izin rekomendasi yang di terbitkan	-			5 Dokumen	36.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT	-	0,00	
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				10 Laporan	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	jumlah dokumen sertifikat di terbitkan	-			5 Dokumen	10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT	-	0,00	
	1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
30	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	-			91 Persentase	430.000.000,00						-	0,00	
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-			-	45.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik														

								Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum														
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	jumlah dokumen yang tersedia	-			5 Dokumen	110.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT	-	0,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
								Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha														
								Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha														
								Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Rumah Tangga	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
								Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				3 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh														
								Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
								Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah														
								Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				24 Rumah Tangga	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-			7 Unit	275.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	0,00	

	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				1 Ha	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
							Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Rumah Tangga	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh														
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali				1 Ha	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				1 Ha	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
31	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PresentasePencegahan pertumbuhan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	-			100 Persentase	459.000.000,00						-	0,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-			7 Unit	459.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	

	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				17 Unit Rumah	340.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	04	2.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				22 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	04	2.01	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				22 Rumah Tangga	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				0 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
32	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-			100 Persentase	301.000.000,00						-	0,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan undefined	-			2 Laporan undefined undefined	301.000.000,00			-	-	Kelompok Masyarakat	-	0,00	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
							Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
							Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				1 Lokasi	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														

							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
33	1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah dokumen Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	-			1 Dokumen	20.000.000,00						-	0,00	
	1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	-			1 Laporan	20.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok Masyarakat	-	0,00	
	1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						735.000.000,00							0,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						735.000.000,00							0,00	
34	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-			-	45.000.000,00						-	0,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	10	04	2.01	0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
35	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan	-			40 Persentase	650.000.000,00						-	0,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			5 Dokumen	650.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							0				0 0	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	10	05	2.01	0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan				0 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

36	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-			-	40.000.000,00						-	0,00	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														
							Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				200 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				200 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				200 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah														
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				200 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						6.815.320.309,00							6.887.684.406,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.815.320.309,00							6.887.684.406,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.815.320.309,00							6.887.684.406,00	
37	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	-			100 %	2.694.053.187,00						-	2.725.204.613,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	7.330.208,00			-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR	-	17.403.510,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		12.020.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		3.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.330.208,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		2.353.510,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	2.031.818.381,00			-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR	-	2.041.818.383,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.025.651.168,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		2.025.651.168,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		2.020.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.167.213,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		2.188.887,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		11.958.328,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ersentase Pegawai PD yang dilayani	-			100 %	75.537.598,00			-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR	-	80.822.050,00	
	1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2.537.598,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		2.562.974,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		25.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		20.529.076,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		25.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		7.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	64.000.000,00			-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR	-	64.640.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		30.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		2.828.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		3.535.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		25.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		2.727.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 %	237.000.000,00			-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR	-	238.470.000,00	
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	90.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		90.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	62.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		62.020.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		35.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		50.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	60.000.000,00			-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR	-	60.600.000,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		60.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	218.367.000,00			-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR	-	221.450.670,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	218.367.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR		221.450.670,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
38	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	-			100 %	2.665.067.122,00						-	2.691.717.793,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-			100 %	2.495.930.210,00			-	-	Masyarakat	-	2.498.080.210,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		35.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		30.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat															
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas															
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan															
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1 laporan	2.280.930.210,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		2.280.930.210,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja															
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-			100 %	169.136.912,00			-	-	Warga masyarakat, Aparatur dan badan hukum	-	193.637.583,00	

	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 laporan	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Warga masyarakat, Aparatur dan badan hukum		57.287.583,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Warga masyarakat, Aparatur dan badan hukum		25.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	49.136.912,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	Warga masyarakat, Aparatur dan badan hukum		50.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Warga masyarakat, Aparatur dan badan hukum		35.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Warga masyarakat, Aparatur dan badan hukum		25.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
39	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran	-			100 %	1.456.200.000,00						-	1.470.762.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penyelamatan dan Penaganan Bahan Berbahaya	-			100 %	1.271.200.000,00			-	-	Masyarakat	-	1.283.912.000,00	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1.111.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		1.111.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		40.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi	Masyarakat		56.562.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		45.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		30.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	185.000.000,00			-	-	-	-	186.850.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				30 Orang	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04	0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran														
							Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran				50 Orang	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04	0006	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran														
							Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya				30 Orang	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04	0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran				5 Desa/Kelurahan	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						4.373.036.642,00							4.169.468.920,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.373.036.642,00							4.169.468.920,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.373.036.642,00							4.169.468.920,00	
40	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	-			100 %	2.468.036.642,00						-	2.554.468.920,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	-			100 %	53.900.000,00			-	-	Pegawai BPBD	-	53.900.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		1.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu	-			100 %	1.600.436.642,00			-	-	Pegawai BPBD	-	1.686.868.920,00	

	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				238 Orang/bulan	1.565.936.642,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	Pegawai BPBD		1.652.368.920,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	33.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu	-			100 %	20.000.000,00			-	-	Pegawai BPBD	-	20.000.000,00	
	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	17.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		17.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani	-			100 %	118.000.000,00			-	-	Pegawai BPBD	-	118.000.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	28.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu	-			100 %	266.500.000,00			-	-	Pegawai BPBD	-	266.500.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	13.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu	-			100 %	220.000.000,00			-	-	Pegawai BPBD	-	220.000.000,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	110.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu	-			100 %	61.600.000,00			-	-	Pegawai BPBD	-	61.600.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	27.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		27.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar	-			100 %	127.600.000,00			-	-	Pegawai BPBD	-	127.600.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	51.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		51.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	71.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		71.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	5.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai BPBD		5.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
41	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar	-			100 %	1.905.000.000,00						-	1.615.000.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-			100 %	50.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	50.000.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)															
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			100 %	705.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	405.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				7 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				50 Orang	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga Negara yangemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-			100 %	965.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	960.000.000,00	

	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas															
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	90.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				20 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	800.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		795.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	-			100 %	185.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	200.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan															
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana															
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyeleggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				25 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota															
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL						2.219.166.260,00							50.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.219.166.260,00							50.000.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2.219.166.260,00							50.000.000,00	

42	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	-			100 %	1.395.147.572,00						-	50.000.000,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			10 Laporan	43.139.660,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial	-	50.000.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	33.694.160,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.445.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	-			14 Laporan	850.475.099,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	843.975.099,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	6.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek	-			3 orang	15.000.000,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	-			12 Laporan	251.150.378,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	0,00	
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	151.150.378,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-			1 Unit	46.935.000,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Kepala Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	46.935.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Kepala Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-			14 orang	133.447.435,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32.247.435,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	89.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			3 Unit	55.000.000,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
43	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan	-			100 %	76.022.233,00						-	0,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan	-			70 Orang	76.022.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Daerah	-	0,00	
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	76.022.233,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Daerah		0,00	DINAS SOSIAL
44	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	-			100 %	288.686.204,00						-	0,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	-			50 orang	245.513.188,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	-	0,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	71.001.747,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang														
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	66.586.600,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	57.924.841,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		0,00	DINAS SOSIAL

	1	06	04	2.01	001 2	Pemberian Layanan Rujukan														
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terlayani	-			50 orang	43.173.016,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	0,00	
	1	06	04	2.02	000 2	Pemberian Layanan Kedaruratan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	43.173.016,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
45	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilayani	-			100 %	378.190.251,00						-	0,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-			37121 Orang	378.190.251,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Fakir Miskin	-	0,00	
	1	06	05	2.02	000 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				37121 Orang	83.190.251,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Fakir Miskin		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	000 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Fakir Miskin		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	000 6	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6692 Orang	95.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Fakir Miskin		0,00	DINAS SOSIAL
46	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang terpenuhi perlindungan sosialnya	-			100 %	40.120.000,00						-	0,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang terpenuhi perlindungan sosialnya	-			20 orang	33.120.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi	Masyarakat terdampak Bencana Alam dan Sosial	-	0,00	
	1	06	06	2.01	000 1	Penyediaan Makanan														

								Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi	Masyarakat terdampak Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
								Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	22.920.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Mitigasi	Masyarakat terdampak Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	7.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Tagana	-	0,00	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
								Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Tagana		0,00	DINAS SOSIAL
47	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	-			100 %	41.000.000,00						-	0,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	-			20 Makam	41.000.000,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Taman Makam	-	0,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
								Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				20 Makam	41.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Babana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Taman Makam		0,00	DINAS SOSIAL
						DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						3.711.401.847,00							3.586.808.981,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.461.294.368,00							968.108.358,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1.461.294.368,00							968.108.358,00	
48	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja	-			100 %	80.000.000,00						-	8.000.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	jumlah dokumen RTK	-			1 dokumen	80.000.000,00			-	-	Tenaga Kerja	-	8.000.000,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
								Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Tenaga Kerja		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
								Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				12 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Tenaga Kerja		8.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
49	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	-			100 %	150.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Orang yang mendapat pelatihan	-			30 Orang	120.000.000,00			-	-	masyarakat	-	50.000.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
								Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				20 Orang	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	

	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
50	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	rsentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan	-			10 Orang	77.000.000,00						-	92.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapakan Pelayanan	-			10 Orang	70.000.000,00			-	-	SDM Pelayanan	-	77.000.000,00	
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
							Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				10 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SDM Pelayanan		22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				25 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SDM Pelayanan		33.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				10 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	SDM Pelayanan		22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1980 Orang	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
51	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus terselesaiakan	-			100 %	1.154.294.368,00						-	783.108.358,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang berselisih yang di cegah	-			5 Perusahaan	0,00			-	-	perusahaan	-	25.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				0 Perusahaan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	perusahaan		25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	-			5 Perusahaan	1.154.294.368,00			-	-	perusahaan	-	758.108.358,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah				4 Perkara	5.271.696,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	perusahaan		10.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				8007 Orang	1.149.022.672,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	perusahaan		748.108.358,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.250.107.479,00							2.618.700.623,00	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						2.250.107.479,00							2.618.700.623,00	
52	3	32	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan DisTransNaker	-			100 %	1.673.107.479,00						-	1.847.700.623,00	
	3	32	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			100 %	29.000.000,00			-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Distransnaker	-	31.000.000,00	
	3	32	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Distransnaker		3.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Distransnaker		3.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Distransnaker		1.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Distransnaker		2.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Distransnaker		2.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Distransnaker		2.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		2.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	13.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Distransnaker	-			100 %	1.402.837.415,00			-	-	Distransnaker	-	1.483.847.487,00	
	3	32	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/bulan	1.395.837.415,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		1.476.847.487,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		2.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	
	3	32	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

	3	32	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Transmigrasi	-			100 %	13.500.000,00			-	-	Distransnaker	-	35.625.000,00	
	3	32	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		22.125.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	13.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		13.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Distransnaker	-			100 %	55.720.000,00			-	-	Distransnaker	-	90.720.000,00	
	3	32	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		8.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.720.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		6.720.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		3.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		68.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	95.997.240,00			-	-	Distransnaker	-	95.997.240,00	
	3	32	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	95.997.240,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		95.997.240,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	48.052.824,00			-	-	Distransnaker	-	49.092.960,00	
	3	32	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	27.452.824,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		28.492.960,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		15.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	16.000.000,00			-	-	Distransnaker	-	46.417.936,00	
	3	32	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		9.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		14.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		8.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Distransnaker		15.217.936,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
53	3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perencanaan pertanahan dan kawasan transmigrasi yang terealisasi menjadi kegiatan teknis	-			100 %	115.000.000,00						-	142.000.000,00	
	3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan yang di indetifikasi	-			1 kawasan	115.000.000,00			-	-	Transmigran	-	142.000.000,00	
	3	32	02	2.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
								Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	02	2.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														
								Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				2 Kawasan Transmigrasi	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	02	2.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
								Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		32.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
54	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya	-			100 %	312.000.000,00						-	457.000.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga Transmigran yang terlatih	-			100 Orang	312.000.000,00			-	-	Transmigran	-	457.000.000,00	
	3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	54.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		61.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														
								Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		24.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi														
								Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				8 Kepala Keluarga	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		31.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
								Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				40 Kepala Keluarga	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		79.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi														
								Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				40 Kepala Keluarga	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		42.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi														

							Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				40 Orang	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi														
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				0 Kepala Keluarga	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran														
							Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan				2 Lokasi	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi														
							Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi				40 KK	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		82.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi														
							Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				2 Lokasi	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Transmigran		28.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
55	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri	-			100 %	150.000.000,00						-	172.000.000,00	
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Berkembang pada Tahap Kemandirian	-			2 SP	150.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Transmigran	-	172.000.000,00	
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				80 Kepala Keluarga	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Transmigran		110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				2 Satuan Permukiman	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Transmigran		62.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.041.321.944,00							6.105.467.836,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.041.321.944,00							6.105.467.836,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.557.321.944,00							3.563.967.836,00	
56	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	-			74 %	3.019.696.216,00						-	3.017.567.836,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			100 %	167.514.511,00			-	-	OPD	-	168.886.131,00	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	85.014.511,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		85.386.131,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
							Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	2.345.081.705,00			-	-	-	-	2.345.081.705,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23/322 Orang/bulan	2.317.081.705,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.317.081.705,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Diadministrasi Sesuai Standar	-			100 %	9.000.000,00			-	-	OPD	-	9.000.000,00	
	2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang Dilayani	-			100 %	65.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	
	2	08	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	85.000.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai standar	-			100 %	266.000.000,00			-	-	-	-	266.000.000,00	
	2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	96.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedia	-			100 %	39.600.000,00			-	-	-	-	39.600.000,00	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	19.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang terpelihara	-			100 %	42.500.000,00			-	-	-	-	39.000.000,00	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
								Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
								Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
57	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	-			2,5 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	

	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-			83 %	70.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	OPD	-	70.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	OPD		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				33 Lembaga	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak di Berbagai Bidang	OPD		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Yang Menjadi Pengurus Aktif Dalam Organisasi Kemasyarakatan	-			27 %	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak di Berbagai Bidang	Organisasi Masyarakat / Lembaga Masyarakat	-	30.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				30 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak di Berbagai Bidang	Organisasi Masyarakat / Lembaga Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
58	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-			100 %	95.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	-			100 %	75.000.000,00			-	-	Korban Kekerasan	-	75.000.000,00	
	2	08	03	2.02	0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&														

							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				20 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Korban Kekerasan		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				20 orang	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban Kekerasan		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga penyedia layanan perempuan yang diberdayakan	-			100 %	20.000.000,00			-	-	Korban Kekerasan	-	25.000.000,00	
	2	08	03	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan				20 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban Kekerasan		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
59	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan	-			100 %	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	-			100 %	25.000.000,00			-	-	Masyarakat dan Organisasi Perempuan	-	25.000.000,00	
	2	08	04	2.01	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
							proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat dan Organisasi Perempuan		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	-			100 %	30.000.000,00			-	-	Masyarakat, OPD dan Desa	-	30.000.000,00	
	2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota				20 Lembaga	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat, OPD dan Desa		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	-			100 %	5.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	5.000.000,00	
	2	08	04	2.03	0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota														
							Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota				20 Orang	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
60	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	-			100 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	

	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur yang dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan disajikan dalam sistem data gender dan anak di tingkat kabupaten/kota	-			5 dokumen	5.000.000,00			-	-	Organisasi Perempuan dan Anak serta Masyarakat	-	5.000.000,00	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Organisasi Perempuan dan Anak serta Masyarakat		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
61	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Ramah Anak	-			35,19 %	91.600.000,00						-	91.600.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha yang terlobat dalam PHA	-			85 %	20.000.000,00			-	-	OPD, LSM, Dunia Usaha dan Masyarakat	-	20.000.000,00	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD, LSM, Dunia Usaha dan Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang Dikembangkan	-			100 %	71.600.000,00			-	-	Lembaga Penyedia layanan Anak, Masyarakat dan Anak	-	71.600.000,00	
	2	08	06	2.02	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
							jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	71.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Lembaga Penyedia layanan Anak, Masyarakat dan Anak		71.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
62	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-			100 %	186.025.728,00						-	189.800.000,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-			100 %	71.225.728,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak di Berbagai Bidang	Anak / Masyarakat / OPD / Lembaga Perlindungan Anak	-	75.000.000,00	
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak di Berbagai Bidang	Anak / Masyarakat / OPD / Lembaga Perlindungan Anak		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota															

								Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota				6 Orang	21.225.728,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak / Masyarakat / OPD / Lembaga Perlindungan Anak		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	94.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak di Berbagai Bidang	Korban Kekerasan, Anak-anak, Masyarakat dan OPD	-	94.800.000,00	
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				22 Orang	84.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak di Berbagai Bidang	Korban Kekerasan, Anak-anak, Masyarakat dan OPD		84.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Korban Kekerasan, Anak-anak, Masyarakat dan OPD		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	-			100 %	20.000.000,00			-	-	Korban Kekerasan, Anak-anak, Masyarakat dan OPD	-	20.000.000,00	
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban Kekerasan, Anak-anak, Masyarakat dan OPD		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2.484.000.000,00							2.541.500.000,00	
63	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-			1,9 % 38.9 - 39 Angka/rate 66,4 Indeks	214.800.000,00						-	214.800.000,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD Yang Berperan Aktif Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	-			45 %	40.000.000,00			-	-	Masyarakat, Sekolah & Perangkat Daerah	-	40.000.000,00	

	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
							Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				9 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Masyarakat, Sekolah & Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
							Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				12 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Masyarakat, Sekolah & Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Masyarakat, Sekolah & Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah														
							Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				5 Perangkat Daerah	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	Masyarakat, Sekolah & Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Memiliki Rumah Data	-			100 %	174.800.000,00			-	-	FASKES dan PKB/PLKB	-	174.800.000,00	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	FASKES dan PKB/PLKB		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
							Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	FASKES dan PKB/PLKB		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	FASKES dan PKB/PLKB		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	94.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	FASKES dan PKB/PLKB		94.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	FASKES dan PKB/PLKB		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														

								Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	FASKES dan PKB/PLKB		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
64	2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Proporsi Kebutuhan yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	-			20 % 75,30 % 8,3 % 95,2 %	1.661.200.000,00						-	1.718.700.000,00	
	2	14	03	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Stakeholders Dan Mitra Kerja Yang Berperan Aktif Dalam Program KKBPK	-			80 %	484.200.000,00			-	-	OPD/Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, Balita, Baduta/Balai Penyuluh KB/PLKB/ Masyarakat/Kampung KB	-	484.200.000,00	
	2	14	03	2.01	000 8	Pengendalian Program KKBPK														
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				3 Laporan	219.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	OPD/Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, Balita, Baduta/Balai Penyuluh KB/PLKB/ Masyarakat/Kampung KB		219.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Laporan	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	OPD/Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, Balita, Baduta/Balai Penyuluh KB/PLKB/ Masyarakat/Kampung KB		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
								Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	OPD/Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, Balita, Baduta/Balai Penyuluh KB/PLKB/ Masyarakat/Kampung KB		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	001 2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
								Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	OPD/Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, Balita, Baduta/Balai Penyuluh KB/PLKB/ Masyarakat/Kampung KB		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	001 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
								Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	OPD/Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, Balita, Baduta/Balai Penyuluh KB/PLKB/ Masyarakat/Kampung KB		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	001 4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
								Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				6 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	OPD/Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, Balita, Baduta/Balai Penyuluh KB/PLKB/ Masyarakat/Kampung KB		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Yang Didayagunakan	-			100 %	270.000.000,00			-	-	Kader PPKBD dan Sub PPKBD	-	275.000.000,00	
	2	14	03	2.02	000 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														

								Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				384 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Kader PPKBD dan Sub PPKBD		205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
								Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				10 Organisasi	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Kader PPKBD dan Sub PPKBD		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
								Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Kader PPKBD dan Sub PPKBD		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes Yang Melakukan Pelayanan KB	-			100 %	517.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB	-	569.500.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
								Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				18 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4750 Orang	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

								Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
								Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
								Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				1 Orang	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
								Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														

								Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				1 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
								Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Orang	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														
								Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				10 Orang	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan														
								Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				1 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-			80 %	390.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Poktan, Masyarakat & Kampung KB	-	390.000.000,00	
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														

								Jumlah DASHAT di Kampung KB				54 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Poktan, Masyarakat & Kampung KB		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
								Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				54 Kampung	165.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kelompok Poktan, Masyarakat & Kampung KB		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
								Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kelompok Poktan, Masyarakat & Kampung KB		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
65	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-				68,1 Indeks 88,1 Indeks 90 %	608.000.000,00						-	608.000.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Di Bina	-				88 %	293.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat	-	293.000.000,00	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
								Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				5 Laporan / Dokumen	48.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat		48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													

								Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
								Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
								Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				15 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
								Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
								Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															

								Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1 Kelompok	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)															
								Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				25 Kelompok	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Poktan, Catin & Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Yang Ikut Berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	-			65 %	315.000.000,00			-	-	Kader TPK, KRS, Organisasi kemasyarakatan, kader dan penggerak keluarga, serta keluarga binaan dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	-	315.000.000,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
								Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Kader TPK, KRS, Organisasi kemasyarakatan, kader dan penggerak keluarga, serta keluarga binaan dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
								Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Kader TPK, KRS, Organisasi kemasyarakatan, kader dan penggerak keluarga, serta keluarga binaan dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga															
								Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Kader TPK, KRS, Organisasi kemasyarakatan, kader dan penggerak keluarga, serta keluarga binaan dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga															
								Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Kader TPK, KRS, Organisasi kemasyarakatan, kader dan penggerak keluarga, serta keluarga binaan dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						6.881.292.221,00								10.950.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.989.464.940,00								5.445.000.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						4.989.464.940,00								5.445.000.000,00	
66	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berjalan Sesuai Standar	-			100 %	4.537.464.940,00						-	4.575.000.000,00	

	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	4.517.839.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	4.500.000.000,00	
	2	09	01	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	4.517.839.940,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas yang mendapatkan pembayaran pajak dan pemeliharaan	-			47 Unit	19.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	75.000.000,00	
	2	09	01	2.09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				57 Unit	19.625.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
67	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KUALITAS KONSUMSI PANGAN YANG DIINDIKASIKAN DENGAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	-			84.5 %	172.850.000,00						-	595.000.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah	-			1 dokumen	92.850.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	316.000.000,00	
	2	09	03	2.01	000 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	000 7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	000 8	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														

								Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				12 laporan	35.850.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	001 1	Pemantauan Stok Pangan														
								Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		73.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	001 2	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
								Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		63.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	001 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
								Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-			1 dikumen	80.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	279.000.000,00	
	2	09	03	2.04	000 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
								Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		129.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04	000 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
								Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
68	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN (TERSEDIANYA CADANGAN BERAS/ JAGUNG SESUAI KEBUTUHAN)	-			20 %	174.150.000,00						-	225.000.000,00	

	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	-			1 dokumen	33.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangkat Daerah	-	50.000.000,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Rawan Pangan yang diintervensi/ditangani	-			5 Desa	141.150.000,00			-	-	Masyarakat	-	175.000.000,00	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	21.150.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
69	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	-			100 %	105.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan segar	-			7 Komoditi	105.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	50.000.000,00	
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.891.827.281,00							5.505.000.000,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.891.827.281,00							5.505.000.000,00	
70	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berjalan Sesuai Standar	-			100 %	487.871.482,00						-	800.000.000,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-			5 Dokumen	47.369.595,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	75.000.000,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	41.223.139,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.661.614,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.661.614,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.411.614,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.411.614,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-				2 Dokumen	25.628.102,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	75.000.000,00	
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	24.628.102,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Inventaris BMD	-				1 Dokumen	6.203.884,00			-	-	-	-	20.000.000,00	
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.203.884,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	-			7 Orang	41.783.657,00			-	-		-	75.000.000,00	
	3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	21.773.657,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	20.010.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-			12 Laporan	183.097.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-		330.000.000,00	
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	2.057.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4.750.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.290.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan yang diadakan	-			1 Unit	95.997.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-		100.000.000,00	
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	95.997.240,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan untuk mendukung operasional perangkat daerah	-			1 Jasa	87.791.504,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	125.000.000,00	
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48.191.504,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
71	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-			100 %	780.000.000,00						-	3.700.000.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	-			50 %	600.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani	-	2.400.000.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		1.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				80 Ton	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang berkualitas dan bersertifikat.	-			10 %	180.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani	-	1.300.000.000,00	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				40 Ekor	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
							Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1000 Dosis	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
72	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-			100 %	149.955.799,00							-	250.000.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan pertanian LP2B	-			3000 Ha	149.955.799,00			-	-	Kelompok Tani	-	250.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				25 Ha	103.955.799,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	46.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
73	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-			100 %	150.000.000,00							-	80.000.000,00	
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium veteriner	-			100 Sampel	150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	80.000.000,00	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
74	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-			100 %	150.000.000,00							-	450.000.000,00	

	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Lahan Pertanian yang mendapatkan Layanan Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian	-			100 Ha	150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani	-	450.000.000,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				20 Ha	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
75	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-			100% %	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	-			10 Kegiatan	20.000.000,00			-	-	Kelompok Tani	-	25.000.000,00	
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian															
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
76	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-			100 %	154.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kelompok tani yang dilakukan penyuluhan	-			1243 Poktan	154.000.000,00			-	-	Kelompok Tani	-	200.000.000,00	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa															
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				54 Unit	54.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian															
							Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP						4.910.221.348,00							5.399.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.910.221.348,00							5.399.000.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4.910.221.348,00							5.399.000.000,00	
77	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	2.216.240.802,00						-	2.507.000.000,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	45.520.806,00			-	-	Sekretariat	-	97.000.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22.081.714,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.504.962,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.879.962,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.442.810,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.560.676,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.763.882,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	15.286.800,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat		17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	884.465.305,00			-	-	-	-	983.000.000,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	813.000.746,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		820.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	7.177.286,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13.287.273,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-			100 %	11.206.636,00			-	-	-	-	161.000.000,00	
	2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.533.956,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.672.680,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		86.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-			100 %	25.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	67.456.750,00			-	-	-	-	90.000.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.950.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1.945.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.475.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.586.750,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 %	230.000.000,00			-	-	-	-	265.000.000,00	
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				23 Unit	25.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	84.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	49.600.000,00			-	-	-	-	87.000.000,00	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	902.991.305,00			-	-	-	-	764.000.000,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		91.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	720.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		501.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		151.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.991.305,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	-			16 %	550.000.000,00						-	0,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang disusun dan diimplementasikan	-			1 Dokumen	550.000.000,00			-	Konsolidasi dan Perencanaan Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-	0,00	

	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Konsolidasi dan Perencanaan Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
79	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Wilayah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			44 %	155.090.408,00						-	110.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana	-			100 %	155.090.408,00			-	-	Masyarakat	-	110.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
							Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				5 Lokasi	25.090.408,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
80	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan keanekaragaman hayati yang dikelola	-			100 %	247.161.320,00						-	310.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-			1 Dokumen	247.161.320,00			-	-	Pemerintah Daerah	-	310.000.000,00	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	67.161.320,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3,0 Ha	180.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Daerah		310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
81	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordinasikan Pengendalian Limbahnya	-			100 %	30.762.040,00						-	30.000.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang memiliki Penyimpanan Sementara Limbah B3	-			100 %	30.762.040,00			-	-	Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	-	30.000.000,00	
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)														
							Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				2 Dokumen	15.762.040,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3														
							Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				2 Usaha	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

82	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupten	-			70 %	82.635.875,00						-	135.000.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	-			100 %	82.635.875,00			-	-	Pelaku Usaha	-	135.000.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				36 Dokumen	42.635.875,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha		105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				20 Badan Usaha	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang tertangani	-			100 %	25.000.000,00						-	41.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten yang diselesaikan	-			100 %	25.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	41.000.000,00	
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				3 Pengaduan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		41.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
84	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang dikelola	-			74 %	1.603.330.903,00						-	2.266.000.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Pelanggan Sampah	-			1050 Pelanggan	1.603.330.903,00			-	-	Masyarakat	-	2.266.000.000,00	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				630 Ton	293.330.903,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		2.006.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.855.950.271,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.855.950.271,00							0,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.855.950.271,00							0,00	
85	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	1.959.350.271,00						-	0,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			100 %	30.750.271,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15.750.271,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu	-			100 %	1.520.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				144 Orang/bulan	1.520.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai perangkat daera yang dilayani	-			100 %	0,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	-			100 %	40.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	-			100 %	101.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	51.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	222.600.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	132.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang dipelihara	-			100 %	45.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
86	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK	-			98 %	305.600.000,00						-	0,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Permohonan peristiwa kependudukan yang diterbitkan	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.	-	0,00	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														

								Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				18000 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk															
								Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4370 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan															
								Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				5500 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan															
								Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Perekaman KTP Elektronik	-			93 %	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.	-	0,00	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan															
								Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				40000 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP El	-			93 %	245.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.	-	0,00	
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk															

								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				3444 Dokumen	75.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk															
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1 Laporan	170.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk															
								Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk															
								Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				50000 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan, termasuk penduduk rentan, seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat terpencil.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen Pedaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu	-			91 %	0,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk															
								Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
87	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase rata-rata kepemilikan Dokumen pencatatan sipil	-			90 %	292.400.000,00						-	0,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakta kelahiran	-			0.98 Rasio	80.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.	-	0,00	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting															
								Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				7000 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil															

							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan															
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentasi anak usia 01-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	-			88 %	212.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.	-	0,00	
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil															
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil															
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	62.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil															
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil															
							Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				50000 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	penduduk yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	-			42 %	0,00			-	-	-	-	0,00	
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil															
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

88	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	-			95 %	235.000.000,00						-	0,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan skala kabupaten	-			2 Dokumen	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.	-	0,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan yang terselenggara dengan baik	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.	-	0,00	
	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pegawai PIAK yang mengikuti Bimtek terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.	-	0,00	
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan															
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Penduduk, lembaga pengguna, serta instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
89	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Buku Profil Kependudukan yang tersedia di lembaga yang dikerjasamakan	-			100 %	63.600.000,00						-	0,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan	-			45 Buku	63.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan yang memerlukan data dan analisis kependudukan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.	-	0,00	
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				16 Dokumen	33.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan yang memerlukan data dan analisis kependudukan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain															
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan yang memerlukan data dan analisis kependudukan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.281.912.035,74							3.501.677.283,74	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.281.912.035,74							3.501.677.283,74	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.281.912.035,74							3.501.677.283,74	
90	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tersedia	-			100 Persen	1.649.632.901,74						-	1.757.748.149,74	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	-			11 Dokumen & laporan	111.600.000,00			-	-	-	-	145.199.833,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	21.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	25.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	25.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.999.833,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	12.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	4.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	12.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia	-			46 Dokumen & laporan	1.246.948.316,74			-	-	-	-	1.247.848.316,74	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.150.148.316,74	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.150.148.316,74	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	50.300.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	6.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersedia	-			44 Paket	10.000.000,00			-	-	-	-	13.500.000,00	
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administasri Umum Perangkat Daerah	-			84 Paket	74.884.585,00			-	-	-	-	122.700.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	900.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	49.503.350,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	10.481.235,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Yugas dan Fungsi SKPD	-			17 Unit	136.500.000,00			-	-	-	-	152.500.000,00	
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	16.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya															
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			24 Laporan	16.700.000,00			-	-	-	-	17.700.000,00	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			29 Unit	53.000.000,00			-	-	-	-	58.300.000,00	
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	50.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	750.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.750.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
91	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-			100 Persen	1.433.279.134,00						-	1.493.679.134,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			100 Persen	1.433.279.134,00			-	-	-	-	1.493.679.134,00	
	2	13	04	2.01	000 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				54 Dokumen	1.367.679.134,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.367.679.134,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	000 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				2 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	000 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				54 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	000 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				54 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	000 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				54 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	000 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				54 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	001 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				54 Dokumen	8.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	001 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	001 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa														
							Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				54 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	001 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
92	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan	-			100 Persen	199.000.000,00						-	250.250.000,00	

	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			66 Dokumen & laporan	199.000.000,00			-	-	-	-	250.250.000,00	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				54 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Unit	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						DINAS PERHUBUNGAN						2.666.356.136,00							1.944.225.135,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.666.356.136,00							1.944.225.135,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						2.666.356.136,00							1.944.225.135,00	
93	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			100 %	1.964.713.372,00						-	1.381.725.841,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			17 %	238.448.504,00			-	-	-	-	15.478.380,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	39.146.156,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	16.428.334,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	33.149.269,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	22.533.156,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	92.139.495,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.110.468,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	35.052.094,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.367.912,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				17 persen	1.134.110.343,00			-	-	-	-	1.093.318.441,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.021.695.292,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.053.204.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	55.107.452,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.002.952,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	57.307.599,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.111.489,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				17 persen	52.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	42.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				145 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				16,7 persen	246.895.535,00			-	-	-	-	100.903.330,00	

	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	71.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	20.402.885,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.849.380,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.540.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450 Laporan	150.952.650,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		91.303.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			17 persen	245.425.670,00			-	-	-	-	106.928.430,00		
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	138.497.240,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							0				1 0	106.928.430,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		106.928.430,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			17 persen	27.656.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-		25.851.760,00	
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	12.056.820,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			10.251.760,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				84 Laporan	15.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			15.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			10 Unit	20.176.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-		19.245.500,00	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12.406.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		12.406.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	7.770.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		6.839.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
94	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota	-			16 persen	701.642.764,00						-	562.499.294,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-			20 persen	550.655.808,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	562.499.294,00	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
								Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
								Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				32 Unit	550.655.808,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		562.499.294,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	
	2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
								Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-			19 persen	150.986.956,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				8 Laporan	150.986.956,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				15 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			undefined undefined	0,00			-	-	masyarakat	-	0,00	
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	
	2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
95	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	0,00						-	0,00	

	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	
	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														
							Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				4 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau														
							Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN						3.393.402.854,00							873.320.700.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.393.402.854,00							873.320.700.000,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3.155.317.956,00							872.730.700.000,00	
96	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-			100 %	1.640.317.956,00						-	870.810.700.000,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-			100 %	57.004.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	114.500.000,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen Berita Acara	13.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan													
							Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	15.604.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-			100 %	1.164.876.756,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah	-	870.044.000.000,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.143.876.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		870.000.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-			100 %	13.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah	-	10.500.000,00	
	2	16	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		500.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
								Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	18.000.000,00			-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	75.700.000,00	
	2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen Dokumen	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-				100 %	75.500.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	157.000.000,00	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-			100 %	250.997.240,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah	-	295.000.000,00	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	95.997.240,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Paket Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-				100 %	55.139.960,00			-	-	Perangkat Daerah	-	77.000.000,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29.539.960,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		27.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-			100 %	5.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah	-	37.000.000,00	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	300.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
								Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
97	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Pengelolaan PPID dan KIM	-			65 Persen	335.000.000,00						-	427.000.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	335.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Digital Dasar dan Peningkatan Literasi Digital	Pengelolaan PPID dan KIM	-	427.000.000,00	

	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media														
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Digital Dasar dan Peningkatan Literasi Digital	Pengelolaan PPID dan KIM		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				50 Komunitas	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Digital Dasar dan Peningkatan Literasi Digital	Pengelolaan PPID dan KIM		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
							Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Pengelolaan PPID dan KIM		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik														
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Digital Dasar dan Peningkatan Literasi Digital	Pengelolaan PPID dan KIM		17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Digital Dasar dan Peningkatan Literasi Digital	Pengelolaan PPID dan KIM		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				46 Media	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Digital Dasar dan Peningkatan Literasi Digital	Pengelolaan PPID dan KIM		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
98	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Pengelolan SPBE	-			65 %	1.180.000.000,00							-	1.493.000.000,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPBE	-			60 %	50.000.000,00			-	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Pemeliharaan Jaringan Internet PEMDA	-	50.000.000,00	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa															
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Pemeliharaan Jaringan Internet PEMDA		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Mendukung SPBE	-			65 %	1.130.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah	-	1.443.000.000,00	
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE															
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota															
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				33 Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi															
							Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 Layanan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo															

								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE															
								Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				1 Aplikasi	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah															
								Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan															
								Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE															
								Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet															
								Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				38 Perangkat Daerah	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah															
								Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas															
								Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Digital Dasar dan Peningkatan Literasi Digital	Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						108.000.000,00							198.000.000,00	
99	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-			100 %	8.000.000,00						-	48.000.000,00	
	2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Diskominfostaper	-			100 %	8.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah	-	48.000.000,00	
	2	20	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Dokumen Data	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
100	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Pengelolan SPBE	-			65 %	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Statatistik Sekotoral	-			2,60 Nilai	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah	-	150.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				65 %	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														

								Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				60 %	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	001 9	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
								Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				50 %	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	002 0	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
								Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				1 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	002 1	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
								Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				50 %	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	002 2	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
								Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							130.084.898,00						392.000.000,00	
101	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Pengelolan SPBE	-			65 %	130.084.898,00						-	392.000.000,00	

	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks KAMI (keamanan Informasi)	-			60 %	110.084.898,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah	-	317.000.000,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		87.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				33 Perangkat Daerah	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	20.084.898,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangkat Daerah		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks KAMI (keamanan Informasi)	-			60 %	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah	-	75.000.000,00	
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	Perangkat Daerah		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
						DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						2.928.907.227,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						568.036.979,00							0,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						568.036.979,00							0,00	

102	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif	-			38,89 %	45.036.979,00						-	0,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	-			27,69 %	45.036.979,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	0,00	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				94 Unit Usaha	45.036.979,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
103	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdayakan, difasilitasi legalitas, serta meningkatnya aktivitas, omset, dan kepuasan koperasi	-			94 Unit Usaha	300.000.000,00						-	0,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi kabupaten/kota yang diberdayakan, difasilitasi legalitas, dan dilindungi secara hukum	-			94 Unit Usaha	300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	0,00	
	2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				94 Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														

								Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				94 Unit Usaha	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
104	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentasi Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala mikro	-			16,67 %	220.000.000,00						-	0,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	-			10 %	220.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	0,00	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				5 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				500 Unit Usaha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				120 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
105	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentasa jumlah usaha kecil dan menengah dari total UMKM	-			3,23 %	3.000.000,00						-	0,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang mengalami Peningkatan skala usaha	-			2,67 %	3.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	0,00	
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				40 Unit Usaha	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					2.360.870.248,00								0,00	
	3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.217.778.197,00								0,00	
106	3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	2.032.778.197,00						-	0,00	
	3	30	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	89.642.392,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	43.962.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	18.680.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	1.742.053.109,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.721.722.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.330.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	3	30	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	-			100 %	103.654.731,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.654.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				180 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	26.700.965,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	11.100.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	15.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	45.727.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	36.727.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
107	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Seusia Dengan Ketentuan	-			100 %	25.000.000,00						-	0,00	
	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Efektivitas pengawasan bahan berbahaya dinilai dari inspeksi distribusi, standar kemasan, akurasi label, penurunan kecelakaan, dan pemahaman pengguna.	-			100 %	25.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	0,00	
	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)													
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
108	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	-			39,5 %	60.000.000,00						-	0,00	

	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia	-			10 Unit	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Sarana Distribusi Perdagangan	-	0,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Sarana Distribusi Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi perdagangan	-			10 orang	40.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Sarana Distribusi Perdagangan	-	0,00	
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Sarana Distribusi Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
109	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komodi tas bahan pokok	-			5,61 %	45.000.000,00						-	0,00	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	-			1 Dokumen	25.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	0,00	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	-			0,00652 %	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	0,00	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														

								Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				5 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
110	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-			95 %	55.000.000,00						-	0,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat, ukur, takar, tibang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahub berjalan	-			95 %	55.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	0,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				95 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				118 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						143.092.051,00							0,00	
111	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Kabupaten	-			2,91 %	118.399.572,00						-	0,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	-			100 %	118.399.572,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	0,00	
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	118.399.572,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dokumen Rencana Pembangunan Industri		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
112	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secata lengkap dan terkini	-			6 Dokumen	24.692.479,00						-	0,00	

	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadao total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/Kota	-			67,15 %	24.692.479,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	0,00	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	24.692.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						1.877.281.277,00								2.872.834.903,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.877.281.277,00								2.872.834.903,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						1.877.281.277,00								2.872.834.903,00	
113	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 Persen	1.719.797.247,00						-	2.537.323.123,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 Persen	40.167.502,00			-	-	-	-	169.000.000,00	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	32.779.522,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.425.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.425.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.425.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.425.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.687.980,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu	-			100 Persen	1.285.086.766,00			-	-	-	-	1.558.508.618,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.239.765.669,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.436.246.862,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	43.159.953,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.761.756,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.161.144,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-			100 Persen	3.269.920,00			-	-	-	-	6.000.000,00	
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.269.920,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani	-			100 Persen	17.080.000,00			-	-	-	-	77.000.000,00	
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	12.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar	-			100 Persen	69.993.042,00			-	-	-	-	144.750.000,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.325.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.958.692,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1.675.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.805.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	56.229.350,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		86.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD DPMPTSP penunjang yang terpenuhi	-			100 Persen	230.687.797,00			-	-	-	-	417.510.000,00	
	2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	95.997.240,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.460.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	4.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	118.690.557,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia pada Dinas PMPTSP	-			100 Persen	53.418.420,00			-	-	-	-	103.954.505,00	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.818.420,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.954.505,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	27.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 Persen	20.093.800,00			-	-	-	-	60.600.000,00	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	13.093.800,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
114	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Investasi berskala Nasional	-			6 Persen	4.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang tersusun	-			1 Dokumen	4.000.000,00			-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	30.000.000,00	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
115	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	-			1 Investor	3.500.000,00						-	40.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan peminat investasi Daerah	-			100 Persen	3.500.000,00			-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	40.000.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
116	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan	-			4 Hari	99.800.000,00						-	165.511.780,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah	-			100 Persen	99.800.000,00			-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	165.511.780,00	

	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1700 Pelaku Usaha	91.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				15 Pelaku Usaha	4.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	3.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		15.511.780,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
117	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku	-			100 Persen	50.184.030,00						-	100.000.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN	-			100 Persen	50.184.030,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	100.000.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				6 Kegiatan Usaha.	15.884.030,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal														
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan Usaha	34.300.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						15.773.354.452,00								15.890.833.674,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.073.354.452,00								10.000.833.674,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						10.073.354.452,00								10.000.833.674,00	
118	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip DISPORAPAR	-			B Predikat	6.373.354.452,00						-	6.300.833.674,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi	-			20 %	230.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	320.000.000,00	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	-			20 %	1.740.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	2.350.000.000,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.500.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan BMD pada PD	-			20 %	110.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	150.000.000,00	
	2	19	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	-			20 %	410.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	529.000.000,00	
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		29.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			20 %	370.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	750.000.000,00	
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan BMD-PD	-			20 %	3.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	550.000.000,00	
	2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	500.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud															

							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan jasa penunjang urusan yang tersedia	-			30 %	308.354.452,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	580.833.674,00	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30.854.452,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		40.833.674,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	127.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		240.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			25 %	205.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	1.071.000.000,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		141.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														

							Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
119	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	-			0,50 %	820.000.000,00						-	820.000.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Yang Dibina	-			6,57 %	570.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Masayarakat	-	570.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota													
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Masayarakat		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota													
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				2 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Masayarakat		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota													

							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				100 Orang	170.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Masayarakat		170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Masayarakat		0,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	-			60 %	250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Kepemudaan	-	250.000.000,00	
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				5 Orang	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Kepemudaan		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
120	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	-			5 %	2.750.000.000,00						-	2.750.000.000,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Siswa dalam Olahraga Pendidikan	-			20 %	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Siswa dan Atlet	-	200.000.000,00	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														

								Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Siswa dan Atlet		0,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar															
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Siswa dan Atlet		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Atlet yang Dibina	-			20 %	600.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet Daerah	-	600.000.000,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota															
								Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	400.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet Daerah		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga															
								Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				10 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet Daerah		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Atlet yang Berprestasi	-			10 Orang	550.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet Daerah	-	550.000.000,00	

	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah														
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet Daerah		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet Daerah		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota														
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet Daerah		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	-			40 %	1.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Lembaga dan Organisasi Olahraga	-	1.000.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Lembaga dan Organisasi Olahraga		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Jumlah Kampanye Olahraga yang Terselenggara	-			10 %	400.000.000,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet dan Masyarakat	-	400.000.000,00	

	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Atlet dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Atlet dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
121	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	-			400,98 %%	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Jumlah anggota organisasi kepramukaan	-			1400 %%	130.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan	-	130.000.000,00	
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah														
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				25 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.700.000.000,00							5.890.000.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5.700.000.000,00							5.890.000.000,00	
122	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	-			3,35 %	2.950.000.000,00						-	3.050.000.000,00	

	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Wisata Unggulan yang Dikelola	-			13,33 %	1.220.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan dan Destinasi Wisata	-	1.250.000.000,00	
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan dan Destinasi Wisata		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				5 Lokasi	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan dan Destinasi Wisata		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Wisatawan dan Destinasi Wisata		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Wisatawan dan Destinasi Wisata		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan	-			36,36 %	680.000.000,00			-	-	Wisatawan dan Masyarakat	-	750.000.000,00	
	3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Wisatawan dan Masyarakat		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Unit	600.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan dan Masyarakat		670.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang di kelola	-			48,15 %	950.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan dan Masyarakat	-	950.000.000,00	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	400.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan dan Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Lokasi	400.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan dan Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Perencanaan, Pemetaan dan Konsolidasi Awal infrastruktur Dasar	Wisatawan dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata yang tersertifikasi	-			32,52 %	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Pelaku Usaha Kreatif dan Masyarakat	-	100.000.000,00	
	3	26	02	2.04	0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota															
							Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				10 Usaha Pariwisata	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Pelaku Usaha Kreatif dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)															
							Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				10 Usaha	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Pelaku Usaha Kreatif dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
123	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	-			60 %	750.000.000,00						-	800.000.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Event Pemasaran dan Promosi Pariwisata yang diselenggarakan	-			50 %	750.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wisatawan Nusantara dan Asing	-	800.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri															
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wisatawan Nusantara dan Asing		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	600.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wisatawan Nusantara dan Asing		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Wisatawan Nusantara dan Asing		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
124	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaku industri Ekonomi kreatif	-			8,83 %	1.400.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang di bina dan diawasi	-			29,33 %	1.400.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	-	1.400.000.000,00	
	3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur														
							Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				1 Unit	550.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif														
							Jumlah Insentif yang Diberikan				50 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual														
							Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Menetapkan Fondasi dan Penguatan Sinergi Daya Saing Investasi Daerah	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah														
							Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														

								Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
125	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	-			32,52 %	600.000.000,00						-	640.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	-			32,52 %	600.000.000,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	-	640.000.000,00	
	3	26	05	2.01	000 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		320.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	001 0	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		320.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						2.312.210.874,00								2.697.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.312.210.874,00								2.697.000.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.005.268.524,00								2.327.000.000,00	
126	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	1.287.768.418,00						-	1.362.000.000,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	-			100 %	79.503.948,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Tersedianya biaya operasional kegiatan evaluasi kinerja perngakat daerah sub bidang perencnaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas	-	84.500.000,00	
	2	23	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	34.949.113,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Tersedianya biaya operasional kegiatan evaluasi kinerja perngakat daerah sub bidang perencnaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.539.634,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Tersedianya biaya operasional kegiatan evaluasi kinerja perngakat daerah sub bidang perencnaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.371.473,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Tersedianya biaya operasional kegiatan evaluasi kinerja perngakat daerah sub bidang perencnaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.817.102,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Tersedianya biaya operasional kegiatan evaluasi kinerja perngakat daerah sub bidang perencnaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.392.050,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Tersedianya biaya operasional kegiatan evaluasi kinerja perngakat daerah sub bidang perencnaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas		4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	26.434.576,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Tersedianya biaya operasional kegiatan evaluasi kinerja perngakat daerah sub bidang perencnaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	-			100 %	905.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	955.500.000,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	900.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		950.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani	-			100 %	15.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	aparatur (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan pemerintah daerah	-	16.000.000,00	
	2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	15.820.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	aparatur (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan pemerintah daerah		16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	136.518.970,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	-	146.000.000,00	
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	51.708.470,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	25.306.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		26.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5500 Paket	3.947.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				200 Laporan	8.225.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		9.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	47.332.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daeran Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi	-			100 %	96.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	aparat pemerintah daerah (aparatur) yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan	-	100.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	96.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	aparat pemerintah daerah (aparatur) yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	-			100 %	1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	pegawai pemerintah daerah yang bertugas di dinas terkait yang membutuhkan dukungan operasional untuk menjalankan tugasnya dan termasuk jasa yang mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran, seperti kebersihan, komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	-	2.000.000,00	
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	pegawai pemerintah daerah yang bertugas di dinas terkait yang membutuhkan dukungan operasional untuk menjalankan tugasnya dan termasuk jasa yang mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran, seperti kebersihan, komunikasi, sumber daya air, dan listrik.		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara	-			100 %	53.925.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Semua jenis BMD yang digunakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	-	58.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	46.725.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Semua jenis BMD yang digunakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	7.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Semua jenis BMD yang digunakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
127	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	-			100 %	617.500.106,00						-	855.000.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dikelola	-			100 %	414.035.448,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan, dan pengelolaan informasi	-	685.000.000,00	

	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				20 Perpustakaan	33.728.494,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan, dan pengelolaan informasi		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				7 Perpustakaan	50.543.001,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan, dan pengelolaan informasi		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
							Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				300 Eksemplar	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan, dan pengelolaan informasi		105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	23.978.275,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan, dan pengelolaan informasi		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				5 Dokumen	63.609.206,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan, dan pengelolaan informasi		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

								Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				250 Eksemplar	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan, dan pengelolaan informasi		105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	001 9	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
								Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				200 Eksemplar	42.176.472,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan, dan pengelolaan informasi		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengunjung perpustakaan	-			100 %	203.464.658,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	anak-anak, remaja, orang dewasa, dan Kelompok Masyarakat yang Belum Literat	-	170.000.000,00	
	2	23	02	2.02	000 6	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
								Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				15 Orang	23.919.077,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	anak-anak, remaja, orang dewasa, dan Kelompok Masyarakat yang Belum Literat		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	000 7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
								Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	anak-anak, remaja, orang dewasa, dan Kelompok Masyarakat yang Belum Literat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	000 9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	anak-anak, remaja, orang dewasa, dan Kelompok Masyarakat yang Belum Literat		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	001 0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
								Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				100 Lokus	49.545.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	anak-anak, remaja, orang dewasa, dan Kelompok Masyarakat yang Belum Literat		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
128	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional Naskah Kuno yang dilestarikan	-			100 %	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	persentase naskah kuno yang dilestarikan	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	masyarakat luas, peneliti, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah	-	110.000.000,00	
	2	23	03	2.01	000 3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
								Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	masyarakat luas, peneliti, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	000 4	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
								Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				10 Eksemplar	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	masyarakat luas, peneliti, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						306.942.350,00							370.000.000,00	
129	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan	-			100 %	306.942.350,00						-	370.000.000,00	

	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang terkelola	-			100 %	206.942.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	seluruh unit kerja di pemerintah daerah, serta individu dan kelompok yang berhak mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik	-	265.000.000,00	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis															
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				15 Berkas	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	seluruh unit kerja di pemerintah daerah, serta individu dan kelompok yang berhak mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis															
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				15 Berkas	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	seluruh unit kerja di pemerintah daerah, serta individu dan kelompok yang berhak mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	28.942.350,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	seluruh unit kerja di pemerintah daerah, serta individu dan kelompok yang berhak mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota															
							Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				45 Lembaga	33.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	seluruh unit kerja di pemerintah daerah, serta individu dan kelompok yang berhak mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0006	Penyusunan Database Arsiparis															

								Jumlah arsiparis				10 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	seluruh unit kerja di pemerintah daerah, serta individu dan kelompok yang berhak mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip															
								Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip				15 Lembaga	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	seluruh unit kerja di pemerintah daerah, serta individu dan kelompok yang berhak mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota															
								Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan				15 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	seluruh unit kerja di pemerintah daerah, serta individu dan kelompok yang berhak mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang tersedia dalam JIKN	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	instansi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota	-	105.000.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN															
								Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				35 Pengguna	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	instansi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota		105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PERIKANAN						2.861.991.126,83								2.897.379.339,38	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.861.991.126,83								2.897.379.339,38	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.861.991.126,83								2.897.379.339,38	
130	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	2.337.991.126,83						-	2.339.379.339,38	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	24.100.000,00			-	-	-	-	24.100.000,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	1.943.885.058,00			-	-	-	-	1.943.885.058,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.927.085.058,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.927.085.058,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-			100 %	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	
	3	25	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-			100 %	17.000.000,00			-	-	-	-	17.000.000,00	
	3	25	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	112.006.068,83			-	-	-	-	113.394.281,38	
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	89.006.068,83	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		90.394.281,38	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 %	184.000.000,00			-	-	-	-	184.000.000,00	
	3	25	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	96.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		96.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	51.000.000,00			-	-	-	-	51.000.000,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	28.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		28.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
131	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	-			100 %	152.000.000,00						-	162.000.000,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	-			100 %	17.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan	-	17.000.000,00	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

								Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan	-			100 %	85.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan	-	95.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				6 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Layanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beroperasi	-			20 %	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan	-	50.000.000,00	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Nelayan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
132	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya	-			100 %	282.000.000,00						-	306.000.000,00	
	3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	-			20 %	5.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan	-	5.000.000,00	
	3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														

								Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				12 Rekomendasi	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibina atau diberdayakan	-			100 %	25.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan	-	25.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				2 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	-			100 %	252.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan	-	276.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		129.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
							Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
							Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Pembudidaya Ikan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
133	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Olahan Perikanan dan Pemasaran Perikanan	-			100 %	90.000.000,00						-	90.000.000,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan binaan	-			100 %	20.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Kelompok Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan	-	20.000.000,00	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Kelompok Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Menyiapkan Ketersediaan Ikan Konsumsi dan Bahan Baku Industri Perikanan	-			100 %	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Kelompok Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan	-	70.000.000,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

								Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				940 Ton	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Kelompok Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing Penyusunan Sistem Pengendalian Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok dan Hasil Perikanan	Masyarakat atau Kelompok Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						BAGIAN PEMERINTAHAN							475.937.840,00							475.937.840,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							475.937.840,00							475.937.840,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							475.937.840,00							475.937.840,00	
134	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-			100 Persenn	475.937.840,00						-	475.937.840,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi	-			100 Pesen	450.937.840,00			-	-	Bagian Pemerintahan	-	450.937.840,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	201.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan		201.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	49.201.874,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan		49.201.874,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	200.735.966,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan		200.735.966,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Persentase Kerjasama yang difasilitasi	-			1 Laporan 1 Dokumen	25.000.000,00			-	-	Bagian Pemerintahan	-	25.000.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan		14.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama															
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pemerintahan		11.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
						BAGIAN HUKUM DAN HAM							319.310.091,93							0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							319.310.091,93							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							319.310.091,93							0,00	
135	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-			99,5 persen	319.310.091,93						-	0,00	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-			1 Kasus 250 Dokumen 250 Dokumen	319.310.091,93			-	-	Jumlah Produk Daerah yang disusun	-	0,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				313 Dokumen	150.075.743,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Jumlah Produk Daerah yang disusun		0,00	BAGIAN HUKUM DAN HAM
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	67.693.739,57	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Jumlah Produk Daerah yang disusun		0,00	BAGIAN HUKUM DAN HAM

	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				250 Dokumen	101.540.609,36	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Jumlah Produk Daerah yang disusun		0,00	BAGIAN HUKUM DAN HAM
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.692.152.116,00								0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.692.152.116,00								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2.692.152.116,00								0,00	
136	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-			100 Persen	2.692.152.116,00						-	0,00	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-			5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	2.692.152.116,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	2.380.150.954,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	229.016.530,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	82.984.632,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						352.268.242,42								0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						352.268.242,42								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						352.268.242,42								0,00	
137	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	-			100 Persen	352.268.242,42						-	0,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-			2 Dokumen 12 Laporann	302.268.242,42			-	-	Masyarakat	-	0,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	152.447.605,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	99.820.637,42	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-			2 Dokumen	50.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						260.013.189,27								0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						260.013.189,27								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						260.013.189,27								0,00	
138	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	-			100 %	260.013.189,27						-	0,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-			100 %	260.013.189,27			-	-	-	-	0,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				7 Dokumen	173.468.063,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	36.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	50.545.126,27	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						831.238.320,00								0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						831.238.320,00								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						831.238.320,00								0,00	
139	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-			100 Persen	831.238.320,00						-	0,00	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-			100 Persen	831.238.320,00			-	-	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				18 Dokumen	275.102.261,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100 Dokumen	457.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				33 Orang	99.136.059,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
						BAGIAN UMUM						22.959.516.709,00								0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						22.959.516.709,00								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						22.959.516.709,00								0,00	
140	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	22.959.516.709,00						-	0,00	

	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	24.438.460,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	10.221.960,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	6.371.960,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	7.844.540,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	5.280.505.404,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	5.061.194.167,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				90 Dokumen	219.311.237,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-			100 %	463.898.145,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	370.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	93.898.145,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai PD yang dilayani	-			100 %	813.120.000,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				84 Dokumen	813.120.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	JUmlah administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	6.043.036.265,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	190.795.695,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	908.890.400,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	53.235.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1.326.050.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM

	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	3.514.065.170,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 %	262.749.192,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	162.749.192,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	3.448.323.929,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	7.876.612,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1.089.142.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1.564.305.400,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	786.999.917,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	2.269.102.000,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	1.112.975.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	540.495.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	615.632.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	-			100 %	935.943.314,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	173.173.314,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				0 Paket	232.770.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang	130.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM

	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	400.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	3.418.400.000,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				0 Paket	1.822.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				0 Paket	1.596.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM
						BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						684.168.314,00							684.168.314,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						684.168.314,00							684.168.314,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						684.168.314,00							684.168.314,00	
141	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	-			100% Dokumen	684.168.314,00						-	684.168.314,00	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	-			8 Dokumen	684.168.314,00			-	-	Bagian Organisasi	-	684.168.314,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	70.561.818,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		70.561.818,00	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	61.628.578,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		61.628.578,00	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	52.060.994,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		52.060.994,00	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	147.648.834,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		147.648.834,00	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	352.268.090,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		352.268.090,00	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
						BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						442.302.680,00							446.998.987,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						442.302.680,00							446.998.987,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						442.302.680,00							446.998.987,00	
142	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar undefined	-			100 % undefined undefined	442.302.680,00						-	446.998.987,00	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kebutuhan Keprotokolan Pimpinan yang Terpenuhi	-			100 %	442.302.680,00			-	-	-	-	446.998.987,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				100 Laporan	281.099.654,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		283.910.651,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				30 Laporan	100.365.833,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		101.369.491,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				40 Laporan	60.837.193,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		61.718.845,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
						SEKRETARIAT DPRD						17.751.698.962,64							20.499.011.844,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17.751.698.962,64							20.499.011.844,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						17.751.698.962,64							20.499.011.844,00	
143	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			100 Persen	14.290.846.973,00						-	15.001.684.844,00	

	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlasananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Kegiatan	53.181.283,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-	54.500.000,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	13.181.283,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Keg	1.433.180.297,00			-	-	-	-	1.729.784.096,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.359.950.387,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.646.784.096,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11.229.910,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			3 Keg	633.000.000,00			-	-	-	-	658.000.000,00	
	4	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				9 Unit	93.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		93.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	360.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			5 Laporan	824.999.450,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-		1.597.000.000,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	34.496.050,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	93.503.400,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	592.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-			592.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-			3 Laporan	804.800.000,00			-	-	-	-	525.000.000,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	265.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	502.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		285.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-			2 Laporan	276.717.950,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-	474.344.300,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	216.717.950,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		221.344.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			25 Orang	7.854.967.993,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-	8.487.967.993,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	7.854.967.993,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		7.854.967.993,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				100 Paket	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		633.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	-			25 Orang	2.410.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-	1.475.088.455,00	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		245.328.955,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				22 Laporan	650.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		1.120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD															
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	1.760.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		109.759.500,00	SEKRETARIAT DPRD
144	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PRESENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-			100 Persen	3.460.851.989,64						-	5.497.327.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	TERLAKSANANYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-			6 keg	308.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	478.000.000,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan															
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				100 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				100 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		135.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				0 Orang	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		8.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlakasnanya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			6 Keg	60.000.000,00			-	-	-	-	94.327.000,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.327.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			1 Keg	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan														
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	-			2 Keg	570.000.000,00			-	-	-	-	720.000.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				25 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				16 Orang	360.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				25 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Reses yang telah dilaksanakan dalam setahun	-			75 Laporan	890.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Perangkat Daerah	-	650.000.000,00	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	890.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Perangkat Daerah		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD yang di Fasilitasi	-			25 Orang	1.612.851.989,64			-	-	Perangkat Daerah	-	3.535.000.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				25 Dokumen	1.512.851.989,64	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		3.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						3.884.587.556,00								3.825.297.132,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.884.587.556,00								3.825.297.132,00	
	5	01				PERENCANAAN						3.416.787.556,00								3.287.497.132,00	
145	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	2.661.851.924,00							-	2.525.337.963,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	151.645.935,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	166.835.935,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.018.778,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		50.208.778,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.587.421,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		10.587.421,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.969.914,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		7.969.914,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.365.322,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		19.365.322,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9.841.031,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		15.841.031,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	65.863.469,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		62.863.469,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	1.693.523.535,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	1.677.333.561,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.655.583.561,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		1.655.583.561,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	37.939.974,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		21.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasi sesuai standar	-			100 %	61.401.683,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	61.041.683,00	
	5	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	61.401.683,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		61.041.683,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	-			100 %	66.159.943,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	38.949.943,00	
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	21.159.943,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		17.199.943,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		21.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	299.763.450,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	222.507.167,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.529.950,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		3.238.517,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	46.766.800,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		49.766.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30000 Paket	33.875.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		26.063.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	46.245.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		43.065.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	170.346.700,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		100.373.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	156.000.000,00			-	-	-	-	126.000.000,00	
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	96.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	-			100 %	201.143.628,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	173.458.324,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	93.869.428,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		73.134.124,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20.724.200,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		20.724.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	86.550.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		79.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	32.213.750,00			-	-	-	-	59.211.350,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	15.615.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.615.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	16.598.750,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.596.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

146	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan perundangan yang berlaku	-			100 %	476.629.521,00						-	254.980.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah	-			4 Dokumen	350.051.277,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	254.980.000,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	260.760.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	31.017.005,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		52.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	11.000.616,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	13.125.571,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	13.851.093,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				432 Usulan	9.352.268,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	10.944.724,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan	-			1 Dokumen	126.578.244,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	0,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	36.367.487,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	90.210.757,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
147	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan	-			100 %	278.306.111,00						-	507.179.169,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan	-			100 %	158.158.705,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	330.032.763,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	7.502.508,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		28.990.508,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	4.110.078,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		26.110.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	5.102.295,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		35.102.296,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				3 Laporan	7.602.074,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		35.602.074,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	12.253.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		22.577.057,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	5.223.574,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		15.735.574,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	6.593.662,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		15.593.662,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	109.771.514,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		150.321.514,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dilaksanakan	-			100 %	54.302.374,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	102.302.374,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	36.402.601,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		72.402.601,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	7.899.773,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		19.899.773,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan	-			100 %	65.845.032,00			-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah	-	74.844.032,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	13.193.397,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		19.193.397,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	10.459.555,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		13.459.555,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	13.124.144,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		13.124.144,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	10.329.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		10.328.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				4 Laporan	13.238.936,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kab. Mamuju Tengah		13.238.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						467.800.000,00								537.800.000,00	
148	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-			-	467.800.000,00							-	537.800.000,00	
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	336.800.000,00			-	-	-	-	-	347.300.000,00	
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset															
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				8 Naskah	75.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan															

							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				2 Laporan	261.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		272.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	-	-			-	131.000.000,00			-	-	-	-	190.500.000,00	
	5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah														
							Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				1 Kegiatan	51.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				2 Laporan	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH						125.414.647.928,00							116.002.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						125.414.647.928,00							116.002.000.000,00	
	5	02				KEUANGAN						125.414.647.928,00							116.002.000.000,00	
149	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	27.713.493.389,00						-	9.749.000.000,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	109.469.712,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	196.500.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	47.721.374,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		48.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.328.696,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		18.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	4.454.198,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		18.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.956.757,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		22.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	6.065.306,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		18.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6.943.381,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		32.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		27.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
								Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-				100 %	26.390.455.828,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	7.652.500.000,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	26.340.455.828,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		7.600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan adminitrasi BMD sesuai ketentuan	-			100 %	30.017.109,00			-	-	-	-	45.000.000,00	
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	11.307.790,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.709.319,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ersentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	-			100 %	227.306.611,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	269.000.000,00	
	5	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai															
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	96.915.452,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	55.058.918,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		47.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		112.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	32.357.541,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		39.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	42.974.700,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	262.098.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	434.000.000,00	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	26.025.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	28.260.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		39.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		27.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	182.813.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-			100 %	231.000.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	180.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	31.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	202.894.829,00			-	-	-	-	632.000.000,00	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	80.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		435.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	122.894.829,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		197.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan yang telaksana	-			100 %	260.250.800,00			-	-	-	-	345.000.000,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	97.150.800,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		135.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	33.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
150	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penganggaran sesuai ketentuan	-			100 %	94.951.350.849,00						-	103.638.000.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen anggaran yang sesuai dengan standar dan regulasI Persentase penyusunan anggaran yang tepat waktu	-			100 % 100 %	1.481.347.053,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	1.765.000.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	37.068.919,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		63.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

								Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	37.322.956,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		63.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
								Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				45 Dokumen	48.261.854,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
								Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				45 Dokumen	49.832.416,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		77.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
								Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				45 Dokumen	26.684.133,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
								Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				45 Dokumen	59.389.072,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
								Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	810.008.541,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		852.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
								Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	322.779.162,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		425.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

								Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	437.345.632,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	899.000.000,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	109.622.867,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		385.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	21.138.151,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	49.530.747,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

								Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	98.569.264,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													
								Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				45 Dokumen	39.464.016,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													
								Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		53.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				45 Orang	43.020.587,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		106.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai ketentuan	-			100 %	766.970.502,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	860.000.000,00	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Laporan	45.453.541,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		53.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													

								Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Dokumen	25.788.617,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		63.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
								Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	25.135.496,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		43.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
								Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				42 Laporan	164.864.371,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		78.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
								Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	135.481.748,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		291.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
								Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		123.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan														
								Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan														

								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	33.246.729,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota															
								Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				50 Lembaga	83.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah															
								Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan Urusan Kewenangan PengelolaanKeuangan Daerah	-			100 %	92.000.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	99.657.000.000,00	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan															
								Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				54 Laporan	90.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		90.152.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak															
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		9.505.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data dan Implementasi SistemInformasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-			100 %	265.687.662,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	457.000.000,00	
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah															

							Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				4 Dokumen	49.018.376,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		149.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	152.973.400,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		184.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	63.695.886,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		124.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
151	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	-			100 %	807.336.971,00						-	894.000.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Pemanfaatan Aset terhadap PAD	-			100 %	807.336.971,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	894.000.000,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga															
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	33.293.664,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		53.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	28.261.695,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		23.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah															
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		23.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah															

								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	253.585.456,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		72.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
								Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		101.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
								Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	109.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		99.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
								Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	64.806.015,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		59.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		54.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
								Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	44.801.290,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		94.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
								Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	11.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

								Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	177.688.851,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		229.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	84.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
152	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan potensi PAD Persentase peningkatan PAD	-			10 % 15 %	1.942.466.719,00						-	1.721.000.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase data potensi PAD yang valid dan konfherenshif Persentase realisasi PAD	-			100 % 100 %	1.942.466.719,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	1.721.000.000,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
								Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Dokumen	54.846.664,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
								Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	85.780.808,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		146.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	85.780.808,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		161.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Unit	238.614.100,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		91.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	26.365.438,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		51.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Laporan	141.078.121,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		76.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				60000 Obyek Pajak	191.082.752,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		351.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah															
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				9 Dokumen	20.921.564,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	82.602.494,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		36.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	17.065.847,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	706.060.920,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		233.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	5	02	04	2.01	001 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		51.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	001 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	161.189.444,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		176.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	001 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	35.130.315,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	001 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah															
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	45.947.444,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		31.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						3.288.412.194,00								3.468.786.246,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.288.412.194,00								3.468.786.246,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						3.288.412.194,00								3.468.786.246,00	
153	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			100 %	1.974.538.594,00						-	2.018.689.560,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran	-			100 %	70.181.437,00				-	-	-	-	70.181.437,00	
	5	03	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	45.790.661,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.790.661,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.103.388,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.103.388,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.103.388,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.103.388,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	14.184.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.184.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 %	1.748.467.457,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1.753.915.720,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1.726.967.457,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1.726.967.457,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		23.448.263,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	-			100 %	3.500.000,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	7.536.953,00	
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		7.536.953,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-			100 %	10.000.000,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	10.000.000,00	
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 %	85.729.700,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	85.729.700,00	
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	76.729.700,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		76.729.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuh	-			100 %	9.000.000,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	25.000.000,00	
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	7.000.000,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	7.000.000,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	40.660.000,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	59.325.750,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	33.160.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		49.825.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		9.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
154	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jabatan fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) / Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	-			66 % 96.88 %	1.313.873.600,00						-	1.450.096.686,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah	-			74.73 %	84.279.675,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	220.502.761,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	25.369.195,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		25.369.195,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		159.223.086,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi														
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	27.910.480,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		27.910.480,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	-			100 %	203.828.249,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	203.828.249,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	15.021.192,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		15.021.192,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	60.828.901,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		60.828.901,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	127.978.156,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		127.978.156,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah	-			100 %	963.746.540,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	963.746.540,00	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				225 Orang	87.847.104,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		87.847.104,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center														

							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				15 Orang	426.898.215,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		426.898.215,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	319.001.221,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		319.001.221,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik	-			100 %	62.019.136,00			-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	62.019.136,00	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				13 Dokumen	20.019.136,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		20.019.136,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				0 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT						9.169.476.500,00							0,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						9.169.476.500,00							0,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						9.169.476.500,00							0,00	
155	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP	-			BB Laporan	7.318.004.500,00						-	0,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tepat Waktu	-			100 Persen	73.776.487,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat	-	0,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.978.576,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.258.288,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5.039.623,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	-				100 Persen	3.089.003.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat	-	0,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	3.050.495.550,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	32.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	6.507.620,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian yang dilayani	-				100 Persen	452.614.766,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat	-	0,00	

	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	452.614.766,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum berjalan sesuai standar	-			100 Persen	391.894.391,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat	-	0,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	1.868.391,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1.776.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.250.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	180.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Administrasi BMD Penunjang yang terpenuhi	-			100 Persen	3.085.363.830,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat	-	0,00	
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	32.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.903.363.830,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	-			100 Persen	141.616.056,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat	-	0,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	40.616.056,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara	-			100 Persen	83.735.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat	-	0,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.045.800,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	30.990.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
156	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terpenuhinya Hasil Laporan Pemeriksaan	-			315 Laporan	1.601.472.000,00						-	0,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pemeriksaan	-			265 Laporan	1.400.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD	-	0,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				35 Laporan	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				38 Laporan	350.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
								Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				38 Laporan	340.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
								Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				20 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				20 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

								Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				25 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengaduan Stakeholder	-			50 Laporan	201.472.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD	-	0,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian														
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				14 Laporan	60.792.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	140.680.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemeriksaan / Pengawasan OPD		0,00	INSPEKTORAT
157	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	250.000.000,00						-	0,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	jumlah auditan yang didampingi dan diasistensi	-			48 Laporan	230.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pengawasan / Pendampingan OPD	-	0,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				15 perangkat daerah	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pengawasan / Pendampingan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				2 perangkat daerah	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pengawasan / Pendampingan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

								Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pengawasan / Pendampingan OPD		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pengawasan / Pendampingan OPD		0,00	INSPEKTORAT
						KECAMATAN TOPOYO					1.577.725.784,00								5.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.577.725.784,00								5.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN					1.577.725.784,00								5.000.000,00		
158	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan undefined	-			14 Dokumen undefined undefined	1.430.360.267,00						-	0,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			6 Dokumen	27.140.758,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	13.040.758,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	-			13 Orang	1.147.001.473,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	kantor kecamatan topoyo	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.136.101.473,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	kantor kecamatan topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	kantor kecamatan topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	kantor kecamatan topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	3.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	kantor kecamatan topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															

								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			6 Dokumen	41.734.536,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	kantor kecamatan topoyo	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	10.934.536,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	kantor kecamatan topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	17.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan	kantor kecamatan topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	13.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persiapan dan Penguatan Dasar Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Literasi Keuangan	kantor kecamatan topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	-			1 Laporan	50.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persiapan dan Penguatan Dasar Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Literasi Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persiapan dan Penguatan Dasar Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Literasi Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persiapan dan Penguatan Dasar Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Literasi Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persiapan dan Penguatan Dasar Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Literasi Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan		0,00	KECAMATAN TOPOYO

	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persiapan dan Penguatan Dasar Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Literasi Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			1 Unit	87.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	44.783.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	15.783.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	11.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persiapan dan Penguatan Dasar Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Literasi Keuangan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			5 Unit	26.000.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
								Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
159	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan	-			100 persen	16.440.000,00						-	5.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	-			100 persen	7.200.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Kantor Kecamatan Topoyo	-	0,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Kantor Kecamatan Topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemutakhiran, Pengintegrasian Data dan Penanganan Masyarakat Miskin	Kantor Kecamatan Topoyo		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	5.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	kantor kecamatan topoyo	-	5.000.000,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum															
								Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	kantor kecamatan topoyo		5.000.000,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	4.240.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial Politik dan Demokarasi Substansial	-	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															
								Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial Politik dan Demokarasi Substansial	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan															

								Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	960.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial Politik dan Demokarasi Substansial	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1.280.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial Politik dan Demokarasi Substansial	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
160	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	-			1 Lembaga	48.625.517,00						-	0,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kecamatan	-			1 Lemabaga	48.625.517,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	0,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	41.425.517,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TOPOYO
161	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	11.500.000,00						-	0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-			1 Laporan	4.500.000,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan serta Forum Komunikasi Umat Beragama Forum Komunikasi, Budaya dan Suku	Masyarakat	-	0,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.250.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan serta Forum Komunikasi Umat Beragama Forum Komunikasi, Budaya dan Suku	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	2.250.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan serta Forum Komunikasi Umat Beragama Forum Komunikasi, Budaya dan Suku	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial Politik dan Demokarasi Substansial	-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial Politik dan Demokarasi Substansial	-		0,00	KECAMATAN TOPOYO
162	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk	-			2 Laporan	32.400.000,00						-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-			2 Laporan	32.400.000,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Masyarakat	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				6 Orang	19.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	4.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Optimalisasi Sosialisasi Kerangka Kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosial Politik dan Demokarasi Substansial	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

								Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	6.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TOPOYO
163	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-				-	38.400.000,00						-	0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-			15 Laporan	38.400.000,00			-	-	Pemerintahan Desa	-	0,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4.300.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				15 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	06	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
								Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	6.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perencanaan Strategis dan Kelembagaan Agropolitan	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN TOPOYO
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN TOPOYO
						KECAMATAN PANGALE							1.586.719.286,00								1.603.566.844,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.586.719.286,00								1.603.566.844,00	
	7	01				KECAMATAN							1.586.719.286,00								1.603.566.844,00	
164	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR	-			100 %	1.498.740.582,00							-	1.513.987.676,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	55.144.666,00			-	-	-	-	55.144.666,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	40.384.061,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.384.061,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.832.241,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.832.241,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.032.041,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.032.041,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.832.241,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.832.241,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.032.041,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.032.041,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.032.041,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.032.041,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.272.283.954,00			-	-	-	-	1.272.283.954,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.211.630.954,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.211.630.954,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	12.203.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.203.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	43.450.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.450.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	14.900.000,00			-	-	-	-	19.720.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	7.900.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.720.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Prangkat Umum Daerah	-			100 %	27.212.962,00			-	-	-	-	37.940.056,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.440.056,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.712.962,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				216 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-			10 Unit	72.000.000,00			-	-	-	-	72.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pesentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	18.145.000,00			-	-	-	-	18.145.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.145.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.145.000,00	KECAMATAN PANGALE

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	11.790.000,00			-	-	-	-	11.490.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	5.790.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.490.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	27.264.000,00			-	-	-	-	27.264.000,00	
	7	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	27.264.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.264.000,00	KECAMATAN PANGALE
165	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YAN DI KOORDINASIKAN	-			100 %	32.521.536,00						-	34.122.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Kordinasikan	-			100 %	8.399.536,00			-	-	-	-	10.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.399.536,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	24.122.000,00			-	-	-	-	24.122.000,00	
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				45 Keluarga	24.122.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.122.000,00	KECAMATAN PANGALE
166	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PENDUDUK	-			100 %	17.340.536,00						-	17.340.536,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Intoleransi SARA yang diSediakan Di Tingkat Kecamatan	-			100 %	17.340.536,00			-	-	-	-	17.340.536,00	
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	17.340.536,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.340.536,00	KECAMATAN PANGALE
167	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	-			100 %	38.116.632,00						-	38.116.632,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilittas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Diklasanakan	-			100 %	38.116.632,00			-	-	-	-	38.116.632,00	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	19.292.632,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.292.632,00	KECAMATAN PANGALE
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				10 Dokumen	18.824.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Pangale, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.824.000,00	KECAMATAN PANGALE
						KECAMATAN TOBADAK						1.508.817.676,07							1.793.078.068,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.508.817.676,07							1.793.078.068,00	
	7	01				KECAMATAN						1.508.817.676,07							1.793.078.068,00	
168	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			400 Laporann	1.473.739.104,07						-	1.680.470.468,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			23 Dokumen	26.142.268,00			-	-	Kantor Kecamatan Tobadak	-	90.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	18.008.059,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		40.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	4.053.775,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		25.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.080.434,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		25.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu	-			28 Laporan	1.165.511.627,07			-	-	Kantor Kecamatan Tobadak	-	1.235.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.152.140.873,07	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		1.200.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.771.230,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		15.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	11.599.524,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		20.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai perangkat daera yang dilayani	-			4 Laporan	13.259.192,00			-	-	Kantor Kecamatan Tobadak	-	18.770.468,00	
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3.259.192,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		8.770.468,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		10.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	-			302 Laporan	126.903.232,00			-	-	Kantor Kecamatan Tobadak	-	125.700.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	650.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		700.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		25.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.425.232,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		10.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	114.828.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		90.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik Daerah	-			6 Laporan	105.100.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Tobadak	-	117.000.000,00	

	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		72.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		35.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		10.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			34 Laporan	24.197.785,00			-	-	Kantor Kecamatan Tobadak	-	34.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	8.897.785,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		18.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	15.300.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		16.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara	-			9 Laporan	12.625.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Tobadak	-	60.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	3.525.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		5.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	9.100.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		55.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
169	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	5.924.223,00						-	60.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.924.223,00			-	-	Kantor Kecamatan Tobadak	-	60.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	5.924.223,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kantor Kecamatan Tobadak		60.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
170	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penyeleng garaan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundan gan yang berlaku	-			1 Laporan	21.198.105,00						-	32.607.600,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jmlah Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan	-			1 Laporan	21.198.105,00			-	-	Masyarakat	-	32.607.600,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	21.198.105,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		32.607.600,00	KECAMATAN TOBADAK
171	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi sara per 1.000 penduduk	-			1 Laporan	7.956.244,00						-	20.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tepat Waktu	-			1 Laporan	7.956.244,00			-	-	Masyarakat	-	20.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	7.956.244,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
						KECAMATAN KAROSSA						1.694.900.494,76							2.087.700.884,76	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.694.900.494,76							2.087.700.884,76	
	7	01				KECAMATAN						1.694.900.494,76							2.087.700.884,76	

172	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang berjalan sesuai standar	-			100 %	1.582.400.494,76						-	1.721.122.044,76	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			100 %	15.065.233,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-	-	59.286.783,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		29.475.790,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		3.500.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		3.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		2.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.065.233,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		2.065.233,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		9.245.760,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Kecamatan tepat waktu	-				100 %	1.362.335.261,76			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	1.400.335.261,76	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.343.335.261,76	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		1.343.335.261,76	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		12.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		5.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA

	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai kecamatan yang dilayani	-			100 %	34.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-	-	60.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	-		20.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				19 Orang	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum berjalan sesuai standar	-			100 %	49.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-	-	49.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		2.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		3.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		1.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	-		2.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	-		2.500.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		5.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	34.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		34.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	KECAMATAN KAROSSA

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang penunjang urusan yang terpelihara	-			100 %	77.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	-	87.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-		72.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		0,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA

	7	01	01	2.07	001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	28.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	-	-	28.000.000,00	
	7	01	01	2.08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pondasi Kelembagaan, Kebijakan dan Infrasturktur Dasar SPBE	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8000 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-	-	37.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		9.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		0,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA

	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
173	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan	-				16.500.000,00						-	95.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	-			100 %	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecmatan Karossa	-	20.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecmatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecmatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	12.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa	-	45.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				6 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		25.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang mencapai target	-			100 %	4.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa	-	30.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
174	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan kegiatan masyarakat desa dan kelurahan yang dikoordinasikan	-				13.000.000,00						-	23.671.134,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa	-	20.671.134,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		20.671.134,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
175	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan	-			100 %	13.000.000,00						-	16.000.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus yang diselesaikan	-			1 Kasus	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa	-	10.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
176	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	37.000.000,00						-	37.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	37.000.000,00			-	-	-	-	37.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				66 Orang	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				66 Orang	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				55 Orang	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

								Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				0 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAROSSA
177	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuia standar dan ketentuan perundang yang berlaku	-			100 %	33.000.000,00						-	194.907.706,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pemgawasan pemerintahan desa yang dilaksankan	-			100 %	33.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa	-	194.907.706,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				22 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				0 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		0,00	KECAMATAN KAROSSA

	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				11 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				11 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		25.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				11 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				0 Laporan	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		10.000.000,00	KECAMATAN KAROSSA
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas dan Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kantor Kecamatan Karossa		19.907.706,00	KECAMATAN KAROSSA
						KECAMATAN BUDONG-BUDONG							1.251.099.599,00							1.311.399.599,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.251.099.599,00							1.311.399.599,00	
	7	01				KECAMATAN							1.251.099.599,00							1.311.399.599,00	
178	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR	-			100 %	1.120.799.599,00						-	1.151.099.599,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	53.000.000,00			-	-	-	-	53.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	886.099.599,00			-	-	-	-	886.099.599,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	861.099.599,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		861.099.599,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	12.000.000,00			-	-	-	-	17.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Prangkat Umum Daerah	-			100 %	48.700.000,00			-	-	-	-	69.700.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-			1 Unit	72.000.000,00			-	-	-	-	72.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pesentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	38.000.000,00			-	-	-	-	38.800.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.500.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.300.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	11.000.000,00			-	-	-	-	14.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
179	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan	-			Baik	71.000.000,00						-	83.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	-			100 %	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	13.000.000,00			-	-	-	-	23.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang mencapai	-			100 %	8.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
180	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YAN DI KOORDINASIKAN	-			100 %	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Kordinasikan	-			2 Keg	12.000.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	

	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
181	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan	-			100 %	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus yang diselesaikan	-			1 Kasus	5.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
182	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PENDUDUK	-			100 %	25.300.000,00						-	30.300.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Intoleransi SARA yang diSediakan Di Tingkat Kecamatan	-			100 %	25.300.000,00			-	-	-	-	30.300.000,00	
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	10.300.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.300.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
183	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	-			100 %	17.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilittas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Diklasanakan	-			100 %	17.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUDONG-BUDONG
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.125.561.895,00							0,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						2.125.561.895,00							0,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.125.561.895,00							0,00	
184	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			100 PERSEN	1.228.858.800,00						-	0,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 PERSEN	64.488.070,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	-	0,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.738.070,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	31.275.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	12.475.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	-			100 PERSEN	865.565.425,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	-	0,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	865.565.425,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-			100 PERSEN	46.500.000,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	-	0,00	
	8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	46.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	-			100 PERSEN	6.768.000,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	-	0,00	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.768.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 PERSEN	95.997.240,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	-	0,00	
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	95.997.240,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 PERSEN	123.537.065,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	-	0,00	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	45.859.685,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12.277.380,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	65.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	-			100 PERSEN	26.003.000,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	-	0,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	26.003.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
185	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	-			undefined undefined	397.243.798,00						-	0,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			3 Laporan	397.243.798,00			-	-	MASYARAKAT	-	0,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															

							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Dokumen	397.243.798,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	MASYARAKAT		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
186	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	-			100 PERSEN	373.070.000,00						-	0,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik	-			3 Laporan	373.070.000,00			-	-	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	-	0,00	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	373.070.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
187	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Pembinaan	-			100 PERSEN	18.478.370,00						-	0,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terumuskan	-			2 Laporan	18.478.370,00			-	-	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	-	0,00	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	18.478.370,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
188	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Menurunya Kasus Penyalahgunaan Nakotika	-			100 PERSEN	50.000.000,00						-	0,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	umlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terumuskan	-			3 Laporan	50.000.000,00			-	-	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	-	0,00	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
189	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-			100 PERSEN	57.910.927,00						-	0,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen laporan Kebijakan teknis dan jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			3 Laporan	57.910.927,00			-	-	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	0,00	

	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	32.897.953,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	25.012.974,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
											J U M L A H	**629.635.594.457,33**							**1.404.907.835.431,70**	

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. ab ini menyajikan arah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2026 yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target kinerja dilakukan untuk menjamin konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan capaian yang ingin diraih, baik dalam aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Target-target ini disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi kebutuhan pembangunan ke depan. Dengan demikian, bab ini menjadi acuan penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari Indikator Kinerja Ekonomi Makro, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci pada tabel-tabel berikut:

6.1 Indikator Kinerja Makro Ekonomi Daerah

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Mamuju Tenagah Tahun 2026

NO	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,98	3,63	3,73
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	1,70	1,66	1,63
3	Angka Kemiskinan	persen	7,72	7,37	7,07
4	Gini Ratio	indeks	0,330	0,310	0,300
5	Tingkat Inflasi	Persen	1,4	2,,5±1	2,5±1
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,53	69,05	69,77
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO_2 e	n/a	59499,59	56336,67

Sumber:BPS Mamuju Tengah (data diolah), 2025

6.2 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantgitatif untuk mengetahui pelaksanaan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Adapun target IKU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Indeks Pendidikan	indeks	61,69	62.36	62,97
2	Indeks Kesehatan	Indeks	0,73	0,73	0,75
3	Prevalensi Stunting	persen	31,5	26,5	25,5
4	Angka Kemiskinan	persen	7,72	7,37	7,07
5	Gini Ratio	indeks	0,330	0,310	0,300
6	Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,98	3,63	3,73
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	1,70	1,66	1,63

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
8	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	persen	8,71	9,01	9,35
9	Indeks Masyarakat Digital	indeks	41,84	42,50	43,00
10	Indeks Inovasi Daerah	indeks	8,95	59,30	59,70
11	Indeks Reformasi Hukum	indeks	96,38	97,00	97,25
12	Indeks Kualitas Kebijakan	indeks	10		
13	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	WTP
14	Indeks SPBE	indeks	2,28	2,35	2,60
15	Indeks Pelayanan Publik	indeks	2,73	2,85	3,01
16	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	angka	73,93	75,00	76,00
17	Penurunan Tingkat Gangguan Keamanan dan Ketertiban	persen	N/a	30	40
18	Persentase penegakan perda	Persen	N/a	10	20
19	Tingkat Inflasi	Persen	1,4	2,5±1	2,5±1
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	N/a	3,56	3,65
21	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,491	0,490	0,480
22	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen			
23	Indeks Risiko Bencana	indeks	159,33	154,47	150,64
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,32	87,01	87,15
25	Persentase Desa yang memiliki lapangan usaha berbasis industri dan jasa layanan pertanian	Persen	N/a	20	30
26	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	74,18	74,5	74,75
27	Nilai SDG's Desa	Angka	42,99	44,00	45,00
28	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks			
29	Nilai SAKIP	Kategori	57,19 (CC)	60,01 (B)	61,50 (B)
30	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Rupiah	623.326.891.467	650.000.000.000	650.000.000.000

6.3 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun berdasarkan indicator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun rincian pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Kunci Realisasi Tahun 2024 dan Tarhet Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dan 2026

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi awal 2024	Target	
			2025	2026
Indikator Kinerja Outcome Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
Urusan Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	99,17	100%	100%
2	Tingkat partisipasi warga negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	95,69	100%	100%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	79,40	85%	100%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	89,72	100%	100%
Urusan Kesehatan				
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,10%	0,30%	0,50%

2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	74,45%	100%	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	80,11%	100%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84,20%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,21%	100%	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,64%	100%	100%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,90%	100%	100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,30%	100%	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar	39,16%	100%	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50,87%	100%	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	91,03%	100%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%

14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota	101,63%	100%	100%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	74,67%	100%	100%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	30,31%	33%	50%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	94,24%	100%	100%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,75%	87%	90%
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	100%	100%	100%
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	37,70%	40%	50%
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	50%	100%	100%

9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%
Urusan Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	100%	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangai	87,73%	100%	100%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	18,46%	22,50%	50%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%
Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	38.454 Orang	65.000 orang	80.000 orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap becana	49 Orang	50 Orang	60 Orang

5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	1.311 Orang	1.500 Orang	1.550 Orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
7	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	17 Menit	15 menit	15 menit
Urusan Sosial				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	40,60%	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
Tenaga Kerja				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,75%	3,46%	5,60%
3	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	127,523%	150%	160%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	22,33%	50%	70%

5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	37,44%	45%	65%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,184%	1,30%	1,50%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13,113%	4,40%	2,99%
Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	17,30%	50%	68%
Pertanahan				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	100%	100%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	100%	100%
4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50%	60%	70%

5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	100%	100%
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%
Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	74,97	80%	87.01%
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/ Kota	24,99%	30%	35%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota	100%	100%	100%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Perekaman KTP elektronik	94,99%	100%	100%
2	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	45,39%	58%	60%
3	Kepemilikan akta kelahiran	98,78%	100%	100%
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	100%	100%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	33,33%	40%	75%
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	22,22%	45%	50%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,76	2,47	2,20

2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	68,20%	85%	95%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	10,75%	50%	70%
Perhubungan				
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,60	0,70	0,75
2	kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0,56	0,65	0,85
Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangka Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%
3	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/ kota	0,20%	25%	50%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	29,12%	50%	73,5%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	3,21%	5%	10,2%
Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	-6,83%	0,60	30%
Kepemudaan dan Olahraga				

1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,96%	2,35	5,89%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	4,38%	6,87%	9,50%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Suket	100	100
Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	58,91%	60%	85%
Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	60%	70%	80%
Perpustakaan				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	10,46%	35%	50%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12,4%	23,1%	55%
Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	41,16%	70%	80%

2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50%	75%	85%
Urusan Pilihan				
Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP)	457.434 Ton	4.611.330 Ton	5.146.330 Ton
Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Suket	0,50%	13,50%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	5,78%	10,50%	15,25%
3	Tingkat hunian akomodasi	18,10%	50%	80%
4	Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,20%	0,25%	0,30%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,50%	1.20%	5,89%
Pertanian				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	490,48%	525%	750%
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	50%	30%	15%
Energi dan Sumber Daya Mineral				

1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten	Suket	n.a	n.a
Perdagangan				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUUP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	91,67%	100%	100%
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98,22%	100%	100%
Perindustrian				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)	0,37%	2,68%	5,00%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang sitetapkan dalam RPIP	Suket	100%	100%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1,84%	100%	100%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1,84%	100%	100%

5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pegawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinyadi daerah kabupaten	Suket	100%	100%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2	6	10
Transmigrasi				
1	Permukiman transmigrasi yang difasilitasi Pembangunan dan Pembinaannya	2	3	3
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	26,07%	27%	30%
2	Rasio PAD	6,42%	8%	8,9%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 4	Level 5
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 4	Level 5
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	61,19%	65%	65%
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
Pengadaan				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	100%	100%

2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	48,18%	50%	60%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	6,17%	8,23%	10,25%
Kepegawaian dan Pendidikan				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	91,58%	90%	100%
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40,77%	60%	65%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,40%	70,50%	100%
Manajemen Keuangan				
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,07%	100%	100%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,13%	100%	100%
3	Manajemen Aset	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7,15%	1%	0,50%
Transparansi dan Partisipasi Publik				

1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuagan daerah	100%	100%	100%

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Indeks pencapaian SPM meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar.

Tabel 6. 4 Target Kinerja SPM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
Urusan Pendidikan					
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	91,61%	100%	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	47,95%	100%	100%
3.	Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	80,70%	100%	100%
Urusan Kesehatan					
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	58,39%	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	67,23%	100%	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	70,77%	100%	100%

4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	69,49%	100%	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	97,03%	100%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	88,97%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	93,83%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85,33%	100%	100%
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabates Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes miletus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85,92%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan OGDJ Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terinveksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92,61%	100%	100%
2.	Penyedian pengelolaan limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelohan air limba domestik	84,44%	100%	100%

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan					
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Tersedianya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda kabupaten/kota	100%	100%	100%
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada	90,00%	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
3.	Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	95,00%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
5.	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96,67%	100%	100%
Urusan Sosial					
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	95,38%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	98,33%	100%	100%

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	96,92%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	93,33%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tangkap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RKPD Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2026 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tengah berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD.
Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tat Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,d an Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian dan evaluasi tersebut maka ditetapkan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
2. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan stakehoder terkait;
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan

secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Secara periodik pada setiap akhir triwulan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan kerangka acuan kerja, rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian denga target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun pada masa transisi RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 yang memperhatikan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 sebagai penjabaran tahap pertama periode pembangunan 2025-2045 dan tahun kedua dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, sehingga adapun kebijakan nasional, provinsi yang sifatnya dapat mengubah arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan, akan diatur dan termuat kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Kesimpulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 dengan tema “Perluasan Swasembada Pangan dan Penguatan Infrastruktur Dasar Wilayah” menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Tema ini dipilih untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan mengintegrasikan prioritas pembangunan yang selaras dengan sasaran nasional dan provinsi, diharapkan RKPD ini dapat menjadi landasan perencanaan pembangunan yang holistik, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Melalui kerja sama, sinergi, dan komitmen semua pihak, pelaksanaan RKPD ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.